

MANAJEMEN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN ISLAM



HASIL KAJIAN DAN DISKUSI
MAHASISWA S2 MPI UIN RADEN
FATAH PALEMBANG



Penulis
Editor

:Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang
:Prof. Dr. Ahmad Zainuri, M.Pd.I &
Dr. Muslim Gani Yasir, M.M



MANAJEMEN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN ISLAM

Miftahul Abidin, Aina Wardah Agissa, Buya Riyadi, Desy Utari, Eka Karmila, Muhammad Irfan Rohimiyansah, Muh Sobari, Saidina, Tiara Nadiah, Yeni Januarni, Riza Kurnia, Rohani, Lini Suryani, Rahmawati, Muhammad Aji Santoso, Maskin, Eti Tamsiyati, Yevi Yasmini, Ayub Bakir.

HASIL KAJIAN DAN DISKUSI MAHASISWA S2 MPI UIN RADEN FATAH PALEMBANG

Penulis :Mahasiswa MPI UIN Raden Fatah Palembang
Editor :Prof. Dr. Ahmad Zainuri. M.Pd.I &
Dr. Muslim Gani Yasir. M.M

**PROGRAM PASCA SARJANA
JURUSAN MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG**

2025

KATA PENGANTAR

Pendidikan Islam merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan masyarakat yang beriman dan berakhlak mulia. Namun, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan mutu pendidikan Islam, seperti kurangnya sumber daya, kurangnya infrastruktur, dan kurangnya kualitas guru.

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan Islam, manajemen peningkatan mutu pendidikan Islam menjadi sangat penting. Manajemen peningkatan mutu pendidikan Islam adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam, sehingga dapat menghasilkan output yang berkualitas dan berdaya saing dan terampil.

Buku ini adalah hasil kajian dan diskusi mahasiswa S2 UIN Raden Fatah Palembang yang membahas tentang manajemen peningkatan mutu pendidikan Islam, termasuk konsep dasar, prinsip-prinsip, dan strategi peningkatan mutu pendidikan Islam. Buku ini juga membahas tentang peran serta stakeholder dalam meningkatkan mutu pendidikan Islam, seperti pemerintah, lembaga pendidikan, guru, dan masyarakat.

Dengan demikian, buku ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pengelola pendidikan Islam, guru, dan stakeholder lainnya dalam meningkatkan mutu pendidikan Islam. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam di Indonesia.

Tujuan buku ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang manajemen peningkatan mutu pendidikan Islam, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan Islam di Indonesia. Adapun sasaran buku ini adalah para pengelola pendidikan Islam, guru, dan stakeholder lainnya yang terlibat dalam pendidikan Islam.

Manfaat buku ini adalah untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam di Indonesia, sehingga dapat menghasilkan output yang berkualitas dan berdaya saing serta memiliki keterampilan tinggi dan berakhlakul karimah yang dapat dijadikan contoh bagi masyarakat.

Palembang April 2025
Penulis

Mahasiswa S2 MPI UIN Raden Fatah

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| Kata Pengantar..... | iii |
| Daftar Isi..... | iv |
| Pengendalian Mutu Pendidikan..... | 5 |
| Pendekatan Six Sigma Dalam Perbaikan Mutu..... | 18 |
| Prinsip Pengendalian Mutu Pendidikan..... | 27 |
| Manajemen Mutu dan Tokoh Pendidikan Islam Dan Barat..... | 36 |
| Masalah Masalah Mutu Pendidikan Islam Indonesia..... | 51 |
| Konsep Manajemen Mutu dan Standar Mutu ISO..... | 60 |
| Hakekat Mutu dan Manajemen Mutu..... | 71 |
| Prinsip Model Total Quality Management (TQM)..... | 84 |
| Penerapan Balanced Scorecard dalam Meningkatkan Kinerja Lembaga Pendidikan..... | 91 |
| Penerapan Standar ISO Pada lembaga Pendidikan Islam..... | 105 |
| Kebijakan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan di Indonesia..... | 110 |
| Peningkatan Mutu Berkelanjutan dan pengembangan budaya Mutu Organisasi..... | 125 |
| Sistem Penjamin Mutu Pendidikan di Indonesia..... | 130 |
| Prinsip Perbaikan 5s dan Perbaikan Berkesinambungan dalam Kaizen..... | 143 |

PENGENDALIAN MUTU PENDIDIKAN

Miftahul Abidin. 24052170025 & Yeni Januarni. 24052170039

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan suatu bangsa. Kualitas pendidikan yang baik akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada kemajuan suatu negara. Oleh karena itu, pengendalian mutu pendidikan menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan.

Pengendalian mutu pendidikan adalah suatu proses yang digunakan untuk memastikan bahwa setiap aspek dalam sistem pendidikan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Mutu pendidikan yang baik merupakan salah satu kunci penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memajukan suatu negara. Pengendalian mutu pendidikan bukan hanya melibatkan upaya di level lembaga pendidikan, tetapi juga melibatkan kebijakan dan regulasi dari pemerintah. Oleh karena itu, pengendalian mutu pendidikan harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.

Selain itu Tuntutan Kualitas Pendidikan yang Tinggi Pada era globalisasi, dunia pendidikan menghadapi tantangan besar, yaitu kebutuhan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, terampil, dan kompeten. Masyarakat, dunia kerja, serta negara membutuhkan lulusan yang memiliki kemampuan yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan industri. Oleh karena itu, pengendalian mutu pendidikan menjadi aspek yang sangat penting untuk menjamin bahwa pendidikan yang diberikan memiliki standar yang tinggi.

Peningkatan Akses dan Kesetaraan Pendidikan yang mengharuskan pemerintah di banyak negara, termasuk Indonesia, berusaha untuk meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Ini termasuk memastikan bahwa pendidikan yang diterima oleh setiap individu di berbagai daerah memiliki kualitas yang setara, tidak terbatas oleh faktor ekonomi atau geografi. Pengendalian mutu pendidikan membantu untuk memastikan bahwa kualitas pendidikan yang diterima di seluruh wilayah dapat terjaga.

Pendidikan yang berkualitas memerlukan sumber daya yang memadai, baik itu sumber daya manusia (guru, pengajar), fasilitas (sekolah, sarana pembelajaran), maupun sumber daya lainnya. Pengendalian mutu mencakup evaluasi dan pengawasan terhadap bagaimana sumber daya ini digunakan dan dikelola dengan efisien untuk mencapai hasil yang maksimal.

Dusamping itu Perubahan dalam Kurikulum dan Kebijakan Pendidikan yang sering kali berubah di banyak negara, termasuk Indonesia, kurikulum dan kebijakan pendidikan sering diperbaharui untuk mencocokkan dengan kebutuhan zaman. Setiap perubahan ini memerlukan pengendalian mutu untuk memastikan bahwa implementasi perubahan tersebut dapat diterima dengan baik di tingkat sekolah dan bahwa dampaknya terhadap hasil pendidikan dapat dipantau dan dievaluasi.

Pengendalian mutu pendidikan juga berkaitan dengan akuntabilitas, di mana lembaga pendidikan, pemerintah, serta pihak terkait lainnya bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Ini melibatkan pengawasan terhadap kinerja guru, siswa, dan sistem pendidikan secara keseluruhan.

Pengendalian mutu pendidikan juga berkaitan dengan proses evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa sistem pendidikan selalu berkembang dan meningkat. Evaluasi ini bisa meliputi hasil ujian, kualitas pengajaran, keterlibatan orang tua, hingga penerapan teknologi dalam pendidikan. Dengan evaluasi yang baik, kualitas pendidikan dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

- Apa pengertian pengendalian mutu pendidikan?
- Bagaimana penerapan sistem pengendalian mutu pendidikan di lembaga pendidikan?
- Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengendalian mutu pendidikan di madrasah?
- Sejauh mana peran kepala sekolah/madrasah dalam pengendalian mutu pendidikan?
- Apa dampak dari penerapan pengendalian mutu pendidikan terhadap prestasi belajar siswa di sekolah/madrasah?

C. Tujuan pembahasan

- Mengetahui pengertian pengendalian mutu pendidikan
- Mengetahui bagaimana penerapan sistem pengendalian mutu pendidikan di lembaga pendidikan?
- Mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengendalian mutu pendidikan di sekolah/madrasah?
- Untuk mengetahui sejauh mana peran kepala sekolah/madrasah dalam pengendalian mutu pendidikan?
- Untuk mengetahui apa dampak dari penerapan pengendalian mutu pendidikan terhadap prestasi belajar siswa di sekolah/madrasah?

D. Metode yang digunakan

Metode yang digunakan dalam makalah ini adalah Deskriptif Kualitatif, **Moleong** (2002) dalam bukunya *Metodologi Penelitian Kualitatif*, menyatakan bahwa metode deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena atau kejadian yang ada dalam situasi tertentu secara sistematis dan objektif.

Tujuan metode ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang konsep atau pengertian yang terkait dengan pengendalian mutu pendidikan. Metode ini akan memungkinkan untuk menjelaskan dengan rinci definisi pengendalian mutu pendidikan, prinsip-prinsipnya, serta bagaimana penerapannya dalam dunia pendidikan, tanpa memerlukan eksperimen atau pengujian hipotesis. Selain itu, jika tujuannya adalah untuk menggali lebih dalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi mutu pendidikan atau mengidentifikasi tantangan dalam pelaksanaannya, **metode kualitatif** juga bisa digunakan, seperti wawancara, diskusi kelompok terarah (FGD), atau analisis dokumen.

PEMBAHASAN

A. Pengertian pengendalian mutu pendidikan

Pengendalian mutu pendidikan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memastikan bahwa proses dan hasil pendidikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pengendalian mutu ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kurikulum, metode pengajaran, hingga evaluasi hasil belajar. Tujuan utama dari pengendalian mutu pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Selain itu pengendalian mutu (quality control) adalah suatu proses yang digunakan untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Proses ini melibatkan pengawasan dan pengecekan secara teratur terhadap kualitas produk atau layanan, untuk memastikan bahwa kesalahan atau cacat dapat ditemukan dan diperbaiki sebelum produk sampai ke konsumen. Pengendalian mutu juga mencakup perbaikan berkelanjutan dengan cara meningkatkan proses produksi, prosedur, dan penggunaan alat yang sesuai untuk menjaga kualitas secara konsisten.

Sedangkan pengendalian mutu pendidikan menurut para ahli memiliki berbagai definisi dan perspektif yang beragam. Berikut adalah beberapa pandangan dari ahli mengenai pengendalian mutu pendidikan:

1. **Arikunto,(2009)**

Menurut Arikunto, pengendalian mutu pendidikan adalah serangkaian proses yang dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan melalui berbagai upaya evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan. Pengendalian mutu bertujuan untuk memastikan agar seluruh kegiatan pendidikan berlangsung sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

2. **Sallis,(2002)**

Sallis menyatakan bahwa pengendalian mutu pendidikan adalah suatu proses yang melibatkan penetapan standar, pengukuran pencapaian, serta analisis hasil pencapaian untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. Menurut Sallis, proses ini meliputi pengumpulan data, analisis, serta perbaikan secara terus menerus untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan.

3. **Deming,(1986)**

W. Edwards Deming, seorang pakar manajemen mutu, menjelaskan bahwa pengendalian mutu pendidikan berfokus pada upaya perbaikan sistem secara keseluruhan. Dalam konteks pendidikan, prinsip-prinsip pengendalian mutu yang diajarkan oleh Deming lebih mengarah pada peningkatan sistem pendidikan melalui penggunaan data untuk perbaikan berkelanjutan, dengan menekankan pentingnya peran semua pihak dalam pendidikan.

4. **Juran,(1992)**

Joseph M. Juran menekankan pentingnya kualitas sebagai suatu komponen yang harus diperhatikan dalam setiap proses, termasuk dalam pendidikan. Juran mendefinisikan pengendalian mutu pendidikan sebagai suatu pendekatan sistematis yang berfokus pada perencanaan, pengendalian, dan peningkatan kualitas pendidikan. Hal ini mencakup perencanaan kurikulum,

pengembangan kompetensi pengajar, serta evaluasi terhadap hasil belajar siswa.

5. **Mulyasa,(2013)**

Menurut Mulyasa, pengendalian mutu pendidikan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam pendidikan untuk memastikan tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Pengendalian mutu melibatkan evaluasi terhadap kurikulum, proses belajar mengajar, serta hasil pembelajaran untuk menjamin bahwa pendidikan yang diberikan selalu sesuai dengan standar kualitas yang diharapkan.

6. **Noe,(2013)**

Noe dalam bukunya mengenai manajemen pengembangan sumber daya manusia, menghubungkan pengendalian mutu pendidikan dengan pengembangan kompetensi guru dan pengelolaan sumber daya pendidikan. Dia menyarankan bahwa pengendalian mutu pendidikan melibatkan pelatihan yang efektif untuk para pendidik, serta penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan pasar dan perkembangan teknologi.

Secara umum, para ahli sepakat bahwa pengendalian mutu pendidikan adalah upaya yang terorganisir dan sistematis untuk memastikan pendidikan yang diberikan memiliki standar yang tinggi dan sesuai dengan harapan masyarakat. sehingga dalam proses penerapan pengendalian mutu harus melibatkan berbagai aspek, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga perbaikan berkelanjutan.

Pengendalian mutu pendidikan dalam perspektif Islam berakar pada nilai-nilai yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan hadits, yang menekankan pentingnya kualitas pendidikan untuk menghasilkan individu yang berakhlak mulia, berpengetahuan luas, dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam Islam, pendidikan bukan hanya tentang transfer ilmu, tetapi juga pembentukan karakter dan akhlak yang baik.

Secara prinsip, pengendalian mutu pendidikan dalam Islam dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain:

1. **Peningkatan Ilmu dan Kualitas Pembelajaran:** Islam sangat menekankan pentingnya ilmu pengetahuan. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (١) خَلَقَ
الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (٢) اقْرَأْ وَرَبُّكَ
الْأَكْرَمُ (٣) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (٤)
عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (٥)

"Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu Yang Maha Mulia, yang mengajar manusia dengan pena, mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya." (QS. Al-Alaq: 1-5)

Ayat ini menegaskan pentingnya membaca dan belajar sebagai bagian dari kualitas pendidikan yang terus menerus harus ditingkatkan.

2. **Pendidikan Karakter dan Akhlak:** Pengendalian mutu pendidikan dalam Islam juga berfokus pada pembentukan akhlak yang baik, seperti yang diajarkan dalam hadits:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ.

- "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." (HR. Al-Bukhari) Pendidikan dalam Islam tidak hanya mengutamakan pencapaian intelektual, tetapi juga moralitas dan etika.
3. **Pendidikan yang Adil dan Merata:** Islam mengajarkan keadilan dalam pendidikan, agar setiap individu, tanpa memandang status sosial, dapat mengakses ilmu pengetahuan
 4. yang baik dan berkualitas. Ini sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam yang tercermin dalam firman Allah:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ
تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa: 58)

Selain itu Al-Qur'an mengajarkan pentingnya kualitas pendidikan dalam banyak ayat, di antaranya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا
يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا
مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Mujadilah: 11)

Dari beberapa ayat Al-qur'an tersebut dapat disimpulkan bahwa: islam sangat menganjurkan hambanya untuk senantiasa meningkatkan mutu pendidikan baik ilmu

agama maupun umum, Hal ini mengindikasikan bahwa pendidikan yang baik dalam Islam harus menghasilkan individu yang beriman dan berilmu, serta memiliki kualitas dalam kehidupan sosial dan spiritual.

Dengan dasar ini, pengendalian mutu pendidikan menurut Islam sangat mengutamakan pembentukan individu yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berakhlak mulia, adil, dan bermanfaat bagi umat serta mampu menjadi panutan dalam kehidupan bermasyarakat.

B. Penerapan sistem pengendalian mutu pendidikan di lembaga pendidikan

Penerapan sistem pengendalian mutu di lembaga pendidikan sangat penting untuk memastikan bahwa proses pendidikan dapat menghasilkan kualitas yang sesuai dengan harapan dan standar yang telah ditetapkan. Melalui penetapan standar mutu yang jelas, pemantauan dan evaluasi secara berkala, serta perbaikan berkelanjutan, lembaga pendidikan dapat meningkatkan kualitas pengajaran, fasilitas, dan layanan yang diberikan kepada siswa.

Dalam Islam, pendidikan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Setiap pihak yang terlibat dalam pendidikan guru, murid, dan pengelola dianggap memegang amanah untuk memastikan pendidikan berlangsung dengan baik.

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya." (QS. An-Nisa: 58)

Islam mengajarkan pentingnya meningkatkan kualitas dan keberlanjutan dalam pembelajaran. Proses belajar mengajar tidak hanya berhenti di ruang kelas, tetapi harus menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dan pengembangan diri yang berkelanjutan. Dalam Islam, Allah memerintahkan umatnya untuk terus meningkatkan diri, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an yang artinya:

فَتَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ
وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴿١١٤﴾

Artinya "Mahatinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Janganlah engkau (Nabi Muhammad) tergesa-gesa (membaca) Al-Qur'an sebelum selesai pewayhuannya kepadamu dan katakanlah, "Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku." (QS. Ta-Ha: 114)

Selain itu, pelatihan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar menjadi faktor kunci dalam menjaga kualitas pendidikan. Keterlibatan berbagai pihak, seperti orang tua, masyarakat, dan pemerintah, juga sangat penting untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik dan relevan dengan kebutuhan zaman. Penggunaan teknologi dalam memonitor dan mengelola proses pendidikan semakin mempermudah pengendalian mutu serta membuat sistem pendidikan lebih transparan dan efektif.

Secara keseluruhan, penerapan sistem pengendalian mutu yang tepat di lembaga pendidikan akan menghasilkan peningkatan kualitas pendidikan yang

berkelanjutan, menjamin kepuasan siswa, dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan di masa depan. Penerapan sistem pengendalian mutu di lembaga pendidikan bertujuan untuk memastikan bahwa proses pendidikan dan pembelajaran yang berlangsung dapat menghasilkan output yang berkualitas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Berikut ini adalah beberapa langkah utama dalam penerapan sistem pengendalian mutu di lembaga pendidikan antara lain:

1. Penetapan Standar Mutu: Lembaga pendidikan harus memiliki standar kualitas yang jelas mengenai kurikulum, pengajaran, fasilitas, dan layanan pendidikan lainnya. Standar ini bisa bersumber dari kebijakan nasional maupun standar internasional.
2. Pemantauan dan Evaluasi: Pengawasan terhadap proses pendidikan dilakukan secara terus-menerus. Evaluasi dilakukan terhadap hasil belajar siswa, kualitas pengajaran, dan efektivitas kurikulum. Pemantauan ini dapat dilakukan melalui tes, observasi kelas, dan penilaian terhadap kegiatan pembelajaran.
3. Peningkatan Berkelanjutan: Berdasarkan hasil evaluasi, lembaga pendidikan melakukan perbaikan dan peningkatan berkelanjutan untuk mengatasi kelemahan atau kekurangan yang ada. Hal ini bisa dilakukan dengan melibatkan guru, siswa, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam perbaikan proses pendidikan.
4. Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM): Salah satu kunci utama dalam pengendalian mutu di lembaga pendidikan adalah peningkatan kompetensi tenaga pengajar. Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan profesional bagi pengajar harus dilakukan secara rutin agar mereka mampu mengikuti perkembangan metode pengajaran yang lebih baik.
5. Keterlibatan Stakeholder: Melibatkan berbagai pihak, seperti orang tua, masyarakat, dan lembaga pendidikan lainnya dalam proses pengendalian mutu. Ini bertujuan untuk menciptakan sinergi dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
6. Penggunaan Teknologi: Teknologi dapat digunakan untuk mempermudah proses pengendalian mutu, seperti dengan menggunakan aplikasi untuk memantau prestasi siswa, sistem penilaian yang lebih transparan, dan fasilitas online untuk pembelajaran.

Adapun tujuan pengendalian mutu pendidikan secara umum adalah untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan dapat mencapai standar kualitas yang diinginkan dan memenuhi kebutuhan semua pemangku kepentingan (seperti siswa, guru, orang tua, pemerintah, dan masyarakat). Berikut adalah beberapa tujuan utama pengendalian mutu pendidikan:

- Meningkatkan kualitas pendidikan:
Tujuan utama pengendalian mutu adalah untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan memiliki kualitas yang baik, baik dalam hal proses, metode pembelajaran, maupun hasil yang dicapai oleh siswa. Pengendalian mutu berfokus pada perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendidikan.
- Mencapai standar pendidikan yang telah ditentukan:
Pengendalian mutu pendidikan bertujuan untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah

atau lembaga pendidikan terkait. Ini mencakup standar kurikulum, proses pembelajaran, fasilitas, dan kompetensi guru.

- Menjamin akuntabilitas:
Pengendalian mutu pendidikan juga bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan (seperti guru, siswa, dan lembaga pendidikan) bertanggung jawab atas kinerja dan pencapaian tujuan pendidikan. Dengan adanya pengendalian mutu, kualitas pendidikan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait.
- Meningkatkan kinerja guru dan siswa:
Salah satu tujuan pengendalian mutu pendidikan adalah untuk meningkatkan kinerja para guru dalam memberikan pengajaran yang berkualitas dan juga meningkatkan kinerja siswa dalam mencapai kompetensi yang diharapkan. Evaluasi dan pelatihan terus-menerus dapat membantu dalam meningkatkan profesionalisme guru dan kemampuan siswa.
- Peningkatan kesetaraan pendidikan:
Pengendalian mutu pendidikan juga bertujuan untuk memastikan adanya pemerataan kualitas pendidikan di berbagai wilayah, baik di kota maupun di daerah terpencil. Ini penting untuk menciptakan kesetaraan dalam kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas.
- Peningkatan relevansi pendidikan
Tujuan lainnya adalah untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan relevan dengan kebutuhan zaman, terutama kebutuhan dunia kerja dan perkembangan teknologi. Pengendalian mutu akan melibatkan penyesuaian kurikulum dan pengajaran agar siswa siap menghadapi tantangan masa depan.
- Meningkatkan kepuasan stakeholder:
Dengan pengendalian mutu pendidikan yang baik, diharapkan akan tercipta kepuasan bagi semua pemangku kepentingan, baik siswa, orang tua, tenaga pendidik, maupun masyarakat. Kepuasan ini bisa berupa hasil belajar yang memadai, proses belajar yang menyenangkan, atau fasilitas yang mendukung.
- Memperbaiki sistem pendidikan secara berkelanjutan:
Pengendalian mutu pendidikan tidak hanya berfokus pada pencapaian kualitas pendidikan saat ini, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan sistem pendidikan yang terus berkembang dan dapat beradaptasi dengan perubahan zaman. Evaluasi berkala dan perbaikan yang berkesinambungan menjadi kunci dalam tujuan ini.

C. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengendalian mutu pendidikan di madrasah

Bukan rahasia umum lagi bahwasanya dalam setiap kebijakan apapun baik di sebuah lembaga pendidikan atau organisasi sudah pasti mengalami hal hal yang bisa menghambat jalannya suatu program kebijakan tersebut, termasuk dalam penerapan pengendalian mutu pendidikan dalam mencapai hasil yang telah di sepakati bersama.

Keberhasilan pengendalian mutu pendidikan di madrasah dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi antara lain:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM): Kinerja tenaga pengajar dan staf di madrasah merupakan faktor penting dalam pengendalian mutu. Guru yang

kompeten, profesional, dan memiliki motivasi tinggi akan lebih mampu memberikan pengajaran yang berkualitas dan mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang diinginkan.

2. Kurikulum dan Pembelajaran: Kurikulum yang relevan, fleksibel, dan berorientasi pada perkembangan siswa sangat berperan dalam pengendalian mutu pendidikan. Pembelajaran yang berbasis pada kebutuhan siswa serta mengikuti perkembangan zaman dapat meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah.
3. Pengawasan dan Evaluasi yang Berkelanjutan: Proses pengawasan yang efektif serta evaluasi yang dilakukan secara berkala akan memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Evaluasi membantu mengidentifikasi kekurangan yang perlu diperbaiki.
4. Fasilitas dan Infrastruktur: Ketersediaan fasilitas pendukung yang memadai, seperti ruang kelas yang nyaman, peralatan belajar yang memadai, serta fasilitas teknologi, sangat mempengaruhi keberhasilan pengendalian mutu pendidikan.
5. Keterlibatan Stakeholder: Partisipasi aktif orang tua, masyarakat, dan lembaga pendidikan lain sangat mendukung keberhasilan pengendalian mutu. Komunikasi yang baik antara madrasah dengan stakeholder terkait membantu menciptakan suasana pendidikan yang kondusif.
6. Komitmen Manajemen: Kepemimpinan yang kuat dan komitmen manajemen dalam menerapkan sistem pengendalian mutu yang jelas dan efektif menjadi dasar penting dalam mencapai keberhasilan. Pengelolaan yang baik, transparansi, dan akuntabilitas menjadi elemen kunci dalam proses tersebut.

Dalam pelaksanaan peningkatan mutu tentu saja memiliki banyak resiko yang bisa timbul sehingga mengakibatkan kurangnya keberhasilan dalam proses pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan tersebut atau mslsh kegagalan. Maka untuk mengantisipasi dan mengurangi hal tersebut dalam menghadapi kendala keberhasilan pengendalian mutu pendidikan di madrasah dapat dilakukan dengan beberapa langkah strategis, antara lain:

1. Peningkatan Kompetensi Guru: Memberikan pelatihan dan workshop secara berkala bagi para guru untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan mengajar, serta pemahaman terhadap perkembangan kurikulum dan teknologi pendidikan. Selain itu, pembinaan secara terus-menerus juga diperlukan untuk memastikan kualitas pengajaran yang konsisten.
2. Penguatan Kepemimpinan Madrasah: Memperkuat kepemimpinan kepala madrasah dalam hal manajerial, komunikasi, dan pembinaan tim. Kepala madrasah yang visioner dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pengendalian mutu serta mampu mengatasi masalah yang ada di madrasah dengan cara yang efektif.
3. Perbaikan Fasilitas dan Infrastruktur: Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kegiatan pembelajaran, seperti ruang kelas yang nyaman, laboratorium, perpustakaan, dan teknologi pembelajaran. Jika anggaran terbatas, bisa diawali dengan perbaikan bertahap berdasarkan prioritas.
4. Meningkatkan Partisipasi Stakeholder: Membangun hubungan yang lebih baik dengan orang tua, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mendukung kegiatan madrasah. Penguatan komite madrasah dan keterlibatan

orang tua dalam proses pendidikan akan mempercepat tercapainya tujuan pendidikan yang berkualitas.

5. Menerapkan Sistem Evaluasi yang Tepat: Mengembangkan sistem evaluasi dan penilaian yang objektif dan berkelanjutan untuk memantau perkembangan hasil **belajar siswa dan** efektivitas pengajaran. Selain itu, pemanfaatan data hasil evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan sangat penting.
6. Pemanfaatan Teknologi Pendidikan: Meningkatkan penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran dan manajemen madrasah. Penggunaan media pembelajaran digital, platform pembelajaran online, dan perangkat teknologi lainnya dapat meningkatkan kualitas pengajaran serta memperluas akses belajar.
7. Pendanaan yang Cukup: Meningkatkan alokasi anggaran untuk pendidikan, baik dari dana pemerintah maupun dukungan dari masyarakat. Program penggalangan dana atau kerja sama dengan berbagai lembaga dapat menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pendidikan.
8. Kolaborasi dengan Lembaga Pendidikan Lain: Membangun kerjasama dengan sekolah-sekolah atau madrasah lain, lembaga pendidikan tinggi, atau organisasi pendidikan non-pemerintah dapat memberikan manfaat berupa pertukaran pengetahuan dan pengalaman, serta meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Dengan melaksanakan langkah-langkah tersebut, diharapkan dapat mengurangi dan mengatasi kendala yang dihadapi dalam pengendalian mutu pendidikan di madrasah sehingga dapat membantu mengatasi secara efektif dan berkelanjutan, sehingga pelaksanaan program yang direncanakan dapat terlaksana sesuai keinginan.

D. Peran kepala sekolah/madrasah dalam pengendalian mutu pendidikan

Mutu pendidikan merupakan salah satu faktor yang menentukan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Di Indonesia, pendidikan yang berkualitas dapat dicapai melalui pengelolaan yang baik dan terstruktur. Salah satu pihak yang berperan penting dalam hal ini adalah kepala sekolah/madrasah. Kepala sekolah/madrasah memiliki tanggung jawab dalam mengelola seluruh aspek pendidikan di lembaganya, termasuk dalam hal pengendalian mutu pendidikan.

Dalam Islam, pemimpin diamanahi untuk memimpin dengan adil dan bijaksana. Kepala sekolah atau madrasah adalah pemimpin yang bertanggung jawab atas mutu pendidikan di lembaga yang dipimpinnya. Kepala sekolah/madrasah berperan dalam merumuskan tujuan pendidikan yang jelas dan sesuai dengan visi dan misi lembaga. Mereka juga bertanggung jawab dalam menetapkan standar mutu pendidikan yang harus dicapai, baik dalam hal kurikulum, pembelajaran, maupun akhlak peserta didik.

Kepala sekolah/madrasah harus memastikan adanya sistem evaluasi yang efektif untuk mengukur kualitas pendidikan di lembaganya. Evaluasi ini harus mencakup berbagai aspek, termasuk pengajaran, pengelolaan, dan pembentukan karakter. Dalam Islam, evaluasi dan pengawasan harus dilakukan dengan adil dan transparan agar kualitas pendidikan terus meningkat. Kepala sekolah/madrasah dapat mengembangkan sistem penilaian yang berfokus pada pencapaian akademis dan moral siswa.

Kepala sekolah/madrasah memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan kompetensi guru. Dalam Islam, penting bagi pemimpin untuk terus belajar dan berkembang. Kepala sekolah harus menyediakan pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru, sehingga mereka dapat terus meningkatkan kemampuan mengajar dan memberikan pendidikan yang berkualitas.

Kepala sekolah/madrasah harus membangun hubungan yang baik dengan orang tua siswa dan masyarakat sekitar. Dalam Islam, kerja sama dan komunikasi yang baik antara orang tua, lembaga pendidikan, dan masyarakat sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Sebagaimana tercantum dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ آلِ مَا مَر

"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR. Bukhari).

Selain itu kepala madrasah adalah pimpinan yang memiliki wewenang tinggi juga sangat berperan dalam mengarahkan tujuan pendidikan yang telah dirancang untuk mencapai tujuan dan mampu menghasilkan output yang mampu bersaing di tingkat global. Berikut ini peran utama kepala madrasah dalam pengendalian mutu pendidikan adalah:

1. **Merancang Perencanaan dan Pengembangan Pendidikan** Kepala sekolah/madrasah berperan penting dalam merencanakan program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman. Perencanaan ini mencakup pengembangan kurikulum, pembinaan guru, serta pengelolaan sarana dan prasarana yang mendukung proses belajar mengajar.
2. **Membuat Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan** Kepala sekolah/madrasah berfungsi sebagai pengambil keputusan utama dalam implementasi kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga terkait. Hal ini meliputi kebijakan pengajaran, kegiatan ekstrakurikuler, serta penggunaan sumber daya yang ada untuk menciptakan proses pembelajaran yang efektif.
3. **Monitoring dan Evaluasi** Monitoring dan evaluasi merupakan salah satu aspek penting dalam pengendalian mutu pendidikan. Kepala sekolah/madrasah bertugas memantau pelaksanaan pembelajaran, mengevaluasi kinerja guru, serta menilai capaian hasil belajar siswa. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, kepala sekolah dapat melakukan perbaikan dan penyesuaian untuk meningkatkan mutu pendidikan.
4. **Pembinaan dan Pengembangan Profesionalisme Guru** Sebagai pemimpin di lembaga pendidikan, kepala sekolah/madrasah memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan kompetensi guru. Hal ini bisa dilakukan melalui pelatihan, workshop, serta pemberian umpan balik yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas pengajaran di kelas.
5. **Pengelolaan Sumber Daya** Kepala sekolah/madrasah juga memiliki peran dalam pengelolaan sumber daya pendidikan, baik sumber daya manusia (guru, staf) maupun sumber daya fisik (fasilitas, alat belajar). Pengelolaan yang efisien akan mendukung terciptanya lingkungan belajar yang kondusif.
6. **Pemberdayaan Stakeholder** Kepala sekolah/madrasah harus menjalin hubungan yang baik dengan berbagai pihak terkait, seperti orang tua siswa,

masyarakat, dan pemerintah. Melalui kerja sama ini, pengendalian mutu pendidikan dapat berjalan lebih efektif dan memperoleh dukungan yang lebih luas.

E. Dampak dari penerapan pengendalian mutu pendidikan terhadap prestasi belajar siswa di sekolah/madrasah

Penerapan pengendalian mutu pendidikan di sekolah atau madrasah memiliki dampak yang signifikan terhadap prestasi belajar siswa. Beberapa dampak positif yang dapat terjadi antara lain:

1. **Peningkatan Kualitas Pembelajaran:** Dengan adanya pengendalian mutu yang baik, kualitas pembelajaran akan lebih terstruktur dan terstandarisasi. Guru dapat mengajar dengan metode yang lebih efektif dan sesuai dengan standar pendidikan yang telah ditetapkan. Hal ini membuat siswa lebih mudah memahami materi dan mencapai hasil belajar yang lebih baik.
2. **Peningkatan Kemampuan Guru:** Salah satu tujuan pengendalian mutu adalah untuk meningkatkan kompetensi guru. Guru yang lebih terampil dan terlatih akan lebih mampu menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Hal ini menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan dan produktif, yang pada akhirnya berdampak positif pada prestasi belajar siswa.
3. **Pemantauan dan Evaluasi yang Lebih Baik:** Pengendalian mutu mencakup proses evaluasi yang berkesinambungan terhadap perkembangan belajar siswa. Dengan adanya sistem penilaian yang baik, siswa dapat menerima umpan balik yang berguna untuk meningkatkan hasil belajar mereka. Evaluasi yang terus menerus juga membantu untuk mengidentifikasi kelemahan siswa dan memberikan solusi tepat untuk mengatasi masalah tersebut.
4. **Fasilitas yang Mendukung:** Salah satu aspek pengendalian mutu adalah penyediaan fasilitas yang mendukung proses belajar. Madrasah atau sekolah yang menerapkan pengendalian mutu akan lebih cenderung untuk memperhatikan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, seperti ruang kelas yang nyaman, alat belajar yang lengkap, dan akses ke teknologi. Fasilitas ini akan mendukung siswa dalam belajar dengan lebih efektif, yang berdampak pada peningkatan prestasi mereka.
5. **Keterlibatan Orang Tua dan Komunitas:** Dalam pengendalian mutu, peran orang tua dan komunitas juga sangat penting. Peningkatan komunikasi dan keterlibatan orang tua dalam mendukung pendidikan anak dapat meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa. Siswa merasa lebih didukung dalam proses belajar, baik di sekolah maupun di rumah.
6. **Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa:** Penerapan pengendalian mutu yang jelas memberikan siswa pemahaman tentang standar yang harus mereka capai. Adanya tujuan yang jelas dan transparan dalam pembelajaran dapat memotivasi siswa untuk berusaha lebih keras dalam meraih prestasi belajar yang lebih baik.
7. **Lingkungan Pembelajaran yang Kondusif:** Pengendalian mutu juga mencakup pengelolaan lingkungan sekolah atau madrasah yang kondusif untuk belajar. Suasana yang mendukung, aman, dan nyaman memungkinkan siswa untuk lebih fokus dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran, yang berdampak langsung pada prestasi mereka.
8. **Pencapaian Standar yang Lebih Baik:** Dengan pengendalian mutu yang efektif, sekolah atau madrasah akan lebih mampu mencapai standar pendidikan

nasional dan internasional. Hal ini memotivasi siswa untuk mencapai hasil yang lebih optimal, sesuai dengan ekspektasi kurikulum yang diterapkan.

Secara keseluruhan, penerapan pengendalian mutu pendidikan dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kerjasama tim antara guru dan kepala madrasah yang dapat meningkatkan prestasi belajar siswa dengan menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih berkualitas, efektif, dan efisien.

KESIMPULAN

Pengendalian mutu pendidikan sangat penting dilakukan dalam lembaga pendidikan untuk memastikan dan mendapatkan pendidikan yang berkualitas, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan pengendalian mutu, perlu adanya keterlibatan berbagai pihak, baik itu pemerintah, lembaga pendidikan, serta masyarakat. Untuk itu, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan harus dilakukan agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai.

Secara keseluruhan, pengendalian mutu pendidikan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu yang menjalani pendidikan memperoleh pengalaman belajar yang berkualitas dan relevan, sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang siap menghadapi tantangan global dan berkembang di dunia yang terus berubah.

Peran kepala madrasah sangat krusial dalam peningkatan mutu pendidikan. Dengan pengelolaan yang baik, perencanaan yang matang, serta evaluasi yang terus-menerus, kepala madrasah dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang berkualitas. Meskipun ada tantangan yang dihadapi, kepala madrasah yang visioner dan inovatif dapat membawa perubahan positif untuk menciptakan generasi yang berdaya saing tinggi di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2009). *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Al-Qur'an, terjemahan Kementerian Agama RI.*
- Arikunto, S. (2012). *Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Baharuddin, A. (2013). *Manajemen Pendidikan di Madrasah*. Jakarta: Kencana
- Besterfield, D. H. (2009). *Quality Control. 8th Edition*. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall.
- Besterfield, D. H. (2009). *Quality Control. 8th Edition*. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall
- Depdiknas. (2006). *Kepemimpinan Pendidikan Madrasah*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Djumhur, S. M. 2016. *Manajemen Mutu Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Gaspersz, V. (2005). *Total Quality Management: Reaching the Peak of Excellence*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hammond, J. L., & Muench, L. J. (2003). *Quality Control and Industrial Statistics*. New York: McGraw-Hill.
- Hasan, M. (2011). *Manajemen Pendidikan Madrasah: Teori dan Praktik*. Yogyakarta:

Pustaka Pelajar.

- Iskandar, H. (2011). *Manajemen Mutu Pendidikan di Madrasah*. Bandung: Alfabeta.
- Mulyasa, E. (2013). *Manajemen Pendidikan: Suatu Pendekatan Baru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. 2015. *Manajemen Mutu Pendidikan: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mulyasa, E. (2007). *Manajemen Pendidikan: Perspektif, Konsep, dan Aplikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Moh. (2005). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Peningkatan Kualitas Pendidikan di Madrasah. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Sudjana, N. (2015). *Evaluasi Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Purwanto, M. 2013. *Evaluasi Pendidikan dan Pengajaran*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Sallis, E. (2002). *Total Quality Management in Education*. 3rd Edition. London: Kogan Page.
- Sudjana, N. 2001. *Evaluasi Pendidikan: Proses, Prinsip, dan Teknik*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Tjiptono, F. (2011). *Manajemen Kualitas dan Peningkatan Kualitas*. Yogyakarta: Andi.
- Tjiptono, F. (2012). *Manajemen Mutu Terpadu*. Yogyakarta: Andi.
- Tim Kemdikbud. 2020. *Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
- Zhao, Y. (2009). *Catching Up or Leading the Way: American Education in the Age of Globalization*. Alexandria: ASCD.

PENDEKATAN SIX SIGMA DALAM PERBAIKAN MUTU

Buya Riadi , 24052170031

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era globalisasi dan persaingan bisnis yang semakin ketat, kualitas produk dan layanan menjadi salah satu faktor kunci yang menentukan keberlangsungan dan keberhasilan suatu perusahaan. Perusahaan dituntut untuk tidak hanya menghasilkan produk yang sesuai dengan standar, tetapi juga mampu memenuhi ekspektasi pelanggan secara konsisten. Oleh karena itu, perbaikan mutu menjadi aspek yang sangat krusial dalam strategi manajemen modern.

Pendidikan Islam merupakan fondasi penting dalam membentuk karakter, akhlak, dan integritas peserta didik agar menjadi insan yang unggul secara spiritual, intelektual, dan sosial. Di tengah perkembangan zaman yang dinamis serta tantangan global yang semakin kompleks, lembaga pendidikan Islam dituntut untuk terus meningkatkan mutu agar dapat bersaing dan tetap relevan. Perbaikan mutu tidak hanya terbatas pada aspek kurikulum atau metode pembelajaran, tetapi juga mencakup sistem manajemen, pelayanan, serta kinerja kelembagaan secara keseluruhan.

Salah satu pendekatan manajemen mutu yang terbukti efektif di berbagai sektor, termasuk sektor pendidikan, adalah **Six Sigma**. Metodologi ini menawarkan kerangka kerja yang sistematis dan berbasis data untuk mengidentifikasi masalah, mengurangi variasi proses, serta meningkatkan kualitas output secara berkelanjutan. Dengan menggunakan pendekatan **DMAIC** (Define, Measure, Analyze, Improve, Control), Six Sigma dapat membantu lembaga pendidikan Islam untuk memahami akar permasalahan mutu, merancang solusi yang tepat, serta memastikan keberlanjutan perbaikan.

Penerapan Six Sigma dalam konteks pendidikan Islam memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi operasional lembaga, meningkatkan kepuasan peserta didik dan orang tua, serta memastikan proses pembelajaran berjalan lebih efektif dan bermutu. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji dan memahami bagaimana pendekatan Six Sigma dapat diadaptasi dan diimplementasikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan Islam secara menyeluruh.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Apa pengertian dan prinsip dasar dari pendekatan Six Sigma?
2. Bagaimana konsep Six Sigma dapat diterapkan dalam konteks pendidikan, khususnya pendidikan Islam?
3. Bagaimana langkah-langkah pendekatan Six Sigma, seperti metode DMAIC, dapat digunakan untuk meningkatkan mutu layanan dan proses pembelajaran di lembaga pendidikan Islam?

C. Tujuan

1. Untuk memahami pengertian dan prinsip dasar dari pendekatan Six Sigma
2. Untuk mengkaji relevansi dan potensi penerapan Six Sigma dalam konteks pendidikan Islam.
3. Untuk menjelaskan langkah-langkah sistematis pendekatan Six Sigma, khususnya metode DMAIC, dalam meningkatkan mutu layanan dan proses pembelajaran.

PEMBAHASAN

A. Sejarah Munculnya Six Sigma

Six Sigma pertama kali diterapkan oleh perusahaan Motorola yang berada di Amerika Serikat tahun 1980 oleh mekanik bernama Bill Smith. Latar belakang munculnya six sigma ialah hilangnya market pemasaran produk Motorola karena terdapat perbandingan kualitas dengan perusahaan yang berada di Jepang. Oleh sebab itu perusahaan Motorola mengenakan *statistical tools* dan dipadankan dengan kajian manajemen sebagai alat ukur dari kenaikan kualitas produk yang dihasilkan. Konsep six sigma lebih maju atau berkembang pada saat dipegang kekuasaannya oleh Mikel Harry, ia mekanik dari Motorola yang didukung oleh Richard Schroeder, ia seorang mantan *executive* perusahaan Motorola. Beliau menciptakan alat ukur kualitas yang memiliki sebutan six sigma atau six sigma Motorola. Konsep dasar six sigma berakar dari *total quality management* (TQM) dan *statistical proses control* (SPC). Berdasar dari dua konsep tersebut mereka

menciptakan sebuah alat ukur kualitas yang populer dengan sebutan six sigma atau six sigma Motorola. Konsep dasar dari six sigma berakar dari *total quality management* (TQM) dan *statistical process control* (SPC). Terdapat penjelasan lainnya yang menyatakan bahwa six sigma bentuk pengembangan dari konsep *quality improvement* yang sudah diimplementasikan mulai tahun 1940. Kesuksesan konsep six sigma Motorola ditandai dengan selama 1 dekade perusahaan Motorola sukses mencapai tingkat kualitas 3,4 DPMO (*defect per million opportunities*). Keberhasilan tersebut membuat beberapa perusahaan mulai mengikuti prinsip six sigma dalam sistem manajemen mereka (Syukron & Kholil, 2013)

B. Karakteristik six sigma

Pertama, menerapkan isu biaya (keuangan), *cycle time* atau disebut dengan waktu yang digunakan untuk menciptakan barang ataupun jasa dan isu bisnis lainnya yang mana terdapat bagian yang perlu dibenahi. *Kedua*, konsep six sigma berfokus mengenai penggunaan *tools* untuk memenuhi perolehan secara sistematis. *Ketiga*, six sigma menyatukan seluruh tujuan dari organisasi dalam satu kesatuan. Kualitas dari produk yang dihasilkan diambil hanya dari satu tujuan, tidak berdiri sendiri maupun terlepas dari tujuan bisnis lainnya. *Keempat*, six sigma melahirkan perubahan yang tidak bekerja dalam bilang *quality department* akan tetapi juga melibatkan operator yang bekerja pada six sigma sembari menjalankan tugas. Six sigma memiliki makna lainnya yang berfokus terhadap suatu proses mencegah kegagalan atau *defect*. Mencegah *defect* mampu dilakukan dengan proses meminimalisir keragaman dalam setiap proses memakai teknik statistik (Coskun, 2010).

C. Peran penting six sigma dalam fungsi manajemen mutu

Terdapat peran yang krusial konsep six sigma dalam fungsi manajemen mutu pendidikan terdapat tiga bagian yang pertama sebagai sistem pengukuran, kedua sebagai sistem manajemen, kemudian yang terakhir sebagai metodologi. Berikut ini penulis paparkan penjelasan dari ketiga bagian tersebut.

Pertama, Six sigma sebagai sebuah sistem pengukuran. Penjelasan nya ialah six sigma melakukan penyebaran atau mendistribusikan berbagai variasi dari rata-rata proses atau prosedur. Pengertiannya ialah konsep six sigma melakukan penyebaran variasi yang dihasilkan dari *mean* suatu metode yang dihasilkan.

Kedua, Six sigma menjadi sebuah sistem manajemen. Penjelasan nya ialah dalam menggunakan alat ukur secara berkelanjutan akan menciptakan organisasi mampu menguasai dan mengendalikan proses intinya, dan bersama mekanisme *problem solving* secara tersusun akan mempermudah organisasi memperoleh jalan keluar atau solusi berlandaskan pada akar problematika yang ada.

Ketiga, Six sigma sebagai metodologi. Penjelasan nya ialah dalam mengatasi permasalahan konsep six sigma memiliki metode dalam mengatasi dari permasalahan tersebut yaitu menggunakan DMAIC atau *define, measure, analyze, improve, dan control* (Karwanto & dkk, 2020).

D. Metodologi Six Sigma

Permasalahan yang muncul dalam proses produksi segera mencari faktor penyebabnya. Kemudian dilanjutkan dengan memperbaiki kualitas produk dan mengontrolnya dalam beberapa waktu. Permasalahan six sigma mampu dipecahkan dengan menerapkan metode DMAIC (Ahmad, 2019).

1) *Define*

Pada tahap ini mengidentifikasi masalah secara khusus, beserta bukti secara nyata dari suatu permasalahan. Bukti tersebut bisa berbentuk laporan (Sarman. Soediantono, 2022).

2) *Measure*

Suatu masalah selepas teridentifikasi akan mengakibatkan munculnya pengaruh dalam proses kinerja. Pada tahap ini perlu adanya pengukuran mengenai tingkat kinerja seseorang, yang disebut dengan variabilitas atau varian (Tijow & Supramono, 2015).

Pada tahap *measure* terdapat beberapa tahapan dalam mengukur suatu masalah :

- a) Menentukan input dan output
- b) Membuat *value stream mapping*
- c) Menentukan ukuran performa yang digunakan
- d) Menyelenggarakan pengumpulan data dalam melakukan perhitungan
- e) Menghitung kapabilitas proses (Sugiono et al., 2021)

3) *Analyze*

Menentukan faktor yang sangat mempengaruhi proses, artinya saat melakukan analisa permasalahan terdapat satu atau bahkan lebih faktor jika dilakukan perbaikan akan memperbaiki proses secara signifikan. Terdapat tahap utama dari fase analisis berikut ini : melakukan identifikasi pada akar permasalahan yang ada. Dalam langkah ini terdapat alat yang membantu yaitu *brainstorming*.

4) *Improv*

Pada tahap ini tim melakukan diskusi mengenai gagasan guna menyempurnakan sebuah sistem berlandaskan hasil dari analisis data, kemudian melakukan uji coba untuk mengidentifikasi hasil tersebut, jika hasilnya baik maka langsung membuat *standar operating procedure* (SOP).

Tahapan utama yakni dengan menentukan, memprioritaskan, dan menerapkan solusi dari setiap permasalahan yang sudah terbukti adanya berikut ini langkah-langkah yaitu:

- a) *Generate solution*, bersumber dari permasalahan yang sudah tervalidasi. Para anggota tim mencari solusi dari permasalahan tersebut. Contoh sumber mencari solusi dengan literatur, *brainstorming*, dan lainnya
- b) *Selected solution*, dari beberapa usulan solusi kita tamping kemudian tim akan memilih solusi mana yang akan diterapkan terlebih dahulu. Terdapat cara yang mudah dalam memilih solusi yaitu menggunakan *benefit effort matriks* yang mana menggunakan perbandingan antara dampak perbaikan dengan usaha yang digunakan.
- c) *To be map*, tim melakukan sketsa ulang pada proses yang menjadikan tujuan perbaikan.
- d) *Work plan*, setelah memperoleh solusi yang akan diterapkan langkah selanjutnya membuat agenda kerja. Agenda tersebut dirancang secara khusus yang mana mampu menjabarkan masalah waktu dan biaya yang diperlukan dalam proses pengaplikasian.

- e) *Piloting*, sebelum menerapkan solusi secara luas pihak tim perlu melakukan tes ulang, apakah implementasi dari solusi tersebut berdampak pada perubahan yang diinginkan. Pilotin memiliki tujuan untuk mempelajari bagaimana cara yang efektif dan efisien apabila solusi tersebut diterapkan secara meluas.
- f) *Evaluasi*, proses ini menggunakan dua hal yaitu pertama, evaluasi terhadap agenda kerja (terhadap jadwal dan biaya). Kedua, evaluasi terhadap hasil (membandingkan data sebelumnya dan sesudah dilakukannya penerapan solusi tersebut (Tijow & Supramono, 2015).

5) *Control*

Melalui tahap ini melakukan dokumentasi untuk mendapatkan perubahan sebelumnya dan mengidentifikasi dari dampak dari perubahan tersebut. Jika perubahan tersebut menghasilkan ketidak sesuaian maka perlu adanya penyusunan rencana dalam memperbaiki secara berkelanjutan. Supaya suatu perusahaan mampu terus berkembang mengiringi perkembangan masa sekarang. Adanya agenda evaluasi dalam jangka panjang diperlukan supaya tetap terjaga (Sugiono et al., 2021).

E. Implementasi Six Sigma dalam peningkatan mutu pendidikan

Six sigma tidak identik tentang pengolahan data statistik, statistik hanya alat ukur untuk memperoleh proses pembaharuan sesuai yang akan dicapai. Pengertian primer dari six sigma ialah suatu manajemen untuk memulihkan suatu proses untuk mencapai hasil yang baik. Beberapa orang mengukur keberhasilan six sigma dengan seberapa banyak kita menggunakan tools statistik atau software canggih yang digunakan. Akan tetapi bukan itu inti dari penerapan six sigma, yaitu tentang kemampuan mengelola suatu bisnis/lembaga ataupun suatu organisasi. Six sigma ialah model sistem penjaminan mutu yang memiliki kaitannya dengan manajemen kualitas dalam mempromosikan suatu produk barang ataupun layanan jasa.

Menurut UU no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam bagian 4 pasal 11 ayat 1 menyatakan bahwa “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”. Upaya tersebut untuk melaksanakan pendidikan yang memiliki mutu yang baik secara masiv supaya setiap warga negara mampu memperoleh pendidikan secara merata yang bermutu.

Implementasi six sigma pada suatu lembaga pendidikan merupakan suatu tantangan. Karena terdapat keterbatasan dalam menerapkan metode tersebut pada suatu organisasi akademik. Metodologi six sigma banyak dilakukan penelitian dan diterapkan dalam lingkup manufaktur/bisnis dari pada dalam dunia pendidikan. Jarang sekali kita menjumpai lembaga pendidikan menggunakan metode six sigma dalam meningkatkan mutu pendidikannya. Dengan mengkaji metode ini, suatu lembaga pendidikan mampu menerapkan program peningkatan mutu secara mikro/setiap satuan pendidikan.

Aktualisasi six sigma dalam bidang pendidikan memiliki korelasi pada rencana perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan. Beberapa bidang memiliki kaitanya untuk meningkatkan mutu pendidikan bisa dimulai dari menteri

pendidikan nasional, dinas pendidikan kota provinsi, lembaga penjaminan mutu pendidikan (LPMP), dinas pendidikan kabupaten/kota, pengawas pendidikan, kepala sekolah, guru, dan orang tua. Sedangkan elemen berinteraksi secara *face to face* dalam proses pendidikan disekolah ialah pengawas, kepala sekolah, dan tenaga guru. Ketiga elemen tersebut mampu menerapkan six sigma dalam meningkatkan mutu pendidikan baik mengatasi ataupun meredam suatu permasalahan yang ada. Beberapa contoh implikasi sederhana metode six sigma dalam bidang pendidikan :

- 1) Pengawas : menerapkan metode six sigma dalam melaksanakan supervise, baik secara akademik ataupun manajerial.
- 2) Kepala sekolah bersama para guru : menerapkan metode six sigma terhadap suatu permasalahan di lembaga sekolah, contoh mengatasi permasalahan peserta didik yang terlambat masuk sekolah, mengatasi peserta didik tidak membersihkan lingkungan sekolah dan sebagainya.
- 3) Guru dalam menyelesaikan masalah pada proses pembelajaran, mengatasi peserta didik yang menyontek saat ujian, mengatasi prestasi peserta didik yang rendah.

Penjelasan sebelumnya tentang metode Six Sigma merupakan suatu metode yang terorganisir terdiri dari 5 metodologi ialah *define, measure, analyze, improvement, dan control*. Kelima metodologi six sigma ini harus dilakukan dalam meningkatkan mutu pendidikan disekolah. Berikut ini implementasi six sigma oleh pengawas sekolah :

- 1) *Define*, pada langkah ini pengawas mampu mengidentifikasi masalah, mengidentifikasikan pelanggan (guru/kepala sekolah), dan menentukan tujuan. Inti dalam langkah ini yaitu menentukan masalah. Pengawas hendak melakukan supervisi kepada guru bisa melakukan beberapa tahap berikut ini :
 - a) Pengawas mengamati suatu *problem* dengan menerapkan instrumen observasi, wawancara, dan dokumentasi.
 - b) Pengawas mengidentifikasi guru secara detail, pengawas bisa melakukannya setelah melakukan pengamatan secara langsung.
 - c) Menetapkan tujuan maksud disini ialah melakukan pengurangan terhadap cact pada produk, pembiayaan dan target waktu. Inti dari menetapkan tujuan disini mampu menyempurnakan kinerja guru dan pegawai sekolah dalam proses pembelajaran.
- 2) *Measure*, dalam tahapan ini pengawas sekolah melakukan memverifikasi problem, kemudian melakukan analisa permasalahan berasal dari data yang ada pada pengawas sekolah saat melakukan rekognisi problematika yang ada. Ditindak lanjuti dari problem mana yang lebih memiliki dampak negative yang dihadapi oleh guru dalam proses pembelajaran. Pengawas dalam tahap ini mampu membandingkan problematika sesuai realita yang ada atau data hasil observasi. Seorang pengawas mampu mengkategorikan guru tersebut sudah layak atau masih memiliki kekurangan, kemudian dilanjutkan dengan pembinaan. Data dari hasil instrumen observasi selanjutnya dikelompokkan dalam bentuk table untuk memperoleh gambaran secara keseluruhan dari problematika tersebut.
- 3) *Analyze*, dalam langkah ini pengawas mampu menentukam faktor yang sangat mempengaruhi proses. Pengawas sekolah menetapkan komponen yang paling utama dari problematika yang dihadapi oleh guru kemudian

akan menjadi fokus utama dalam pembinaan. Contoh : saat proses pembelajaran daring, banyak sekali guru yang kesulitan dengan menggunakan aplikasi google classroom. Apalagi guru yang sudah berumur yang mana sudah tidak begitu faham perihal teknologi. Seharusnya pengawas melakukan diklat perihal penggunaan google classroom dan aplikasi penunjang pembelajaran lainnya.

- 4) *Improve*, tahapan ini pengawas dan guru yang diberikan arahan berdiskusi perihal pemikiran untuk mampu memperbaiki sistem pembelajaran berlandaskan dari hasil Analisa sebelumnya. Saat melakukan diskusi ini pengawan beserta guru mengidentifikasi tindakan yang mampu diterapkan guna memperbaiki proses.
- 5) *Control*, pada langkah tersebut pengawas sekolah perlu memuat agenda dan desain pengukuran supaya hasil yang sudah tercipta baik saling berkaitan. Pada tahap ini pengawas membuat sejenis metrik untuk bisa dilakukan *control* dan revisi. Jika terdapat penurunan mampu untuk melakukan pembaharuan lagi.

Pada langkah ini pengawas sekolah mampu membuat keputusan alat ukur mana yang akan digunakan untuk melakukan tinjauan apakah agenda kegiatan pembaharuan yang sudah disepakati sesuai dengan SOP yang berlaku.

F. Implementasi six sigma dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP)

Peningkatan mutu pendidikan mampu dicapai salah satunya melalui organisasi sekolah. Organisasi sekolah mempunyai target ketercapaiannya yaitu dengan mampu meningkatkan mutu sekolah yang salah satunya untuk mencetak lulusan yang memiliki potensi yang baik saat menghadapi lingkungan masyarakat diluar lingkungan sekolah. Untuk menggapai tujuan tersebut lembaga pendidikan wajib bertolak ukur pada standar nasional pendidikan yang sudah pemerintah tetapkan. Tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 meneguhkan bahwa standar nasional pendidikan ialah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar tersebut meliputi standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, standar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan (Sugiono et al., 2021).

Penerapan metode six sigma pada peningkatan organisasi dilembaga pendidikan ialah *pertama*, sekolah melakukan rancangan dalam proses mengelola kegiatan pembelajaran beserta mencoba mengelola pembelajaran yang sesuai dengan SNP. *Kedua*, lembaga pendidikan menciptakan hasil kelulusan yang memiliki penguasaan yang mencakup kognitif, afektif, dan psikomotorik yang telah dipelajari di lembaga pendidikan. *Ketiga*, lembaga pendidikan mampu memformulasikan kurikulum yang tertuang dalam silabus yang meliputi ruang lingkup, tujuan, beserta metode yang kemudian mampu mengimplementasikan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.

Keempat, lembaga pendidikan menerapkan mekanisme pembelajaran selaras dengan kaidah dan standar dan melakukan monitoring selama berlangsungnya pembelajaran. *Kelima*, lembaga pendidikan menetapkan dalam

faktor penilaian harus secara adil atau netral dan sesuai dengan kebijakan dan instrument penilaian kemudian memberitahakan hasil penilaiannya kepada pimpinan lembaga pendidikan.

Keenam, lembaga pendidikan memiliki limitasi kompetensi dan *vak* kependidikan dan bertenaga kependidikan dan juga lembaga pendidikan dapat melakukan evaluasi terhadap staf kependidikan. *Ketujuh*, lembaga pendidikan membentuk Rencana Kerja Sekolah dengan singkatan (RKS) dalam jangka waktu 4 tahun atau dengan jangka panjang, kemudian Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang mana agenda ini digunakan dalam kurun waktu sementara atau untuk satu tahun kedepan, selain itu lembaga pendidikan juga membentuk Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) (Sugiono et al., 2021).

Selain itu terdapat beberapa tahapan kepala sekolah dalam merealisasikan keefektifan dan mengembangkan sistem manajemen mutu pengelolaan pendidikan sebagai berikut ini: a) melakukan konfirmasi akan ketersediaan sumber daya manusia dan fasilitas, kemudian informasi yang diperlukan untuk mendorong dalam implementasi dan pengawasan dalam proses tersebut, b) melakukan identifikasi pada proses yang dibutuhkan untuk mendukung sistem manajemen mutu dan implementasinya, c) melakukan penentuan tahapan dan korelasi dengan proses tersebut, d) menetapkan standarisasi dan cara yang digunakan dalam meyakinkan guna aktivitas implementasi dan inspeksi terhadap proses akan berlangsung secara efektif, e) melakukan monitoring, mengukur, dan melakukan analisa terhadap proses tersebut, f) mampu menentukan keputusan yang diperlukan guna mampu mendapatkan hasil yang telah dirancang dan mendapatkan peningkatan secara berlekanjutan terhadap proses tersebut(Prasojo, 2020).

KESIMPULAN

Six sigma dicetuskan oleh teknisi Motorola yang berasal dari amerika, mereka menciptakan konsep ini, karena mereka kehilangan market Motorola. Karena perusahaan yang berada di amerika dan Jepang memiliki perbandingan kualitas. Model sistem manajemen six sigma lazim diterapkan pada dunia perbisnisan untuk menghitung proses yang tujuannya mencapai kata *perfect*. Pada dunia pendidikan saat ini, secara global belum mengetahui tentang istilah manajemen six sigma yang berkaitan dengan manajemen kualitas. Model yang saat ini populer diterapkan Indonesia yaitu sistem manajemen kualitas total (TQM). Semakin meningkatnya sikap peduli akan stakeholder dalam mutu pendidikan. Dengan begitu mampu menciptakan kepuasan pada pelanggan. Konsep six sigma yang penulis gunakan menerapkan metodologi DMAIC (*define, measure, analyze, improve, control*).

Implementasi six sigma pada lembaga pendidikan berbeda dalam menerapkan pada industri manufaktur sehingga perlu beberapa penyesuaian. Unsur yang berkaitan secara langsung dengan proses pendidikan disekolah yaitu pengawas sekolah, kepala sekolah, dan guru. Dari unsur tersebut mampu menerapkan six sigma dalam proses peningkatan mutu pendidikan, mampu

mengatasi atau mengurangi permasalahan yang ada. Penerapan six sigma dalam meningkatkan organisasi di lembaga pendidikan. a) sekolah melakukan

SARAN

1. Pendekatan Six Sigma sebaiknya diterapkan secara bertahap sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lembaga pendidikan. Penyesuaian terhadap budaya organisasi, sumber daya manusia, serta visi-misi lembaga menjadi kunci keberhasilan implementasi.
2. Untuk memastikan keberhasilan pendekatan Six Sigma, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan perlu mendapatkan pelatihan terkait prinsip-prinsip dasar Six Sigma, termasuk metode DMAIC dan pentingnya data dalam pengambilan keputusan.
3. Dalam konteks pendidikan Islam, pendekatan Six Sigma perlu diselaraskan dengan nilai-nilai Islam, seperti kejujuran, tanggung jawab, kerja keras, dan ikhlas. Ini penting agar perbaikan mutu tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh aspek spiritual dan moral.
4. Lembaga pendidikan disarankan untuk membangun sistem evaluasi yang kuat dan berbasis data guna memantau efektivitas setiap proses, serta menindaklanjuti temuan-temuan secara cepat dan terstruktur.
5. Institusi pendidikan dapat menjalin kerja sama dengan lembaga lain yang telah sukses menerapkan Six Sigma sebagai bentuk benchmarking dan pembelajaran bersama demi peningkatan mutu yang lebih signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, F. (2019). *Six Sigma Dmaic Sebagai Metode Pengendalian Kualitas Produk Kursi Pada Ukm*. *JISI : Jurnal Integrasi Sistem Industri* , 6(1). <https://doi.org/10.24853/jisi.6.1.11-17>
- Bafadal, I. (2003). *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar: Dari Sentralisasi Menuju Desentralisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Caldwell, B. J., & Spinks, J. M. (1992). *Leading the Self-Managing School*. London: Falmer Press.
- Coskun, A. (2010). *Quality Management and Six Sigma* (Z. Debeljuh, Ed.; 1st ed., Vol.(1). *Sciyo*. <https://doi.org/10.5772/271>
- Depdiknas. (2005). *Panduan Penjaminan Mutu Pendidikan*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Deming, W. Edwards. (1986). *Out of the Crisis*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Garvin, D. A. (1987). *Competing on the Eight Dimensions of Quality*. *Harvard Business Review*.
- Gaspersz, V. (2002). *Pedoman Implementasi Program Six Sigma Terintegritas dengan ISO 9001:2000, MBNQA dan HACCP*. Gramedia.
- Handini, M. C., Riska, N., & Amaningsih, A. (2018). *Penerapan Metoda Servqual dan Six Sigma Dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan*. <https://www.researchgate.net/publication/352358342>
- Juran, J. M. (1988). *Juran on Planning for Quality*. New York: Free Press.
- Oakland, J. S. (2003). *Total Quality Management: Text with Cases*. Oxford: Butterworth-Heinemann.

- Rochmat, S. (2015). *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas Sekolah*. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 10(1), 23-35.
- Rosenberg, M. J. (2001). *E-Learning: Strategies for Delivering Knowledge in the Digital Age*. New York: McGraw-Hill.
- Sarman. Soediantono, D. (2022). *Literature Review of Lean Six Sigma (LSS) Implementation and Recommendations for Implementation in the Defense Industries*. *Journal of Industrial Engineering & Management Research*, 3(2), 2722– 8878. <http://www.jiemar.org>
- Sugiono, S. R. F., Yaqin, M. A., Evanandy, A., Condrokirono, J. G., & Fauzan, Abd. C. (2021). *Implementasi Six Sigma pada Organisasi Sekolah Menggunakan Pendekatan Define, Measure, Analyze, Improve, Control (DMAIC)*. *ILKOMNIKA: Journal of Computer Science and Applied Informatics*, 3(1), 139–150. <https://doi.org/10.28926/ilkomnika.v3i1.172>
- Syukron, A., & Kholil, M. (2013). *Six Sigma Quality for Business Improvement (1st ed.)*. Graha Ilmu.
- Tijow, M. A., & Supramono. (2015). *Implementasi Pendekatan Lean Six Sigma untuk Peningkatan Mutu Lulusan (Studi Pada PPS. MMPUKSW Salatiga)*. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 2(1), 72–85.
- Utari, R., & Wijayanti, W. (2017). *Perbaikan Manajemen Sekolah Melalui Lean Six Sigma*. 127–138.

PRINSIP PENGENDALIAN MUTU PENDIDIKAN

Eka Karmila, 24052170023 & Desy Utari, 24052170013

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengendalian mutu pendidikan merupakan upaya sistematis dan terencana untuk memastikan bahwa proses dan hasil pendidikan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Dalam era globalisasi, pendidikan yang berkualitas menjadi salah satu faktor kunci dalam pembangunan manusia dan ekonomi suatu negara. Adanya variasi mutu pendidikan di berbagai sekolah dan daerah mengharuskan adanya standar yang konsisten dan evaluasi yang berkelanjutan.

Peningkatan mutu pendidikan merupakan sasaran pembangunan di bidang pendidikan nasional dan merupakan bagian integral dari upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia yang kaffah (menyeluruh). Kondisi pergulatan global yang mendunia, pendidikan nasional saat ini dihadapkan pada permasalahan hubungan yang tidak linier antara pendidikan dan dunia kerja. Perkembangan dunia kerja tidak terkejar oleh dunia pendidikan. Salah satu komponen keberhasilan dalam dunia pendidikan adalah adanya tenaga pengajar yang disebut dengan guru. Guru merupakan salah satu orang yang melakukan perintah Allah amar ma'ruf nahi munkar. sebagaimana disebut dalam surah Al-Imran 104 3 , disamping itu juga guru sebagai pemegang amanah, Sebagai pemegang amanat, guru bertanggung jawab atas amanah yang diserahkan kepadanya. Allah SWT menjelaskan dalam surah An-Nisa 58:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.

Standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru telah dijelaskan berbagai kompetensi guru sesuai bidang mata pelajarannya masing-masing untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan 4 .Empat komponen penting dalam pendidikan yang saling terkait satu sama lain yaitu: a) kurikulum , yaitu materi yang akan diajarkan, b) proses yaitu bagaimana materi diajarkan, c) fasilitas yaitu berkaitan dengan sarana dan prasarana pendukung, d) produk yaitu hasil dari proses pendidikan).

Semua aspek ini sama pentingnya karena merupakan satu kesatuan yang membentuk lingkungan pendidikan. Pembangunan pendidikan bukan hanya terfokus pada penyediaan faktor input pendidikan tetapi juga harus lebih memperhatikan proses pendidikan. Input pendidikan merupakan hal yang mutlak harus ada dalam batas-batas tertentu tetapi tidak menjadi jaminan dapat secara otomatis meningkatkan mutu pendidikan (school resources are necessary but not sufficient condition to improve student achievement).

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, tuntutan terhadap pendidikan yang lebih baik semakin meningkat. Pengendalian mutu pendidikan tidak hanya bertujuan untuk menjaga standar, tetapi juga untuk meningkatkan kinerja lembaga pendidikan melalui penilaian, perbaikan, dan pengembangan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penting untuk memahami prinsip-prinsip dasar pengendalian mutu pendidikan, sehingga dapat diterapkan secara efektif dalam lingkungan pendidikan.

B. Rumusan Masalah

Berikut adalah beberapa rumusan masalah yang dapat digunakan untuk makalah tentang prinsip pengendalian mutu pendidikan:

1. Apa Pengertian Pengendalian Mutu Pendidikan?
2. Bagaimana implementasi prinsip-prinsip pengendalian mutu pendidikan di berbagai jenjang pendidikan di Indonesia?
3. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapan pengendalian mutu pendidikan di berbagai daerah?
4. Bagaimana strategi yang efektif untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui pengendalian mutu yang berkelanjutan?
5. Bagaimana cara mengukur dan mengevaluasi keberhasilan pengendalian mutu pendidikan di berbagai lembaga pendidikan?

C. Methodologi

Berikut adalah contoh metodologi untuk makalah tentang prinsip pengendalian mutu pendidikan:

Metodologi Penelitian:

1. Pendekatan Penelitian: Makalah ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami dan menganalisis prinsip-prinsip pengendalian mutu pendidikan.

2. Sumber Data:
 - Data Primer: Wawancara dengan para pendidik, kepala sekolah, dan pengawas pendidikan di berbagai jenjang pendidikan.
 - Data Sekunder: Studi literatur dari jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan terkait pengendalian mutu pendidikan.
3. Teknik Pengumpulan Data:
 - Wawancara: Melakukan wawancara semi-terstruktur dengan narasumber untuk mendapatkan pandangan dan pengalaman mereka tentang pengendalian mutu pendidikan.
 - Observasi: Mengamati praktik pengendalian mutu di berbagai lembaga pendidikan.
 - Studi Dokumentasi: Menganalisis dokumen kebijakan, laporan evaluasi, dan hasil penelitian sebelumnya terkait dengan pengendalian mutu pendidikan.
4. Teknik Analisis Data:
 - Analisis Konten: Menganalisis data wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan pengendalian mutu pendidikan.
 - Analisis Deskriptif: Menyajikan data dalam bentuk deskriptif untuk memberikan gambaran yang jelas tentang prinsip dan praktik pengendalian mutu pendidikan.
5. Teknik Analisis Data:
 - Analisis Konten: Menganalisis data wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan pengendalian mutu pendidikan.
 - Analisis Deskriptif: Menyajikan data dalam bentuk deskriptif untuk memberikan gambaran yang jelas tentang prinsip dan praktik pengendalian mutu pendidikan.
6. Validitas dan Reliabilitas:
 - Triangulasi: Menggunakan berbagai sumber data dan teknik pengumpulan data untuk memastikan keakuratan dan konsistensi temuan.
 - Kredibilitas: Memastikan keabsahan data melalui pemeriksaan silang dengan narasumber dan validasi hasil penelitian oleh para ahli di bidang pendidikan.

Dengan metodologi ini, diharapkan makalah dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang prinsip pengendalian mutu pendidikan dan rekomendasi untuk meningkatkan mutu pendidikan di berbagai lembaga pendidikan.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Pengendalian Mutu Pendidikan

Quality Assurance (QA) adalah proses penentuan dan Pengendalian mutu atau pemenuhan syarat mutu pengelolaan pendidikan secara istiqamah dan berkelanjutan sehingga para stakeholders dan pihak lain yang berkepentingan mendapatkan manfaat (Aspranawa, 2015). Pengendalian mutu Quality Assurance (QA) digunakan untuk menetapkan syarat-syarat mutu dari semua elemen yang bekerja dalam organisasi atau transformasi alumni yang meliputi pendekatan pembelajaran aktif, kolaboratif, kooperatif, konstruktif dan tuntas.

Penjaminan dan pengendalian mutu adalah berhubungan dengan proses yang saling dan memerlukan data tentang kinerja dan mutu tenaga pendidik, program

lembaga pendidikan. Pengendalian mutu mengarah pada peningkatan mutu. Proses pengendalian mutu mencakup bidang yang akan dicapai beserta prioritas pengembangan, menyajikan data perencanaan yang didasarkan pada bukti serta pengambilan keputusan, dan mendukung budaya peningkatan yang berkelanjutan.

Mutu hasil pendidikan di tingkat pendidikan dasar dan menengah di Indonesia dinilai berdasarkan delapan standar pendidikan nasional BSNP. SPPMP untuk pendidikan dasar dan menengah mencakup: (a) penilaian mutu pendidikan, (b) analisis dan pelaporan mutu pendidikan dan (c) peningkatan mutu pendidikan. Maksud dari Penjaminan dan pengendalian adalah meningkatkan mutu, validitas data dan penggunaan data tentang penjaminan mutu untuk memastikan bahwa: (a) pengumpulan data cukup dilakukan sekali saja, (b) informasi dan data yang terkumpul valid, (c) data yang di kumpulkan dapat dipakai untuk penjaminan mutu, dalam peningkatan mutu, (d) data yang telah dianalisis dapat digunakan untuk tujuan pengembangan kebijakan, alokasi sumber daya, perencanaan dan peningkatan mutu.

Adapun berikut teori-teori mengenai pengendalian mutu pendidikan :

1. Teori Total Quality Management (TQM):

TQM adalah pendekatan manajemen yang berfokus pada peningkatan kualitas di seluruh aspek organisasi melalui partisipasi semua anggotanya. Dalam konteks pendidikan, TQM melibatkan perbaikan berkelanjutan dalam proses pembelajaran, penilaian, dan manajemen sekolah untuk mencapai kepuasan stakeholder (siswa, orang tua, guru, dan masyarakat).

2. Teori Continuous Improvement (Kaizen):

Prinsip Kaizen berasal dari Jepang dan berarti "perbaikan berkelanjutan". Dalam pendidikan, prinsip ini diterapkan dengan melakukan evaluasi rutin dan upaya peningkatan terus-menerus terhadap metode pengajaran, kurikulum, dan fasilitas pendidikan.

3. Teori Quality Assurance (QA):

Quality Assurance adalah proses sistematis untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa standar pendidikan yang ditetapkan telah dipenuhi. QA melibatkan pemantauan, penilaian, dan akreditasi lembaga pendidikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan.

4. Teori Sistem:

Pendekatan sistem memandang sekolah sebagai sebuah sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berinteraksi (siswa, guru, kurikulum, fasilitas, dll.). Prinsip pengendalian mutu dalam pendekatan ini melibatkan koordinasi dan sinergi antara semua komponen untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan.

5. Teori Pembelajaran dan Motivasi:

Teori ini menyoroti pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan memotivasi siswa untuk mencapai prestasi yang tinggi. Pengendalian mutu pendidikan juga berkaitan dengan memastikan metode pengajaran yang efektif dan relevan untuk kebutuhan siswa.

6. Teori Evaluasi Program:

Evaluasi program adalah proses sistematis untuk menilai efektivitas program pendidikan. Prinsip pengendalian mutu dalam evaluasi program melibatkan pengumpulan dan analisis data untuk menentukan apakah tujuan program telah tercapai dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.

Prinsip dasar mutu pendidikan harus bertumpu pada gagasan yang dialogis nilai ketuhanan dan rasionalitas. Dengan kata lain bahwa terdapat kesesuaian antara pengalaman empiris yang terdiri atas fakta atau informasi dengan nilai Ilahiyah untuk diolah menjadi teori yang valid yang menjadi tempat berpijaknya suatu ilmu pengetahuan yang ilmiah. Bila kata "mutu" disatukan dengan kata "pendidikan" dalam sebuah variabel, maka yang dimaksud adalah kualitas pendidikan adalah kadar prestasi yang diraih oleh peserta didik melalui proses pembelajaran, atau tingkat kecakapan kognitif, afektif, dan psikomotorik pada peserta didik. Keberhasilan mutu pendidikan di perlukan adanya dukungan dari manajer puncak akan melakukan dukungan untuk perubahan yang di anggap perlu dalam melaksanakan strategi pencapaian mutu pendidikan.

Pendidikan merupakan sebuah penanaman moral manusia untuk masa depan dengan membekali generasi muda akhlak mulia dan kemampuan yang memadai agar mencapai kesejahteraan. Al-Qur'an telah memerintahkan kepada manusia agar meningkatkan kualitas dan waspada terhadap keturunan yang lemah, Allah swt. berfirman dalam QS al-Nisa' /4: 9:

وَالَّذِينَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ٩

Terjemahnya: "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar".

Ayat tersebut di atas, menunjukkan bahwa sasaran untuk membangun manusia seutuhnya yang meliputi segala bidang kehidupan bangsa termasuk keagamaan dan pendidikan, karena pendidikan sebagai proses pembentukan akhlak yang esensial dalam kehidupan manusia, yang lazimnya dimiliki dalam diri setiap umat Islam. Pendidikan diakui sebagai suatu investasi sumber daya manusia, karena pendidikan memberikan roh terhadap pembangunan sosial ekonomi melalui cara meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kecakapan sikap, produktivitas dan kualitas sumber daya manusia.

B. Prinsip Pengendalian Mutu Pendidikan

Pengendalian mutu pendidikan di berbagai jenjang pendidikan di Indonesia dilakukan melalui berbagai mekanisme seperti akreditasi sekolah, evaluasi kinerja guru, dan penilaian hasil belajar siswa. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) juga menerapkan program-program peningkatan mutu pendidikan seperti Sekolah Penggerak dan Guru Penggerak yang bertujuan untuk meningkatkan

kompetensi dan kualitas pengajaran.

Dalam Sistem Pengendalian Mutu Pendidikan beberapa hal menjadi prinsip dasar yang harus dipahami oleh semua unsur sehingga proses pengendalian mutu akan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, adapun Prinsip Pengendalian Mutu pendidikan yaitu :

Fokus pada Peserta Didik: Pengendalian mutu harus berfokus pada kebutuhan dan kepentingan peserta didik.

1. Standar Mutu: Menetapkan standar mutu yang jelas dan dapat diukur untuk semua aspek pendidikan.
2. Pengukuran dan Evaluasi: Melakukan pengukuran dan evaluasi secara teratur untuk memantau kualitas pendidikan.
3. Pengembangan dan Peningkatan: Melakukan pengembangan dan peningkatan secara terus-menerus untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
4. Partisipasi dan Kolaborasi: Melibatkan semua pihak yang terkait, termasuk guru, siswa, orang tua, dan masyarakat, dalam proses pengendalian mutu.
5. Transparansi dan Akuntabilitas: Menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam semua aspek pendidikan.
6. Penggunaan Teknologi: Menggunakan teknologi untuk mendukung proses pengendalian mutu.

Dalam menjaga mutu perlu banyak keterlibatan dari semua unsur karena bila kita sudah mendapat akreditasi yang tinggi tantangannya adalah bagaimana agar tetap berada pada posisi yang sama tidak turun karena akan mempengaruhi harapan pelanggan baik internal terutama eksternal terhadap satuan pendidikan tertentu. Hal inilah mengapa sangat penting mengacu pada prinsip-prinsip penjaminan mutu agar selalu berkesinambungan antara berbagai aspek baik sumber daya manusia, sarana prasarana, kurikulum hingga pada keluaran serta aspek pembiayaan. Banyak dijumpai kasus-kasus di lapangan terutama pada tahap sosialisasi terhadap sistem penjaminan mutu masih terdapat para pendidik maupun tenaga kependidikan yang belum begitu memahami konsep penjaminan mutu sehingga di lapangan pada proses pelaksanaannya banyak terjadi tumpang tindih dan kesalah pahaman yang dapat berakibat tidak maksimalnya hasil yang dicapai dan diharapkan sesuai tujuan setiap satuan pendidikan. Untuk itu adapun. Langkah-langkah Pengendalian Mutu, sebagai berikut.

1. Identifikasi Kebutuhan: Mengidentifikasi kebutuhan dan kepentingan peserta didik.
2. Pengembangan Standar Mutu: Mengembangkan standar mutu yang jelas dan dapat diukur.
3. Pengukuran dan Evaluasi: Melakukan pengukuran dan evaluasi secara teratur.
4. Analisis dan Tindakan: Menganalisis hasil pengukuran dan evaluasi, dan melakukan tindakan perbaikan.
5. Pengembangan dan Peningkatan: Melakukan pengembangan dan peningkatan secara terus-menerus.

C. Tantangan dalam Penerapan Pengendalian Mutu

Tantangan dalam penerapan pengendalian mutu pendidikan sering kali dimulai dengan ketidaksesuaian antara standar yang ditetapkan dan kondisi nyata di lapangan. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam penerapan pengendalian mutu

pendidikan meliputi keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran, tenaga pengajar yang kompeten, maupun fasilitas pendidikan. Selain itu, terdapat juga tantangan dalam hal kesenjangan mutu pendidikan antar daerah, yang disebabkan oleh perbedaan akses terhadap sumber daya dan layanan pendidikan. Meskipun kurikulum dan standar pendidikan telah ditetapkan oleh otoritas terkait, implementasinya di berbagai lembaga pendidikan sering kali bervariasi. Faktor-faktor seperti kurangnya sumber daya, baik dari segi fasilitas maupun kualitas pengajaran, dapat mempengaruhi sejauh mana standar mutu pendidikan dapat tercapai. Ketidakseimbangan ini menyebabkan perbedaan kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa di berbagai wilayah atau sekolah, yang pada akhirnya berdampak pada pemerataan pendidikan yang diinginkan.

Selain itu, tantangan lain terletak pada pengukuran dan penilaian mutu pendidikan itu sendiri. Pengendalian mutu pendidikan sering kali berfokus pada hasil akademik siswa, seperti ujian dan nilai, namun hal ini tidak selalu mencerminkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Penilaian yang terlalu fokus pada angka atau hasil ujian bisa mengabaikan aspek lain dari pendidikan yang sama pentingnya, seperti pengembangan karakter, keterampilan sosial, dan kemampuan berpikir kritis. Kurangnya indikator yang lebih holistik untuk mengukur mutu pendidikan ini menjadi hambatan dalam menerapkan sistem pengendalian mutu yang lebih lengkap dan efektif.

Tantangan terakhir adalah keterbatasan dalam pengembangan kapasitas tenaga pendidik. Guru merupakan elemen kunci dalam pengendalian mutu pendidikan, namun banyak sekolah yang menghadapi kesulitan dalam menyediakan pelatihan berkelanjutan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Banyak guru yang belum mendapatkan pelatihan atau pembinaan yang memadai untuk mengadaptasi metode pengajaran terbaru atau menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran. Tanpa peningkatan kompetensi yang berkelanjutan, sulit untuk memastikan bahwa pengendalian mutu pendidikan dapat terwujud secara optimal, karena kualitas pengajaran yang baik sangat bergantung pada kualifikasi dan keterampilan guru.

D. Strategi Efektif untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan

Dalam meningkatkan mutu pendidikan banyak strategi yang bisa dilakukan seperti menggunakan Teknologi. Teknologi memainkan peran penting dalam pengendalian mutu pendidikan melalui pengembangan platform belajar daring, sistem informasi manajemen pendidikan, dan alat evaluasi berbasis teknologi. Teknologi juga memungkinkan pembelajaran jarak jauh, yang memberikan akses pendidikan kepada siswa di daerah terpencil. Adapun Strategi efektif untuk meningkatkan mutu pendidikan meliputi:

1. Peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan dan sertifikasi.
2. Pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.
3. Penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai.
4. Peningkatan partisipasi orang tua dan masyarakat dalam proses pendidikan.
5. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan.

Selain itu Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung pengendalian mutu pendidikan, seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Program Indonesia Pintar. Kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh Indonesia.

E. Pengukuran dan Evaluasi Keberhasilan Pengendalian Mutu

Pengukuran dan evaluasi keberhasilan pengendalian mutu pendidikan dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai indikator yang mencakup aspek akademik maupun non-akademik. Secara umum, hasil ujian dan nilai akademik sering digunakan untuk menilai pencapaian siswa terhadap standar kurikulum yang telah ditetapkan. Agar pengukuran dapat sesuai dengan standar keberhasilan pengendalian mutu maka perlu di perhatikan aspek pengendalian mutu pendidikan sebagai berikut :

1. Kurikulum: Memastikan bahwa kurikulum yang digunakan relevan, mutakhir, dan sesuai dengan kebutuhan siswa.
2. Proses Pembelajaran: Memantau dan mengevaluasi proses pembelajaran untuk memastikan bahwa siswa mendapatkan pengalaman belajar yang efektif.
3. Guru dan Staf: Memastikan bahwa guru dan staf memiliki kualifikasi, kemampuan, dan pengalaman yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran.
4. Sarana dan Prasarana: Memastikan bahwa sarana dan prasarana yang tersedia memadai dan mendukung proses pembelajaran.
5. Evaluasi dan Penilaian: Melakukan evaluasi dan penilaian secara teratur untuk memantau kemajuan siswa dan meningkatkan kualitas pendidikan.
6. Keterlibatan Orang Tua dan Masyarakat: Meningkatkan keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam proses pendidikan untuk memastikan bahwa kebutuhan siswa terpenuhi.

Namun, untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif, evaluasi juga harus mencakup aspek lain seperti perkembangan keterampilan sosial, sikap, dan kreativitas siswa. Penggunaan survei kepuasan siswa, orang tua, serta pengamatan langsung terhadap proses pembelajaran juga dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai efektivitas pengendalian mutu yang diterapkan. Adapun Manfaat Pengendalian Mutu sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan: Pengendalian mutu dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan.
2. Meningkatkan Kepercayaan: Pengendalian mutu dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan.
3. Meningkatkan Efisiensi: Pengendalian mutu dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya.

Selain itu, evaluasi keberhasilan pengendalian mutu pendidikan juga memerlukan penilaian terhadap pengembangan dan kinerja tenaga pendidik. Hal ini dapat dilakukan melalui penilaian terhadap keterampilan pengajaran, kemampuan beradaptasi dengan teknologi pembelajaran, serta tingkat partisipasi mereka dalam pelatihan atau program peningkatan kompetensi. Feedback dari rekan sejawat dan atasan juga penting untuk mengetahui sejauh mana guru menerapkan metode pengajaran yang sesuai dengan standar mutu. Dengan demikian, evaluasi

pengendalian mutu pendidikan tidak hanya terfokus pada hasil akademik, tetapi juga pada kualitas proses pendidikan secara menyeluruh.

KESIMPULAN

Pengendalian mutu pendidikan adalah proses sistematis untuk memantau, mengevaluasi, dan meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam pengendalian mutu pendidikan:

Dalam Sistem Pengendalian Mutu Pendidikan beberapa hal menjadi prinsip dasar yang harus dipahami oleh semua unsur sehingga proses pengendalian mutu akan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, yaitu diantaranya adalah: prinsip berkelanjutan, prinsip terencana/ sistematis dan prinsip keterbukaan

Secara keseluruhan, penerapan prinsip-prinsip pengendalian mutu pendidikan yang komprehensif dan berkelanjutan dapat membawa perubahan positif dalam sistem pendidikan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi siswa, guru, dan masyarakat. Dengan komitmen semua pihak, mutu pendidikan di Indonesia dapat terus ditingkatkan dan mampu bersaing secara global.

SARAN

Setelah kita mempelajari dan memahami makalah tentang Prinsip Pengendalian Mutu Pendidikan. Semoga dapat menambah wawasan dan semoga makalah ini bermanfaat bagi pembaca dan pendengar. Walaupun terdapat kekurangan pada makalah ini kritik dan saran serta masukan sangat kami harapkan demi menuju ke arah yang lebih baik dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulhak, Ishak dan Ugi Prayogi. (2012). Penelitian tindakan dalam pendidikan nonformal.

Jakarta: Rajawali Pers.

Bungin, M. B. (2008). Penelitian kualitatif. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Creswell, J. W. (2008). Educational research, planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (3rd ed.). New Jersey: Pearson Education.

Depdiknas. (2003). Undang-undang sistem pendidikan nasional No 20 tahun 2003.

Direktorat Pendidikan Kesetaraan Depdiknas. (2006). Acuan proses pelaksanaan dan pembelajaran pendidikan kesetaraan program Paket A, Paket B dan Paket C.

Jakarta:

Departemen Pendidikan Nasional.

Fatah. (2009). Landasan manajemen pendidikan. Bandung: Remaja Rokhsadaya.

Handoko, T. Hani. (2003). Manajemen (Cetakan ke-18). Yogyakarta: BPFE.

Hoy, C., Jardine, C. B., & Wood, M. (2005). Improving quality in education. London and New

York: Falmer Press.

Sallis, E. (2005). Total quality management in education. London: Kogan Page Limited

MANAJEMEN MUTU DAN TOKOH PENDIDIKAN ISLAM DAN BARAT

Aina Warga Agissa, 24052170027 & Maskin, 24052170041

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena pendidikan merupakan proses pembentukan karakter dan kompetensi individu. Dalam dunia pendidikan, manajemen mutu berperan besar dalam menciptakan sistem yang efektif dan efisien, yang dapat menghasilkan kualitas pendidikan yang optimal. Manajemen mutu dalam pendidikan memfokuskan pada penerapan standar kualitas dalam seluruh elemen pendidikan, mulai dari kurikulum, metode pengajaran, hingga evaluasi terhadap proses pembelajaran itu sendiri¹.

Sementara itu, dalam proses pembentukan pendidikan, berbagai tokoh dari tradisi yang berbeda, baik Islam maupun Barat, telah memberikan kontribusi besar dalam pembentukan sistem pendidikan yang berkembang hingga saat ini. Pemikiran mereka terkait pendidikan bukan hanya berfokus pada aspek intelektual, namun juga mencakup pembentukan karakter dan moral peserta didik. Dalam makalah ini, akan dibahas secara mendalam mengenai konsep manajemen mutu dalam pendidikan serta perbandingan pemikiran tokoh pendidikan Islam dan Barat yang memberikan pengaruh signifikan terhadap perkembangan sistem pendidikan². Dalam suatu proses pendidikan agar hasilnya mampu untuk menciptakan daya saing global, maka para pengelola pendidikan selayaknya harus melakukan penyempurnaan di dalam internal organisasinya baik yang berkenaan dengan keadaan sumber daya manusia yang harus selalu dilakukan peningkatan-peningkatan kinerja dan pengetahuannya, program-program pembelajaran, fasilitas (sarana dan prasarana) pembelajaran, dan keuangan yang mampu untuk memfasilitasi persaingan global. Berdasarkan hal tersebut, setiap pengelola pendidikan perlu memperhatikan dan menempatkan mutu sebagai alat untuk memperoleh manfaat terhadap persaingan global yang dapat memperbaiki dan menyempurnakan kegiatan pendidikan.³

Makalah ini akan membahas secara mendalam mengenai manajemen mutu dalam pendidikan serta perbandingan pemikiran tokoh pendidikan Islam dan Barat dalam membentuk sistem pendidikan yang berkualitas. Pembahasan ini bertujuan untuk menggali bagaimana pendekatan manajemen mutu yang diterapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan daya saing, serta bagaimana pemikiran tokoh-tokoh pendidikan dari dua tradisi tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan pendidikan yang holistik dan berkualitas.

B. Rumusan Masalah

Fokus permasalahan yang akan diungkapkan dalam makalah ini adalah sebagai berikut:

¹ Kuntoro, Alfian Tri. "Manajemen mutu pendidikan Islam." *Jurnal Kependidikan* 7.1 (2019): 84-97.

² Duryat, *Paradigma Pendidikan Islam* (2021).

³ Kurniady, *Standar Sistem Mutu* (2011).

1. Bagaimana konsep manajemen mutu dalam pendidikan yang dapat meningkatkan kualitas dan daya saing pendidikan?
2. Apa saja prinsip-prinsip manajemen mutu yang dapat diterapkan dalam sistem pendidikan di Indonesia?
3. Bagaimana kontribusi tokoh-tokoh pendidikan Islam dan Barat dalam perkembangan sistem pendidikan?
4. Apa perbedaan dan persamaan pemikiran tokoh pendidikan Islam dan Barat dalam konteks manajemen mutu pendidikan?
5. Bagaimana pengaruh pemikiran tokoh-tokoh pendidikan Islam dan Barat terhadap implementasi manajemen mutu dalam dunia pendidikan modern?

C. Tujuan Makalah

Makalah ini disusun dengan tujuan untuk:

1. Menjelaskan konsep dan penerapan manajemen mutu dalam pendidikan yang dapat meningkatkan kualitas dan daya saing sistem pendidikan.
2. Menganalisis prinsip-prinsip manajemen mutu yang dapat diterapkan dalam konteks pendidikan Indonesia.
3. Mengidentifikasi kontribusi tokoh-tokoh pendidikan Islam dan Barat dalam pengembangan teori dan praktik pendidikan yang berkualitas.
4. Membandingkan pemikiran tokoh-tokoh pendidikan Islam dan Barat dalam hal penerapan manajemen mutu pendidikan, serta implikasinya terhadap sistem pendidikan global.
5. Menggali peran manajemen mutu pendidikan dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan tuntutan zaman.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Manajemen Mutu

Manajemen adalah bentuk kata derivasi dari dabbara (mengatur) yang banyak terdapat dalam alQur'an yang pengertian sama dengan hakikat manajemen adalah al-tadbir (pengaturan), dalam surat as-Sajdah ayat 5, manajemen dideskripsikan sebagai suatu kegiatan atau melakukan pekerjaan harus terencana, terukur dan terarah, hal ini mengindikasikan bahwa sesuatu yang akan dikerjakan haruslah terprogram:

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ
أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿٥﴾

Artinya :

Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu” (QS. As-Sajdah [32]:5)

Manajemen mutu adalah konsep yang telah menjadi perbincangan utama di berbagai kalangan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Berbagai inisiatif dan pendekatan telah muncul sebagai bentuk komitmen dalam perbaikan mutu

pendidikan, seperti manajemen mutu terpadu, jaminan mutu pendidikan, gugus kendali mutu, serta manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah. Berkembangnya berbagai konsep ini menggambarkan adanya perhatian serius dalam upaya mencapai standar mutu pendidikan yang lebih baik⁴. Mutu merujuk pada tingkat keunggulan suatu produk atau hasil kerja, baik itu barang maupun jasa, yang meliputi aspek yang tampak (tangible) maupun yang tidak tampak (intangible). Dalam dunia pendidikan, mutu mencakup baik proses pembelajaran maupun hasil yang dicapai. Proses pendidikan yang berkualitas melibatkan berbagai elemen penting, seperti bahan ajar yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor, metode pengajaran yang disesuaikan dengan kemampuan guru, serta dukungan dari sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu, penciptaan lingkungan yang kondusif juga berperan penting dalam mencapai pendidikan yang bermutu.⁵

B. Konsep Manajemen Mutu dalam Pendidikan

Manajemen mutu dalam pendidikan adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan dengan fokus pada pencapaian hasil yang lebih baik dalam pembelajaran. Konsep ini tidak hanya melibatkan standar akademik yang tinggi, namun juga meliputi aspek sosial dan moral yang penting dalam pengembangan peserta didik.⁶ Terdapat beberapa elemen penting dalam manajemen mutu pendidikan, di antaranya adalah:

- a) **Perencanaan Kurikulum yang Efektif** Kurikulum merupakan landasan utama dalam pembelajaran. Sebuah kurikulum yang baik harus dapat mencakup berbagai aspek pengetahuan, keterampilan, dan nilai yang perlu dipelajari oleh peserta didik. Kurikulum yang berorientasi pada pengembangan potensi individu harus mampu merespons perubahan zaman, tantangan global, serta kebutuhan masyarakat.
- b) **Proses Pembelajaran yang Berkualitas** Manajemen mutu pendidikan memandang bahwa pembelajaran harus dilakukan dengan pendekatan yang memadai dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembelajaran yang efektif tidak hanya mengandalkan pengajaran konvensional, namun juga melibatkan penggunaan metode inovatif yang dapat mendorong partisipasi aktif dari siswa.
- c) **Evaluasi Berkelanjutan** Evaluasi berperan penting dalam memastikan kualitas pendidikan yang diterapkan. Evaluasi harus dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan untuk mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan yang dihadapi dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, evaluasi menjadi alat untuk meningkatkan kinerja pendidik, kualitas pengajaran, serta mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
- d) **Pengembangan Profesionalisme Guru** Kualitas pendidikan tidak lepas dari peran guru sebagai penggerak utama dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi dan profesionalisme guru melalui pelatihan dan peningkatan kemampuan harus menjadi bagian integral dalam manajemen mutu pendidikan.⁷

⁴ Haryanto, B. (2020). Buku Ajar Manajemen Mutu Pendidikan Islam. *Umsida Press*, 1-147.

⁵ Amon & Harliansyah, *Analisis Kompetensi Manajerial* (2022), 147-162.

⁶ Hasra, Asyarah, & Azainil, *Kepemimpinan Profesionalisme* (2024), *Journal of Education Research* 5(3): 4168-4176.

⁷ Triwiyanto, T. (2022). *Manajemen kurikulum dan pembelajaran*. Bumi Aksara.

Dalam implementasi manajemen mutu pendidikan Islam ada beberapa hal yang harus dicermati: Fokus pada pelanggan (QS. Al Syu'ara [26]: 181183), Kepemimpinan (QS. Al-Ahzab[33]: 21), Keterlibatan semua orang (QS. Al Mulk: 15), Pendekatan proses (QS AlInsiyaaq [84]: 19), Pendekatan proses. (QS. Al-Zumar [39]: 62), Perbaikan terus menerus (QS. Ar-Ra'd : 11), Pendekatan proses pengambilan keputusan (QS. AlSyura: 38), Hubungan dengan pemasok dengan prinsip saling menguntungkan (QS Al-Nisa [4]: 29)

C. Prinsip-Prinsip Manajemen Mutu

1. **Fokus pada Kepuasan Pelanggan:** Siswa, orang tua, dan masyarakat merupakan "pelanggan" pendidikan yang harus memperoleh kepuasan dari layanan pendidikan.
2. **Peningkatan Berkelanjutan (Continuous Improvement):** Proses pembelajaran dan manajemen harus terus ditingkatkan untuk mencapai hasil yang lebih baik.
3. **Pemberdayaan Sumber Daya Manusia:** Tenaga pengajar dan staf harus dilibatkan dalam setiap perencanaan dan keputusan, serta diberikan pelatihan dan sumber daya untuk berkembang.
4. **Penyempurnaan Proses:** Fokus pada efisiensi dan efektivitas dalam proses-proses operasional pendidikan.

D. Model-Model Manajemen Mutu Pendidikan

1. **Total Quality Management (TQM):** Merupakan model manajemen mutu yang diterapkan dengan cara melibatkan seluruh elemen dalam institusi pendidikan untuk bersama-sama meningkatkan kualitas layanan pendidikan.
2. **ISO 9001 untuk Pendidikan:** Standar internasional yang dapat digunakan oleh lembaga pendidikan untuk menjamin bahwa proses yang dilakukan memenuhi persyaratan kualitas yang tinggi.
3. **Six Sigma:** Pendekatan untuk mengurangi cacat dalam proses pendidikan dengan menggunakan metode statistik.

E. Sekolah Yang Bermutu

Sekolah adalah lembaga yang memiliki peran utama dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. Di dalamnya, terdapat berbagai aktivitas dan individu yang saling bergantung satu sama lain. Agar sekolah dapat memastikan keberlanjutan dan keberhasilannya, perlu adanya sejumlah instrumen yang dapat menjamin kualitas pendidikan yang diberikan. Instrumen-instrumen tersebut menjadi penentu eksistensi sekolah, yang semuanya bergantung pada tingkat kualitas yang dimilikinya⁸. Sebuah sekolah akan mampu unggul dan berkembang dibandingkan dengan sekolah lain jika memiliki mutu yang tinggi. Kualitas pendidikan dapat ditingkatkan melalui beberapa cara, yaitu sebagai berikut :

- a) Meningkatkan ukuran prestasi akademik melalui ujian nasional atau ujian daerah yang menyangkut kompetensi dan pengetahuan, memperbaiki tes bakat (scholastic aptitude test), sertifikasi kompetensi dan profil portofolio (portofolio profile);
- b) Membentuk kelompok sebaya untuk meningkatkan gairah pembelajaran melalui belajar secara kooperatif (cooperative learning);

⁸ Yani, Juli, and Fitri Endang Srimulat. *Administrasi pendidikan*. CV. Tatakata Grafika, 2023.

- c) Menciptakan kesempatan belajar baru di sekolah dengan mengubah jam sekolah menjadi pusat belajar sepanjang hari dan tetap membuka sekolah pada jam-jam libur;
- d) Meningkatkan pemahaman dan penghargaan melalui penguasaan materi (mastery learning) dan penghargaan atas pencapaian prestasi akademik;
- e) Membantu siswa memperoleh pekerjaan dengan menawarkan kursuskursus yang berkaitan dengan keterampilan memperoleh pekerjaan, bertindak sebagai sumber kontak informal tenaga kerja, membimbing siswa menilai pekerjaan-pekerjaan, membimbing siswa membuat daftar riwayat hidupnya dan mengembangkan portofolio pencarian kerja⁹

Untuk menilai mutu sebuah lembaga pendidikan, kita perlu melihatnya secara menyeluruh, yang mencakup ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung, profesionalisme pengajar dan staf, budaya organisasi yang mendukung, kepemimpinan yang berkualitas, serta pengelolaan keuangan yang transparan. Jika semua elemen tersebut menunjukkan kinerja yang optimal, maka sekolah dengan kualitas tinggi yang dapat mencapai tujuan pendidikan akan terwujud. Dalam konteks pengajaran di sekolah, upaya peningkatan mutu pengajaran sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mempengaruhi proses belajar mengajar di kelas. Secara mikro, peningkatan mutu berkaitan erat dengan perilaku profesional guru selama proses pengajaran. Ini mencerminkan komitmen guru dalam mengelola dan menerapkan nilai, sikap, serta perilaku profesional dalam kegiatan pendidikan¹⁰. Pengembangan system manajemen mutu dalam organisasi pendidikan. Dalam mengembangkan system manajemen Mutu dapat mengikuti tahapan tahapan sebagai berikut :

1. Identifikasi semua proses penataan/pengelolaan Mutu dalam organisasi, proses ini biasa disebut sebagai proses bisnis, misalnya dari rekrutmen sampai pensiun
2. Tetapkan nama proses bisnis misalnya Evaluasi & Pengembangan Kurikulum
3. Tetapkan input dan output setiap proses Mutu Alokasikan sumber daya yang dibutuhkan dalam suatu proses Mutu tersebut Tetapkan pelanggan untuk setiap proses termasuk kebutuhan dan persyaratannya Tetapkan pemilik proses tersebut (misalnya evaluasi kurikulum menjadi tanggung jawab kepala program studi)
4. Tentukan urutan dan interaksi proses-proses penataan Mutu yang ada (dengan prosedur di buat interaksi) .
5. Sahkan, dokumentasikan & distribusikan proses-proses Mutu tersebut.
6. Tentukan kriteria dan metode yang diperlukan untuk memastikan efektivitas operasi dan pengendalian proses-proses tersebut
7. Tetapkan karakteristik hasil dari suatu proses, kriteria keberhasilan (melalui evaluasi)
8. Tetapkan proses komunikasi¹¹

Agar bisa mencapai daya saing global di dunia pendidikan, selayaknya setiap organisasi pendidikan harus selalu melakukan contiously improvement di dalam berbagai komponen manajemen pendidikan sehingga mampu memenuhi keinginan stakeholder yang dijadikan patokan atau standar dalam rangka mencapai

⁹ Saleh & Malik, *Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan* (2019), *Fenomena* 11(2): 143-154

¹⁰ Mulyasa, H. E. (2022). *Manajemen dan kepemimpinan kepala sekolah*. Bumi Aksara.

¹¹ Maulana & Suryana, *Upaya Tenaga Administrasi Pendidikan* (2021), *PeTeKa* 4.2: 266-274.

daya saing secara global. Oleh karena itu, langkah-langkah yang harus dilakukan oleh setiap organisasi pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Menentukan kebutuhan dan harapan stakeholder atau masyarakat dan pihak yang berkepentingan lainnya.
2. Menetapkan kebijakan mutu dan tujuan mutu organisasi
3. Menentukan proses dan tanggungjawab yang diperlukan untuk mencapai tujuan mutu.
4. Menentukan dan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan mutu.
5. Menetapkan metode untuk mengukur keefektifan dan efisiensi tiap proses
6. Menerapkan pengukuran ini untuk menentukan keefektifan dan efisiensi tiap proses
7. Menentukan sarana pencegahan ketidaksesuaian dan penghilangan¹²

F. Tokoh Pendidikan Islam

- a) **Imam Al-Ghazali (1058–1111 M)** Imam Al-Ghazali adalah salah satu tokoh besar dalam pendidikan Islam. Pemikirannya tentang pendidikan sangat berfokus pada pembentukan akhlak dan moral siswa. Dalam karyanya *Ihya' Ulum al-Din*, Al-Ghazali menekankan pentingnya pendidikan untuk mencapai kesempurnaan rohani dan intelektual. Pendidikan bagi Al-Ghazali tidak hanya tentang transfer ilmu, tetapi juga tentang pengembangan nilai-nilai moral dan spiritual¹³.
- b) **Ibnu Khaldun (1332–1406 M)** Ibnu Khaldun, seorang sejarawan dan ilmuwan sosial Muslim, juga memberikan kontribusi besar terhadap pemikiran pendidikan. Dalam karya monumentalnya, *Muqaddimah*, Ibnu Khaldun memperkenalkan konsep pentingnya pendidikan dalam membentuk kemajuan peradaban. Ia menekankan peran penting masyarakat dan budaya dalam perkembangan pendidikan, serta pentingnya pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan sosial dan ekonomi¹⁴.
- c) **Al-Farabi (872–950 M)** Al-Farabi adalah seorang filsuf dan ilmuwan yang banyak berkontribusi pada pendidikan di dunia Islam. Ia dikenal dengan pemikirannya tentang hubungan antara pendidikan dan kebahagiaan. Al-Farabi berpendapat bahwa tujuan pendidikan adalah untuk mencapai kebahagiaan melalui pengembangan potensi intelektual dan moral individu.¹⁵
- d) **Abu Hanifah** lahir pada tanggal 2 rajab 80 H atau bertepatan dengan hari Selasa, 5 September 699 M di Kufah, Irak. Abu Hanifah tidak hanya seorang ahli fiqh yang handal tetapi juga seorang ahli pendidikan yang mampuni. Ini terbukti bahwa lahirnya kita Al-Alim Wa Al-Muta'allim. Kitab ini merupakan kitab pertama di bidang pendidikan islam. Tujuan pendidikan menurut Abu Hanifah adalah menegaskan bahwa suatu perbuatan yang hendaknya mengikuti petunjuk ilmu yang sebagaimana anggota tubuh juga menuruti panduan penglihatan. Ilmu pengetahuan itu seperti bekal yang sedikit namun jelas

¹² Kurniady, *Standar Sistem Mutu* (2011), *Jurnal Administrasi Pendidikan* 8(1).

¹³ Anjani, Arifin, & Hidayat, *Pemikiran Pendidikan Islam Imam Al-Ghazali* (2024), *ELMAKTABAH International Journal of Educational Research* 1(1).

¹⁴ Erliana & Normawati, *Pemikiran Ibnu Khaldun tentang Pendidikan Islam* (2024), *Mauriduna: Journal of Islamic Studies* 5(1): 129-145.

¹⁵ Erdriani, Mukhaiyar, & Anananda, *Filosofis dan Praktis dalam Pemikiran Al Farabi* (2024), *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa* 3(4): 46-55.

manfaatnya bagi seorang musafir, jelas tujuannya untuk pengetahuan dan pemahaman¹⁶.

- e) Imam Syafi'i merupakan pakar pendidikan Islam generasi Abu Hanifah, beliau juga dikenal seorang dari imam mazhab empat dikalangan Ahlus Sunnah wal Juma'ah. Mazhab Imam Syafi'i menjadi mazhab utama dan mempunyai banyak pengikut. Pemikiran pendidikan menurut Imam Syafi'i sebagian besar tertuang dalam karyanya yakni *Siwan asy-Syafi'i*. Karyanya memiliki kumpulan syair yang secara rinci mengulang beberapa hal yang berisi seputar¹⁷ keutamaan ilmu. Klasifikasi ilmu, etika, dan perihal menjadi ahli fiqh atau tasawuf.
- f) Ibnu Sahnun merupakan seorang ahli faqh dan tokoh mazhab Maliki yang terkemuka di Afrika Utara. Beliau juga seorang pemikir pendidikan yang mampuni. Sejalah mencatat bahwa dia sebagai pelopor Ilmu Pendidikan Islam pada masa itu karena banyak imam memfokuskan kajian dalam bidang ilmu pendidikan yang lebih fokus mengkaji ilmu fiqh dan hadis.¹⁸

G. Tokoh Pendidikan Barat

1. **John Dewey (1859–1952)** John Dewey adalah tokoh besar dalam pendidikan Barat yang terkenal dengan konsep pendidikan progresifnya. Dewey percaya bahwa pendidikan harus berorientasi pada pengalaman langsung, yang memungkinkan siswa untuk belajar melalui praktik dan refleksi. Ia menekankan pentingnya pengajaran yang demokratis dan pembelajaran yang relevan dengan kehidupan sehari-hari¹⁹.
2. **Maria Montessori (1870–1952)** Maria Montessori, seorang dokter dan pendidik asal Italia, mengembangkan metode pendidikan yang kini dikenal dengan nama metode Montessori. Pendekatan ini menekankan kebebasan anak dalam belajar, dengan menyediakan lingkungan yang mendukung perkembangan natural mereka. Montessori percaya bahwa anak-anak memiliki potensi besar yang dapat berkembang secara optimal melalui pengalaman langsung dan pembelajaran mandiri.²⁰
3. **Jean Piaget (1896–1980)** Jean Piaget adalah seorang psikolog perkembangan yang terkenal dengan teori perkembangan kognitifnya. Piaget berpendapat bahwa anak-anak melalui berbagai tahap perkembangan kognitif, dan pendidikan harus disesuaikan dengan tahap perkembangan tersebut. Pendekatan Piaget menekankan pentingnya pembelajaran aktif yang memungkinkan anak-anak membangun pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi dengan lingkungan²¹.
4. **Carl Rogers** Pengasas kepada psikologi humanistik. Rogers telah mendirikan sebuah pusat kaunseling di Universitas Chicago. Carl Rogers berjasa besar

¹⁶ Habibullah, *Pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang Al-Istihsan* (2016), *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 4(07).

¹⁷ Ibid

¹⁸ Manik, Wagiman. "Pemikiran pendidikan Ibnu Sahnun." *WARAQAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 1.1 (2016): 16-16.

¹⁹ Nata, A. Pendidikan progresif John Dewey: tinjauan di MAN Insan Cendekia Serpong Tangerang Selatan.

²⁰ Yus, A. (2011). *Model pendidikan anak usia dini*. Kencana.

²¹ Margaretha, L. (2020). Teori-teori belajar untuk kecerdasan bahasa anak usia dini. *Early Childhood Research and Practice*, 1(01), 8-15.

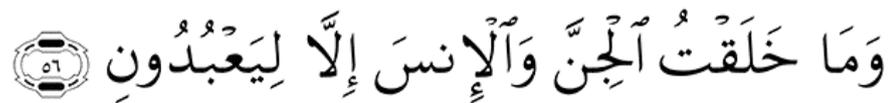
dalam mengantarkan psikologihumanistik untuk dapat diaplikasikan dalam pendidikan. Top of Form²²

H. Tokoh Pendidikan Islam dan Pemikirannya

Tokoh-tokoh pendidikan dalam tradisi Islam memberikan kontribusi yang besar terhadap pembentukan sistem pendidikan Islam yang mendalam, berfokus pada pengembangan moral, akhlak, serta pengetahuan. Beberapa tokoh pendidikan Islam yang berpengaruh adalah:

1. **Imam Al-Ghazali (1058-1111 M)** Imam Al-Ghazali merupakan salah satu ulama terbesar yang menekankan pentingnya integrasi antara ilmu pengetahuan dan pengembangan akhlak dalam pendidikan. Al-Ghazali memandang bahwa pendidikan bukan hanya sekadar transfer ilmu, namun juga pembentukan karakter. Dalam karya monumental *Ihya' Ulumuddin*, Al-Ghazali menggarisbawahi pentingnya penanaman nilai-nilai moral dalam proses belajar, agar ilmu yang didapat dapat membawa manfaat di dunia dan akhirat²³.

Tujuan pendidikan Islam menurut Imam Al-Ghazali adalah untuk beramal shaleh dan beribadah kepada Allah SWT. Sebagaimana Allah SWT Berfirman Q.S Az-Zaryat ayat 56:



Artinya: Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.

2. **Ibnu Khaldun (1332-1406 M)** Ibnu Khaldun dikenal sebagai bapak sosiologi dan sejarah Islam yang memberikan pandangan baru mengenai pentingnya pendidikan dalam pembangunan masyarakat. Dalam bukunya *Muqaddimah*, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa pendidikan harus diadaptasi dengan kondisi sosial masyarakat, dengan penekanan pada aspek sosial dan psikologis. Ia berpendapat bahwa pendidikan yang baik adalah yang mampu menciptakan keseimbangan antara pengembangan intelektual dan karakter peserta didik.²⁴
3. **Fakhruddin Al-Razi (1149-1209 M)** Fakhrudin Al-Razi adalah seorang ahli teologi dan filsuf yang sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan Islam. Ia mengajukan gagasan bahwa pendidikan harus mengembangkan pemikiran rasional dan spiritual dalam diri manusia. Al-Razi memandang bahwa pemahaman ilmu pengetahuan tidak terlepas dari pengembangan hati dan moral²⁵.

²² Razali, Mahani, Ramlah Jantan, and Shahabuddin Hashim. *Psikologi pendidikan*. PTS Professional, 2003.

²³ Maghriza & Nursikin, *Pendekatan Pendidikan Nilai dalam Filsafat Islam (2024)*, *Afeksi: Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan* 5(2): 295-314.

²⁴ Fitriani, R. (2019). Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun. *Maro*, 2(2), 128-142.

²⁵ Maulida, H. (2025). Kajian Kitab Tafsir Mafatih Al-Ghaib Karya Fakhrudin Al-Razi. *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, 2(1), 228-248.

I. Dampak Sosial Masyarakat Hasil Pemikiran Tokoh Pendidikan Islam

Masyarakat merupakan komponen yang tak terpisahkan dari adanya suatu kebijakan. Kebijakan pendidikan Islam tidak hanya berpengaruh untuk beberapa orang saja namun juga mempengaruhi keseluruhan lapisan masyarakat yang artinya mempunyai pengaruh yang bagi masyarakat luas. Sedangkan pendidikan pada dasarnya merupakan rancangan upaya masa depan masyarakat yang harus diperhitungkan berbagai faktor yang berpengaruh. Kebijakan Pendidikan mestinya juga disesuaikan dengan ukuran masyarakat itu sendiri sehingga menjadikan kesatuan yang selaras. Demikian dengan kebijakan pendidikan yang diterapkan di Indonesia yang memang sangat mempengaruhi perkembangan dan perubahan masyarakat. Pendidikan sendiri berfungsi sebagai pengembangan kemampuan dan membantu berkembangnya watak masyarakat agar berpotensi baik. Seiring dengan perkembangan zaman tentu berpengaruh pula pada pendidikan Islam di Indonesia. Pendidikan Islam mulai menyentuh pendidikan formal dan lebih sistematis, tentunya perubahan ini juga didukung dengan teknologi yang ada. Pendidikan Islam yang tadinya kaku dan hanya menyentuh ilmu dasar pendidikan Islam diperluas menjadi penjabaran dasar-dasar pendidikan Islam yang tentunya akan mendorong lahirnya kebijakan baru di tengah-tengah masyarakat. Beragam respons masyarakat, karena sebagian sudah terlanjur sejalan dengan kebijakan lama yang hanya mempelajari dasar dipaksa untuk mengubah jalannya agar seakan dengan kebijakan yang ada, namun sebagian lagi mampu terbuka dengan kebijakan yang ada sehingga berpengaruh dengan sejalanannya dengan kebijakan yang baru²⁶

Sebagian dari masyarakat akan merasa sejalan dengan kebijakan pendidikan Islam yang sebelum adanya pergeseran zaman dan perkembangan teknologi yang akan membuat mereka kurang mampu untuk menyelaraskan jalannya dalam kebijakan pendidikan Islam yang baru, inilah lapisan masyarakat yang kontra terhadap kebijakan pendidikan Islam. Sebagian masyarakat ini akan perlu waktu untuk menyesuaikan dirinya terhadap kebijakan pendidikan Islam yang baru, karena masyarakat mau tidak mau harus mengikuti kebijakan pendidikan Islam yang diterapkan. Namun, sebagian dari masyarakat merasa sejalan dan mendukung dengan kebijakan pendidikan Islam yang telah diupgrade. Masyarakat yang mengikuti pergerakan zaman dan perkembangan teknologi cenderung berpikir terbuka dan maju sejalan dengan era kebijakan pendidikan Islam saat ini. Penyesuaian masyarakat akan lebih mudah dan cepat menerima sehingga menimbulkan respon yang positif. Berikut dampak positif dalam penggunaan kebijakan pendidikan Islam yang terupgrade dengan perkembangan zaman :

1. Adanya peningkatan dan keseimbangan soft skills dan hard skills
2. Pengembangan diri lebih terintegrasi.
3. Memperluas wawasan dengan teknologi yang semakin berkembang.
4. Keterbukaan pendidikan Islam dengan dunia yang lebih luas.
5. Kesejajaran pendidikan Islam dengan pendidikan umum sehingga minat masyarakat juga tinggi²⁷

²⁶ Siahaan, Hidayat, & Rustam, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam* (2019).

²⁷ Ramadhayanti, Rizal, Pasrizal, & Firdaus, *Training and Development Sumber Daya Insani pada KSPS-BMT Al-Makmur* (2023), *Management of Education: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 9(1): 33-54.

J. Tokoh Pendidikan Barat dan Pemikirannya

Tokoh-tokoh pendidikan Barat juga memberikan sumbangan besar dalam perkembangan teori pendidikan modern. Mereka lebih menekankan pada pentingnya metode ilmiah dan pendekatan pedagogik yang rasional. Beberapa tokoh pendidikan Barat yang berpengaruh adalah:

1. **John Dewey (1859-1952)** John Dewey adalah seorang filsuf dan pendidik yang dikenal dengan teori pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*). Dewey berpendapat bahwa pendidikan harus memungkinkan siswa untuk belajar melalui pengalaman langsung dan aktif, bukan hanya melalui ceramah atau hafalan. Ia memperkenalkan konsep *learning by doing*, yang mengedepankan partisipasi aktif siswa dalam proses belajar²⁸.
2. **Maria Montessori (1870-1952)** Maria Montessori adalah seorang pendidik asal Italia yang mengembangkan metode Montessori, yang berfokus pada pengembangan diri anak-anak melalui pendekatan yang individual. Ia menekankan pentingnya kebebasan dalam belajar, dengan memberikan anak-anak kesempatan untuk memilih aktivitas yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. Metode Montessori telah diterapkan secara luas di berbagai negara dan dianggap sebagai pendekatan inovatif dalam pendidikan anak usia dini. Metode Montessori pada dasarnya adalah pendekatan pendidikan langsung yang mengizinkan ekspresi diri dan permainan kolaboratif dengan prinsip menghargai anak. Melalui metode Montessori, anak-anak akan belajar mengembangkan konsentrasi yang baik, mengembangkan sikap gemar belajar, melatih motorik, membangun rasa percaya diri, dan menghargai lingkungan, diri sendiri, dan orang lain. Dalam sistem pendidikan Montessori, guru adalah fasilitator atau pemandu dan mengarahkan anak-anak untuk belajar melalui interaksi dengan material dengan meminimalisir adanya intervensi (*limit intervention*). Menurut Montessori, tugas guru adalah mempersiapkan dan mengatur serangkaian kegiatan dalam lingkungan khusus yang dibuat untuk anak. Tujuan utama guru adalah untuk mendapatkan pemahaman penuh tentang anak, baik segi perkembangan anak sampai kepada minatnya. Dalam kelas Montessori guru disebut dengan *directress*, ia adalah penghubung yang dinamis antara anak dengan lingkungan.²⁹
3. **Jean Piaget (1896-1980)** Jean Piaget, seorang psikolog asal Swiss, mengembangkan teori perkembangan kognitif yang menekankan pentingnya pemahaman terhadap tahap-tahap perkembangan intelektual anak. Piaget berpendapat bahwa pendidikan harus disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif anak, sehingga proses belajar dapat berlangsung secara efektif dan sesuai dengan kemampuan mereka. Ia juga memperkenalkan konsep konstruktivisme dalam pendidikan, yang menekankan bahwa pengetahuan dibangun oleh siswa melalui interaksi mereka dengan lingkungan. Aspek penting dari teori Piaget adalah bahwa ia telah meneliti pembentukan konsep, di mana anak-anak secara aktif terlibat dalam lingkungan. Menurut Piaget, bahwa titik awal pertumbuhan intelektual anak adalah tindakan mereka sendiri. Anak secara aktif terlibat dengan orang-orang dan benda-benda disekelilingnya dan anak mulai membangun konsep atau skema tentang dunia. Skema adalah pola perilaku yang terkait dimana

²⁸ Randall, John Herman. "John Dewey, 1859-1952." *The Journal of Philosophy* 50.1 (1953): 5-13.

²⁹ Kiuk & Susanto, *Pentingnya Metode Montessori* (2023), *Metanoia* 5(1)

anak bisa menggeneralisasi dan menggunakannya dalam berbagai macam situasi yang berbeda³⁰

4. **John Locke** John Locke dilahirkan di sebuah desa kecil bernama Somersetshire, Inggris tahun 1632. Pada saat itu, John Locke hidup dalam kondisi politik yang kurang kondusif di Inggris. Ayah Locke adalah orang yang pertama memberi keyakinan kepada Locke akan demokrasi dalam dirinya. Saat muda, John Locke tercatat sebagai mahasiswa di salah satu universitas yakni Oxford University. Kemudian Locke dipercaya untuk mengajar Filsafat Yunani dan filsafat moral di Universitas tersebut (Septi Triandini, 2020). Menurut Locke, pembelajaran selama masa bayi itu sangat penting. Pada masa-masa tersebut, jiwa manusia berada pada kondisi yang paling lunak sehingga dapat membentuk seperti yang diinginkan. Teori John Locke kemudian dinamakan teori "Tabula Rasa". Dalam pemikiran John Locke terhadap teori nya, John Locke berpikir bahwa pengalamanlah yang menjadi dasar pengetahuan. Pendidikan pun merupakan suatu mentransformasikan ilmu pengetahuan, nilai nilai kehidupan, serta cara hidup dalam bermasyarakat. Teori "Tabula Rasa" meyakini individu sebagai kertas kosong yang masih bersih, belum ada noda. Selanjutnya, para orang dewasa, lingkungan lah yang menulis di kertas kosong tersebut apa yang dikehendaki. John Locke menganggap pendidikan di rumah adalah pendidikan yang penting bagi individu untuk tumbuh dan berkembang. Hal ini dikarenakan, pendidikan di rumah dapat menjalin hubungan emosional yang lebih baik antara orang dewasa (dalam hal ini orangtua sebagai pendidik utama anak)³¹
5. **Friedrich Wilhelm August Froebel** lahir di Jerman tepatnya di Oberweissbach, sebuah desa di Hutan Thuringian, di Kota Kecil Schwazburg-Rudolstadt. Ia lahir pada tanggal 21 April tahun 1782, merupakan anak bungsu dari lima laki-laki bersaudara. Ayah Froebel bernama Johann Jacob Froebel adalah penjaga Gereja Tua Lutheran, sekaligus pendeta atau pastor. Ibu Froebel meninggal dunia saat ia berumur sembilan bulan dan ayahnya kemudian menikah lagi. Sejak itu Froebel merasa dirinya diabaikan sebab kurangnya perhatian dan kasih sayang, terlebih ketika ia memiliki adik dari pernikahan ayah dengan ibu tirinya (Froebel, 2018). Beruntungnya ia bertemu dengan Herr Gruner yang membesarkan hatinya dan menyekolahkan pada tahun 1800-an (Ulfah, 2013). Pemikiran Froebel tentang pendidikan anak sebagian dipengaruhi oleh konsep kedewasaan yang dikemukakan oleh Comenius dan Pestalozzi. Pada konsep ini, peran pendidik adalah mengamati proses kedewasaan alami anak dan memberikan kegiatan yang membuat mereka mempelajari apa yang siap dipelajari (S.Morisson, 2012). Froebel mengemukakan apabila seorang anak mendapat pendidikan yang tepat, maka ia seperti halnya tanaman muda yang akan berkembang mengikuti hukumnya sendiri, mulai dari biji menjadi tunas dan berkembang menjadi tanaman yang siap menghasilkan buah. Oleh sebab itu, pendidikan anak usia dini harus mengikuti sifat alami dari anak, salah satunya yakni melalui metode bermain. Adapun peran pendidik diumpamakan sebagai tukang kebun yang merawat tanaman dengan penuh perhatian dan cinta. Pandangan Froebel terkait hal ini merupakan perluasan pandangan dan pemahaman terhadap dunia tentang

³⁰ Ardiati, *Perbandingan Teori Perkembangan Kognitif Anak Usia Dini* (2021), disertasi doktoral, IAIN Bengkulu.

³¹ Tejaningrum et al., *Kajian Pemikiran Tokoh-Tokoh dan Teori Mengenai Pendidikan Anak Usia Dini* (2022).

hubungan individu, Tuhan dan Alam (Patmonodewo, 2000). Sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Froebel yakni membimbing anak untuk menyadari jati dirinya sebagai makhluk Tuhan dan individu, sehingga dalam dirinya tumbuh pengertian, empati, cerdas, bermoral dan terpenting adalah berguna bagi masyarakat (Masnival, 2013).

K. Perbandingan Pemikiran Tokoh Pendidikan Islam dan Barat

Meskipun berasal dari tradisi yang berbeda, terdapat sejumlah kesamaan dalam pemikiran tokoh pendidikan Islam dan Barat mengenai konsep pendidikan yang berkualitas.

1. **Pentingnya Pendidikan Holistik** Baik dalam pemikiran Islam maupun Barat, pendidikan dipandang sebagai sarana untuk mengembangkan potensi individu secara menyeluruh, yang mencakup aspek intelektual, moral, dan sosial. Al-Ghazali, misalnya, menekankan pentingnya pendidikan yang seimbang antara ilmu pengetahuan dan pembentukan karakter, sementara Dewey juga menekankan pentingnya pengembangan diri melalui pengalaman nyata yang melibatkan siswa secara aktif.
2. **Integrasi antara Pengetahuan dan Moral** Tokoh pendidikan Islam, seperti Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun, memandang pendidikan sebagai sarana untuk membentuk moralitas dan karakter, bukan hanya sekadar memperoleh pengetahuan ilmiah. Di sisi lain, tokoh pendidikan Barat seperti Montessori dan Piaget juga menyadari bahwa pendidikan yang baik tidak hanya berfokus pada pengetahuan, tetapi juga pada pengembangan keterampilan sosial dan moral.
3. **Pendidikan yang Berpusat pada Peserta Didik** Dalam pemikiran kedua tradisi ini, pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi peserta didik. Tokoh pendidikan Barat seperti Montessori menekankan kebebasan belajar yang disesuaikan dengan minat anak, sementara dalam tradisi Islam, Ibnu Khaldun menekankan pentingnya pendidikan yang relevan dengan kondisi sosial dan kebutuhan zaman.³²

Dampak sosial masyarakat akibat pemikiran tokoh pendidikan Barat di Indonesia dapat dilihat dalam beberapa aspek penting:

1. **Perubahan Sistem Pendidikan:** Pengaruh pemikiran tokoh-tokoh pendidikan Barat seperti John Dewey, Friedrich Froebel, dan Jean Piaget mengarah pada perubahan dalam sistem pendidikan Indonesia. Pendidikan di Indonesia bertransformasi dari sistem tradisional yang lebih mengutamakan hafalan, menjadi lebih berbasis pada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan kreativitas³³.
2. **Pendidikan Demokratis:** Pemikiran Barat memperkenalkan konsep pendidikan yang lebih demokratis, yang menekankan pada peran aktif siswa dalam proses belajar. Hal ini mengarah pada pergeseran dari pendekatan otoriter yang lebih mengutamakan guru sebagai sumber utama informasi, menjadi lebih interaktif dan berbasis pada pengalaman³⁴.
3. **Sekularisasi Pendidikan:** Salah satu dampak penting adalah pengaruh sekularisasi yang berkembang di sistem pendidikan Indonesia. Pemikiran

³² Madhar, *Pemikiran Pendidikan Imam Al-Ghazali* (2024), *TARQIYATUNA: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Madrasah Ibtidaiyah* 3(2): 115-126.

³³ Rochmawati, *The Development of Educational Theories and Its Implementation on National Education System in Indonesia* (2023), *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan dan Humaniora)* 7(1): 61-71.

³⁴ Sudirman, P. (2019). Pedagogi Kritis Sejarah, Perkembangan dan Pemikiran. *Jurnal Pendidikan Dasar dan Keguruan*, 4(2), 63-72.

tokoh Barat cenderung memisahkan pendidikan dari agama, sehingga ada pergeseran dalam kurikulum yang lebih mengedepankan pengetahuan umum ketimbang pendidikan agama³⁵.

4. **Penyebaran Pemikiran Modern:** Pemikiran Barat mendorong masyarakat Indonesia untuk membuka diri terhadap ide-ide modern seperti hak asasi manusia, kebebasan berpikir, dan demokrasi, yang³⁶ mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap pendidikan, sosial, dan politik.
5. **Kesenjangan Sosial:** Di sisi lain, penerimaan terhadap pendidikan Barat menciptakan kesenjangan sosial antara mereka yang memiliki akses terhadap pendidikan modern dengan mereka yang tetap bergantung pada pendidikan tradisional atau yang tidak memiliki akses ke pendidikan Barat.³⁷

Secara keseluruhan, pemikiran tokoh pendidikan Barat memberi kontribusi besar terhadap transformasi sosial dan pendidikan di Indonesia, meskipun dampaknya tidak selalu sepenuhnya positif, mengingat adanya tantangan dalam mengintegrasikan nilai-nilai lokal dan budaya Indonesia dengan sistem pendidikan Barat.

L. Analisis Komparatif dan Integrasi

1. Persamaan dan Perbedaan

Baik perspektif Islam maupun Barat, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan. Keduanya menekankan pentingnya:

- 1) Fokus pada peserta didik
- 2) Keterlibatan seluruh elemen pendidikan
- 3) Peningkatan kualitas secara berkelanjutan
- 4) Evaluasi dan umpan balik

Perbedaan utama terletak pada landasan filosofis dan nilai-nilai yang mendasarinya.

- 1) **Islam:** Berdasarkan nilai-nilai tauhid, ibadah, ilmu, amal saleh, dan ukhuwah Islamiyah. Menekankan pentingnya pendidikan moral dan spiritual.
- 2) **Barat:** Berdasarkan prinsip-prinsip empirisme, rasionalisme, dan humanisme. Menekankan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan inovasi.

2. Potensi Integrasi

Kedua perspektif memiliki potensi untuk saling melengkapi. Integrasi dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Mengintegrasikan nilai-nilai Islam (moral, spiritual, etika) dalam kurikulum dan metode pembelajaran.
- 2) Mengadopsi prinsip-prinsip manajemen mutu Barat (efisiensi, efektivitas, akuntabilitas) dalam pengelolaan lembaga pendidikan Islam.
- 3) Mengembangkan model manajemen mutu yang holistik, yang mengintegrasikan aspek spiritual, moral, intelektual, dan keterampilan.

³⁵ Ma'ruf et al., *Diskursus Sekularisasi Pendidikan Kontemporer dan Dampaknya terhadap Moralitas* (2024), *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora* 7(1): 357-372.

³⁶ Saragih & Zulkarnaen, *Transformasi Pemikiran Politik Islam* (2025), *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan dan Humaniora)* 9(1): 1-7.

³⁷ Nuranisa, N., Aprilia, A., Halimah, S. N., & Mandasari, M. (2023). Kepercayaan Masyarakat Adat dan Modernisasi di Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25(2), 337-347.

- 4) Membangun kerja sama antara lembaga pendidikan Islam dan Barat untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman.

KESIMPULAN

Manajemen mutu dalam pendidikan sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Dalam konteks pendidikan, penting untuk memperhatikan kualitas kurikulum, proses pembelajaran, serta evaluasi yang berkelanjutan. Tokoh-tokoh pendidikan, baik dari tradisi Islam maupun Barat, memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap pengembangan sistem pendidikan yang holistik, berfokus pada pengembangan intelektual, karakter, serta keterampilan sosial peserta didik. Pemikiran mereka menunjukkan bahwa pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang mampu mengintegrasikan berbagai aspek, baik pengetahuan, moral, maupun keterampilan hidup yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk menghadapi tantangan zaman.

Manajemen mutu dalam pendidikan berperan penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas dan dapat memenuhi kebutuhan siswa serta masyarakat. Prinsip-prinsip manajemen mutu, seperti peningkatan berkelanjutan, fokus pada kepuasan pelanggan, dan pemberdayaan sumber daya manusia, harus diterapkan secara konsisten. Dalam konteks pemikiran pendidikan, baik tokoh pendidikan Islam maupun Barat memberikan kontribusi yang signifikan. Meskipun terdapat perbedaan pendekatan antara keduanya, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu membentuk individu yang berkualitas, berpengetahuan, dan memiliki karakter yang baik.

Manajemen mutu dalam pendidikan adalah elemen yang sangat penting dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan. Perkembangan pendidikan tidak lepas dari peran besar para tokoh pendidikan dari tradisi Islam dan Barat, yang memberikan kontribusi besar terhadap teori dan praktik pendidikan. Meskipun terdapat perbedaan dalam filosofi dan pendekatannya, kedua tradisi ini memberikan perspektif yang sangat berharga dalam meningkatkan kualitas pendidikan di dunia.

Penting bagi kita untuk mengambil pelajaran dari kedua sistem ini untuk mengembangkan sistem pendidikan yang tidak hanya fokus pada pengembangan intelektual, tetapi juga moral dan spiritual, sesuai dengan kebutuhan zaman yang terus berubah.

REKOMENDASI

- 1) Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai implementasi manajemen mutu dalam pendidikan Islam dan Barat di berbagai konteks.
- 2) Perlu adanya pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru dan tenaga kependidikan tentang manajemen mutu.
- 3) Perlu dibangun kerjasama antara lembaga pendidikan Islam dan Barat untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman.
- 4) Perlu dikembangkan model manajemen mutu yang holistik yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip manajemen mutu Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amon & Harliansyah, *Analisis Kompetensi Manajerial* (2022), 147-162.
- Anjani, Arifin, & Hidayat, *Pemikiran Pendidikan Islam Imam Al-Ghazali* (2024), *ELMAKTABAH International Journal of Educational Research* 1(1).
- Ardiati, *Perbandingan Teori Perkembangan Kognitif Anak Usia Dini* (2021), disertasi doctoral, IAIN Bengkulu.
- Duryat, *Paradigma Pendidikan Islam* (2021).
- Erdriani, Mukhaiyar, & Anananda, *Filosofis dan Praktis dalam Pemikiran Al Farabi* (2024), *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa* 3(4): 46-55.
- Erliana & Normawati, *Pemikiran Ibnu Khaldun tentang Pendidikan Islam* (2024), *Mauriduna: Journal of Islamic Studies* 5(1): 129-145.
- Fitriani, R. (2019). *Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun*. Maro, 2(2), 128-142.
- Habibullah, *Pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang Al-Istihsan* (2016), *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 4(07).
- Haryanto, B. (2020). *Buku Ajar Manajemen Mutu Pendidikan Islam*. Umsida Press, 1-147.
- Hasra, Asyarah, & Azainil, *Kepemimpinan Profesionalisme* (2024), *Journal of Education Research* 5(3): 4168-4176.
- Kiuk & Susanto, *Pentingnya Metode Montessori* (2023), *Metanoia* 5(1)
- Kuntoro, Alfian Tri. "Manajemen mutu pendidikan Islam." *Jurnal Kependidikan* 7.1 (2019): 84-97.
- Kurniady, *Standar Sistem Mutu* (2011), *Jurnal Administrasi Pendidikan* 8(1).
- Madhar, *Pemikiran Pendidikan Imam Al-Ghazali* (2024), *TARQIYATUNA: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Madrasah Ibtidaiyah* 3(2): 115-126.
- Maghriza & Nursikin, *Pendekatan Pendidikan Nilai dalam Filsafat Islam* (2024), *Afeksi: Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan* 5(2): 295-314.
- Manik, Wagiman. "Pemikiran pendidikan Ibnu sahnun." *WARAQAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 1.1 (2016): 16-16.
- Margaretha, L. (2020). *Teori-teori belajar untuk kecerdasan bahasa anak usia dini*. *Early Childhood Research and Practice*, 1(01), 8-15.
- Ma'ruf et al., *Diskursus Sekularisasi Pendidikan Kontemporer dan Dampaknya terhadap Moralitas* (2024), *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora* 7(1): 357-372.
- Maulana & Suryana, *Upaya Tenaga Administrasi Pendidikan* (2021), *PeTeKa* 4.2: 266-274. *Top of Form*
- Maulida, H. (2025). *Kajian Kitab Tafsir Mafatih Al-Ghaib Karya Fakhruddin Al-Razi*. *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, 2(1), 228-248.
- Mulyasa, H. E. (2022). *Manajemen dan kepemimpinan kepala sekolah*. Bumi Aksara.
- Nata, A. *Pendidikan progresif John Dewey: tinjauan di MAN Insan Cendekia Serpong Tangerang Selatan*.
- Nuranisa, N., Aprilia, A., Halimah, S. N., & Mandasari, M. (2023). *Kepercayaan Masyarakat Adat dan Modernisasi di Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya*. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25(2), 337-347.
- Ramadhayanti, Rizal, Pasrizal, & Firdaus, *Training and Development Sumber Daya Insani pada KSPS-BMT Al-Makmur* (2023), *Management of Education: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 9(1): 33-54.
- Randall, John Herman. "John Dewey, 1859-1952." *The Journal of Philosophy* 50.1 (1953): 5-13.
- Razali, Mahani, Ramlah Jantan, and Shahabuddin Hashim. *Psikologi pendidikan*. PTS

- Professional, 2003.*
- Rochmawati, *The Development of Educational Theories and Its Implementation on National Education System in Indonesia (2023)*, *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan dan Humaniora)* 7(1): 61-71.
- Saleh & Malik, *Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan (2019)*, *Fenomena* 11(2): 143-154
- Saragih & Zulkarnaen, *Transformasi Pemikiran Politik Islam (2025)*, *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan dan Humaniora)* 9(1): 1-7.
- Siahaan, Hidayat, & Rustam, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam (2019)*.
- Sudirman, P. (2019). *Pedagogi Kritis Sejarah, Perkembangan dan Pemikiran*. *Jurnal Pendidikan Dasar dan Keguruan*, 4(2), 63-72.
- Tejaningrum et al., *Kajian Pemikiran Tokoh-Tokoh dan Teori Mengenai Pendidikan Anak Usia Dini (2022)*.
- Triwiyanto, T. (2022). *Manajemen kurikulum dan pembelajaran*. Bumi Aksara.
- Yani, Juli, and Fitri Endang Srimulat. *Administrasi pendidikan*. CV. Tatakata Grafika, 2023.
- Yus, A. (2011). *Model pendidikan anak usia dini*. Kencana.

MASALAH-MASALAH MUTU PENDIDIKAN ISLAM INDONESIA

Saidina, 24052170032

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan Islam di Indonesia memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan intelektual generasi Muslim. Namun, di tengah perkembangan zaman, pendidikan Islam masih menghadapi berbagai tantangan mutu yang memengaruhi daya saing lulusannya. Masalah seperti kurikulum yang kurang relevan, kualitas guru yang belum optimal, sarana prasarana terbatas, dan manajemen lembaga yang kurang profesional menjadi penghambat peningkatan kualitas pendidikan Islam.

Pendidikan Islam di Indonesia memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk karakter, moral, dan intelektual generasi Muslim. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki ribuan madrasah, pesantren, dan sekolah Islam yang menjadi tulang punggung pendidikan keagamaan. Namun, di tengah tuntutan globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan, pendidikan Islam masih menghadapi berbagai tantangan serius terkait mutu dan relevansinya.

Dalam beberapa dekade terakhir, pemerintah telah berupaya meningkatkan kualitas pendidikan Islam melalui berbagai kebijakan, seperti penyetaraan madrasah dengan sekolah umum, penguatan kurikulum, dan peningkatan kualitas guru. Namun, pada praktiknya, masih banyak masalah mendasar yang menghambat peningkatan mutu pendidikan Islam. Beberapa di antaranya adalah kurikulum yang kurang adaptif, kualitas guru yang belum memadai, sarana prasarana terbatas, manajemen lembaga yang belum profesional, dan kesenjangan kualitas antara sekolah Islam di perkotaan dan pedesaan.

Masalah kurikulum, misalnya, banyak lembaga pendidikan Islam yang masih mengandalkan pendekatan tradisional dengan minim integrasi ilmu pengetahuan modern. Hal ini menyebabkan lulusan kurang mampu bersaing di dunia kerja yang

semakin kompetitif. Selain itu, kualitas guru juga menjadi persoalan krusial. Banyak guru madrasah dan pesantren yang belum tersertifikasi atau memiliki kompetensi pedagogik yang memadai. Rendahnya kesejahteraan guru juga turut memengaruhi motivasi dan kinerja mereka.

Di sisi lain, keterbatasan sarana prasarana, seperti kurangnya laboratorium, perpustakaan, dan akses teknologi, membuat proses pembelajaran tidak optimal. Madrasah dan pesantren di daerah terpencil seringkali tertinggal jauh dibandingkan dengan yang berada di kota besar. Selain itu, manajemen yang belum berbasis teknologi dan kurang transparan juga menghambat pengembangan lembaga pendidikan Islam.

Dampak dari masalah-masalah ini sangat serius. Lulusan pendidikan Islam seringkali dianggap kurang kompetitif dibandingkan lulusan sekolah umum. Citra madrasah dan pesantren pun kerap dipandang sebagai "kelas dua" dalam sistem pendidikan nasional. Jika tidak segera diatasi, hal ini dapat memperlebar kesenjangan pendidikan dan mengurangi kontribusi pendidikan Islam dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul.

Oleh karena itu, makalah ini akan mengkaji secara mendalam masalah-masalah mutu pendidikan Islam di Indonesia, menganalisis dampaknya, serta menawarkan solusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam agar lebih relevan dan kompetitif di era global. Dengan demikian, diharapkan pendidikan Islam dapat terus berkontribusi positif dalam membangun generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan siap menghadapi tantangan zaman.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa saja masalah-masalah mutu pendidikan Islam di Indonesia?
2. Bagaimana dampak dari masalah-masalah tersebut terhadap perkembangan pendidikan Islam?
3. Apa solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan Islam di Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Mengidentifikasi masalah-masalah mutu pendidikan Islam di Indonesia.
2. Menganalisis dampak dari masalah tersebut.
3. Menawarkan solusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam.

PEMBAHASAN

2.1 Masalah-Masalah Mutu Pendidikan Islam di Indonesia

2.1.1 Kurikulum yang Kurang Relevan

Salah satu masalah utama dalam mutu pendidikan Islam di Indonesia adalah kurikulum yang belum sepenuhnya relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Banyak kurikulum yang masih bersifat tradisional, berorientasi pada hafalan materi dan tidak mengintegrasikan antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum secara proporsional. Selain itu, kurikulum sering kali tidak disusun berdasarkan pendekatan kontekstual yang menyesuaikan dengan realitas sosial dan tantangan global. Akibatnya, peserta didik kesulitan untuk menerapkan pengetahuan agama dalam kehidupan sehari-hari dan kurang memiliki kompetensi

abad 21 seperti berpikir kritis, kolaborasi, literasi digital, dan kewirausahaan.

Kelemahan lain terletak pada kurangnya pelatihan dan pendampingan bagi guru dalam memahami dan mengimplementasikan kurikulum yang ada. Banyak guru hanya mengandalkan buku teks dan metode ceramah, tanpa melibatkan metode pembelajaran aktif dan berbasis proyek yang dapat meningkatkan keterlibatan siswa. Untuk menjawab tantangan tersebut, kurikulum pendidikan Islam perlu direvisi agar lebih integratif, adaptif, dan aplikatif. Materi keislaman harus dihubungkan dengan konteks kekinian seperti isu-isu lingkungan, teknologi, ekonomi digital, dan kemanusiaan global. Kurikulum yang relevan akan membantu peserta didik menjadi muslim yang tidak hanya shaleh secara pribadi, tetapi juga mampu memberikan kontribusi positif di tengah masyarakat modern.

Lebih lanjut kurikulum yang tidak relevan dapat diidentifikasi antaranya :

- Kurikulum pendidikan Islam seringkali masih bersifat tradisional dan kurang mengintegrasikan ilmu pengetahuan modern.
- Minimnya pengembangan keterampilan kritis dan kreatif dalam pembelajaran.
- Kurangnya penyesuaian dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan teknologi.

2.1.2 Kualitas Guru yang Belum Optimal

Guru merupakan komponen kunci dalam sistem pendidikan, termasuk dalam pendidikan Islam. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kualitas guru pada lembaga pendidikan Islam, khususnya di madrasah dan pesantren, masih jauh dari ideal. Banyak guru yang belum memenuhi standar kualifikasi akademik dan profesional sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah, misalnya memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai atau sertifikasi kompetensi mengajar.

Rendahnya kualitas guru ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti terbatasnya akses pelatihan dan pengembangan profesional, beban kerja yang tinggi, serta insentif atau penghargaan yang belum sebanding dengan tanggung jawab mereka. Selain itu, masih terdapat guru yang menggunakan metode pembelajaran konvensional tanpa pendekatan yang inovatif, sehingga proses belajar mengajar menjadi monoton dan kurang efektif. Di samping itu, kurangnya penguasaan teknologi informasi di kalangan guru juga menjadi hambatan besar, terutama dalam era digital saat ini. Guru perlu mampu memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran agar proses belajar menjadi lebih interaktif dan menarik, serta sesuai dengan gaya belajar generasi milenial dan Z.

Untuk mengatasi persoalan ini, diperlukan strategi peningkatan kapasitas guru secara sistematis dan berkelanjutan, seperti melalui pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi profesi, program mentoring, serta pemberian insentif yang layak. Pemerintah dan lembaga penyelenggara pendidikan Islam juga perlu menjalin kerja sama dengan institusi pelatihan dan universitas untuk membekali para guru dengan keahlian pedagogik dan teknologi yang relevan dengan perkembangan zaman.

Kemudian Kualitas Guru yang Belum Optimal bisa diidentifikasi diantaranya :

- Banyak guru pendidikan Islam yang belum memiliki kompetensi pedagogik dan profesional yang memadai.
- Rendahnya kualifikasi akademik dan pelatihan pengembangan guru.
- Minimnya motivasi guru akibat rendahnya kesejahteraan.

2.1.3 Sarana dan Prasarana yang Terbatas

Sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung penting dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran. Sayangnya, banyak lembaga pendidikan Islam di Indonesia, terutama di daerah pedesaan dan pelosok, masih menghadapi keterbatasan fasilitas pendidikan yang sangat mendasar. Beberapa sekolah bahkan masih kekurangan ruang kelas yang layak, meja dan kursi yang memadai, serta sanitasi dan sumber air bersih yang memadai. Ketiadaan laboratorium sains, perpustakaan, serta fasilitas teknologi informasi seperti komputer dan akses internet juga menjadi hambatan besar dalam pengembangan potensi peserta didik. Hal ini menyebabkan kegiatan belajar mengajar berjalan secara minimalis dan cenderung tidak menarik bagi siswa. Akibatnya, proses pembelajaran menjadi kurang interaktif, serta tidak mendukung eksplorasi dan kreativitas siswa secara optimal.

Selain itu, pesantren-pesantren tradisional banyak yang masih beroperasi dengan fasilitas seadanya, termasuk asrama santri yang padat dan kurang sehat, ruang belajar yang sederhana, serta minimnya alat bantu pembelajaran. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap kenyamanan dan efektivitas pembelajaran, serta kesejahteraan peserta didik secara umum. Untuk mengatasi persoalan ini, dibutuhkan intervensi dari berbagai pihak, terutama pemerintah dan lembaga filantropi, dalam bentuk peningkatan anggaran, bantuan sarana, dan kerja sama pembangunan infrastruktur pendidikan. Pemanfaatan teknologi tepat guna juga dapat menjadi solusi alternatif, seperti pembelajaran daring melalui perangkat sederhana atau penggunaan perpustakaan digital. Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai, mutu pendidikan Islam akan lebih mudah ditingkatkan..

2.1.4 Manajemen Lembaga yang Kurang Profesional

Manajemen pendidikan memiliki peran sentral dalam menentukan arah, strategi, dan kualitas pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di lembaga pendidikan Islam. Namun, masih banyak lembaga seperti madrasah dan pesantren yang dikelola secara tradisional dan belum menerapkan prinsip-prinsip manajemen modern. Hal ini menyebabkan lemahnya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Kepemimpinan lembaga yang kurang visioner, minimnya pelatihan bagi tenaga administrasi, serta tidak adanya sistem manajemen mutu yang terstruktur membuat pengelolaan sekolah tidak berjalan secara optimal. Banyak kebijakan bersifat reaktif, tidak berbasis data, dan tidak terintegrasi dengan visi-misi jangka panjang lembaga.

Selain itu, transparansi dan akuntabilitas juga menjadi persoalan. Dalam beberapa kasus, penggunaan dana tidak diawasi secara sistematis dan belum dilaporkan secara terbuka kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk wali murid dan masyarakat. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan yang berdampak pada rendahnya partisipasi publik dalam mendukung pendidikan Islam. Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya pelatihan dan penguatan kapasitas manajerial bagi kepala sekolah, pengelola madrasah, maupun pimpinan pesantren. Penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS), penggunaan teknologi dalam administrasi, serta keterlibatan aktif komite sekolah dan masyarakat dapat menjadi langkah penting dalam mewujudkan manajemen lembaga pendidikan Islam yang profesional dan berorientasi mutu.

2.1.5 Minimnya Anggaran Pendidikan

Salah satu tantangan serius dalam peningkatan mutu pendidikan Islam di Indonesia adalah keterbatasan anggaran yang dialokasikan, baik dari pemerintah maupun dari sumber lain. Meskipun Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional telah mengamanatkan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN/APBD, distribusi dana tersebut belum sepenuhnya merata dan berkeadilan terhadap lembaga pendidikan Islam, khususnya madrasah swasta dan pesantren. Banyak lembaga pendidikan Islam yang harus mengandalkan dana operasional dari iuran siswa atau donasi masyarakat yang jumlahnya terbatas dan tidak konsisten. Kondisi ini menyebabkan kesulitan dalam membayar gaji guru secara layak, memperbaiki sarana prasarana, hingga mengembangkan program-program pembelajaran yang inovatif.

Minimnya anggaran juga berdampak pada ketidaktercukupannya fasilitas pendukung seperti buku pelajaran, alat peraga, perangkat teknologi, hingga pelatihan tenaga pendidik. Di sisi lain, proses pencairan bantuan pemerintah sering kali lambat dan berbelit, serta tidak jarang terkendala oleh masalah administratif dan kurangnya pendampingan teknis. Untuk mengatasi persoalan ini, diperlukan kebijakan afirmatif dari pemerintah dalam bentuk peningkatan alokasi dana pendidikan bagi lembaga Islam, khususnya di wilayah terpencil atau tertinggal. Selain itu, lembaga pendidikan Islam juga perlu meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan serta menjalin kerja sama strategis dengan sektor swasta, lembaga zakat, dan organisasi masyarakat untuk mendiversifikasi sumber pendanaan.

2.1.6 Disparitas Kualitas antara Sekolah Islam di Perkotaan dan Pedesaan

Salah satu masalah krusial dalam mutu pendidikan Islam di Indonesia adalah adanya kesenjangan kualitas antara sekolah atau madrasah yang berada di wilayah perkotaan dan yang berada di wilayah pedesaan atau terpencil. Sekolah-sekolah Islam di perkotaan umumnya lebih maju dari segi fasilitas, sumber daya manusia, akses teknologi, serta peluang pengembangan profesional bagi tenaga pendidik. Sebaliknya, banyak lembaga di pedesaan yang masih menghadapi keterbatasan serius. Faktor-faktor seperti kurangnya guru berkualifikasi, keterbatasan anggaran, kondisi geografis yang sulit dijangkau, serta lemahnya dukungan pemerintah dan masyarakat sekitar menyebabkan kualitas pendidikan Islam di pedesaan tertinggal jauh. Kurikulum pun sering kali tidak disesuaikan dengan kebutuhan lokal, sehingga kurang relevan bagi siswa yang tinggal di wilayah tersebut.

Selain itu, sekolah-sekolah di kota cenderung lebih mudah menjalin kemitraan dengan pihak luar seperti lembaga donor, universitas, atau institusi teknologi, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas layanan pendidikan mereka. Sementara itu, sekolah di pedesaan kerap berjalan sendiri, tanpa banyak dukungan eksternal maupun pembinaan yang berkelanjutan. Untuk mengatasi ketimpangan ini, dibutuhkan kebijakan afirmatif dari pemerintah yang berfokus pada pemberdayaan lembaga pendidikan Islam di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Penyediaan insentif bagi guru yang bersedia mengajar di daerah terpencil, pembangunan infrastruktur dasar pendidikan, serta peningkatan program pendampingan dan pelatihan guru merupakan langkah penting untuk mengurangi kesenjangan ini dan mendorong pemerataan mutu pendidikan Islam di seluruh Indonesia.

2.2 Dampak Masalah Mutu Pendidikan Islam

1. Lulusan Kurang Kompetitif – Kurang siap menghadapi persaingan global.

Mutu pendidikan yang rendah di berbagai lembaga pendidikan Islam berimplikasi langsung pada kualitas lulusan yang dihasilkan. Lulusan dari madrasah atau pesantren sering kali dianggap kurang kompetitif jika dibandingkan dengan lulusan dari lembaga pendidikan umum yang telah lebih dahulu mengadopsi pendekatan pembelajaran modern dan berbasis kompetensi global. Minimnya penguasaan bahasa asing (terutama bahasa Inggris), keterampilan berpikir kritis, kemampuan komunikasi, serta literasi teknologi menjadi hambatan utama bagi para lulusan dalam mengakses peluang di dunia pendidikan tinggi maupun pasar kerja, baik nasional maupun internasional. Akibatnya, banyak lulusan yang hanya terserap di sektor informal atau tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena keterbatasan kemampuan dasar yang dibutuhkan di era globalisasi.

Selain itu, kurikulum yang tidak kontekstual dan metode pembelajaran yang kurang aplikatif membuat lulusan kesulitan dalam menghadapi perubahan sosial dan ekonomi yang dinamis. Ketidakmampuan dalam memadukan ilmu agama dengan keterampilan praktis juga menyebabkan lulusan kurang fleksibel dan tidak mampu bersaing di era industri 4.0 dan society 5.0. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka akan terjadi ketertinggalan sistemik dalam pemberdayaan umat melalui pendidikan. Oleh karena itu, peningkatan mutu pendidikan Islam bukan hanya soal memperbaiki sistem pembelajaran internal, tetapi juga berkaitan langsung dengan masa depan generasi Islam yang berdaya saing tinggi dan mampu membawa nilai-nilai Islam dalam kancah global.

2. Minimnya Inovasi Pendidikan – Pendidikan Islam tertinggal dalam pengembangan metode pembelajaran modern.

Rendahnya mutu pendidikan Islam di Indonesia juga berdampak pada minimnya inovasi dalam proses pembelajaran. Banyak lembaga pendidikan Islam masih mengandalkan metode pembelajaran konvensional seperti ceramah satu arah dan hafalan, tanpa mengintegrasikan pendekatan-pendekatan baru yang lebih kontekstual, kolaboratif, dan berbasis teknologi. Minimnya inovasi ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan akses terhadap pelatihan guru, kurangnya fasilitas pendukung teknologi, dan budaya belajar yang belum terbuka terhadap perubahan. Akibatnya, proses belajar mengajar menjadi monoton, kurang menarik, dan tidak mampu membangkitkan potensi kreatif serta pemikiran kritis peserta didik.

Ketertinggalan dalam inovasi juga berdampak pada rendahnya daya saing lulusan. Di saat pendidikan global telah bergerak menuju pembelajaran digital, blended learning, hingga pemanfaatan AI dan big data dalam pendidikan, sebagian besar lembaga pendidikan Islam masih tertinggal dalam menerapkan teknologi sebagai bagian dari strategi pengajaran dan manajemen. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan yang semakin besar antara pendidikan Islam dan kebutuhan dunia modern. Oleh karena itu, peningkatan mutu pendidikan Islam harus disertai dengan dorongan kuat untuk menciptakan ekosistem inovatif—mulai dari pembaruan kurikulum, penguatan kapasitas guru dalam pedagogi digital, hingga penyediaan sarana yang

mendukung pembelajaran kreatif dan berbasis proyek.

3. Citra Negatif – Masyarakat sering memandang pendidikan Islam sebagai "kelas dua" dibanding sekolah umum.

Rendahnya mutu pendidikan Islam juga berdampak pada terbentuknya citra negatif di mata masyarakat. Banyak orang tua dan calon peserta didik masih menganggap bahwa lembaga pendidikan Islam, terutama madrasah dan pesantren, berada di bawah kualitas sekolah umum, baik dari segi akademik, fasilitas, maupun masa depan lulusan. Pandangan ini menyebabkan pendidikan Islam sering dianggap sebagai "pilihan kedua" atau "alternatif terakhir", bukan pilihan utama. Stigma ini semakin diperkuat dengan banyaknya kasus lulusan lembaga Islam yang tidak mampu bersaing di dunia kerja, kurang menguasai teknologi, atau tidak memiliki keterampilan praktis yang dibutuhkan masyarakat modern. Di sisi lain, citra pendidikan Islam yang terlalu "tekstual" dan tidak terbuka terhadap ilmu pengetahuan umum juga memperkuat asumsi bahwa lembaga tersebut hanya mencetak lulusan untuk ranah keagamaan semata.

Dampaknya, minat masyarakat untuk menyekolahkan anak di lembaga pendidikan Islam menjadi rendah, terutama dari kalangan menengah ke atas. Hal ini memperparah ketimpangan kualitas dan akses pendidikan antara lembaga Islam dan lembaga umum, serta menghambat proses integrasi ilmu agama dan sains dalam sistem pendidikan nasional. Untuk mengubah citra ini, pendidikan Islam harus melakukan transformasi besar-besaran dalam hal kualitas, inovasi, serta pencapaian lulusan. Keberhasilan lembaga Islam dalam mencetak generasi yang religius sekaligus cakap dalam menghadapi tantangan global akan menjadi bukti nyata bahwa pendidikan Islam adalah pilihan unggul, bukan sekadar alternatif.

4. Rendahnya Daya Serap Lulusan di Dunia Kerja – Banyak lulusan madrasah dan pesantren yang sulit bersaing di pasar kerja.

Masalah mutu pendidikan Islam secara langsung berdampak pada rendahnya daya serap lulusan madrasah dan pesantren di dunia kerja. Banyak lulusan mengalami kesulitan dalam memperoleh pekerjaan, terutama di sektor formal, karena kurang memiliki keterampilan teknis, sertifikasi keahlian, serta kompetensi yang dibutuhkan oleh industri. Lulusan pendidikan Islam umumnya masih terfokus pada penguasaan ilmu agama secara tekstual, namun minim pelatihan dalam keterampilan praktis seperti teknologi informasi, bahasa asing, komunikasi bisnis, kewirausahaan, maupun soft skills lainnya. Hal ini menyebabkan mereka kalah bersaing dengan lulusan dari sekolah umum atau kejuruan yang telah dibekali dengan kompetensi kerja berbasis industri. Selain itu, sebagian besar pesantren dan madrasah belum memiliki program penyaluran kerja atau jaringan kemitraan dengan dunia industri dan dunia usaha (DUDI). Rendahnya koneksi ini membuat lulusan sulit mendapatkan peluang magang, pengalaman kerja, atau informasi lowongan yang sesuai dengan minat dan kemampuannya.

Dampak lebih lanjutnya adalah meningkatnya angka pengangguran terdidik di kalangan alumni lembaga pendidikan Islam. Ini tidak hanya menjadi persoalan ekonomi, tetapi juga sosial, karena lulusan yang tidak produktif

berisiko mengalami demoralisasi atau kehilangan arah. Untuk mengatasi hal ini, lembaga pendidikan Islam perlu mulai mengintegrasikan pendidikan keterampilan hidup (life skills education), penguatan vokasi, serta pembentukan pusat karier dan pelatihan kerja. Kolaborasi dengan dunia industri juga penting dilakukan agar lulusan memiliki daya saing dan relevansi tinggi terhadap kebutuhan pasar kerja modern.

2.3 Solusi untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan Islam

2.3.1 Pengembangan Kurikulum Integratif

- Mengintegrasikan ilmu agama dengan sains, teknologi, dan keterampilan abad 21.
- Memperkuat pembelajaran berbasis proyek (PjBL) dan STEM.

2.3.2 Peningkatan Kualitas Guru

- Program pelatihan dan sertifikasi guru secara berkala.
- Meningkatkan kesejahteraan guru untuk meningkatkan motivasi.

2.3.3 Perbaikan Sarana dan Prasarana

- Pemerataan akses teknologi digital di madrasah dan pesantren.
- Pembangunan laboratorium dan perpustakaan yang memadai.

2.3.4 Penerapan Manajemen Modern

- Penerapan sistem manajemen berbasis teknologi (e-management).
- Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan lembaga.

2.3.5 Peningkatan Anggaran Pendidikan

- Pemerintah perlu meningkatkan alokasi dana untuk madrasah dan pesantren.
- Kerjasama dengan swasta dan lembaga filantropi untuk pendanaan.

2.3.6 Pemerataan Kualitas Pendidikan

- Program afirmasi untuk sekolah Islam di daerah tertinggal.
- Pertukaran guru dan siswa antara wilayah maju dan terpenc

KESIMPULAN

Masalah mutu pendidikan Islam Indonesia memerlukan penanganan komprehensif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Dengan pendekatan transformatif yang memadukan khazanah keislaman dengan kemajuan zaman, pendidikan Islam memiliki potensi besar untuk tidak hanya mengejar ketertinggalan tetapi juga menjadi pelopor dalam pengembangan model pendidikan integratif di tingkat global. Langkah-langkah perbaikan harus dilakukan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan untuk mewujudkan visi pendidikan Islam yang unggul dan relevan di abad 21.

Pendidikan Islam di Indonesia menghadapi berbagai masalah mutu seperti kurikulum yang kurang relevan, kualitas guru terbatas, sarana prasarana tidak memadai, dan manajemen yang belum profesional. Masalah ini berdampak pada rendahnya daya saing lulusan dan citra pendidikan Islam. Namun, dengan perbaikan kurikulum, peningkatan kualitas guru, dan penguatan manajemen, mutu pendidikan Islam dapat ditingkatkan. Kemudian bahwa masalah mutu pendidikan Islam di Indonesia bersifat multidimensional dan sistemik. Beberapa temuan kunci yang teridentifikasi meliputi:

- ✓ Aspek Kurikulum:
- ✓ Sumber Daya Pendidikan:
- ✓ Tantangan Global:

- ✓ Dampak Sistemik:
- ✓ Rekomendasi Strategis:
- ✓ Transformasi Kurikulum:
- ✓ Penguatan Kapasitas:
- ✓ Reformasi Kelembagaan:

SARAN

- Pemerintah harus memperhatikan alokasi anggaran yang lebih besar untuk pendidikan Islam.
- Lembaga pendidikan Islam perlu mengadopsi teknologi dan metode pembelajaran modern.
- Kolaborasi antara pesantren, madrasah, dan industri diperlukan untuk meningkatkan relevansi lulusan.
-

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, A. (2012). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta: Kencana.
- Data Kementerian Agama RI tentang Statistik Pendidikan Islam. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. (2020). *Strategi Pengembangan Pendidikan Islam*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Furchan, A. (2004). *Paradigma Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mastuhu. (1994). *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*.
- Mujib, A., & Mudzakir, A. (2001). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Nasution, H. (2005). *Pendidikan Islam di Indonesia: Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Rohiat, E. (2008). *Manajemen Sekolah: Teori Dasar dan Praktik*. Bandung: Refika Aditama.
- Sauri, S. (2015). *Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Melalui Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Alfabeta.
- Tilaar, H. A. R. (2002). *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Umar, H. (2020). *Mutu Pendidikan Islam: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Yusuf, S., & Jailani, M. (2016). *Problematika Pendidikan Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Deepublish.

KONSEP MANAJEMEN MUTU DAN STANDAR MUTU ISO

Eti Tamsiyati, 24052170045

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Dalam era globalisasi dan persaingan yang semakin ketat, lembaga pendidikan harus terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pendidikan untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan menerapkan konsep manajemen mutu yang efektif. Manajemen mutu adalah suatu sistem yang dirancang untuk memastikan bahwa proses pendidikan yang dilakukan oleh suatu lembaga pendidikan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.

Pendidikan merupakan sarana yang sangat strategis dalam melestarikan sistem nilai yang berkembang dalam kehidupan (Mundiri, 2012). Pekerja intelektual menjadi alat utama dalam meningkatkan produktivitas, dan pengetahuan menjadi sumber utama. Mengakses ke persatuan Eropa untuk sistem pendidikan Indonesia berarti tantangan baru yaitu perolehan Mutu, pengelolaan, mobilitas, dan respons yang lebih baik terhadap persyaratan dan perubahan.

Manajemen juga merupakan proses, terdiri atas kegiatan-kegiatan dalam upaya mencapai tujuan secara efisien. Pengelolaan di sekolah mendorong terwujudnya fleksibilitas atau keluwesan-keluwesan kepada sekolah, dan mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan) dan masyarakat (orang tua siswa, tokoh masyarakat, ilmuwan, pengusaha dan sebagainya), untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundangundangan yang berlaku. Mewujudkan mutu pendidikan dan memberikan pelayanan yang memuaskan pelanggan bukanlah pekerjaan yang mudah dan membutuhkan tahapan dan proses yang berkelanjutan.

Lembaga pendidikan dikatakan bermutu apabila mampu memberi layanan sesuai atau bahkan melebihi harapan guru, karyawan, peserta didik, dan pihak-pihak lain yang terkait, seperti orang tua, penyandang dana, pemerintah atau dunia kerja sebagai pengguna lulusan. Untuk memberikan jaminan terhadap mutu, lembaga pendidikan harus melakukan pengelolaan lembaga yang berorientasi pada mutu. Mutu pendidikan perlu dikelola dengan tertib dan kontinyu agar membawa hasil yang memuaskan. Maka diperlukan manajemen mutu pendidikan.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan pembahasan tentang konsep manajemen mutu dan standar mutu ISO dalam konteks dunia pendidikan, berikut adalah rumusan masalah yang dapat diidentifikasi:

- 1) Bagaimana konsep manajemen mutu dapat diterapkan dalam suatu lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan?
- 2) Apa saja tantangan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan dalam menerapkan konsep manajemen mutu?
- 3) Bagaimana standar mutu ISO dapat diterapkan dalam suatu lembaga pendidikan untuk memastikan bahwa proses pendidikan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan?

- 4) Apa saja manfaat yang dapat diperoleh oleh lembaga pendidikan dengan menerapkan konsep manajemen mutu dan standar mutu ISO?

C. Metodologi Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diidentifikasi, maka dalam penelitian ini kami menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan analisis isi.

Dengan alasan :

- 1) Metode penelitian kualitatif lebih sesuai untuk memahami konsep manajemen mutu dan standar mutu ISO dalam konteks dunia pendidikan.
- 2) Wawancara dapat memberikan informasi yang lebih mendalam dan detail tentang penerapan konsep manajemen mutu dan standar mutu ISO dalam lembaga pendidikan.
- 3) Analisis isi dapat membantu memahami konsep manajemen mutu dan standar mutu ISO dalam konteks dunia pendidikan.

Kelebihan:

- 1) Metode penelitian kualitatif dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang penerapan konsep manajemen mutu dan standar mutu ISO dalam lembaga pendidikan.
- 2) Wawancara dapat memberikan informasi yang lebih akurat dan reliable tentang penerapan konsep manajemen mutu dan standar mutu ISO dalam lembaga pendidikan.
- 3) Analisis isi dapat membantu memahami konsep manajemen mutu dan standar mutu ISO dalam konteks dunia pendidikan.

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan analisis isi, penelitian ini dapat memperoleh data yang akurat dan reliable untuk menjawab rumusan masalah yang telah diidentifikasi.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Manajemen

Dalam seluruh aspek kehidupan sangatlah diperlukan manajemen, dan sampai kapanpun manajemen tak akan terlepas dari kehidupan kita. Sebuah organisasi, perusahaan maupun instansi dan lembaga lainnya membutuhkan manajemen untuk pencapaian tujuan yang diharapkan dan pastinya direncanakan. Berbicara tentang manajemen, perlu kiranya kita mengetahui terlebih dahulu "Apa sih pengertian dari manajemen itu?" Asal muasal kata Manajemen di ambil dari kata To Manage yang memiliki arti mengatur. Secara global Manajemen merupakan suatu ilmu dan seni untuk mengelola sumberdaya melalui sebuah kegiatan yang dikerjakan sekelompok orang atau individual agar nantinya dapat mencapai tujuan yang diinginkan organisasi atau instansi itu sendiri.

Ada 4 hal utama yang dapat di ambil dari pengertian Manajemen, yakni:

- 1) Suatu seni dan ilmu
Manajemen dikatakan sebagai Ilmu karena secara prinsip atau konsep manajemen bisa dipelajari. Seni yang ada pada manajemen merupakan suatu keunikan pada setiap manajer dalam mengatur sumberdaya melalui

- kepemimpinannya pada sebuah instansi/organisasi.
- 2) Mengelola sumber daya
Untuk menghasilkan Output yang berbobot, maka sumberdaya harus dikelola dengan cara-cara jitu dan untuk dapat menunjang hasil yang berbobot itu pula diperlukan sumberdaya yang mumpuni dalam bidang manajemen. Proses dalam mengelola manajemen ini dapat ditemukan pada unsur-unsur manajemen.
 - 3) Pencapaian suatu tujuan
Tak dapat dipungkiri jika suatu instansi dan atau lembaga pasti memiliki tujuan, akan dibawa kemana dan dijadikan apa suatu lembaga tersebut pastinya sudah ada rancangan dan angan-angan tersendiri bagi sumber daya yang ada didalamnya, terlebih pimpinan yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap lembaga yang dipimpinnya.
 - 4) Kegiatan yang dikerjakan kelompok
Suatu kegiatan manajemen akan berhasil jika dilakukan secara bersama, karena manajemen akan timpang jika hanya berjalan serorang diri. Maka dari itu manajemen mau tidak mau harus melibatkan orang lain, dengan begitu akan timbul koordinasi antara pelaku manajemen. Nah, dengan adanya kegiatan berkelompok ini akan terjadi pembagian tugas atau job description pada para pelaku tersebut menjadi beberapa divisi.

B. Pengertian mutu

Pengertian mutu atau quality dapat ditinjau dari dua perspektif konsep. Pertama konsep mutu bersifat absolut atau mutlak, kedua konsep mutu bersifat relatif menurut Sallis (dalam Ali, 2009:334). Dalam konsep mutu absolut mutu merujuk pada sifat yang menggambarkan derajat baiknya suatu barang atau jasa yang diproduksi atau dipasok oleh suatu lembaga tertentu. Pada konsep mutu absolut derajat baiknya produk, barang atau jasa yang mencerminkan tingginya harga barang atau jasa tsb, dan tingginya standar penilaian lembaga yang memproduksi atau pemasok terhadap barang tsb. Sedangkan konsep mutu yang bersifat relatif, derajat mutu itu bergantung pada penilaian pelanggan.

Keterlibatan pelanggan dalam menentukan suatu produk, baik barang maupun jasa adalah dengan cara produsen mempertimbangkan harapan dan kebutuhan pelanggan terhadap produk-produk yang dihasilkan, apakah memuaskan atau memenuhi kebutuhan mereka.

menurut Rinehart (dalam Ali, 2009:343). Peran penting pelanggan dalam menentukan mutu dengan menekankan bahwa sebuah mutu yang dirasa dari sebuah produk atau jasa adalah faktor utama yang mempengaruhi kesuksesan produk atau jasa tersebut menurut Petters (dalam Sallis, 2010:57)..

Mutu merupakan kebutuhan utama setiap orang, setiap institusi bahkan setiap Negara, Sehingga muncul slogan Quality is everybody business, dimana usaha untuk memperoleh dan meningkatkan mutu merupakan agenda utama setiap orang. Mutu menjadi salah satu tantangan bagi institusi bisnis maupun pendidikan karena mereka dihadapkan pada persoalan bagaimana mengelola sebuah mutu dalam menghadapi persaingan global.

Mutu pertama kali muncul dalam dunia industri, namun dewasa ini mutu juga

menjadi kebutuhan dalam dunia pendidikan. Dalam dunia industri, mutu adalah nilai jual yang menjadi prioritas utama dan menjadi faktor pembeda yang dibutuhkan oleh konsumen, sedangkan dalam dunia pendidikan dapat diartikan sebagai derajat keunggulan suatu produk atau hasil kerja baik yang dapat dilihat maupun yang tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan.

Hal ini ditujukan agar institusi pendidikan mampu bertahan dalam dunia persaingan yang sangat kompetitif serta mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Terdapat banyak pengertian tentang mutu atau kualitas.

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, mutu adalah suatu nilai atau keadaan. Sementara pengertian lain tentang mutu dikemukakan oleh para ahli dilihat dari sudut pandang yang berbeda, sebagai berikut:

1. Crosby mendefinisikan mutu kualitas adalah *conformance to requirement*, yaitu sesuai yang diisyaratkan atau distandarkan. Suatu produk memiliki kualitas apabila sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan. Standar kualitas meliputi bahan baku, proses produksi dan produksi jadi.
2. Menurut Garvin sebagaimana dikutip oleh M.N. Nasution kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, manusia atau tenaga kerja, proses dan tugas, serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan atau konsumen. Selera atau harapan konsumen pada suatu produk selalu berubah sehingga kualitas produk juga harus berubah atau disesuaikan. Dengan perubahan kualitas produk tersebut, diperlukan perubahan atau peningkatan keterampilan tenaga kerja, perubahan proses produksi dan tugas, serta perubahan lingkungan organisasi agar produk dapat memenuhi atau melebihi harapan konsumen.
3. Menurut ISO 9000 : 2000, mutu adalah derajat/tingkat karakteristik yang melekat pada produk yang mencukupi persyaratan atau keinginan. Karakteristik disini berarti hal-hal yang dimiliki produk, antara lain
 - a. Karakteristik fisik (elektrikal, mekanikal, biological) seperti , mobil, rumah, dll,
 - b. Karakteristik perilaku (kejujuran, kesopanan). Ini biasanya produk yang berupa jasa seperti di rumah sakit atau asuransi perbankan,
 - c. Karakteristik sensori (bau, rasa) seperti minuman dan makanan.

Adapun indikator atau kriteria yang dapat dijadikan tolok ukur mutu pendidikan yaitu hasil akhir pendidikan, hasil langsung pendidikan (hasil langsung inilah yang dipakai sebagai titik tolak pengukuran mutu pendidikan suatu lembaga pendidikan, misal tes tertulis, daftar cek, anekdot, skala rating, dan skala sikap), proses pendidikan, instrumen input (alat berinteraksi dengan raw input, yakni siswa), serta raw input dan lingkungan.

Siapa yang seharusnya memutuskan apakah sebuah sekolah berhasil memberikan sebuah layanan yang memiliki mutu? Pelanggan adalah wasit terhadap mutu dan institusi sendiri tidak akan mampu bertahan tanpa mereka. Mutu dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang memuaskan dan melampaui keinginan dan kebutuhan pelanggan. Definisi ini disebut juga dengan istilah mutu sebagai persepsi (*quality in perception*). Mutu ini bisa disebut sebagai mutu yang hanya ada di mata

orang yang melihatnya. Ini merupakan definisi yang sangat penting. Sebab, ada satu resiko yang seringkali diabaikan dari definisi ini, yaitu kenyataan bahwa para pelanggan adalah pihak yang membuat keputusan terhadap mutu. Dan mereka melakukan penilaian tersebut dengan merujuk pada produk terbaik yang bisa bertahan dalam persaingan.

C. Konsep mutu pendidikan

Istilah mutu dan standar mutu sangat berimplikasi pada jaminan mutu. Untuk mengukur mutu diperlukan adanya standar mutu, yakni suatu paduan sifat-sifat barang atau jasa yang relatif baik dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan (lokal, nasional, dan global).

Berkaitan dengan standar mutu, mutu dapat dilihat dari dua sisi sebagai berikut: pertama, standar produk atau jasa yang ditunjukkan dengan adanya kesesuaian dengan spesifikasi yang ditetapkan, sesuai dengan penggunaan, produk tanpa cacat, serta sekali benar dan seterusnya. Kedua, standar untuk pelanggan yang ditunjukkan dengan adanya kepuasan pelanggan atau melebihi harapan pelanggan, dan setia kepada pelanggan menurut Sallis (dalam Sumardjoko, 2010:58).

ISO 9000 merupakan dokumen standar yang dapat diterapkan pada hampir keseluruhan kegiatan bisnis karena standar ISO-9000 dapat dipakai sebagai pedoman untuk desain manufaktur, penjualan, dan pelayanan untuk produk baik barang maupun jasa. Standar sistem mutu internasional seri ISO-9000 terdiri atas elemen-elemen berikut: (1) bagian pedoman (ISO-9001, ISO-9002, dan ISO-9004), (2) bagian seri sertifikasi (ISO-9001, ISO-9002, dan ISO-9003). ISO-9001 merupakan sistem mutu model untuk jaminan mutu dalam perencanaan, produksi, instalasi, dan layanan, ISO-9002 merupakan sistem mutu model untuk jaminan mutu dalam produksi, instalasi, dan layanan, dan ISO-9003 merupakan sistem mutu model untuk jaminan mutu dalam inspeksi akhir dan tes.

Penjaminan mutu pendidikan merupakan suatu konsep dalam manajemen mutu pendidikan. Dalam penerapan konsep ini setiap sekolah atau lembaga pendidikan diarahkan agar memberi jaminan bahwa pelayanan pendidikan yang diberikan itu memenuhi harapan pelanggannya. Sallis (2010:68)

Pelanggan dalam konteks pendidikan dibedakan antara lain: (a) pelanggan internal yang terdiri dari guru, tenaga kependidikan dan tenaga administrasi, (b) pelanggan eksternal yang terbagi menjadi dua pelanggan eksternal primer yaitu siswa dan pelanggan eksternal sekunder yaitu pemerintah, orang tua atau masyarakat yang membiayai pendidikan, dan pelanggan tersier yaitu lembaga atau pemakai lulusan. Keragaman pelanggan tersebut mengharuskan lembaga pendidikan lebih memfokuskan perhatian mereka terhadap keinginan pelanggan pendidikan. Untuk memenuhi keinginan dan harapan pelanggan pendidikan maka sebuah lembaga pendidikan atau sekolah memberikan penjaminan mutu pendidikan terhadap lembaga pendidikan atau sekolah. Standar-standar mutu yaitu:

Standar Produk dan Jasa

- a. Kesesuaian dengan spesifikasi.
- b. Kesesuaian dengan tujuan dan manfaat.
- c. Tanpa cacat (zero effects).
- d. Selalu baik sejak awal.

- e. Standar Pelanggan
- f. Kepuasan pelanggan.
- g. Memenuhi kebutuhan pelanggan.
- h. **Menyenangkan pelanggan**

D. Menejemen Mutu Pendidikan

Mutu harus secara sadar dikelola untuk memenuhi tuntutan masyarakat. Dari klaim sebelumnya kami menyimpulkan bahwa manajemen mutu adalah "bagian integral dari manajemen, yang berperan untuk mencapai sasaran mutu, yang tercermin tidak hanya dalam memberikan tetapi juga dalam meningkatkan mutu. Hal ini dicapai dengan mengelola kegiatan yang berasal dari mutu yang mapan. Kebijakan dan rencana, dan dilakukan dalam system mutu, menggunakan, antara lain, rencana pemantauan mutu yang tepat. Total Quality Manajement (TQM) atau manajemen mutu terpadu merupakan sistem manajemen yang dikembangkan di berbagai negara dalam menghadapi dunia yang cepat berubah dan penuh ketidakpastian dalam rangka menciptakan efektivitas dan kepuasan (satisfaction) (Mundiri, 2016).

Manajemen yang efisien dari suatu organisasi dicapai dengan menggunakan model yang berbeda. Salah satunya adalah sistem manajemen mutu. Dengan manajemen mutu sistem kami memahami "struktur, prosedur, proses dan sumber daya yang diperlukan lainnya yang diperlukan untuk penerapan manajemen mutu. Sebuah sistem mutu tidak dapat dipisahkan dari norma-norma dan standar internasional (standar) mutu. Standar adalah formalisasi prinsip-prinsip dasar mutu manajemen Semakin banyak entitas (tidak hanya bisnis terkait) berusaha untuk menyesuaikan sistem Mutunya sendiri dengan persyaratan, terutama, dari standar ISO 9000. Untuk diakreditasi ISO 9001 (dari tahun 2000), auditor independen harus menyatakan bahwa organisasi memenuhi persyaratan berikut dari standar: sistem manajemen mutu, pencatatan, komitmen manajemen terhadap mutu, manajemen sumber daya, produksi, dan pengukuran, analisis dan perbaikan.

Organisasi pendidikan tinggi mana pun yang ingin diakreditasi oleh sertifikat, harus melalui beberapa tahap: pengembangan sistem mutu yang mengimplementasikan persyaratan ISO 9000: 2000; pemilihan lembaga sertifikasi yang terakreditasi; pra-audit sistem mutu oleh lembaga sertifikasi; audit akhir dari sistem mutu setelah sertifikat diterbitkan; serangkaian audit yang lebih kecil setidaknya sekali setahun (Priyono, Bina, & Priyono, 2016).

Menurut beberapa pengalaman dari Uni Eropa, seluruh proses memperoleh sertifikat berlangsung antara 12 dan 18 bulan. Sertifikat ini berlaku untuk jangka waktu tiga tahun. Jaringan Eropa untuk Jaminan Mutu di Pendidikan Tinggi (ENQA) didirikan pada tahun 2000 dengan tujuan untuk membentuk lembaga untuk jaminan mutu dalam pendidikan tinggi. Pada tahun 2004, Jaringan mengubah namanya menjadi Asosiasi Eropa untuk Jaminan Mutu di Pendidikan Tinggi (Syafaruddin, Candra Wijaya, Ahmad Syukri Sitorus, 2015).

Tujuan utamanya adalah untuk mempromosikan kerja sama Eropa di bidang evaluasi dan jaminan Mutu di antara semua peserta yang terlibat dalam proses

jaminan Mutu. Agen ini didirikan di banyak negara, dan tujuan mereka diwujudkan melalui fungsi-fungsi berikut Jaminan Mutu dan peningkatan dalam pengertian tradisional. Untuk tujuan ini, lembaga harus mendorong institusi pendidikan tinggi untuk meningkatkan mutu pendidikan, terutama dengan mengevaluasinya. Proses evaluasi dibagi menjadi empat langkah, yang utama adalah penilaian diri (disediakan oleh lembaga pendidikan tinggi) dan penilaian eksternal (oleh para ahli independen). Peran lembaga adalah untuk memulai dan mengkoordinasikan proses evaluasi.

Melayani sebagai pusat di mana semua informasi yang tersedia mengenai implementasi dan jaminan sistem mutu dapat ditemukan. Strategi yang dalam perkembangan dalam penggunaan Manajemen Mutu Terpadu dalam dunia pendidikan adalah, institusi pendidikan memposisikan dirinya sebagai institusi jasa atau dengan kata lain menjadi industri jasa, yakni institusi yang memberikan pelayanan sesuai dengan keinginan para pelanggan. Oleh karena itu dalam memposisikan dirinya sebagai industri jasa, maka sebuah lembaga pendidikan harus memenuhi standar mutu. Konsep mutu dalam TQM ini harus memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan. Secara operasional, mutu ditentukan oleh dua faktor yaitu terpenuhinya spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya (Quality In Fact) dan terpenuhinya spesifikasi yang diharapkan (Quality In Perfection) menurut tuntutan dan kebutuhan pengguna jasa. Manajemen Mutu Terpadu dalam pendidikan mencoba untuk memaksimalkan daya saing organisasi pendidikan melalui perbaikan berkelanjutan, input, proses, output, jasa, manusia, serta lingkungan yang memiliki prinsip-prinsip utama yaitu tetap fokus pada peserta didik, obsesi terhadap kualitas, pendekatan ilmiah, komitmen jangka panjang, kerja sama tim. Perbaikan sistem secara berkesinambungan, pelatihan dan pengembangan, kebebasan yang terkendali serta adanya satu kesatuan tujuan yang dilakukan dalam proses yang sistematis melalui pola PDCA yang terdiri dari langkah perencanaan, melaksanakan rencana, memeriksa hasil pelaksanaan rencana dan melakukan tindakan korektif terhadap hasil yang diperoleh.

Sedangkan Mutu pendidikan yang baik memiliki standar. Oleh karena itu, secara nasional diberlakukanlah standar-standar mutu pendidikan, yang disebut Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dalam pasal 2 ayat 1 PP No. 19 tahun 2005 dinyatakan bahwa ruang lingkup SNP meliputi:

- (1) standar isi;
- (2) standar proses;
- (3) standar kompetensi lulusan;
- (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan;
- (5) standar sarana dan prasarana;
- (6) standar pengelolaan sekolah;
- (7) standar pembiayaan, dan
- (8) standar penilaian pendidikan.

Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat (6) mengemukakan bahwa standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

Ruang lingkup standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah menurut Permendiknas RI No. 41 Tahun 2007 mencakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran. Standar proses telah menempatkan guru pada posisi yang strategis dalam proses mengajar siswa, karena mengajar memerlukan tanggung jawab moral yang cukup berat. Keberhasilan pendidikan bergantung pada pertanggungjawaban guru dalam melaksanakan tugas mengajarnya.

2.1. Standar mutu ISO

A. Definisi dan tujuan standar mutu ISO

A.1. Definisi standar mutu ISO dan tujuannya

Definisi Standar Mutu ISO adalah serangkaian standar internasional yang digunakan untuk memastikan bahwa produk atau jasa memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Standar mutu ISO dikembangkan oleh Organisasi Internasional untuk Standardisasi (ISO) dan telah diadopsi oleh lebih dari 160 negara di seluruh dunia.

A.2. Sejarah dan perkembangan standar mutu ISO

a. Sejarah Standar Mutu ISO

Standar mutu ISO memiliki sejarah yang panjang dan kompleks. Berikut adalah beberapa tahap penting dalam sejarah standar mutu ISO:

1. 1947: Organisasi Internasional untuk Standardisasi (ISO) didirikan pada tahun 1947 dengan tujuan untuk mengembangkan standar internasional untuk berbagai bidang, termasuk mutu.
2. 1950-an: ISO mulai mengembangkan standar mutu untuk berbagai bidang, termasuk industri manufaktur dan jasa.
3. 1960-an: ISO mengembangkan standar mutu yang pertama, yaitu ISO 9001, yang diterbitkan pada tahun 1969.
4. 1970-an: ISO terus mengembangkan standar mutu untuk berbagai bidang, termasuk lingkungan dan kesehatan.

b. Perkembangan Standar Mutu ISO

Standar mutu ISO terus berkembang seiring dengan perubahan kebutuhan industri dan masyarakat. Berikut adalah beberapa perkembangan penting dalam standar mutu ISO:

1. ISO 9001:1987: Versi pertama dari standar mutu ISO 9001 yang diterbitkan pada tahun 1987.
2. ISO 9001:1994: Versi kedua dari standar mutu ISO 9001 yang diterbitkan pada tahun 1994.
3. ISO 9001:2000: Versi ketiga dari standar mutu ISO 9001 yang diterbitkan pada tahun 2000.
4. ISO 9001:2008: Versi keempat dari standar mutu ISO 9001 yang diterbitkan pada tahun 2008.
5. ISO 9001:2015: Versi kelima dari standar mutu ISO 9001 yang diterbitkan pada tahun 2015.

B. Perubahan dalam Standar Mutu ISO

Perubahan dalam standar mutu ISO mencakup:

Penggunaan bahasa yang lebih sederhana: Standar mutu ISO yang baru menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan mudah dipahami.

1. Pengintegrasian dengan standar lain: Standar mutu ISO yang baru dapat diintegrasikan dengan standar lain, seperti standar lingkungan dan kesehatan.
2. Penggunaan teknologi informasi: Standar mutu ISO yang baru dapat menggunakan teknologi informasi untuk memantau dan mengontrol proses.
3. Penglibatan seluruh pihak: Standar mutu ISO yang baru menekankan pentingnya penglibatan seluruh pihak dalam proses manajemen mutu.

C. Prinsip – prinsip standar mutu ISO

Prinsip-Prinsip Standar Mutu ISO

- Fokus pada Pelanggan: Memahami kebutuhan dan harapan pelanggan, serta berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
- Penglibatan Seluruh Pihak: Menglibatkan seluruh pihak dalam proses manajemen mutu, termasuk karyawan, supplier, dan pelanggan.
- Pendekatan Proses: Menggunakan pendekatan proses untuk memastikan bahwa produk atau jasa memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.
- Peningkatan Berkelanjutan: Berusaha untuk meningkatkan kualitas produk atau jasa secara berkelanjutan, dengan cara mengidentifikasi dan mengatasi kesalahan dan kelemahan.
- Pengambilan Keputusan Berdasarkan Fakta: Menggunakan data dan fakta untuk pengambilan keputusan, serta memastikan bahwa keputusan tersebut berdasarkan pada analisis yang akurat dan objektif.
 1. Pengembangan dan Peningkatan Kemampuan: Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan karyawan untuk memastikan bahwa mereka memiliki kemampuan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan mereka secara efektif.
 2. Kemitraan dengan Supplier: Mengembangkan kemitraan dengan supplier untuk memastikan bahwa produk atau jasa yang diterima memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.

D. Jenis – jenis Standar Mutu ISO

1. ISO 9001:1994: Versi kedua dari standar mutu ISO 9001 yang diterbitkan pada tahun 1994.
2. ISO 9001:2000: Versi ketiga dari standar mutu ISO 9001 yang diterbitkan pada tahun 2000.
3. ISO 9001:2008: Versi keempat dari standar mutu ISO 9001 yang diterbitkan pada tahun 2008.
4. ISO 9001:2015: Versi kelima dari standar mutu ISO 9001 yang diterbitkan pada tahun 2015.

E. Manfaat Standar Mutu ISO

Manfaat Standar Mutu ISO

- a. Meningkatkan Kualitas: Standar mutu ISO membantu organisasi meningkatkan kualitas produk atau jasa mereka dengan memastikan

bahwa proses produksi atau penyediaan jasa memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.

- b. Meningkatkan Kepercayaan: Standar mutu ISO membantu organisasi meningkatkan kepercayaan pelanggan dan stakeholder lainnya dengan memastikan bahwa produk atau jasa memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.
- c. Meningkatkan Efisiensi: Standar mutu ISO membantu organisasi meningkatkan efisiensi proses produksi atau penyediaan jasa dengan memastikan bahwa proses tersebut dilakukan secara efektif dan efisien.
- d. Meningkatkan Daya Saing: Standar mutu ISO membantu organisasi meningkatkan daya saing mereka di pasar global dengan memastikan bahwa produk atau jasa memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.
- e. Meningkatkan Keselamatan dan Kesehatan: Standar mutu ISO membantu organisasi meningkatkan keselamatan dan kesehatan dengan memastikan bahwa produk atau jasa tidak membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia.
- f. Meningkatkan Produktivitas: Standar mutu ISO membantu organisasi meningkatkan produktivitas dengan memastikan bahwa proses produksi atau penyediaan jasa dilakukan secara efektif dan efisien.
- g. Meningkatkan Kepuasan Pelanggan: Standar mutu ISO membantu organisasi meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memastikan bahwa produk atau jasa memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.
- h. Meningkatkan Pengembangan Bisnis: Standar mutu ISO membantu organisasi meningkatkan pengembangan bisnis dengan memastikan bahwa proses produksi atau penyediaan jasa dilakukan secara efektif dan efisien.

E. Perubahan dalam Standar Mutu ISO

Perubahan dalam standar mutu ISO mencakup:

1. Penggunaan bahasa yang lebih sederhana: Standar mutu ISO yang baru menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan mudah dipahami.
2. Pengintegrasian dengan standar lain: Standar mutu ISO yang baru dapat diintegrasikan dengan standar lain, seperti standar lingkungan dan kesehatan.
3. Penggunaan teknologi informasi: Standar mutu ISO yang baru dapat menggunakan teknologi informasi untuk memantau dan mengontrol proses.
4. Penglibatan seluruh pihak: Standar mutu ISO yang baru menekankan pentingnya penglibatan seluruh pihak dalam proses manajemen mutu.

2.3. Standar mutu ISO dalam dunia Pendidikan

Standar mutu ISO dapat diterapkan dalam suatu lembaga pendidikan dengan cara mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan lembaga pendidikan, kemudian memilih standar ISO yang relevan dengan kebutuhan tersebut. Setelah itu, lembaga pendidikan harus membentuk tim yang terdiri dari staf dan guru untuk mengembangkan dan menerapkan sistem manajemen mutu.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan standar mutu ISO dalam lembaga pendidikan adalah kurangnya sumber daya, kurangnya pengetahuan

tentang standar ISO, dan kurangnya komitmen dari pihak manajemen dan staf. Selain itu, perubahan budaya organisasi juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi penerapan standar mutu ISO.

Penerapan standar mutu ISO dapat meningkatkan kualitas pendidikan dalam lembaga pendidikan dengan cara memastikan bahwa semua proses pendidikan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Selain itu, penerapan standar mutu ISO juga dapat meningkatkan efisiensi proses pendidikan dan memastikan bahwa proses pendidikan dilakukan secara efektif dan efisien.

Manfaat penerapan standar mutu ISO dalam lembaga pendidikan adalah meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan meningkatkan efisiensi proses pendidikan. Selain itu, penerapan standar mutu ISO juga dapat memastikan bahwa proses pendidikan dilakukan secara efektif dan efisien.

KESIMPULAN

Konsep mutu dan standar mutu ISO adalah dua hal yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas produk atau jasa dalam suatu organisasi. Mutu adalah suatu kondisi yang memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan, sedangkan standar mutu ISO adalah serangkaian standar internasional yang digunakan untuk memastikan bahwa produk atau jasa memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Begitu juga Konsep mutu dan standar mutu ISO sangat relevan dengan pendidikan, karena pendidikan juga memerlukan standar kualitas yang tinggi untuk memastikan bahwa lulusan memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai.

Prinsip-Prinsip Standar Mutu ISO

Standar mutu ISO berdasarkan pada beberapa prinsip, yaitu:

1. Fokus pada pelanggan
2. Partisipasi seluruh pihak
3. Pendekatan proses
4. Peningkatan berkelanjutan
5. Pengambilan keputusan berdasarkan fakta

Manfaat Standar Mutu ISO

Standar mutu ISO memiliki beberapa manfaat, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas produk atau jasa
2. Meningkatkan kepercayaan pelanggan
3. Meningkatkan efisiensi proses
4. Meningkatkan daya saing organisasi
5. Meningkatkan keselamatan dan kesehatan

Implementasi Standar Mutu ISO

Implementasi standar mutu ISO memerlukan beberapa langkah, yaitu:

1. Identifikasi kebutuhan dan tujuan organisasi
2. Pemilihan standar mutu ISO yang relevan

3. Pembentukan tim implementasi
4. Analisis proses dan identifikasi area perbaikan
5. Pengembangan sistem manajemen mutu

Dengan demikian, konsep mutu dan standar mutu ISO adalah dua hal yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas produk atau jasa dalam suatu organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

1. ISO. (2015). *ISO 9001:2015. International Organization for Standardization.*
2. Oakland, J. S. (2014). *Total Quality Management: Text with Cases. Routledge.*
3. Dale, B. G. (2015). *Managing Quality. Wiley.*

Jurnal

1. *Journal of Quality Management*
2. *International Journal of Quality & Reliability Management*
3. *Total Quality Management & Business Excellence*

Sumber Online

1. *Situs web resmi ISO ((link unavailable))*
2. *Situs web resmi International Organization for Standardization ((link unavailable))*
3. *Artikel-artikel tentang standar mutu ISO dan implementasinya dalam pendidikan dari*

sumber-sumber online yang terpercaya.

4. *pengantar – standart – MUTU ISO-9001*

Dokumen-Dokumen Resmi

1. *Dokumen-dokumen resmi dari ISO tentang standar mutu ISO*
2. *Dokumen-dokumen resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang implementasi standar mutu ISO dalam pendidikan*

HAKEKAT MUTU DAN MANAJEMEN MUTU

Muhammad Irfan Rohimiansyah, 24052170026 & Riza Kurnia, 24052160004

PENDAHULUAN

D. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu pilar fundamental dalam pembangunan suatu bangsa. Di era globalisasi yang semakin kompleks ini, tuntutan terhadap mutu pendidikan semakin meningkat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Lembaga pendidikan dituntut untuk dapat menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki pengetahuan akademis yang baik, tetapi juga keterampilan dan karakter yang sesuai dengan kebutuhan zaman.

Dalam konteks Indonesia, isu mutu pendidikan masih menjadi tantangan yang signifikan. Berbagai indikator menunjukkan bahwa mutu pendidikan di Indonesia masih perlu ditingkatkan, mulai dari capaian hasil belajar siswa, kualifikasi dan kompetensi pendidik, sarana prasarana, hingga sistem manajemen pendidikan. Kesenjangan mutu pendidikan antar daerah juga masih menjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius.

Manajemen mutu dalam dunia pendidikan hadir sebagai sebuah pendekatan sistematis untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara menyeluruh. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada hasil akademis siswa, tetapi juga pada seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan, termasuk proses pembelajaran, pengembangan sumber daya manusia, pengelolaan sarana prasarana, dan hubungan dengan pemangku kepentingan. Implementasi manajemen mutu dalam pendidikan menjadi semakin krusial mengingat pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang akan menentukan masa depan generasi penerus bangsa.

Namun demikian, penerapan manajemen mutu dalam dunia pendidikan menghadapi berbagai tantangan. Beberapa kendala yang sering ditemui antara lain kurangnya pemahaman tentang konsep mutu pendidikan yang holistik, keterbatasan sumber daya, resistensi terhadap perubahan, dan kesulitan dalam mengukur dan mengevaluasi capaian mutu pendidikan secara komprehensif. Di sisi lain, perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan masyarakat menuntut lembaga pendidikan untuk terus beradaptasi dan meningkatkan mutunya.

Berdasarkan kompleksitas permasalahan tersebut, menjadi penting untuk mengkaji lebih dalam tentang Hakekat mutu dan manajemen mutu dalam konteks pendidikan. Pemahaman yang mendalam tentang kedua aspek ini akan membantu para pemangku kepentingan pendidikan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen mutu yang efektif, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan secara berkelanjutan.

E. Rumsan Masalah

1. Bagaimana Hakekat mutu dalam konteks Pendidikan dan apa saja komponen yang mempengaruhi mutu Pendidikan?
2. Bagaimana manajemen mutu dalam Lembaga Pendidikan?
3. Bagaimana strategi yang efektif untuk meningkatkan mutu Pendidikan melalui pendekatan manajemen mutu ?

F. Tujuan

1. Memahami Hakekat mutu dalam konteks Pendidikan dan apa saja komponen yang mempengaruhi mutu Pendidikan
2. Memahami manajemen mutu dalam Lembaga Pendidikan
3. Merumuskan dan menganalisis strategi yang efektif untuk meningkatkan mutu Pendidikan melalui pendekatan manajemen mutu

LANDASAN TEORI TEORI

A. Hakekat Mutu

Mutu adalah konsep yang menggambarkan tingkat keunggulan atau kualitas suatu produk, layanan, proses, atau sistem dalam memenuhi atau melebihi harapan dan kebutuhan pelanggan. Pengertian mutu dapat bervariasi tergantung pada perspektif dan konteksnya

Mutu adalah kemampuan (ability) yang dimiliki oleh satuan produk atau jasa (services), yang dapat memenuhi kebutuhan atau harapan kepuasan (satisfaction) pelanggan (customers). Dalam dunia pendidikan, pelanggan

dikelompokkan menjadi dua, yaitu internal customer dan external customer. Internal customer yaitu siswa atau mahasiswa sebagai pembelajar (learners), dan external customer yaitu masyarakat dan dunia industri.

Menurut W. Edwards Deming, seorang pionir dalam manajemen mutu, mendefinisikan mutu sebagai kesesuaian dengan kebutuhan pasar atau konsumen. Artinya, suatu produk atau layanan dianggap bermutu jika mampu memenuhi atau melebihi harapan konsumen, sehingga menghasilkan kepuasan dan loyalitas pelanggan.

Deming menekankan bahwa masalah mutu berkaitan erat dengan manajemen. Untuk meningkatkan mutu, ia merekomendasikan 5 prinsip di antaranya meliputi:

1. Menciptakan tujuan yang mantap untuk perbaikan produk dan layanan: Organisasi harus memiliki komitmen jangka panjang untuk terus meningkatkan produk dan layanan mereka.
2. Mengadopsi filosofi baru: Manajemen harus menerima era baru dengan meninggalkan praktik lama yang tidak efektif dan berfokus pada peningkatan mutu secara berkelanjutan.
3. Menghentikan ketergantungan pada inspeksi massal: Alih-alih mengandalkan inspeksi untuk memastikan mutu, proses produksi harus dirancang sedemikian rupa sehingga cacat dapat dicegah sejak awal.
4. Mengakhiri praktik penawaran berdasarkan harga saja: Organisasi sebaiknya tidak memilih pemasok hanya berdasarkan harga terendah, tetapi juga mempertimbangkan kualitas dan keandalan.
5. Meningkatkan sistem produksi dan layanan secara konstan: Ada kebutuhan untuk perbaikan terus-menerus dalam proses dan sistem untuk meningkatkan mutu dan produktivitas.
- 6.

Prinsip-prinsip ini menekankan pentingnya pendekatan sistematis dan berkelanjutan dalam manajemen untuk mencapai dan mempertahankan mutu yang tinggi. Menurut David A. Garvin, seorang pakar manajemen kualitas, mengidentifikasi delapan dimensi mutu yang dapat digunakan untuk menganalisis karakteristik kualitas suatu produk atau layanan. Meskipun awalnya diterapkan pada produk manufaktur, dimensi-dimensi ini juga dapat diadaptasi untuk konteks pendidikan guna memahami dan meningkatkan mutu pendidikan. Berikut adalah delapan dimensi tersebut:

1. Kinerja (Performance): Mengacu pada karakteristik utama yang menjadi pertimbangan pelanggan atau pemangku kepentingan. Dalam konteks pendidikan, ini bisa berarti efektivitas proses pembelajaran dan pencapaian akademik siswa.
2. Fitur (Features): Merupakan karakteristik tambahan atau pelengkap yang meningkatkan daya tarik. Dalam pendidikan, ini dapat berupa program ekstrakurikuler, fasilitas pendukung, atau layanan tambahan yang ditawarkan oleh institusi pendidikan.
3. Keandalan (Reliability): Menggambarkan konsistensi dan kepercayaan terhadap kinerja. Dalam pendidikan, ini berkaitan dengan konsistensi dalam penyampaian materi, evaluasi, dan hasil belajar siswa.
4. Kesesuaian (Conformance): Tingkat kesesuaian dengan standar atau spesifikasi yang ditetapkan. Dalam konteks pendidikan, ini bisa berarti

- sejauh mana kurikulum dan proses pembelajaran memenuhi standar nasional atau internasional yang berlaku.
5. Daya Tahan (Durability): Mengacu pada umur panjang atau keberlanjutan. Dalam pendidikan, ini dapat diartikan sebagai kemampuan institusi untuk mempertahankan kualitas pendidikan dan relevansi programnya seiring waktu.
 6. Kemampuan Pelayanan (Serviceability): Kemudahan dalam mendapatkan layanan perbaikan atau dukungan. Dalam konteks pendidikan, ini bisa merujuk pada ketersediaan layanan bimbingan, konseling, dan dukungan akademik bagi siswa.
 7. Estetika (Aesthetics): Aspek keindahan atau penampilan. Dalam pendidikan, ini dapat berkaitan dengan lingkungan belajar yang nyaman, desain fasilitas yang menarik, dan suasana kampus yang kondusif.
 8. Kualitas yang Dipersepsikan (Perceived Quality): Persepsi atau reputasi kualitas di mata masyarakat. Dalam konteks pendidikan, ini berkaitan dengan reputasi institusi, persepsi publik terhadap kualitas lulusan, dan citra sekolah atau universitas di mata masyarakat.

Dengan memahami dan menerapkan delapan dimensi mutu ini, institusi pendidikan dapat melakukan evaluasi yang komprehensif terhadap berbagai aspek operasional dan layanan mereka, sehingga dapat merancang strategi peningkatan mutu yang lebih efektif dan berkelanjutan.

B. Manajemen Mutu

Manajemen mutu telah mengalami evolusi sejak awal abad ke-20. Awalnya, konsep ini dipopulerkan oleh Frederick W. Taylor melalui pendekatan scientific management, yang menekankan pada efisiensi dan standarisasi proses. Kemudian, Walter A. Shewhart memperkenalkan konsep pengendalian kualitas statistik (statistical quality control) pada tahun 1920-an.

Pada pertengahan abad ke-20, W. Edwards Deming dan Joseph Juran membawa revolusi dalam manajemen mutu dengan memperkenalkan pendekatan yang lebih holistik. Deming menekankan pentingnya manajemen yang berbasis data dan perbaikan berkelanjutan, sementara Juran memperkenalkan konsep "Trilogi Juran" yang terdiri dari perencanaan kualitas, pengendalian kualitas, dan perbaikan kualitas.

Di Jepang, konsep manajemen mutu berkembang pesat melalui pendekatan Total Quality Management (TQM), yang menekankan pada partisipasi seluruh anggota organisasi dan fokus pada kepuasan pelanggan.

Total Quality Management (TQM) adalah pendekatan manajemen mutu yang berfokus pada peningkatan kualitas secara menyeluruh dalam organisasi. Menurut Oakland (2003), TQM melibatkan semua level organisasi, dari manajemen puncak hingga karyawan tingkat bawah, dalam upaya mencapai kepuasan pelanggan dan perbaikan berkelanjutan.

Beberapa elemen kunci TQM meliputi:

1. Kepemimpinan: Peran manajemen puncak dalam memimpin dan mendukung inisiatif TQM.

2. Pelatihan dan pengembangan: Memberikan pelatihan kepada karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka.
3. Komunikasi: Membangun komunikasi yang efektif antar departemen dan level organisasi.
4. Pengukuran dan evaluasi: Menggunakan metrik dan indikator kinerja untuk mengevaluasi kemajuan.

Manajemen mutu dalam pendidikan adalah pendekatan sistematis yang bertujuan untuk memastikan dan meningkatkan kualitas proses dan hasil pendidikan secara berkelanjutan. Pendekatan ini melibatkan perencanaan, pengendalian, penjaminan, dan peningkatan mutu melalui partisipasi aktif semua pemangku kepentingan, termasuk pendidik, tenaga kependidikan, siswa, orang tua, dan masyarakat

Manajemen mutu dalam pendidikan berfokus pada pemenuhan standar kualitas yang telah ditetapkan dan peningkatan berkelanjutan dalam semua aspek operasional institusi pendidikan. Hal ini mencakup pengelolaan input, proses, dan output pendidikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut sebuah sumber, manajemen mutu pendidikan melibatkan tiga model utama: input, proses, dan output.

Adapun prinsip-prinsip manajemen mutu dalam pendidikan yaitu:

1. Fokus pada Pelanggan: Memahami dan memenuhi kebutuhan serta harapan siswa, orang tua, dan masyarakat sebagai pelanggan utama dalam pendidikan.
2. Keterlibatan Semua Pihak: Mendorong partisipasi aktif dari seluruh anggota institusi pendidikan, termasuk staf pengajar, staf administrasi, dan siswa, dalam upaya peningkatan mutu.
3. Pendekatan Proses: Mengelola aktivitas dan sumber daya sebagai proses yang saling terkait untuk mencapai hasil yang efisien dan efektif.
4. Perbaikan Berkelanjutan: Melakukan evaluasi dan peningkatan secara terus-menerus terhadap proses dan sistem pendidikan untuk mencapai kinerja yang lebih baik.
5. Pengambilan Keputusan Berbasis Data: Menggunakan data dan informasi yang akurat sebagai dasar dalam pengambilan keputusan untuk perbaikan mutu.
6. Hubungan yang Saling Menguntungkan dengan Pemasok: Membangun hubungan kerjasama yang baik dengan pihak-pihak yang menyediakan sumber daya dan layanan pendukung pendidikan.

Implementasi manajemen mutu dalam pendidikan penerapan manajemen mutu dalam pendidikan melibatkan beberapa langkah strategis, antara lain:

1. Penetapan Kebijakan Mutu: Menyusun dan mengkomunikasikan kebijakan mutu yang jelas sebagai pedoman bagi seluruh anggota institusi pendidikan.
2. Perencanaan Mutu: Merencanakan tujuan dan sasaran mutu yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (SMART).
3. Pengendalian Mutu: Memantau dan mengendalikan proses pendidikan untuk memastikan kesesuaian dengan standar yang ditetapkan.
4. Penjaminan Mutu: Melakukan audit dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu berjalan efektif.
5. Peningkatan Mutu: Mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan mengambil tindakan korektif serta preventif untuk meningkatkan mutu secara keseluruhan.

Manfaat manajemen mutu dalam pendidikan dengan menerapkan manajemen mutu, institusi pendidikan dapat mencapai berbagai manfaat, seperti:

1. Meningkatkan kepuasan siswa dan orang tua melalui layanan pendidikan yang berkualitas.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional institusi pendidikan.
3. Meningkatkan reputasi dan daya saing institusi pendidikan di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.
4. Mendorong budaya perbaikan berkelanjutan di lingkungan pendidikan.
5. Memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar pendidikan yang berlaku.

Secara keseluruhan, manajemen mutu dalam pendidikan adalah pendekatan integral yang memastikan bahwa setiap aspek dari proses pendidikan dikelola dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal dan berkelanjutan.

C. Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan

Mutu pendidikan merujuk pada tingkat keunggulan dan efektivitas proses pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan. Menurut Depdiknas (2003), mutu pendidikan adalah kemampuan lembaga pendidikan dalam mengelola proses pembelajaran untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar yang ditetapkan. Mutu pendidikan tidak hanya dilihat dari hasil akademik, tetapi juga dari aspek afektif dan psikomotorik peserta didik.

Beberapa indikator mutu pendidikan antara lain:

1. Kualitas input: Kualitas peserta didik, tenaga pendidik, dan sarana prasarana.
2. Proses pembelajaran: Efektivitas metode pengajaran, kurikulum, dan manajemen kelas.
3. Output dan outcome: Prestasi akademik, keterampilan hidup, dan kontribusi lulusan terhadap masyarakat.

Peningkatan mutu pendidikan merupakan hal yang krusial dalam menghadapi tantangan global dan tuntutan masyarakat akan sumber daya manusia yang kompeten. Menurut UNESCO (2015), pendidikan berkualitas adalah kunci untuk mencapai pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Peningkatan mutu pendidikan tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga bagi masyarakat dan negara secara keseluruhan.

Beberapa alasan pentingnya peningkatan mutu pendidikan:

1. Meningkatkan daya saing bangsa: Pendidikan berkualitas menghasilkan sumber daya manusia yang mampu bersaing di tingkat global.
2. Mengurangi kesenjangan sosial: Pendidikan yang merata dan berkualitas dapat mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi.
3. Mempersiapkan generasi masa depan: Pendidikan berkualitas mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi perubahan dan tantangan di masa depan.

Strategi peningkatan mutu pendidikan melibatkan berbagai aspek, mulai dari perencanaan, implementasi, hingga evaluasi. Beberapa strategi yang dapat diterapkan antara lain:

1. Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik

Tenaga pendidik memegang peran sentral dalam proses pembelajaran. Menurut Suryadi (2007), peningkatan kualitas guru dapat dilakukan melalui pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan profesional berkelanjutan. Guru yang kompeten dan motivasi tinggi akan mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan inspiratif.

2. Pengembangan Kurikulum yang Relevan

Kurikulum harus dirancang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan zaman. Nana Syaodih Sukmadinata (2010) menyatakan bahwa kurikulum yang baik harus fleksibel, inovatif, dan berorientasi pada pengembangan keterampilan abad ke-21, seperti berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi.

3. Pemanfaatan Teknologi dalam Pembelajaran

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan mutu pendidikan. Rosenberg (2001) menjelaskan bahwa integrasi TIK dalam pembelajaran dapat meningkatkan aksesibilitas, interaktivitas, dan kualitas materi pembelajaran.

4. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah pendekatan yang memberikan otonomi kepada sekolah dalam mengelola sumber dayanya. Menurut Caldwell dan Spinks (1992), MBS dapat meningkatkan akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan efisiensi pengelolaan pendidikan.

5. Peningkatan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang memadai merupakan faktor penting dalam menunjang proses pembelajaran. Bafadal (2003) menyatakan bahwa sekolah harus memiliki fasilitas yang memadai, seperti perpustakaan, laboratorium, dan ruang kelas yang nyaman, untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.

6. Evaluasi dan Penjaminan Mutu

Evaluasi dan penjaminan mutu diperlukan untuk memastikan bahwa proses pendidikan berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Depdiknas menjelaskan bahwa sistem penjaminan mutu pendidikan meliputi evaluasi diri, audit internal, dan akreditasi sekolah.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas strategi peningkatan mutu pendidikan. Misalnya, Supriadi (2009) menemukan bahwa peningkatan kualitas guru melalui pelatihan dan sertifikasi secara signifikan meningkatkan hasil belajar siswa. Sementara itu, Rochmat (2015) menyatakan bahwa implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan akuntabilitas sekolah. Penelitian lain oleh Wahyudi (2018) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa. Selain itu, Hadi (2020) menemukan bahwa pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri dapat meningkatkan daya saing lulusan di pasar kerja.

PEMBAHASAN

A. Hakekat Mutu dalam Konteks Pendidikan

Mutu dalam konteks pendidikan merupakan konsep yang kompleks dan multidimensi., mutu pendidikan tidak hanya berkaitan dengan hasil akademik, tetapi juga mencakup aspek afektif dan psikomotorik peserta didik. Mutu pendidikan dapat dilihat dari tiga komponen utama, yaitu input, proses, dan output.

1. Input meliputi kualitas peserta didik, tenaga pendidik, dan sarana prasarana. Peserta didik yang memiliki motivasi tinggi dan latar belakang pendidikan yang baik akan lebih mudah mencapai hasil belajar yang optimal. Tenaga pendidik yang kompeten dan berkualitas juga menjadi faktor kunci dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Selain itu, sarana dan prasarana yang memadai, seperti perpustakaan, laboratorium, dan ruang kelas yang nyaman, turut mendukung proses pembelajaran yang berkualitas.
2. Proses pembelajaran merupakan jantung dari mutu pendidikan. Proses ini melibatkan metode pengajaran, kurikulum, manajemen kelas, dan interaksi antara guru dan siswa. Kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman dan metode pengajaran yang inovatif dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Selain itu, manajemen kelas yang baik akan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa.
3. Output dan outcome pendidikan mencerminkan hasil akhir dari proses pembelajaran. Output pendidikan meliputi prestasi akademik siswa, sedangkan outcome berkaitan dengan keterampilan hidup dan kontribusi lulusan terhadap masyarakat. Lulusan yang berkualitas tidak hanya memiliki pengetahuan akademis yang baik, tetapi juga keterampilan sosial dan karakter yang kuat.

B. Manajemen Mutu dalam Lembaga Pendidikan

Manajemen mutu dalam lembaga pendidikan adalah pendekatan sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan, manajemen mutu melibatkan perencanaan, pengendalian, penjaminan, dan peningkatan mutu melalui partisipasi aktif semua pemangku kepentingan.

1. Perencanaan Mutu

Perencanaan mutu melibatkan penetapan tujuan dan sasaran mutu yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (SMART). Misalnya, lembaga pendidikan dapat menetapkan target peningkatan nilai ujian nasional atau peningkatan partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler.

2. Pengendalian Mutu

Pengendalian mutu dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi terhadap proses pembelajaran. Hal ini dapat dilakukan melalui observasi kelas, evaluasi kinerja guru, dan analisis hasil belajar siswa. Dengan pengendalian mutu yang efektif, lembaga pendidikan dapat mengidentifikasi masalah sejak dini dan mengambil tindakan korektif.

3. Penjaminan Mutu

Penjaminan mutu melibatkan audit dan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu berjalan sesuai dengan standar yang

ditetapkan. Misalnya, lembaga pendidikan dapat melakukan evaluasi diri dan mengikuti proses akreditasi untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar nasional atau internasional.

4. Peningkatan Mutu

Peningkatan mutu dilakukan melalui identifikasi area yang memerlukan perbaikan dan implementasi tindakan korektif serta preventif. Misalnya, jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa metode pengajaran tertentu kurang efektif, lembaga pendidikan dapat mengadakan pelatihan bagi guru untuk meningkatkan keterampilan mengajar mereka.

C. Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Pendekatan Manajemen Mutu

Berdasarkan tinjauan teoritis dan praktik, terdapat beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui pendekatan manajemen mutu.

1. Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik

Tenaga pendidik memegang peran sentral dalam proses pembelajaran. Peningkatan kualitas guru dapat dilakukan melalui pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan profesional berkelanjutan. Misalnya, lembaga pendidikan dapat mengadakan workshop atau seminar untuk meningkatkan keterampilan pedagogis guru. Selain itu, program sertifikasi guru dapat memastikan bahwa guru memiliki kompetensi yang memadai untuk mengajar.

2. Pengembangan Kurikulum yang Relevan

Kurikulum harus dirancang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan zaman. Kurikulum yang baik harus fleksibel, inovatif, dan berorientasi pada pengembangan keterampilan abad ke-21, seperti berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi. Misalnya, lembaga pendidikan dapat mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) ke dalam kurikulum untuk mempersiapkan siswa menghadapi era digital.

3. Pemanfaatan Teknologi dalam Pembelajaran

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan mutu pendidikan. Integrasi TIK dalam pembelajaran dapat meningkatkan aksesibilitas, interaktivitas, dan kualitas materi pembelajaran. Misalnya, penggunaan platform pembelajaran online dapat memungkinkan siswa untuk mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja.

4. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah pendekatan yang memberikan otonomi kepada sekolah dalam mengelola sumber dayanya. MBS dapat meningkatkan akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Misalnya, sekolah dapat melibatkan orang tua dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

5. Peningkatan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang memadai merupakan faktor penting dalam menunjang proses pembelajaran. Lembaga pendidikan harus memastikan bahwa mereka memiliki fasilitas yang memadai, seperti perpustakaan, laboratorium, dan ruang kelas yang nyaman. Misalnya, sekolah dapat mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki atau membangun fasilitas baru yang mendukung proses pembelajaran.

6. Evaluasi dan Penjaminan Mutu

Evaluasi dan penjaminan mutu diperlukan untuk memastikan bahwa proses pendidikan berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Lembaga pendidikan dapat melakukan evaluasi diri, audit internal, dan mengikuti proses akreditasi untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Misalnya, sekolah dapat mengadakan evaluasi berkala terhadap kinerja guru dan hasil belajar siswa untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.

D. Implementasi Manajemen Mutu dalam Pendidikan

Implementasi manajemen mutu dalam pendidikan memerlukan komitmen dan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan, termasuk manajemen sekolah, guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan antara lain:

1. Penetapan Kebijakan Mutu

Lembaga pendidikan harus menyusun dan mengkomunikasikan kebijakan mutu yang jelas sebagai pedoman bagi seluruh anggota institusi. Kebijakan ini harus mencerminkan visi dan misi lembaga serta komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan.

2. Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, terutama tenaga pendidik, merupakan langkah penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Lembaga pendidikan dapat mengadakan pelatihan berkala untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan guru.

3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat, termasuk orang tua dan stakeholders lainnya, dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pendidikan. Misalnya, sekolah dapat membentuk komite sekolah yang melibatkan perwakilan orang tua dan masyarakat untuk memberikan masukan dalam pengambilan keputusan.

4. Penggunaan Data untuk Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan berbasis data merupakan prinsip penting dalam manajemen mutu. Lembaga pendidikan harus mengumpulkan dan menganalisis data secara berkala untuk mengevaluasi kinerja dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.

E. Tantangan dalam Penerapan Manajemen Mutu Pendidikan

Meskipun manajemen mutu memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, antara lain:

1. Keterbatasan Sumber Daya

Banyak lembaga pendidikan, terutama di daerah terpencil, menghadapi keterbatasan sumber daya, baik finansial maupun manusia. Hal ini dapat menghambat implementasi manajemen mutu yang efektif.

2. Resistensi terhadap Perubahan

Perubahan seringkali menimbulkan resistensi dari pihak-pihak yang merasa nyaman dengan status quo. Untuk mengatasi hal ini, lembaga pendidikan perlu melakukan sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan terhadap manajemen mutu.

3. Kesulitan dalam Mengukur Mutu Pendidikan

Mutu pendidikan adalah konsep yang kompleks dan sulit diukur secara kuantitatif. Lembaga pendidikan perlu mengembangkan indikator dan alat evaluasi yang komprehensif untuk mengukur mutu pendidikan secara holistik.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa mutu pendidikan merupakan aspek fundamental yang menentukan keberhasilan suatu bangsa dalam menghadapi tantangan global. Mutu pendidikan tidak hanya dilihat dari hasil akademik, tetapi juga mencakup aspek afektif dan psikomotorik peserta didik. Komponen utama yang memengaruhi mutu pendidikan meliputi input (peserta didik, tenaga pendidik, dan sarana prasarana), proses pembelajaran, serta output dan outcome (prestasi akademik dan kontribusi lulusan terhadap masyarakat).

Manajemen mutu dalam pendidikan adalah pendekatan sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan. Pendekatan ini melibatkan perencanaan, pengendalian, penjaminan, dan peningkatan mutu melalui partisipasi aktif semua pemangku kepentingan. Beberapa strategi yang efektif untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui pendekatan manajemen mutu meliputi peningkatan kualitas tenaga pendidik, pengembangan kurikulum yang relevan, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, manajemen berbasis sekolah (MBS), peningkatan sarana dan prasarana, serta evaluasi dan penjaminan mutu.

Implementasi manajemen mutu dalam pendidikan menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, resistensi terhadap perubahan, dan kesulitan dalam mengukur mutu pendidikan secara holistik. Namun, dengan komitmen dan partisipasi aktif dari semua pihak, tantangan tersebut dapat diatasi untuk mencapai peningkatan mutu pendidikan yang berkelanjutan.

SARAN

1. Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik
 - Lembaga pendidikan perlu secara rutin mengadakan pelatihan, workshop, dan program pengembangan profesional bagi guru untuk meningkatkan kompetensi pedagogis dan keterampilan mengajar.
 - Program sertifikasi guru harus terus ditingkatkan untuk memastikan bahwa tenaga pendidik memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.
2. Pengembangan Kurikulum yang Relevan
 - Kurikulum harus dirancang secara fleksibel dan inovatif, dengan mengintegrasikan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi.
 - Integrasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam kurikulum perlu diperluas untuk mempersiapkan siswa menghadapi era digital.
3. Pemanfaatan Teknologi dalam Pembelajaran
 - Lembaga pendidikan harus memanfaatkan platform pembelajaran online dan alat teknologi lainnya untuk meningkatkan aksesibilitas dan interaktivitas pembelajaran.
 - Pelatihan penggunaan teknologi bagi guru dan siswa perlu ditingkatkan agar mereka dapat memanfaatkan teknologi secara optimal.
4. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
 - Sekolah perlu diberikan otonomi yang lebih besar dalam mengelola sumber dayanya, dengan melibatkan partisipasi aktif dari orang tua dan masyarakat.
 - Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sekolah harus ditingkatkan melalui pembentukan komite sekolah yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
5. Peningkatan Sarana dan Prasarana
 - Pemerintah dan lembaga pendidikan harus mengalokasikan anggaran yang memadai untuk memperbaiki dan membangun fasilitas pendukung pembelajaran, seperti perpustakaan, laboratorium, dan ruang kelas yang nyaman.
 - Prioritas harus diberikan kepada sekolah-sekolah di daerah terpencil yang masih kekurangan sarana dan prasarana.
6. Evaluasi dan Penjaminan Mutu
 - Lembaga pendidikan perlu mengembangkan sistem evaluasi dan penjaminan mutu yang komprehensif, termasuk evaluasi diri, audit internal, dan proses akreditasi.
 - Indikator mutu pendidikan harus dirancang secara holistik, mencakup aspek akademik, afektif, dan psikomotorik.
7. Mengatasi Tantangan Implementasi
 - Untuk mengatasi keterbatasan sumber daya, pemerintah dan lembaga pendidikan perlu mencari sumber pendanaan alternatif, seperti kerja sama dengan pihak swasta atau organisasi non-pemerintah.
 - Sosialisasi dan pelatihan tentang pentingnya manajemen mutu perlu dilakukan untuk mengurangi resistensi terhadap perubahan di kalangan tenaga pendidik dan staf administrasi.

Dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan mutu pendidikan di Indonesia dapat terus ditingkatkan, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap menghadapi tantangan global di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bafadal, I. (2003). *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar: Dari Sentralisasi Menuju Desentralisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Caldwell, B. J., & Spinks, J. M. (1992). *Leading the Self-Managing School*. London: Falmer Press.
- Depdiknas. (2003). *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Depdiknas. (2005). *Panduan Penjaminan Mutu Pendidikan*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Deming, W. Edwards. (1986). *Out of the Crisis*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Garvin, D. A. (1987). *Competing on the Eight Dimensions of Quality*. Harvard Business Review.
- Hadi, S. (2020). Pengaruh Pengembangan Kurikulum terhadap Daya Saing Lulusan di Pasar Kerja. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 15(2), 45-60.
- Juran, J. M. (1988). *Juran on Planning for Quality*. New York: Free Press.
- Oakland, J. S. (2003). *Total Quality Management: Text with Cases*. Oxford: Butterworth-Heinemann.
- Rochmat, S. (2015). Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas Sekolah. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 10(1), 23-35.
- Rosenberg, M. J. (2001). *E-Learning: Strategies for Delivering Knowledge in the Digital Age*. New York: McGraw-Hill.
- Supriadi, D. (2009). Peningkatan Kualitas Guru melalui Pelatihan dan Sertifikasi: Dampaknya terhadap Hasil Belajar Siswa. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 12(3), 67-78.
- Suryadi, A. (2007). *Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Pelatihan dan Pengembangan Profesional Guru*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sukmadinata, N. S. (2010). *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- UNESCO. (2015). *Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives*. Paris: UNESCO Publishing.
- Wahyudi, A. (2018). Pemanfaatan Teknologi dalam Pembelajaran: Dampaknya terhadap Motivasi dan Prestasi Belajar Siswa. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 20(2), 89-102.
- Taylor, F. W. (1911). *The Principles of Scientific Management*. New York: Harper & Brothers.
- Shewhart, W. A. (1931). *Economic Control of Quality of Manufactured Product*. New York: D. Van Nostrand Company.

PRINSIP MODEL TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM)

Lini Suryani, 24052170011

BAB I PENDAHULUAN

1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah melakukan perubahan kebijakan dalam bidang Pendidikan. Kualitas dan jenjang Pendidikan menjadi tuntutan utama untuk mengalami perubahan, karena semakin tingginya persaingan global. Perubahan Pendidikan selalu terjadi sejalan dengan adanya perubahan budaya kehidupan. Perubahan Pendidikan memiliki tujuan meningkatnya Pendidikan untuk mendukung Pembangunan di masa depan. Pendidikan harus mematok potensi Nurani dan potensi akademik peserta didik. (Windryani & Afriansyah, 2019). Konsep Pendidikan akan menjadi bermanfaat saat memasuki ke dunia kerja, sehingga mampu menerapkan konsep Pendidikan yang di peroleh dari proses Pendidikan.

Menciptakan Pendidikan yang mempunyai mutu yang baik, bukan hanya tanggung jawab sekolah, tetapi juga menjadi tanggung jawab orang tua, atau semua pihak yang terlibat dalam Pendidikan tersebut. Pendidikan tidak akan berjalan jika tidak ada Kerjasama dari semua pihak yang terkait. Oleh karena itu, Pendidikan perlu di rancang secara sistematis supaya system dapat berjalan dengan efektif. Dalam suatu Pendidikan diperlukan sebuah manajemen, untuk mengatur jalur Pendidikan sebagai Pembangunan kemajuan Lembaga.

Standar utama di bentuknya system manajerial di Lembaga Pendidikan adalah memperoleh kualitas baik di setiap tahapan dalam Lembaga Pendidikan, yaitu input, proses dan output dari pengelolaan Lembaga pendidikan. Lembaga Pendidikan akan baik dan efektif apabila memiliki sumber daya manusia yang relevan. Sumber daya manusia yang memiliki kesiapan mengajar, mampu menyampaikan pembelajaran dengan baik, serta mampu beradaptasi dengan peserta didik. Pendidikan merupakan kebutuhan primer yang harus di miliki oleh individu karena salah satu pengukur keberhasilan Lembaga Pendidikan dapat dilihat dari proses pembelajaran.

Lembaga pendidikan merupakan tempat terjadinya kegiatan proses belajar mengajar. Dalam persaingan global, sebuah lembaga pendidikan atau organisasi yang ingin berkembang dituntut untuk menghasilkan kualitas pendidikan dengan mutu yang lebih baik, yang bersaing dan pelayanan yang terbaik. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan perbaikan mutu dalam segala aspek yang berkaitan dengan kualitas pendidikan dan layanan tersebut.

Penerapan prinsip-prinsip TQM dalam pendidikan vokasi banyak mendapat tantangan. Berbagai faktor yang mempengaruhi penerapan TQM, adanya keterbatasan sumber daya, perubahan, resistensi kompleksitas terhadap sistem pendidikan vokasi, dan lain sebagainya. (Indadihayati & Hariyanto, 2023)

Seiring perkembangan zaman, Lembaga Pendidikan harus inovatif guna memberikan jaminan mutu terbaik bagi Lembaga Pendidikan itu sendiri serta menjadi daya Tarik bagi Masyarakat untuk menitipkan anaknya di Lembaga

Pendidikan. Kualitas yang baik akan menghasilkan pengurangan biaya dan waktu yang efisien. Salah satu prinsip yang harus di terapkan dalam Lembaga Pendidikan adalah menerapkan model management mutu yaitu prinsip model Total Quality Management. Dengan penerapan model Total Quality Management mampu menghasilkan kualitas Lembaga Pendidikan.

2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka diperoleh rumusan masalah yaitu

- 1) Apakah prinsip model TQM dapat di adopsi di Lembaga Pendidikan?
- 2) bagaimana cara meningkatkan mutu Lembaga pendidikan dengan menggunakan Prinsip Model Total Quality Management?
- 3) Apakah penerapan model Total Quality Management berpengaruh signifikan terhadap Lembaga Pendidikan?

3 Metode penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini dijabarkan secara deskriptif. penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data di Lembaga Pendidikan secara langsung untuk menemukan masalah yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

Data yang diperoleh baik itu dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang dapat memberikan hasil secara langsung kepada peneliti. Pada penelitian ini, digunakan program QCC (Quality Control Circle) pada lembaga Pendidikan, yang mampu kualitas proses melalui kerjasama tim dan analisis data. Adapun yang menjadi objek dari penelitian ini adalah kepala satuan Pendidikan, Guru, Tenaga Kependidikan, Pustakawan, Pembina UKS, Siswa serta Scurity dalam Lembaga Pendidikan.

Sumber data sekunder berupa kelengkapan data penelitian berupa daftar Pustaka, dokumentasi kegiatan pada saat penelitian, hasil angket peserta didik, buku, jurnal maupun artikel untuk digunakan sebagai tambahan kelengkapan penelitian.

BAB III PEMBAHASAN

3. 1 Pengertian Total Quality Management

Menurut International Organization for Standarization (IOS) Total Quality Management (TQM) ialah pendekatan manajemen pada suatu organisasi, yang berpusat kepada kualitas, berdasarkan partisipasi semua anggotanya dan bertujuan untuk kesuksesan jangka panjang melalui kepuasan pelanggan, dan manfaat bagi semua anggota organisasi dan masyarakat. (Susanto et al, 2016) mendefinisikan total quality management (TQM) merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha untuk memaksimalkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus menerus pada produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungannya.

Total Quality Management (TQM) adalah sebuah kultur, dengan sifat yang tertanam di dalam kultur ini adalah sebuah komitmen terhadap kualitas dan sikap yang diperlihatkan melalui keterlibatan setiap individu dalam proses perbaikan produk maupun jasa secara berkala, melalui metode ilmiah yang

inovatif. TQM merupakan sistem manajemen yang mengangkat kualitas sebagai strategi usaha dan berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi.

3. 2 Prinsip-Prinsip Total Quality Management

Beberapa karakteristik TQM yaitu mencakup:

1. Perubahan kultur lembaga pendidikan memfasilitasi lingkungan yang kondusif untuk para pendidik dan staf seperti alat-alat keterampilan, sistem dan prosedur sederhana yang membantu pekerjaan mereka, penghargaan dan motivasi yang dapat meningkatkan kepercayaan diri serta memberdayakan setiap individu di dalamnya;
2. Organisasi terbalik, yaitu kepemimpinan dalam TQM yang berlangsung dari atas ke bawah (top-down). (Kajian Kritis Pendidikan Islam dan Manajemen Pendidikan Dasar & STIT Madani Yogyakarta, 2020)

Pada dasarnya karakteristik kepemimpinan juga mengandung prinsip-prinsip TQM yaitu:

1. Fokus pada pelanggan
2. Obsesi terhadap kualitas
3. Pemahaman mengenai struktur pekerjaan
4. Kebebasan yang terkendali
5. Kesatuan tujuan
6. Melacak kesalahan dalam sistem
7. Kerja sama tim
8. Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan (Rahmi, 2015)

Menurut (Rika Aryani, 2017) empat prinsip utama dalam TQM. Keempat prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepuasan pelanggan Semua usaha manajemen dalam TQM diarahkan pada satu tujuan utama yaitu terciptanya kepuasan pelanggan. Pelanggan haruslah merupakan prioritas utama organisasi, karena kelangsungan organisasi tergantung pada pelanggan
2. Respek terhadap setiap orang. Karyawan merupakan sumber daya organisasi yang paling bernilai. Oleh karena itu, setiap orang dalam organisasi harus diperlakukan dengan baik dan diberi kesempatan untuk terlibat dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan
3. Manajemen berdasarkan fakta. Maksudnya adalah setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan pada data, bukan pada perasaan (feeling). Dengan menggunakan data, maka manajemen dan tim dalam organisasi dapat fokus pada situasi yang vital. Dengan demikian, manajemen dapat memprediksikan hasil dari setiap keputusan dan tindakan yang dilakukan
4. Perbaikan berkesinambungan. Agar dapat sukses, setiap organisasi perlu melakukan proses sistematis dalam melaksanakan perbaikan secara berkesinambungan. Konsep yang berlaku di sini adalah siklus PDCAA (plan-do-check-act-analyze), yang terdiri dari langkah-langkah perencanaan, dan melakukan tindakan korektif terhadap hasil yang diperoleh.

3. 3 Implementasi Total Quality Management (TQM) Dalam Pendidikan

Untuk mencapai kualitas pendidikan, lembaga pendidikan (sekolah) harus dapat mengimplementasikan konsep strategi manajemen yang disebut

Total Quality Management (TQM), dilakukan dengan cara memproses perbaikan secara berkala terhadap seluruh komponen manajemen sekolah baik dari komponen bidang kurikulum, kesiswaan, kepegawaian, sarana dan prasarana, keuangan, dan layanan khusus (perpustakaan, serta Usaha Kesehatan Sekolah, cafeteria, dll).(Darmawan, P.A et all., 2021)

Implementasi Total Quality Management (TQM) dalam lembaga pendidikan Islam adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman akan nilai-nilai akidah Islam
Total Quality Management (TQM) adalah suatu pendekatan manajemen yang berfokus pada peningkatan kualitas secara menyeluruh dalam sebuah organisasi. Awal muncul dalam dunia industri, untuk penerapan dapat di adaptasi pada berbagai sektor, termasuk lembaga pendidikan. Lembaga Pendidikan Islam Salah satu contoh dalam penerapan TQM yaitu memastikan bahwa seluruh yang terlibat dalam lingkup pendidikan memiliki pemahaman yang kuat akan nilai-nilai Islam. Pemahaman tentang akhlak, etika kerja, dan nilai-nilai moral yang harus diterapkan dalam semua aspek kehidupan.
2. Pengembangan Kurikulum Berbasis Islam
Kurikulum harus menjadi fokus utama sesuai dengan prinsip-prinsip. Dalam kurikulum harus mencakup mata pelajaran agama Islam yang dominan dan pengintegrasian dalam pembelajaran lainnya. Memastikan anggota lembaga pendidikan memahami dan menerapkan nilai-nilai Islam dalam aspek kegiatan pendidikan. Nilai-nilai dasar yang harus dimiliki seperti kejujuran, integritas, keadilan, dan kasih sayang bagi semua keputusan dan tindakan. Pemimpin lembaga pendidikan harus menerapkan keteladanan pemimpin, komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai Islam, dan mendorong budaya organisasi yang konsisten dengan prinsip-prinsip TQM.
3. Kualitas Pendidikan dan pembelajaran
Kualitas pendidikan dan pembelajaran harus mengalami peningkatan dengan memperhatikan kualifikasi guru, metode pembelajaran yang efektif, dan pemantauan terhadap perkembangan siswa. Evaluasi reguler tentang kinerja guru dan siswa harus dilakukan untuk memastikan peningkatan berkelanjutan
4. Keterlibatan Orang tua dan masyarakat
Yang terlibat secara aktif dalam proses pendidikan adalah orang tua dan masyarakat, dengan memberikan umpan balik, dukungan, dan partisipasi dalam lembaga pendidikan. Keterlibatan orang tua dan masyarakat dapat memacu keberhasilan lembaga pendidikan, sehingga dapat dinilai bentuk kepuasan dalam mengidentifikasi area perbaikan dan harapan keberhasilan dapat dipenuhi.
5. Pemanfaatan teknologi
Pemanfaatan teknologi, seperti penggunaan platform pembelajaran dan sistem informasi sekolah, dapat membantu meningkatkan efisiensi administrasi dan pembelajaran di lembaga pendidikan Islam.(Indadihayati & Hariyanto, 2023)

Mengimplementasikan TQM dalam pendidikan adalah suatu cara untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam (Undang-

Undang Sistem pendidikan Nasional Nomor 20 , 2003) memerlukan pembenahan dalam hal pengelolaan pendidikan, penerapan manajemen berbasis sekolah, dan upaya menuju perbaikan menyeluruh dalam pendidikan agar mampu menjawab tuntutan mutu pendidikan sesuai standar nasional pendidikan. Dalam dunia pendidikan, TQM merujuk pada kepuasan pelanggan baik pelanggan dalam (internal customer) maupun pelanggan luar (eksternal customer). Pelanggan dalam seperti kepala sekolah, guru, staf dan penyelenggara institusi. Sedangkan pelanggan luar seperti masyarakat, pemerintah dan dunia industri. Lembaga pendidikan disebut bermutu apabila mampu menyajikan kepuasan terhadap pelanggan dalam dan pelanggan luar atas jasa yang diberikan.

Hal yang paling pokok pada saat penerapan TQM dalam lembaga pendidikan adalah:

1. Perbaikan secara terus menerus (continuous improvement). Konsep ini mengandung pengertian bahwa pihak pengelola harus melakukan berbagai perbaikan dan peningkatan terus menerus untuk menjamin semua komponen penyelenggaraan pendidikan telah mencapai standar mutu yang ditetapkan. Konsep ini juga berarti bahwa institusi pendidikan senantiasa memperbaharui proses berdasarkan kebutuhan dan tuntutan.
2. Penentuan Standar Mutu (Quality assurance). Paham untuk menentukan standar-standar mutu dari semua komponen yang bekerja dalam proses produksi atau transformasi lulusan institusi pendidikan. Standar ini meliputi kepemilikan kemampuan dasar pembelajaran sesuai dengan jenjang pendidikan, kurikulum, dan evaluasi.
3. Perubahan Kultur (change of culture). Pimpinan institusi pendidikan harus mampu membangun kesadaran para anggotanya akan pentingnya mempertahankan dan meningkatkan mutu pembelajaran.
4. Perubahan Organisasi (upside-down-organization). Penerapannya dalam lingkungan sekolah bisa terlaksana dalam bentuk perubahan struktur organisasi sekolah dalam manajemen berbasis sekolah. Awalnya dalam struktur konvensional dari atas ke bawah, maka dalam struktur baru bisa berubah dari bawah ke atas.
5. Mempertahankan hubungan dengan pelanggan (keeping close to the customer). Hubungan yang baik antara institusi pendidikan dengan masyarakat, orang tua siswa dan pihak lain, maka institusi atau lembaga pendidikan harus mampu menjalin hubungan yang baik dengan pelanggannya.

Mengadopsi TQM di lembaga pendidikan memiliki empat alasan utama, antara lain:

1. Pendidik harus bertanggung jawab sesuai tugas dan pokok fungsinya, pendidik adalah faktor utama bagi peningkatan sekolah. Pendidik harus mengakomodir penyelesaian masalah yang berdampak pada lingkungan belajar di sekolah.
2. Pendidikan membutuhkan proses pemecahan masalah yang peka dan fokus pada identifikasi dan penyelesaian penyebab utama yang menimbulkan masalah tersebut. Semua akar dalam masalah pendidikan bersifat sistemik, yaitu berasal dari akar masalah yang berada dari komunitas sekolah dan berimplikasi pada kegiatan belajar mengajar di sekolah itu sendiri.

3. Organisasi sekolah mewujudkan model organisasi belajar semua organisasi.
4. Melalui integrasi TQM di lembaga pendidikan, masyarakat mengetahui tujuan dari sistem pendidikan yang berjalan saat ini.

Komponen pendukung implementasi TQM dalam penelitian ini mencakup aspek, yaitu:

1. Kepemimpinan
Komponen kepemimpinan sebagai pendukung implementasi TQM dalam pendidikan
2. Diklat
Pelaksanaan diklat dapat dikatakan baik jika dilakukan secara optimal
3. Komunikasi
Komunikasi harus dibangun cukup baik untuk membantu proses perbaikan kinerja di lembaga pendidikan
4. Pengukuran
Pengukuran kinerja dapat diterapkan berdasarkan standar yang telah ditetapkan
5. Dukungan struktur
Struktur sebagai konfigurasi formal dan independen yang bertugas memberikan rekomendasi dan masukan terkait dengan lembaga pendidikan
6. Penghargaan
Penghargaan terhadap terlaksananya program kinerja yang memberikan dampak signifikan. (Supriyanto, 2011)

3.4 Manfaat TQM Dalam Pendidikan

TQM sangat bermanfaat baik bagi pelanggan, institusi, maupun bagi staf organisasi:

1. Manfaat bagi pelanggan
 - Sedikit atau bahkan tidak memiliki masalah dengan produk atau pelayanan
 - Kepedulian terhadap pelanggan lebih baik atau pelanggan lebih diperhatikan
 - Kepuasan pelanggan terjamin.
2. Manfaat bagi institusi
 - Terdapat perubahan kualitas produk dan pelayanan
 - Staf lebih termotivasi
 - Produktifitas meningkat
 - Biaya turun
 - Produk cacat berkurang
 - Permasalahan dapat diselesaikan dengan cepat.
3. Manfaat bagi staf organisasi
 - Pemberdayaan
 - Lebih terlatih dan berkemampuan
 - Lebih dihargai dan diakui.

Manfaat lain dari implementasi TQM yang dapat dirasakan oleh institusi di masa yang akan datang adalah:

- Membuat institusi sebagai pemimpin (leader) dan bukan hanya sekedar pengikut (follower)
- Membantu terciptanya team work
- Membuat institusi lebih sensitif terhadap kebutuhan pelanggan
- Membuat institusi siap dan lebih mudah beradaptasi terhadap perubahan
- Hubungan antara staf departemen yang berbeda lebih mudah. (Murtadho, 2012)

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan

Total Quality Management (TQM) ialah pendekatan manajemen pada suatu organisasi, yang berpusat kepada kualitas, berdasarkan partisipasi semua anggotanya dan bertujuan untuk kesuksesan jangka panjang melalui kepuasan pelanggan, dan manfaat bagi semua anggota organisasi dan masyarakat. Total Quality Management (TQM) adalah sebuah kultur, dengan sifat yang tertanam di dalam kultur ini adalah sebuah komitmen terhadap kualitas dan sikap yang diperlihatkan melalui keterlibatan setiap individu dalam proses perbaikan produk maupun jasa secara berkala, melalui metode ilmiah yang inovatif.

Adapun prinsip TQM meliputi Fokus pada pelanggan, obsesi terhadap kualitas, pemahaman mengenai struktur pekerjaan, kebebasan yang terkendali, kesatuan tujuan, melacak kesalahan dalam sistem, kerjasama tim, pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan.

Implementasi TQM dalam lembaga pendidikan meliputi berbagai aspek yaitu Pemahaman akan nilai-nilai akidah Islam, Pengembangan Kurikulum Berbasis Islam, Kualitas Pendidikan dan pembelajaran, Keterlibatan Orang tua dan masyarakat, Pemanfaatan teknologi.

Manfaat TQM dalam lembaga pendidikan yaitu Manfaat bagi pelanggan yaitu sedikit atau bahkan tidak memiliki masalah dengan produk atau pelayanan, kepedulian terhadap pelanggan lebih baik atau pelanggan lebih diperhatikan, kepuasan pelanggan terjamin. Manfaat bagi institusi, terdapat perubahan kualitas produk dan pelayanan, staf lebih termotivasi, produktifitas meningkat, biaya turun, produk cacat berkurang, permasalahan dapat diselesaikan dengan cepat. Manfaat bagi staf organisasi yaitu pemberdayaan, lebih terlatih dan berkemampuan, lebih dihargai dan diakui.

DAFTAR PUSTAKA

- Indadihayati, W., & Hariyanto, V. L. (2023). Tinjauan Literatur Tentang Penerapan Prinsip Total Quality Management Dalam Pendidikan Vokasi: Tantangan Dan Peluang. 7(1). <https://doi.org/10.33363/satya-sastraharing.v7i1.1029>*
- Kajian Kritis Pendidikan Islam dan Manajemen Pendidikan Dasar, J., & STIT Madani Yogyakarta, H. (2020). Judul Artikel (10 pt. Cambria). Nama Penulis |, 37(2). <https://ejournal.stainupwr.ac.id/>*
- Murtadho, A. (2012). MEMPERKOKOH KUALITAS PENDIDIKAN MADRASAH BERBASIS MANAJEMEN MUTU TERPADU (TQM).*

Putu Ayub Darmawan, I., Arifudin, O., Renaldi, R., Made Rianita, N., Octavianus, S., Candra, L., Sri Lestari, A., Djati Satmoko, N., Muniarty, P., Nugroho Catur Saputro, A., Manik, E., & Kusumastuti, D. (2021). *TOTAL QUALITY MANAGEMENT DALAM DUNIA PENDIDIKAN (MODEL, TEKNIK DAN IMPLEMENTASI)*. www.penerbitwidina.com

Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20. (2003).

Rahmi Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, S. (2015). *TOTAL QUALITY MANAGEMENT DALAM MEMAJUKAN PENDIDIKAN ISLAM (Vol. 3, Issue 1)*. Januari-Juni.

Supriyanto, A. (2011). *IMPLEMENTASI TOTAL QUALITY MANAGEMENT DALAM SISTEM MANAJEMEN MUTU PEMBELAJARAN DI INSTITUSI PENDIDIKAN*.

Susanto, B., & Muhammadiyah Magelang Jalan Tidar no, U. (2016). *TOTAL QUALITY MANAGEMENT, PERFORMANCE MEASUREMENT SYSTEM, REWARDS AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT TO PERFORMANCE OF EMPLOYEES TOTAL QUALITY MANAGEMENT, SISTEM PENGUKURAN KINERJA, PENGHARGAAN DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN*. <http://tempo.co.id>

Windryani, F., & Afriansyah, H. (2019). *Implementasi MAnajemen Mutu Terpadu dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan*. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/JXCQY>

**PENERAPAN KONSEP BALANCED SCORECARD
DALAM MENINGKATKAN KINERJA LEMBAGA PENDIDIKAN**
Tiara Nadilah, 24052170007

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era globalisasi dan revolusi industri 4.0 yang menuntut percepatan adaptasi serta peningkatan kualitas pada berbagai sektor kehidupan, dunia pendidikan dituntut untuk tidak hanya menjadi lembaga penyelenggara pembelajaran semata, tetapi juga menjadi institusi yang dikelola secara profesional, terukur, dan berbasis strategi. Pendidikan sebagai pilar utama pembangunan sumber daya manusia memiliki peran sentral dalam menciptakan generasi yang kompeten, kreatif, dan adaptif terhadap dinamika zaman (Maryati et al., 2021). Oleh sebab itu, lembaga pendidikan harus senantiasa melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja secara sistematis agar dapat menjaga relevansi dan efektivitas fungsinya di tengah kompleksitas tantangan global.

Di tengah arus perubahan yang cepat peningkatan mutu pendidikan tidak dapat dilepaskan dari proses manajemen strategis yang komprehensif. Manajemen strategis ini harus mampu menjawab kebutuhan internal lembaga sekaligus memenuhi ekspektasi eksternal dari para pemangku kepentingan, seperti peserta didik, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Dalam konteks ini, salah satu pendekatan modern yang terbukti efektif dalam mengukur dan meningkatkan kinerja organisasi secara holistik adalah konsep Balanced Scorecard (BSC) yang diperkenalkan oleh Robert Kaplan dan David Norton pada awal 1990-an. BSC telah menjadi paradigma baru

dalam pengukuran kinerja karena mampu mengintegrasikan antara indikator keuangan dan non-keuangan secara seimbang (Zen Istiarsono, 2022).

Balanced Scorecard dikembangkan sebagai respons terhadap kelemahan sistem pengukuran kinerja tradisional yang terlalu berfokus pada aspek finansial dan bersifat jangka pendek. Dalam dunia bisnis, pendekatan ini berhasil mendorong perbaikan berkelanjutan dan pencapaian tujuan strategis perusahaan. Namun seiring waktu, pendekatan ini juga banyak diadopsi oleh organisasi non-profit dan sektor publik, termasuk institusi pendidikan. Hal ini karena BSC menawarkan empat perspektif yang saling terintegrasi, yaitu: perspektif keuangan, perspektif pelanggan (dalam hal ini peserta didik dan orang tua), perspektif proses bisnis internal (aktivitas pembelajaran, manajemen kurikulum, dan administrasi), serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (pengembangan SDM, inovasi, dan budaya organisasi).

Penggunaan Balanced Scorecard dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk mengukur dan meningkatkan kinerja secara menyeluruh. Misalnya, melalui perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, sekolah atau universitas dapat mengevaluasi kompetensi guru dan dosen, efektivitas pelatihan internal, serta iklim organisasi yang mendukung inovasi. Sementara itu, perspektif proses internal dapat digunakan untuk mengkaji efisiensi pelaksanaan kurikulum, administrasi pendidikan, dan pelayanan akademik (Ramdani et al., 2023). Perspektif pelanggan dapat membantu menilai kepuasan siswa, lulusan, maupun mitra industri, sedangkan perspektif keuangan, meskipun tidak dominan, tetap penting dalam pengelolaan anggaran, efisiensi penggunaan dana BOS, atau sumber daya keuangan lainnya.

Sayangnya dalam praktiknya sebagian besar lembaga pendidikan di Indonesia masih mengandalkan pendekatan evaluasi kinerja yang bersifat administratif, kuantitatif, dan tidak menyentuh dimensi strategis jangka panjang. Evaluasi yang dilakukan sering kali terbatas pada pemenuhan indikator akreditasi, pelaporan rutin ke dinas atau kementerian, atau sekadar menyesuaikan dengan kebijakan yang bersifat top-down. Hal ini menyebabkan tidak optimalnya penggunaan data kinerja untuk proses perencanaan strategis dan pengambilan keputusan berbasis bukti. Padahal, lembaga pendidikan yang ingin bertahan dan unggul dalam ekosistem persaingan global membutuhkan instrumen yang lebih dinamis dan reflektif terhadap semua aspek organisasi secara menyeluruh.

Oleh karena itu penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana konsep Balanced Scorecard dapat diadopsi dan diterapkan dalam dunia pendidikan secara sistematis. Tidak hanya sebagai alat ukur semata, tetapi juga sebagai kerangka kerja strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Penerapan BSC di lembaga pendidikan juga memungkinkan penguatan akuntabilitas publik dan transparansi, karena setiap capaian kinerja dapat ditelusuri secara terukur dan terdokumentasi dengan baik (Lirizki, 2025). Selain itu, pendekatan ini mendorong kolaborasi antarelemen sekolah atau institusi, karena masing-masing perspektif dalam BSC saling bergantung dan mendukung satu sama lain dalam mewujudkan visi dan misi pendidikan yang unggul.

Penerapan Balanced Scorecard dalam lembaga pendidikan dapat menjadi jembatan antara idealisme pendidikan dan realitas manajerial. Di satu sisi, pendidikan memiliki misi luhur untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk karakter, sementara di sisi lain lembaga pendidikan perlu dikelola secara efektif dan efisien agar

tujuan tersebut tercapai secara berkelanjutan. Melalui pengukuran kinerja yang menyeluruh dan berimbang, pendidikan tidak hanya menjadi proses yang normatif, tetapi juga dapat dikelola secara profesional dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan berorientasi hasil.

Makalah ini disusun untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep Balanced Scorecard dan bagaimana penerapannya dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja lembaga pendidikan. Dalam pembahasannya, akan diuraikan tentang landasan teori Balanced Scorecard, penjabaran masing-masing perspektif dalam konteks pendidikan, serta manfaat strategis yang dapat diperoleh lembaga pendidikan jika menerapkan pendekatan ini secara konsisten. Dengan memahami dan menerapkan Balanced Scorecard, diharapkan lembaga pendidikan tidak hanya mampu mempertahankan keberlangsungan operasionalnya, tetapi juga mampu bertransformasi menjadi institusi yang adaptif, unggul, dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun global.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat ditentukan bahwa rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep Balanced Scorecard dapat diadaptasi secara efektif dalam konteks lembaga pendidikan?
2. Apa saja indikator kinerja dari keempat perspektif Balanced Scorecard yang relevan untuk mengukur kinerja lembaga pendidikan?
3. Bagaimana penerapan Balanced Scorecard dapat berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas lembaga pendidikan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat ditentukan bahwa tujuan penelitian dari makalah ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memahami dan menganalisis penerapan konsep Balanced Scorecard dalam meningkatkan manajemen strategis lembaga pendidikan.
2. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan indikator-indikator kinerja dari perspektif keuangan, pelanggan, proses internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan dalam lembaga pendidikan.
3. Untuk mengevaluasi kontribusi penerapan Balanced Scorecard dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan, akuntabilitas, serta pencapaian tujuan institusional.

PEMBAHASAN

2.1 Adaptasi Konsep Balanced Scorecard dalam Konteks Lembaga Pendidikan

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan dalam era globalisasi dan digitalisasi, kebutuhan terhadap sistem manajemen strategis yang terstruktur, adaptif, dan menyeluruh menjadi semakin mendesak. Dunia pendidikan tidak lagi cukup hanya mengandalkan pendekatan administratif yang bersifat reaktif dan statis, melainkan dituntut untuk mengembangkan mekanisme evaluasi kinerja yang mampu mencerminkan dinamika perubahan lingkungan, harapan stakeholder, serta arah pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan (Drajat et al., 2023). Dalam kerangka inilah konsep

Balanced Scorecard (BSC), yang semula dikembangkan dalam dunia korporasi, mulai mendapat perhatian sebagai pendekatan alternatif yang menjanjikan untuk diadopsi dalam dunia pendidikan.

Konsep Balanced Scorecard pertama kali diperkenalkan oleh Robert Kaplan dan David Norton pada awal tahun 1990-an sebagai sistem pengukuran kinerja organisasi yang menekankan pentingnya keseimbangan antara indikator keuangan dan non-keuangan. BSC tidak hanya bertujuan untuk mengukur kinerja berdasarkan output akhir yang bersifat finansial, tetapi juga mempertimbangkan proses dan input strategis yang mempengaruhi pencapaian tujuan jangka panjang organisasi. Dalam pendekatannya, Balanced Scorecard menggunakan empat perspektif utama, yaitu: keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan organisasi. Keempat perspektif ini dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara hasil dan proses, antara orientasi masa kini dan masa depan, serta antara indikator kuantitatif dan kualitatif.

Dalam konteks lembaga pendidikan keempat perspektif tersebut tidak serta-merta dapat diterapkan secara langsung tanpa penyesuaian. Lembaga pendidikan, terutama yang bersifat non-profit atau publik, memiliki karakteristik, nilai, dan tujuan yang berbeda dibandingkan organisasi bisnis. Orientasi lembaga pendidikan lebih berfokus pada pencapaian misi sosial, seperti peningkatan kualitas pembelajaran, pencerdasan kehidupan bangsa, serta penguatan nilai-nilai karakter dan kebudayaan. Oleh karena itu, adaptasi konsep Balanced Scorecard dalam dunia pendidikan membutuhkan pendekatan yang kontekstual dan reflektif terhadap fungsi dasar pendidikan serta kebutuhan stakeholder yang lebih kompleks (Nabilah & Abidin, 2022).

1. Perspektif keuangan dalam lembaga pendidikan perlu ditafsirkan secara lebih luas. Meskipun lembaga pendidikan bukanlah entitas yang berorientasi profit, aspek finansial tetap menjadi elemen penting dalam mendukung keberlangsungan operasional, pengadaan sarana prasarana, dan pemberdayaan sumber daya manusia. Dalam kerangka BSC, perspektif keuangan di lembaga pendidikan dapat diukur melalui efisiensi penggunaan anggaran pendidikan, tingkat transparansi dalam pelaporan keuangan, efektivitas alokasi dana untuk kegiatan pembelajaran, dan tingkat keberhasilan dalam menggalang dana eksternal (seperti hibah atau kerjasama). Penilaian atas indikator-indikator ini bukan untuk mengejar keuntungan, melainkan untuk memastikan bahwa setiap sumber daya yang dimiliki dikelola secara bijak dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pendidikan.
2. Perspektif pelanggan yang dalam konteks bisnis mengacu pada konsumen atau klien, perlu didefinisi sesuai dengan ekosistem pendidikan. Dalam hal ini, pelanggan utama lembaga pendidikan adalah peserta didik, namun tidak terbatas pada mereka saja. Orang tua, masyarakat, pemerintah, alumni, serta mitra kerja sama juga termasuk dalam kategori stakeholder yang memiliki harapan tertentu terhadap output pendidikan. Indikator pada perspektif ini dapat mencakup tingkat kepuasan siswa terhadap proses pembelajaran, persepsi orang tua terhadap layanan pendidikan, relevansi kurikulum dengan kebutuhan industri, hingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan kualitas lembaga pendidikan. Dalam perspektif ini, Balanced Scorecard membantu lembaga pendidikan untuk mendengar suara stakeholder dan menjadikannya bagian dari proses perbaikan berkelanjutan.

3. Perspektif proses bisnis internal dalam pendidikan mengarah pada seluruh kegiatan utama yang dilakukan oleh lembaga dalam rangka memberikan layanan pendidikan. Ini mencakup proses perencanaan dan implementasi kurikulum, pelaksanaan pembelajaran di kelas, kegiatan bimbingan dan konseling, sistem evaluasi dan asesmen, administrasi akademik, serta pengelolaan mutu internal. Balanced Scorecard mendorong lembaga pendidikan untuk mengidentifikasi proses-proses mana yang menjadi kunci keberhasilan pencapaian misi dan visi, serta bagaimana efektivitas proses tersebut dapat diukur secara obyektif dan dijadikan dasar pengambilan keputusan. Misalnya, waktu penyelesaian proses akademik, jumlah kegiatan pengembangan profesional guru, atau persentase implementasi program digitalisasi sekolah dapat menjadi indikator penting dalam perspektif ini.
4. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan menjadi dimensi yang sangat krusial dalam lembaga pendidikan. Perspektif ini menekankan pentingnya pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kapasitas organisasi, serta penciptaan budaya inovatif dan adaptif. Dalam dunia pendidikan, hal ini berkaitan erat dengan pengembangan profesional guru dan tenaga kependidikan, penyediaan pelatihan dan workshop secara berkelanjutan, pemberian ruang bagi kolaborasi tim, serta penguatan sistem informasi manajemen yang menunjang kinerja organisasi. Dengan menggunakan BSC, lembaga pendidikan dapat merancang indikator yang mencerminkan tingkat investasi terhadap SDM, indeks kepuasan kerja staf, frekuensi pelatihan berbasis kebutuhan, atau tingkat pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran dan manajemen.

Selain keempat perspektif utama tersebut dalam beberapa studi terbaru mengenai adaptasi Balanced Scorecard untuk organisasi nirlaba, termasuk lembaga pendidikan, dikenal pula pendekatan yang disebut dengan Modified Balanced Scorecard. Dalam pendekatan ini, lembaga diberi keleluasaan untuk menyesuaikan urutan prioritas perspektif berdasarkan misi utamanya. Misalnya, dalam lembaga pendidikan yang sangat menekankan pengembangan siswa sebagai tujuan utama, maka perspektif pelanggan (peserta didik) dapat ditempatkan di puncak hierarki strategi. Dengan demikian, seluruh aktivitas dan proses organisasi diarahkan untuk mendukung peningkatan hasil belajar dan kepuasan peserta didik, bukan sekadar pencapaian efisiensi finansial.

Penerapan Balanced Scorecard dalam lembaga pendidikan juga membawa sejumlah manfaat strategis yang sangat penting (Prasasty, 2025):

1. BSC memberikan kerangka berpikir strategis yang memungkinkan pimpinan lembaga untuk melihat kinerja organisasi secara menyeluruh dan terintegrasi. Ini sangat membantu dalam menghindari pendekatan manajerial yang parsial dan tidak berorientasi jangka panjang.
2. BSC mendukung proses perencanaan yang berbasis data dan fakta. Dengan indikator yang jelas dan terukur, lembaga pendidikan dapat melakukan evaluasi kinerja secara berkala, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, serta menetapkan target strategis yang realistis dan terarah.
3. BSC memfasilitasi komunikasi internal yang lebih baik. Karena seluruh elemen dalam lembaga memahami indikator kinerja yang digunakan, setiap bagian organisasi dapat melihat kontribusinya terhadap pencapaian tujuan bersama.

Ini mendorong terciptanya budaya kerja kolaboratif, transparan, dan bertanggung jawab.

4. BSC membantu lembaga pendidikan untuk menunjukkan akuntabilitasnya kepada publik. Dalam era keterbukaan informasi dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap kualitas layanan publik, kemampuan lembaga pendidikan untuk menunjukkan capaian kinerjanya secara terstruktur menjadi nilai tambah yang signifikan.

Penerapan Balanced Scorecard di lingkungan pendidikan tidak lepas dari tantangan. Di antaranya adalah keterbatasan sumber daya, baik dalam bentuk SDM yang memahami prinsip-prinsip BSC maupun sistem informasi yang mampu mendukung pengumpulan dan analisis data kinerja secara efektif. Selain itu, resistensi terhadap perubahan juga menjadi hambatan yang kerap muncul, terutama di lingkungan pendidikan yang masih sangat birokratis atau terlalu terbiasa dengan sistem pelaporan tradisional yang bersifat top-down. Oleh karena itu, penting untuk melakukan proses sosialisasi, pelatihan, serta pembinaan berkelanjutan agar transformasi menuju manajemen kinerja strategis berbasis Balanced Scorecard dapat berjalan optimal.

Pendekatan bertahap dan partisipatif perlu dilakukan. Lembaga pendidikan dapat memulai dengan menyusun peta strategi (strategy map) yang menggambarkan hubungan kausal antara keempat perspektif Balanced Scorecard dan tujuan strategis organisasi. Kemudian, dipilih sejumlah indikator kunci (Key Performance Indicators/KPI) yang paling relevan dan dapat diukur secara obyektif. Setelah itu, dilakukan proses monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut secara berkala. Jika dijalankan secara konsisten, maka lambat laun pendekatan ini akan terintegrasi dalam budaya organisasi dan menjadi bagian dari sistem penjaminan mutu internal (Wulangsih et al., 2024).

Dengan demikian adaptasi konsep Balanced Scorecard dalam dunia pendidikan bukanlah sekadar penyesuaian teknis, tetapi juga merupakan transformasi paradigmatik dalam cara lembaga mengelola kinerja dan mengartikulasikan visinya secara strategis. Di tengah berbagai tuntutan untuk meningkatkan kualitas, daya saing, dan relevansi pendidikan, Balanced Scorecard menjadi alat yang sangat potensial untuk menjembatani antara idealisme pendidikan dengan realitas manajerial yang kompleks. Dengan BSC, lembaga pendidikan tidak hanya mampu berjalan, tetapi juga melangkah maju dengan arah yang jelas, terukur, dan berkelanjutan.

2.2 Indikator Kinerja Strategis dalam Perspektif Balanced Scorecard untuk Lembaga Pendidikan

Penerapan Balanced Scorecard (BSC) dalam lembaga pendidikan tidak hanya sebatas pada pengadopsian kerangka kerja konseptualnya saja, tetapi juga menuntut adanya pemilihan dan pengembangan indikator kinerja strategis yang relevan, terukur, dan mampu mencerminkan kinerja lembaga secara menyeluruh. Indikator-indikator ini berfungsi sebagai alat ukur konkret dalam menilai sejauh mana lembaga pendidikan telah mencapai tujuan strategisnya dalam setiap perspektif Balanced Scorecard, yaitu perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran serta pertumbuhan (Aini et al., 2023). Dalam praktiknya, setiap indikator harus disesuaikan dengan visi, misi, serta konteks institusional lembaga pendidikan, baik pada tingkat sekolah dasar, menengah, maupun perguruan tinggi.

Pemilihan indikator kinerja strategis harus mencerminkan keseimbangan antara hasil (outcomes) dan proses (processes), serta antara tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Di sinilah keunikan Balanced Scorecard—ia tidak hanya mengukur apa yang telah dicapai, tetapi juga bagaimana capaian tersebut dihasilkan. Dengan demikian, indikator kinerja dalam BSC tidak bersifat tunggal atau kaku, melainkan dapat dikembangkan secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan dinamika lembaga pendidikan yang bersangkutan.

Meskipun lembaga pendidikan bukan entitas bisnis yang berorientasi laba, perspektif keuangan tetap menjadi dimensi penting dalam pengukuran kinerja, karena ketersediaan dan pengelolaan dana yang baik menjadi dasar bagi terselenggaranya seluruh aktivitas pendidikan. Dalam perspektif ini, indikator kinerja strategis diarahkan pada efisiensi penggunaan anggaran, keberlanjutan pembiayaan, serta transparansi dalam pengelolaan sumber daya keuangan. Beberapa indikator kinerja strategis dari perspektif keuangan dalam konteks pendidikan antara lain (Lirizki, 2024):

1. Tingkat efisiensi anggaran operasional (rasio realisasi anggaran terhadap perencanaan).
2. Proporsi dana untuk pengembangan pendidikan dibandingkan biaya operasional rutin.
3. Kemampuan lembaga dalam memperoleh dana eksternal (hibah, sponsor, CSR, kerja sama dengan industri).
4. Transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan (persentase audit internal/eksternal yang bebas temuan).
5. Rasio investasi terhadap pengembangan SDM dan infrastruktur.
6. Ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan kepada dinas atau pemangku kepentingan.

Indikator-indikator ini menunjukkan sejauh mana lembaga pendidikan dapat mengelola sumber daya keuangan secara profesional, serta menjaga keberlangsungan operasional secara berkelanjutan. Efisiensi dan transparansi keuangan juga menjadi tolok ukur utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan, khususnya di era keterbukaan informasi saat ini.

Dalam konteks lembaga pendidikan, pelanggan tidak hanya terbatas pada peserta didik, tetapi juga meliputi orang tua siswa, alumni, masyarakat, dunia usaha dan industri, serta instansi pemerintah yang menjadi pemangku kepentingan. Perspektif ini menekankan pentingnya memahami kebutuhan, harapan, dan persepsi pelanggan sebagai dasar untuk peningkatan mutu layanan pendidikan secara menyeluruh. Indikator kinerja strategis dalam perspektif pelanggan di antaranya (Khairani, 2024):

1. Tingkat kepuasan peserta didik terhadap kualitas pembelajaran.
2. Kepuasan orang tua terhadap pelayanan administrasi dan komunikasi sekolah.
3. Tingkat kelulusan dan kelanjutan studi ke jenjang lebih tinggi.
4. Reputasi lembaga pendidikan di mata masyarakat dan media.
5. Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pendidikan.
6. Tingkat kepercayaan dunia usaha terhadap lulusan (khusus untuk SMK/ perguruan tinggi).
7. Feedback alumni terhadap relevansi kurikulum dan pengalaman belajar.

Penggunaan survei kepuasan, wawancara, dan forum diskusi dengan stakeholder menjadi metode yang umum untuk mengukur indikator ini. Dalam jangka panjang, indikator pelanggan berfungsi sebagai cerminan dari keberhasilan lembaga pendidikan dalam membangun hubungan yang harmonis dan berdaya guna dengan lingkungan eksternal.

Proses bisnis internal dalam lembaga pendidikan merujuk pada seluruh kegiatan utama yang mendukung pencapaian misi pendidikan, mulai dari perencanaan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, hingga pelayanan administrasi dan pengelolaan mutu. Perspektif ini menilai seberapa efektif dan efisien proses-proses tersebut dilaksanakan untuk mendukung tujuan strategis lembaga. Indikator kinerja strategis dalam perspektif proses internal antara lain (Tanjung, 2021) :

1. Tingkat implementasi kurikulum sesuai standar nasional/kurikulum merdeka.
2. Frekuensi supervisi akademik dan non-akademik oleh kepala sekolah atau pimpinan.
3. Tingkat kehadiran guru/dosen dalam kegiatan pembelajaran.
4. Jumlah inovasi pembelajaran yang diterapkan setiap semester.
5. Waktu rata-rata penyelesaian layanan administrasi siswa.
6. Jumlah keluhan peserta didik yang ditindaklanjuti.
7. Penerapan sistem evaluasi berbasis teknologi (CBT, LMS, e-Raport, dll).
8. Pelaksanaan siklus penjaminan mutu internal (monitoring, evaluasi, tindak lanjut).

Perspektif ini memberikan gambaran sejauh mana lembaga pendidikan mampu menjaga kualitas proses inti yang berdampak langsung pada hasil belajar peserta didik. Proses yang baik menjadi fondasi dari output yang berkualitas.

Perspektif ini merupakan fondasi bagi seluruh perspektif lainnya karena menyangkut kemampuan organisasi dalam beradaptasi, berkembang, dan berinovasi. Dalam dunia pendidikan, ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, pengembangan kompetensi, motivasi kerja, serta infrastruktur penunjang pembelajaran yang mendukung transformasi digital dan budaya organisasi yang progresif. Indikator kinerja strategis dalam perspektif pembelajaran dan pertumbuhan mencakup (Sundari, 2024):

1. Jumlah pelatihan yang diikuti oleh guru/dosen setiap tahun.
2. Persentase guru yang telah tersertifikasi dan berkualifikasi sesuai bidangnya.
3. Tingkat partisipasi dalam program pengembangan profesional berkelanjutan (PKB, workshop, seminar).
4. Indeks kepuasan kerja tenaga pendidik dan kependidikan.
5. Frekuensi kegiatan refleksi atau evaluasi diri guru dalam pengembangan pembelajaran.
6. Jumlah penggunaan teknologi dalam proses mengajar (LMS, e-learning, AR/VR, AI tools).
7. Jumlah penelitian tindakan kelas (PTK) atau publikasi ilmiah yang dilakukan.
8. Tingkat retensi staf pengajar berkualitas.

Perspektif ini sangat menentukan masa depan lembaga pendidikan karena pengembangan SDM dan inovasi merupakan motor utama dari kemajuan institusi.

Lembaga yang tidak menaruh perhatian pada pembelajaran dan pertumbuhan akan stagnan dan tertinggal dalam menghadapi perubahan zaman.

Dalam pendekatan *Balanced Scorecard*, keempat perspektif ini bukanlah elemen yang berdiri sendiri, melainkan saling terhubung dalam rantai sebab-akibat strategis. Misalnya, peningkatan dalam pembelajaran dan pertumbuhan akan memperkuat proses internal; proses internal yang baik akan meningkatkan kepuasan pelanggan; kepuasan pelanggan pada akhirnya dapat memperkuat legitimasi sosial lembaga dan memungkinkan pengelolaan keuangan yang lebih baik. Oleh karena itu, pemilihan indikator kinerja tidak boleh dilakukan secara terpisah, tetapi harus berdasarkan peta strategi lembaga yang menggambarkan hubungan logis di antara berbagai tujuan strategis.

Pembuatan peta strategi menjadi salah satu langkah penting dalam implementasi BSC, karena membantu lembaga pendidikan memvisualisasikan hubungan antara indikator satu dengan lainnya dan menegaskan bahwa semua indikator saling mendukung dalam satu kerangka tujuan besar. Misalnya, jika lembaga memiliki tujuan meningkatkan kualitas lulusan, maka indikator-indikator yang dipilih dalam semua perspektif harus mengarah pada tujuan tersebut—mulai dari pelatihan guru (pembelajaran), inovasi pengajaran (proses), kepuasan siswa (pelanggan), hingga efektivitas pembiayaan (keuangan).

Walaupun konsep BSC sangat ideal, dalam praktiknya lembaga pendidikan sering menghadapi tantangan dalam memilih dan mengelola indikator kinerja yang tepat. Beberapa tantangan tersebut antara lain (Wasliman et al., 2023) :

1. Keterbatasan SDM yang mampu menyusun indikator yang SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound).
2. Ketidaksiapan sistem informasi manajemen dalam mengumpulkan dan menganalisis data secara real time.
3. Resistensi terhadap perubahan dari staf yang belum terbiasa dengan manajemen berbasis kinerja.
4. Terlalu banyak indikator sehingga menyulitkan fokus strategis dan pelacakan capaian.
5. Kurangnya keterlibatan seluruh stakeholder dalam penyusunan indikator, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara tujuan lembaga dan indikator yang digunakan.

Oleh karena itu, penting bagi lembaga pendidikan untuk mengembangkan sistem pengukuran kinerja yang sederhana namun strategis, fokus pada indikator-indikator kunci yang berdampak besar, dan melibatkan partisipasi semua unsur organisasi dalam proses penetapan serta evaluasinya. Pendekatan yang partisipatif dan berbasis data akan mendorong kesadaran kolektif terhadap pentingnya pengelolaan kinerja secara sistemik dan terarah.

Penentuan indikator kinerja strategis dalam setiap perspektif *Balanced Scorecard* merupakan fondasi penting dalam implementasi manajemen kinerja berbasis strategi di lembaga pendidikan. Melalui indikator yang tepat, lembaga pendidikan dapat memastikan bahwa seluruh aktivitasnya mengarah pada pencapaian visi, misi, dan tujuan pendidikan secara terukur dan berkelanjutan. Lebih dari sekadar alat ukur, indikator kinerja dalam kerangka BSC juga berperan sebagai kompas strategis yang mengarahkan perbaikan berkelanjutan, pengambilan

keputusan berbasis data, dan transformasi kelembagaan menuju pendidikan yang bermutu, inklusif, dan relevan dengan tantangan masa depan.

2.3 Kontribusi Penerapan Balanced Scorecard terhadap Peningkatan Kinerja Lembaga Pendidikan

Dalam konteks manajemen pendidikan modern kinerja lembaga pendidikan tidak lagi hanya dinilai dari sisi akademik seperti nilai ujian atau angka kelulusan, melainkan dari berbagai dimensi strategis yang lebih luas dan kompleks. Lembaga pendidikan dituntut untuk menunjukkan performa unggul dalam aspek tata kelola, kualitas layanan, efisiensi sumber daya, inovasi pembelajaran, hingga kepuasan stakeholder. Untuk menjawab kebutuhan evaluasi kinerja yang komprehensif ini, pendekatan **Balanced Scorecard (BSC)** hadir sebagai alat strategis yang bukan hanya mengukur hasil, tetapi juga mengarahkan proses menuju pencapaian tujuan pendidikan yang lebih holistik dan berkelanjutan.

Penerapan Balanced Scorecard dalam lembaga pendidikan memberikan kontribusi besar dalam berbagai aspek. BSC bukan sekadar sistem pelaporan kinerja, tetapi merupakan pendekatan manajerial yang mengintegrasikan perencanaan strategis, pengukuran kinerja, pemantauan proses, serta perbaikan berkelanjutan. Dengan struktur empat perspektifnya—keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran & pertumbuhan—BSC mampu menciptakan kerangka kerja evaluasi yang seimbang antara tujuan jangka pendek dan jangka panjang, antara hasil dan proses, serta antara dimensi internal dan eksternal (Ramlan, 2024).

1. Meningkatkan Efektivitas Perencanaan Strategis

Salah satu kontribusi paling signifikan dari penerapan BSC dalam lembaga pendidikan adalah peningkatan efektivitas dalam perencanaan strategis. Sebelum adanya BSC, banyak lembaga pendidikan menyusun rencana strategis yang bersifat normatif, tidak berbasis data, dan tidak dikaitkan secara langsung dengan indikator kinerja yang terukur. Hal ini menyebabkan kesenjangan antara visi dan misi lembaga dengan aktivitas operasional sehari-hari. Melalui BSC, seluruh tujuan strategis dijabarkan ke dalam indikator-indikator spesifik dalam keempat perspektif, sehingga mempermudah proses penyusunan, implementasi, dan evaluasi rencana kerja lembaga pendidikan.

Sebagai contoh jika visi lembaga adalah menjadi institusi yang unggul dalam kualitas pembelajaran berbasis teknologi, maka melalui BSC dapat diturunkan sasaran strategis pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (misalnya peningkatan pelatihan TIK untuk guru), perspektif proses internal (misalnya jumlah kelas berbasis blended learning), perspektif pelanggan (misalnya kepuasan siswa terhadap metode pembelajaran digital), serta perspektif keuangan (alokasi anggaran untuk pengembangan e-learning). Dengan demikian, BSC memfasilitasi perumusan strategi yang konkret, terarah, dan berbasis data.

2. Mendorong Budaya Organisasi yang Berorientasi Kinerja

Kontribusi lain yang sangat penting dari penerapan BSC adalah pembentukan budaya organisasi yang berorientasi pada kinerja. Dalam banyak kasus, lembaga pendidikan masih dikelola secara birokratis dengan sistem kerja yang tidak mengutamakan hasil dan kualitas. BSC mengubah paradigma

ini dengan menempatkan pencapaian indikator strategis sebagai fokus utama seluruh aktivitas organisasi. Seluruh komponen lembaga, dari pimpinan hingga staf pelaksana, didorong untuk memahami peran dan kontribusinya dalam pencapaian tujuan bersama. Ketika lembaga memiliki indikator kinerja yang jelas, setiap unit kerja dapat menetapkan target yang terukur dan memantau progresnya secara berkala. Hal ini menciptakan tanggung jawab kolektif dan meningkatkan akuntabilitas individu maupun tim. Selain itu, budaya evaluasi berbasis data juga mulai tumbuh, di mana setiap keputusan manajerial didasarkan pada hasil pengukuran yang obyektif, bukan sekadar intuisi atau kebiasaan. Dalam jangka panjang, hal ini membangun sistem yang lebih disiplin, transparan, dan produktif.

3. Memperkuat Sistem Monitoring dan Evaluasi

Sistem monitoring dan evaluasi (M&E) sering kali menjadi titik lemah dalam pengelolaan lembaga pendidikan. Banyak program atau kebijakan yang berjalan tanpa pengawasan berkelanjutan atau tanpa evaluasi dampak yang jelas. Penerapan BSC menghadirkan sistem M&E yang lebih sistematis, berkelanjutan, dan berbasis indikator. Dengan adanya indikator-indikator dalam setiap perspektif, lembaga pendidikan dapat melakukan pemantauan rutin terhadap progres capaian strategi, mengidentifikasi penyimpangan, dan segera melakukan tindakan korektif.

Misalnya jika indikator dalam perspektif proses internal menunjukkan penurunan dalam jumlah inovasi pembelajaran, maka pimpinan lembaga dapat mengevaluasi penyebabnya—apakah karena kurangnya pelatihan, motivasi guru menurun, atau hambatan administratif. Dengan data tersebut, intervensi dapat dilakukan secara tepat sasaran, bukan hanya bersifat umum atau reaktif. Sistem M&E berbasis BSC juga memungkinkan pelaporan kinerja yang lebih akuntabel kepada pemangku kepentingan seperti orang tua, yayasan, pemerintah, dan mitra industri.

4. Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan

Salah satu manfaat paling nyata dari penerapan Balanced Scorecard adalah peningkatan kualitas layanan pendidikan kepada peserta didik dan masyarakat. Dengan adanya indikator dalam perspektif pelanggan, lembaga pendidikan secara aktif mengukur kepuasan siswa, orang tua, dan stakeholder lain terhadap layanan yang diberikan. Hasil pengukuran ini menjadi masukan penting dalam perbaikan mutu, baik dalam hal metode pembelajaran, sistem administrasi, fasilitas pendidikan, maupun pola komunikasi. Lembaga pendidikan dapat merespons kebutuhan dan aspirasi pelanggan secara lebih adaptif. Misalnya, hasil survei menunjukkan rendahnya kepuasan terhadap pelayanan bimbingan konseling, maka lembaga dapat memperkuat unit tersebut dengan penambahan staf, pelatihan, atau peningkatan sarana. Dengan demikian, pendekatan yang diterapkan tidak lagi bersifat satu arah, tetapi lebih dialogis dan berbasis kebutuhan riil masyarakat. Hal ini tentu akan memperkuat legitimasi lembaga di mata publik dan meningkatkan daya saingnya.

5. Mendorong Inovasi dan Pengembangan SDM

Dalam perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, BSC mendorong lembaga pendidikan untuk secara aktif melakukan pengembangan sumber daya manusia dan menciptakan iklim kerja yang mendukung inovasi. Dalam sistem pendidikan yang cepat berubah, guru dan tenaga kependidikan harus senantiasa meningkatkan kompetensinya agar tetap relevan dengan perkembangan kurikulum, teknologi pembelajaran, dan karakteristik peserta didik.

Indikator seperti jumlah pelatihan, jumlah inovasi pembelajaran, publikasi ilmiah, dan partisipasi dalam forum akademik menjadi alat ukur penting dalam menilai komitmen lembaga terhadap pengembangan profesional. BSC juga mendorong integrasi teknologi dan transformasi digital di lingkungan pendidikan. Penggunaan Learning Management System (LMS), pembelajaran berbasis AI, serta penerapan media interaktif menjadi bagian dari strategi pengembangan yang terukur. Dalam jangka panjang, hal ini menciptakan keunggulan kompetitif yang sulit ditandingi.

Balanced Scorecard membantu lembaga pendidikan dalam mengelola sumber daya secara lebih efisien dan efektif, terutama dalam perspektif keuangan. Selama ini, banyak lembaga pendidikan yang mengalami kebocoran anggaran, pengeluaran tidak prioritas, atau alokasi dana yang tidak sejalan dengan tujuan strategis. Dengan adanya indikator kinerja keuangan yang terukur—seperti efisiensi anggaran, ketepatan alokasi dana, atau proporsi dana pengembangan—penggunaan anggaran dapat lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. BSC membantu memetakan prioritas pengeluaran berdasarkan kontribusinya terhadap visi dan misi lembaga. Dana yang terbatas dapat dioptimalkan untuk mendukung program-program unggulan, penguatan proses inti, dan pengembangan SDM, bukan sekadar untuk memenuhi kebutuhan rutin. Dengan demikian, lembaga pendidikan menjadi lebih mandiri, produktif, dan tidak terlalu bergantung pada subsidi eksternal.

Implementasi BSC menuntut koordinasi dan integrasi yang kuat antar unit kerja di dalam lembaga pendidikan. Karena indikator kinerja dalam setiap perspektif saling terkait dan saling mendukung, maka setiap bagian organisasi harus bekerja secara sinergis untuk mencapai target bersama. Hal ini menciptakan budaya kerja yang kolaboratif, menghindari silo atau fragmentasi antar departemen, serta memperkuat kohesi internal. Sebagai contoh, keberhasilan dalam perspektif pelanggan tidak bisa dicapai hanya oleh guru, tetapi juga memerlukan kontribusi dari staf administrasi, bagian keuangan, serta manajemen puncak. Dengan kerangka BSC, seluruh unsur organisasi memiliki pemahaman yang sama tentang arah strategis lembaga dan indikator keberhasilannya. Hal ini menciptakan rasa kepemilikan, partisipasi aktif, dan semangat kolektif dalam mendorong kemajuan lembaga.

Di tengah tuntutan masyarakat akan tata kelola lembaga pendidikan yang transparan dan akuntabel, BSC memberikan kontribusi yang sangat penting. Dengan sistem pengukuran kinerja yang jelas, lembaga pendidikan dapat menyampaikan laporan kinerja kepada publik secara terbuka dan berbasis data. Laporan ini tidak hanya mencakup aspek akademik, tetapi juga menyeluruh mencakup keuangan, pelayanan, proses, dan inovasi.

Akuntabilitas ini memperkuat posisi lembaga di hadapan masyarakat, pemerintah, dan mitra eksternal. Lembaga yang terbuka terhadap evaluasi publik

cenderung mendapatkan kepercayaan yang lebih tinggi, akses terhadap kerja sama yang lebih luas, serta peluang untuk berkembang sebagai pusat pendidikan unggulan. Di era digital, keterbukaan informasi menjadi bagian dari reputasi institusi yang harus dijaga.

Secara keseluruhan dapat ditarik Kesimpulan bahwa penerapan *Balanced Scorecard* memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap peningkatan kinerja lembaga pendidikan dari berbagai aspek strategis. BSC tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur, tetapi sebagai pendekatan komprehensif yang mengarahkan seluruh aktivitas lembaga menuju pencapaian visi dan misi secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan. Dengan empat perspektif utamanya, BSC mendorong perencanaan strategis yang efektif, budaya kerja berbasis kinerja, peningkatan kualitas layanan, efisiensi sumber daya, inovasi berkelanjutan, serta akuntabilitas publik yang tinggi. Melalui implementasi yang konsisten dan partisipatif, *Balanced Scorecard* dapat menjadi fondasi kuat bagi transformasi lembaga pendidikan menuju arah yang lebih maju, profesional, dan relevan dengan tantangan masa depan.

KESIMPULAN

Penerapan konsep *Balanced Scorecard* dalam lembaga pendidikan telah terbukti memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh. Konsep ini menghadirkan pendekatan yang lebih seimbang dan menyeluruh dengan menggabungkan empat perspektif utama, yakni keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Melalui integrasi keempat perspektif tersebut, lembaga pendidikan mampu membangun sistem pengukuran kinerja yang tidak hanya fokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses-proses strategis yang mendukung pencapaian tujuan jangka panjang. *Balanced Scorecard* memungkinkan pimpinan lembaga untuk memetakan sasaran strategis, menentukan indikator keberhasilan yang spesifik, serta menyusun peta strategi yang menggambarkan hubungan kausal antar unsur kinerja organisasi. Dengan demikian, arah pengembangan lembaga menjadi lebih terarah, obyektif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas secara berkelanjutan.

Balanced Scorecard juga berfungsi sebagai sistem manajemen strategis yang mendorong pergeseran budaya kerja menuju organisasi yang berbasis hasil dan akuntabilitas. Dalam praktiknya, pendekatan ini memperkuat efektivitas perencanaan strategis, menumbuhkan budaya evaluatif berbasis data, serta menciptakan mekanisme monitoring yang dapat memacu perbaikan kinerja secara konsisten. Penerapan BSC di lingkungan pendidikan juga memfasilitasi keterlibatan seluruh komponen lembaga—dari kepala sekolah, guru, staf administrasi, hingga pemangku kepentingan eksternal—dalam mencapai sasaran bersama secara sinergis. Hal ini menciptakan kohesi organisasi yang kuat dan menghindarkan lembaga dari pola kerja sektoral yang terfragmentasi. Dalam jangka panjang, lembaga pendidikan yang konsisten menerapkan *Balanced Scorecard* tidak hanya mampu menunjukkan performa yang unggul, tetapi juga mampu menyesuaikan diri dengan dinamika zaman, membangun kepercayaan publik, dan menjawab tantangan globalisasi dengan pendekatan strategis yang adaptif dan tangguh.

SARAN

Berdasarkan Kesimpulan diatas maka penulis dapat merekomendasikan beberapa saran dalam makalah ini adalah sebagai berikut :

1. Lembaga pendidikan perlu membangun sistem pengukuran kinerja yang terstruktur dan berbasis Balanced Scorecard secara bertahap, dimulai dari penyusunan visi strategis hingga pemilihan indikator yang relevan dan terukur.
2. Diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan agar seluruh komponen lembaga memahami dan mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip Balanced Scorecard secara efektif.
3. Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya disarankan untuk mendorong dan memfasilitasi integrasi pendekatan Balanced Scorecard dalam kebijakan penjaminan mutu dan akreditasi pendidikan guna menciptakan lembaga yang adaptif, inovatif, dan berkinerja tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, L., Hanifah, S. R., & Fitroh, F. (2023). Penerapan Balance Scorecard pada Perguruan Tinggi di Indonesia: Tinjauan Literatur Sistematis. *Jurnal Teknik Informatika Dan Sistem Informasi*, 9(1), 54–68. <https://doi.org/10.28932/jutisi.v9i1.5712>
- Drajat, Usep Setiawan, Agus Hermawan, HM. Iim Wasliman, Eva Dianawati, Arman Paramansyah, Kab Bandung, K., & Laa Roiba Bogor, I.-N. (2023). Implementasi Konsep Balance Score-Card (BSC) Dalam Peningkatan Kinerja Pada SMPN 1 Cangkang Kabupaten Bandung. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 5(6), 2840–2851. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v5i6.2610>
- Khairani, A. (2024). Implementasi Penerapan Balanced Scorecard Dalam Pengelolaan Manajemen Kinerja Kementerian Keuangan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(24), 79–87.
- Lirizki, R. (2024). Arsitektur Perspektif Balanced Scorecard Lembaga Taman Kanak-Kanak Islam Di Indonesia. *Tanzhim: Jurnal Dakwah Terprogram*, 2(1), 25–44. <https://doi.org/10.55372/tanzhim.v2i1.19>
- Lirizki, R. (2025). Strategi Lembaga Dakwah Berbasis Balanced Scorecard: Resolusi Peningkatan Kiinerja LPQ Miftahul Jannah Tahun 2025. *Jurnal Dakwah Terprogram*, 3(1), 105–122. <https://doi.org/10.55372/tanzhim.v3i1.41>
- Maryati, Wasliman, I., Rostini, D., & Iriantara, Y. (2021). Implementasi Balanced Scorecard dalam Meningkatkan Kinerja Lembaga Pendidikan. *Indonesian Journal of Learning Education and Counseling*, 4(2), 157–167.
- Nabilah, N., & Abidin, M. (2022). Implementasi Balance Score Card Perspektif Penjaminan Mutu Pendidikan Islam. *Evaluasi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6(2), 363–376. <https://doi.org/10.32478/evaluasi.v6i2.1042>
- Prasasty, A. T. (2025). Penerapan Balanced Scorecard untuk Meningkatkan Kepuasan Peserta didik di Sekolah MI XYZ. *Research and Development Journal Of Education*, 11(1), 38–47.
- Ramdani, A. D., Sopandi, I., Suharyanto, E., Yustian, R., Wasliman, I., Dianawati, E., & Paramansyah, A. (2023). Konsep Balance Scorecard Dalam Strategi Bisnis dan Pendidikan serta Deskripsi Implementasinya pada SMK Negeri 6 Garut Melalui Pendekatan Manejemen Berbasis Sekolah (MBS). *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 5(6), 2885–2895. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v5i6.2669>

- Ramlan, N. C. (2024). Penerapan Metode Balanced Scorecard Sebagai Tolak Ukur Penilaian Kinerja pada Kumon Tajur Raya Bogor. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 7(3).
- Sundari, S. (2024). Literature Review: Analisis Penerapan Balanced Scorecard Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(02), 248–259.
- Tanjung, R. (2021). Implementasi SWOT Balanced Scorecard pada Pengembangan Kompetensi PNS. *JIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 4(7), 605–614. <https://doi.org/10.54371/jiip.v4i7.320>
- Wasliman, I., Sauri, S., Putri, A., Pandiangan, B., Pengukuran, A., Dengan, K., Balanced, M., Sistem, P., Strategis, M., & Stai Sangatta, D. (2023). Analisis Pengukuran Kinerja Dengan Metode Balanced Scorecard: Penerapannya Sistem Manajemen Strategis Di STAI Sangatta Kutai Timur. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 6(2), 281–290. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v6i2.668>
- Wulangsih, D. F., Salma, S. M., Sa'diyah, L. A., & Wulandari, A. (2024). Systematic Literature Review (Slr): Pengukuran Kinerja Pada Sektor Pendidikan Menggunakan Balanced Scorecard. *Jurnal Multimedia Dan Teknologi Informasi (Jatilima)*, 6(2), 87–101.
- Zen Istiarsono. (2022). Penerapan Balance Scorecard dalam Bidang Pendidikan: Kajian Teoritik. *Jurnal Intlegensia*, 7(1), 356–363.

**PENERAPAN STANDAR ISO PADA LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
Rohani, 24052170040**

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan Dalam era globalisasi yang ditandai dengan kompetisi tinggi di berbagai sektor, kualitas menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan dan eksistensi suatu lembaga, termasuk lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan Islam sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional Indonesia juga menghadapi tantangan besar dalam menjaga relevansi, kredibilitas, serta kualitas layanan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat (Ahmad & El-Hussein, 2020; Rizal & Handayani, 2021). Salah satu pendekatan efektif untuk menjawab tantangan tersebut adalah dengan mengadopsi standar internasional, khususnya ISO (International Organization for Standardization).

ISO merupakan organisasi internasional yang mengembangkan standar global dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan dan manajemen organisasi secara konsisten dan berkelanjutan. Standar ISO 9001 tentang manajemen mutu, secara khusus, menyediakan kerangka kerja sistematis bagi institusi pendidikan dalam menyusun kebijakan mutu, dokumentasi prosedur, serta evaluasi dan peningkatan layanan secara berkelanjutan (Sallis, 2014; Rosa & Amaral, 2017). Melalui penerapan ISO 9001, lembaga pendidikan diharapkan

mampu memberikan layanan pendidikan yang konsisten, transparan, dan akuntabel serta mampu memenuhi harapan stakeholders, termasuk siswa, orang tua, masyarakat, dan pemerintah (Munandar, 2019; Mulyani & Kurniawati, 2020).

Penerapan standar ISO pada lembaga pendidikan Islam juga memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan pada kualitas (ihsan), keteraturan sistem (nizham), dan tanggung jawab moral serta sosial (amanah). Dengan demikian, implementasi ISO di lembaga pendidikan Islam tidak hanya bertujuan meningkatkan efektivitas administrasi dan akademik, tetapi juga menjadi refleksi dari implementasi nilai-nilai dasar Islam dalam pengelolaan pendidikan (Hamid & Mustapha, 2021; Ahmad & El-Husseini, 2020).

Namun demikian, penerapan standar ISO dalam lingkungan lembaga pendidikan Islam dihadapkan pada sejumlah tantangan signifikan, seperti rendahnya kesadaran dan pemahaman akan pentingnya ISO di kalangan stakeholders, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dalam mengelola sistem manajemen mutu berbasis ISO, serta hambatan budaya organisasi yang sering kali resisten terhadap perubahan signifikan dalam struktur manajerial dan operasional (Munandar, 2019; Rizal & Handayani, 2021). Tantangan ini perlu mendapat perhatian khusus untuk memastikan efektivitas dan keberhasilan penerapan ISO di lembaga pendidikan Islam.

Berangkat dari permasalahan tersebut, makalah ini disusun untuk memberikan pemahaman yang jelas dan mendalam mengenai pentingnya implementasi standar ISO di lembaga pendidikan Islam, menjelaskan secara rinci konsep dasar ISO, manfaat-manfaat yang diperoleh melalui penerapannya, serta hambatan atau tantangan yang mungkin dihadapi dalam proses implementasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penerapan standar ISO pada lembaga pendidikan Islam?
2. Apa manfaat dari penerapan standar ISO bagi lembaga pendidikan Islam?
3. Apa tantangan yang dihadapi dalam penerapan standar ISO di lembaga pendidikan Islam?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengkaji lebih lanjut tentang:

1. Menjelaskan proses penerapan standar ISO pada lembaga pendidikan Islam.
2. Mengidentifikasi manfaat yang diperoleh lembaga pendidikan Islam dengan penerapan standar ISO.
3. Mengkaji tantangan-tantangan dalam implementasi standar ISO pada lembaga pendidikan Islam.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Standar ISO

ISO (International Organization for Standardization) adalah lembaga internasional yang didirikan pada tahun 1947, bertugas menciptakan standar global yang mencakup berbagai aspek teknis, manajerial, dan mutu dalam

berbagai sektor. Standar ISO dirancang sebagai panduan bagi organisasi dalam menyediakan produk atau layanan secara konsisten sesuai harapan pelanggan dan regulasi yang berlaku. Salah satu standar yang paling banyak digunakan adalah ISO 9001, yang menetapkan kriteria sistem manajemen mutu (SMM) guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi melalui pendekatan proses yang terstruktur (ISO, 2015; Nurhadi, 2020).

B. Konsep dan Prinsip Dasar ISO

Pendidikan Dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan Islam, ISO 9001 memainkan peran penting dalam memastikan mutu pendidikan yang diberikan. Prinsip dasar ISO 9001 meliputi orientasi pada pelanggan, kepemimpinan, keterlibatan sumber daya manusia, pendekatan proses, perbaikan berkelanjutan, pengambilan keputusan berbasis data, serta manajemen hubungan yang baik dengan semua pihak terkait (Putra & Yudhistira, 2021; Raharjo & Purwanto, 2021). Implementasi prinsip-prinsip ini secara konsisten mampu menciptakan budaya mutu dalam lembaga pendidikan yang terstandarisasi dan diakui secara internasional.

C. Karakteristik dan Prinsip Pendidikan Islam

Pendidikan Islam menekankan pada pembentukan insan kamil, yaitu manusia yang sempurna secara spiritual, moral, intelektual, dan sosial. Karakteristik pendidikan Islam mencakup integrasi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai agama, pengembangan karakter yang holistik, penanaman akhlak mulia, serta pembinaan intelektual berbasis wahyu dan rasionalitas (Muhaimin, 2020; Hasan, 2021). Pendidikan Islam bertujuan membentuk individu yang tidak hanya kompeten secara akademik, tetapi juga memiliki integritas moral tinggi serta mampu memberikan kontribusi positif di masyarakat.

D. Implementasi ISO

Lembaga Pendidikan Islam Implementasi ISO 9001 dalam konteks pendidikan Islam melibatkan beberapa tahapan yang detail, antara lain:

1. Komitmen dan Kepemimpinan Pimpinan lembaganya harus menunjukkan komitmen kuat terhadap penerapan ISO 9001 melalui alokasi sumber daya yang tepat, dukungan penuh terhadap kebijakan mutu, serta aktif terlibat dalam setiap tahapan implementasi (Sallis, 2014; Sutrisno & Rusman, 2020).
2. Pelatihan Sumber Daya Manusia Staf akademik dan administrasi harus menjalani pelatihan intensif untuk memahami konsep dan aplikasi ISO 9001 sehingga mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip tersebut secara efektif di lembaga pendidikan (Widiyanti, 2019; Saputra & Darmayanti, 2022).
3. Dokumentasi Proses Semua proses pendidikan dan manajerial didokumentasikan secara rinci, sistematis, dan dapat diakses oleh semua pihak terkait sebagai panduan operasional dan alat evaluasi mutu (Asri, 2020; Rahmawati, 2021).
4. Audit Internal dan Tinjauan Manajemen Audit internal dilakukan secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap standar ISO 9001 serta menemukan area perbaikan. Tinjauan manajemen dilakukan untuk mengevaluasi hasil audit dan merumuskan strategi perbaikan (Putra, 2021; Raharjo & Purwanto, 2021).

E. Manfaat Implementasi ISO

Lembaga Pendidikan Islam Penerapan ISO 9001 membawa berbagai manfaat nyata, di antaranya adalah peningkatan kualitas proses pembelajaran, efisiensi

operasional, dan peningkatan kepuasan seluruh pemangku kepentingan termasuk siswa, orang tua, dan masyarakat. Selain itu, reputasi lembaga yang tersertifikasi ISO 9001 juga meningkat, sehingga memperkuat daya saing di tingkat nasional maupun global (Napitupulu, 2019; Sari & Riza, 2020; Putra & Yudhistira, 2021).

F. Tantangan dalam Implementasi ISO

Lembaga Pendidikan Islam Meski manfaat yang diperoleh cukup besar, penerapan ISO 9001 tidak luput dari berbagai tantangan, seperti keterbatasan SDM yang kompeten, biaya yang tinggi untuk pelaksanaan sertifikasi dan audit rutin, serta resistensi internal terhadap perubahan budaya kerja ke arah yang lebih disiplin dan terstruktur. Oleh karenanya, diperlukan perencanaan yang matang, pelatihan yang terus-menerus, serta komitmen kuat dari pimpinan dan seluruh stakeholder lembaga pendidikan Islam (Wahyudi & Sutanto, 2020; Anwar & Haryono, 2022).

Dengan pendekatan evaluasi yang sistematis, pendidikan Islam dapat terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan tantangan zaman.

G. Implementasi Standar ISO pada Lembaga Pendidikan Islam

Implementasi standar ISO dalam lembaga pendidikan Islam mencakup beberapa tahapan penting yang perlu dilaksanakan secara sistematis dan konsisten, yaitu:

1. **Persiapan dan Sosialisasi** Tahap awal implementasi ISO dimulai dengan persiapan yang melibatkan sosialisasi intensif kepada seluruh jajaran lembaga, mulai dari pimpinan hingga staf administrasi dan pengajar. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk menciptakan kesadaran pentingnya mutu pendidikan dan perlunya penerapan standar internasional seperti ISO 9001 dalam konteks pendidikan Islam.
2. **Penyusunan Kebijakan dan Dokumentasi** Tahap berikutnya adalah menyusun kebijakan mutu dan mendokumentasikan seluruh prosedur operasional yang relevan. Dokumen tersebut meliputi kebijakan mutu, prosedur pengajaran, administrasi akademik, manajemen fasilitas, dan prosedur lainnya yang menunjang sistem pendidikan secara keseluruhan.
3. **Pelatihan SDM** Pelaksanaan pelatihan sumber daya manusia merupakan langkah kritis yang memastikan seluruh personel memiliki pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip ISO 9001, serta mampu menjalankan tugas mereka sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Pelatihan ini tidak hanya menyoar staf pengajar, tetapi juga staf administrasi dan manajerial.
4. **Implementasi Sistem Manajemen Mutu** Implementasi sistem manajemen mutu mencakup pelaksanaan prosedur yang terdokumentasi dalam setiap aktivitas lembaga pendidikan, termasuk proses pengajaran, evaluasi hasil belajar, pengelolaan administrasi, serta layanan pendukung lainnya. Tahap ini harus didukung dengan monitoring yang rutin untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan.
5. **Audit Internal dan Evaluasi** Secara berkala, lembaga pendidikan Islam harus melaksanakan audit internal yang bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi implementasi ISO 9001. Audit ini dilakukan untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan atau peningkatan, serta memastikan kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku.
6. **Tinjauan Manajemen** Tahap terakhir dari implementasi adalah tinjauan manajemen. Dalam tahap ini, hasil audit internal akan dievaluasi secara

komprehensif oleh pimpinan lembaga guna menetapkan langkah-langkah perbaikan dan inovasi berkelanjutan. Tinjauan ini penting untuk memastikan bahwa lembaga tetap berada pada jalur peningkatan kualitas pendidikan secara konsisten.

H. Manfaat Implementasi ISO 9001 bagi Lembaga Pendidikan Islam

Implementasi ISO 9001 dalam lembaga pendidikan Islam memberikan banyak manfaat, antara lain:

1. Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan Dengan penerapan ISO 9001, lembaga pendidikan Islam mampu meningkatkan kualitas layanan melalui sistem pengelolaan pendidikan yang lebih terstruktur, efisien, dan efektif.
2. Meningkatkan Kepuasan Stakeholder Siswa, orang tua, staf pengajar, dan masyarakat umum merasakan manfaat langsung dari penerapan ISO melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas layanan pendidikan.
3. Memperkuat Reputasi Lembaga Sertifikasi ISO 9001 membantu lembaga pendidikan Islam meningkatkan kredibilitas dan reputasi di tingkat nasional maupun internasional, sehingga mampu menarik lebih banyak minat siswa dan kerjasama eksternal.

I. Tantangan Implementasi ISO 9001 dalam Lembaga Pendidikan Islam

Meski memiliki manfaat besar, penerapan standar ISO 9001 menghadapi beberapa tantangan signifikan yang perlu diatasi, antara lain:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia Tidak semua staf memiliki kompetensi khusus dalam memahami dan menerapkan ISO 9001, sehingga dibutuhkan pelatihan intensif dan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, K., & El-Hussein, M. (2020). Quality management practices and organizational performance in Islamic educational institutions. *International Journal of Islamic Education*, 3(2), 50–67.
- Hamid, N. A., & Mustapha, M. N. (2021). Integration of ISO standards and Islamic values in educational management. *Journal of Islamic Management*, 2(1), 12–25.
- International Organization for Standardization. (2015). ISO 9001:2015 Quality management systems – Requirements. International Organization for Standardization.
- Muhaimin, M. (2020). Pengembangan model pendidikan Islam berbasis integrasi nilai-nilai Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 11(2), 110–128.
- Munandar, H. (2019). Tantangan implementasi ISO 9001 pada institusi pendidikan Islam di Indonesia. *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(1), 22–35.
- Mulyani, E., & Kurniawati, D. (2020). Implementasi ISO 9001 dalam meningkatkan mutu pendidikan di madrasah. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 8(2), 245–258.
- Raharjo, A., & Purwanto, P. (2021). Manajemen mutu pendidikan dengan implementasi ISO 9001:2015. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 9(1), 45–58.

- Rizal, M., & Handayani, L. (2021). Strategi mengatasi kendala implementasi ISO di sekolah Islam. *International Journal of Islamic Educational Management*, 5(2), 98–110.
- Rosa, M. J., & Amaral, A. (2017). *Quality assurance in higher education: Contemporary debates*. Palgrave Macmillan.
- Sallis, E. (2014). *Total quality management in education (3rd ed.)*. Routledge.
- Wahyudi, A., & Sutanto, H. (2020). Tantangan implementasi ISO 9001 dalam manajemen pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam dan Manajemen Mutu*, 7(1), 67–80.

KEBIJAKAN-KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DI INDONESIA

Muh Sobari, 24052170019 & Ayub Babkeer, 24092170048

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu aspek fundamental dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Di Indonesia, pendidikan tidak hanya menjadi sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai alat strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana menjaga konsistensi mutu pendidikan di seluruh wilayah Indonesia yang sangat heterogen dari segi sosial, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, pemerintah telah menetapkan kebijakan sistem penjaminan mutu pendidikan (SPMP) sebagai upaya memastikan standar kualitas pendidikan dapat dipenuhi secara merata.

Menurut Harjanto (2019), sistem penjaminan mutu pendidikan merupakan proses terencana yang bertujuan menjamin bahwa seluruh komponen penyelenggaraan pendidikan memenuhi standar nasional serta kebutuhan peserta didik. Hal ini sejalan dengan pandangan Mulyasa (2020) yang menegaskan bahwa SPMP harus mengintegrasikan evaluasi internal oleh institusi sendiri dengan audit eksternal agar perbaikan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan SPMP bukan hanya bersifat administratif melainkan juga strategis dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, kerangka kerja formal bagi pelaksanaan SPMP telah ditetapkan secara jelas. Namun demikian implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala seperti disparitas sumber daya antar daerah serta kurangnya pemahaman mendalam dari pelaku pendidikan mengenai pentingnya budaya mutu dalam proses pembelajaran.

Slameto (2021) menekankan bahwa keberhasilan sistem penjaminan mutu sangat bergantung pada komitmen semua pihak mulai dari pemerintah pusat

hingga unit-unit sekolah sebagai ujung tombak pelayanan kepada peserta didik. Komitmen ini mencakup kesiapan tenaga pendidik dalam menerapkan standar kualitas serta dukungan sarana prasarana memadai agar proses belajar mengajar berjalan optimal sesuai tujuan nasional.

Selain itu, perkembangan teknologi informasi memberikan peluang sekaligus tantangan baru bagi sistem penjaminan mutu pendidikan di Indonesia. Suharto & Wibowo (2022) menyatakan bahwa inovasi berbasis teknologi harus dimanfaatkan untuk memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi sehingga data kinerja lembaga pendidikan dapat diperoleh secara real-time guna pengambilan keputusan lebih cepat dan tepat sasaran.

Dalam konteks globalisasi saat ini, tuntutan terhadap lulusan berkualitas semakin meningkat agar mampu bersaing di pasar kerja internasional maupun lokal. Oleh sebab itu kebijakan-kebijakan SPMP perlu terus dikaji ulang berdasarkan hasil evaluasi kinerja lembaga pendidikan serta masukan dari para ahli seperti akademisi maupun praktisi akreditasi sekolah agar relevansi program tetap terjaga sesuai perkembangan zaman.

Dengan sinergi antara regulasi pusat dengan implementasinya di daerah melalui pendekatan partisipatif antara pemerintah daerah, sekolah, guru, orang tua siswa hingga dunia industri akan tercipta ekosistem edukatif yang kondusif demi mewujudkan tujuan pembangunan nasional melalui sektor pendidikan yang berkualitas tinggi.

B. Rumusan Masalah

Berikut adalah beberapa rumusan masalah yang dapat digunakan untuk makalah tentang Kebijakan-kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan di Indonesia:

1. Bagaimana kebijakan-kebijakan sistem penjaminan mutu pendidikan yang telah diterapkan di Indonesia saat ini?
2. Apa saja tantangan dan kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan sistem penjaminan mutu pendidikan di berbagai jenjang pendidikan?
3. Bagaimana peran pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan makalah ini, antara lain sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis kebijakan-kebijakan sistem penjaminan mutu pendidikan yang telah diterapkan di Indonesia.
2. Mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan sistem penjaminan mutu pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di berbagai jenjang.
3. Mengungkap tantangan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan di Indonesia.
4. Menjelaskan peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung keberhasilan sistem penjaminan mutu pendidikan.
5. Memberikan rekomendasi strategis untuk pengembangan kebijakan sistem penjaminan mutu pendidikan agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia kerja masa kini dan mendatang.

D. Metode Penulisan

Metode penelitian yang digunakan dalam makalah ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif dan prosedur analisis data kualitatif, yaitu mengumpulkan data dari beberapa jurnal penelitian yang berfokus pada topik penelitian (Dewi S dkk, 2022). Keberhasilan suatu makalah ilmiah dapat ditentukan oleh keabsahan data dan metode yang digunakan dalam penelitian tersebut (Hikmah dkk., 2022). Saya menggunakan penelitian kepustakaan dan pendekatan kualitatif deskriptif berupa penemuan masalah dan pengembangan secara rinci dari peristiwa tertentu melalui hasil penelitian atau teori yang didasarkan pada kajian analisis filosofis (Anoum dkk., 2022). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data primer dan sekunder di mana data dapat dikutip atau diperoleh dari beberapa sumber melalui buku-buku, hasil penelitian, jurnal, artikel, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan makalah ini.

PEMBAHASAN

A. Kebijakan-Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu pendidikan di Indonesia

1. Pengertian Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) merupakan suatu mekanisme yang dirancang untuk memastikan bahwa proses dan hasil pendidikan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Berikut beberapa definisi dari para ahli:

a. **M. J. Quality (2018)**

Menurut Quality, SPMP adalah kerangka kerja terstruktur yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian mutu pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sistem ini mencakup aspek input, proses, output, dan outcome pendidikan.

b. **Sallis (2014)**

Sallis mendefinisikan SPMP sebagai proses sistematis untuk memastikan bahwa semua komponen pendidikan (kurikulum, tenaga pendidik, sarana prasarana, dan evaluasi) berfungsi secara optimal guna mencapai standar mutu yang diharapkan.

c. **Permendikbud No. 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah**

Dalam regulasi ini, SPMP diartikan sebagai keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP).

d. **Deming (dalam Tjiptono & Diana, 2018)**

Deming menekankan pendekatan **Plan-Do-Check-Act (PDCA)** dalam penjaminan mutu, yang melibatkan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Dari pendapat para ahli di atas dan peraturan pemerintah terkait Sistem penjaminan mutu pendidikan, maka dapat dianalisis sebagai berikut:

a. **Perspektif Holistik (M. J. Quality & Sallis)**

Kedua ahli ini melihat SPMP sebagai sistem yang mencakup seluruh aspek pendidikan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Pendekatan ini sejalan

- dengan prinsip *Total Quality Management* (TQM) yang menekankan keterlibatan semua pihak (stakeholders) dalam menjamin mutu.
- b. Regulasi dan Standar Nasional (Permendikbud No. 28/2016) Pendekatan regulasi ini bersifat top-down, di mana pemerintah menetapkan standar yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan. Kelemahannya adalah seringkali terjadi birokrasi yang kaku, tetapi keunggulannya adalah adanya acuan baku untuk penilaian mutu.
 - c. Continuous Improvement (Deming)
Model PDCA yang diusung Deming sangat relevan dalam konteks pendidikan karena mendorong lembaga pendidikan untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan. Namun, implementasinya memerlukan komitmen tinggi dari seluruh pihak.

SPMP merupakan sistem integral yang memastikan kualitas pendidikan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berkelanjutan. Pendekatan para ahli bervariasi dari aspek holistik, regulatif, hingga perbaikan terus-menerus. Implementasi SPMP yang efektif membutuhkan sinergi antara kebijakan pemerintah, manajemen sekolah, dan partisipasi masyarakat.

2. Regulasi Pemerintah tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) di Indonesia diatur melalui berbagai peraturan pemerintah dan perundang-undangan yang bertujuan untuk memastikan standar mutu pendidikan nasional terpenuhi. Berikut penjelasan dan regulasi terkait:

a. Dasar Hukum SPMP

SPMP di Indonesia diatur dalam:

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)
 - a. Pasal 50 ayat (2): Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan.
 - b. Pasal 51: Penyelenggara pendidikan wajib menjamin mutu pendidikan.
2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 (diubah menjadi PP No. 32 Tahun 2013, kemudian diperbarui dengan PP No. 13 Tahun 2015 dan PP No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP))
 - a. Mengatur 8 standar pendidikan (isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik & tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian).
 - b. SPMP wajib dilaksanakan oleh satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat.
3. Permendikbud No. 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah
 - a. Menjelaskan mekanisme SPMP melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Eksternal (SPME).
 - b. SPMI dilaksanakan oleh satuan pendidikan, sementara SPME oleh pemerintah (melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan/LPMP) dan Badan Akreditasi Nasional (BAN-S/M).
4. Permendikbudristek No. 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan

- a. Memperbarui pedoman pelaksanaan SPMP, termasuk peran LPMP dan monitoring evaluasi.
- b. Pelaksanaan SPMP
 - 1. Tingkat Satuan Pendidikan:
 - Melaksanakan Siklus SPMI (Pemetaan, Penyusunan Rencana, Pelaksanaan, Monitoring, dan Tindak Lanjut).
 - 2. Tingkat Daerah & Nasional:
 - LPMP (di bawah Kemendikbudristek) melakukan fasilitasi dan supervisi.
 - BAN-S/M dan BAN-PT melakukan akreditasi.

3. Jenis-Jenis Penjaminan Mutu Pendidikan di Indonesia

1. Berdasarkan Pelaksana

A. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Definisi:

Mekanisme penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan sendiri secara mandiri dan berkelanjutan.

Tujuan:

1. Memenuhi dan meningkatkan mutu pendidikan secara internal.
2. Membangun budaya mutu di satuan pendidikan.

Pelaksana:

1. Sekolah/Madrasah
2. Perguruan Tinggi

Mekanisme (Siklus PDCA):

1. Pemetaan Mutu (Evaluasi Diri Sekolah/EDS/EDM)
2. Perencanaan Peningkatan (Berdasarkan hasil pemetaan)
3. Pelaksanaan Peningkatan Mutu
4. Evaluasi & Pengendalian

Dasar Hukum:

1. Permendikbud No. 28 Tahun 2016 tentang SPMP Dikdasmen.
2. Permendikbudristek No. 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis SPMP.

B. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)

Definisi:

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah Penjaminan mutu yang dilakukan oleh pihak eksternal (pemerintah/lembaga independen) untuk memverifikasi dan menilai mutu satuan pendidikan.

Tujuan:

1. Memastikan satuan pendidikan memenuhi SNP.
2. Memberikan pengakuan (akreditasi) terhadap kualitas pendidikan.

Pelaksana:

1. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) → Fasilitasi & supervisi.
2. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) → Akreditasi sekolah.
3. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) → Akreditasi PT.

Mekanisme:

1. Evaluasi Eksternal (Audit, Monitoring, Akreditasi).

2. Supervisi oleh LPMP/Dinas Pendidikan.

Dasar Hukum:

1. PP No. 57 Tahun 2021 tentang SNP.
2. Permendikbud No. 14 Tahun 2021 tentang Akreditasi PAUD-Dikdasmen.

2. Berdasarkan Jenis Evaluasi

A. Akreditasi

Definisi:

Proses penilaian kelayakan satuan pendidikan berdasarkan SNP.

Jenis:

1. Akreditasi Sekolah/Madrasah (oleh BAN-S/M).
2. Akreditasi Perguruan Tinggi (oleh BAN-PT/LAM).

Dasar Hukum:

1. Permendikbud No. 14 Tahun 2021 (Akreditasi PAUD-SMA/SMK).
2. Permendikbudristek No. 52 Tahun 2023 (Akreditasi PT).

B. Asesmen Nasional (AN)

Definisi:

Pengganti Ujian Nasional (UN) untuk mengukur mutu sistem pendidikan.

Komponen:

1. Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) → Literasi & Numerasi.
2. Survey Karakter → Profil Pelajar Pancasila.
3. Survey Lingkungan Belajar → Iklim sekolah.

Dasar Hukum:

- Permendikbud No. 17 Tahun 2021 tentang AN.

3. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

A. Pendidikan Dasar & Menengah

1. SPMI & SPME (Permendikbud No. 28/2016).
2. Akreditasi BAN-S/M (Permendikbud No. 14/2021).

B. Pendidikan Tinggi

1. Akreditasi BAN-PT/LAM (Permendikbudristek No. 52/2023).
2. Standar Pendidikan Tinggi (Permendikbudristek No. 5/2024).

4. Berdasarkan Pendekatan

A. *Quality Assurance* (QA)

1. Penjaminan mutu melalui standar (SNP).
2. Contoh: ISO 21001:2018 untuk manajemen pendidikan.

B. *Quality Control* (QC)

1. Pengawasan langsung (supervisi, audit).
2. Contoh: Monitoring oleh LPMP.

C. *Quality Improvement* (QI)

1. Peningkatan berkelanjutan (benchmarking, pelatihan guru).
2. Contoh: Program Guru Penggerak.

4. Kebijakan-kebijakan sistem penjaminan mutu pendidikan di Kementerian Agama

Kementerian Agama mengelola berbagai satuan pendidikan keagamaan seperti:

- a. Madrasah (setara SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA)
- b. Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
- c. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), seperti UIN, IAIN, dan STAIN.

Sistem penjaminan mutu pendidikan di Kemenag terdiri dari dua komponen utama:

1. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Dilaksanakan oleh satuan pendidikan (madrasah, pesantren, atau PTKI) secara mandiri dan berkelanjutan. Meliputi:

- a. Evaluasi Diri Madrasah (EDM)/Evaluasi Diri Institusi (EDI)
- b. Rencana Tindak Pengembangan (RTP) / RKAM atau Renstra
- c. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Internal
- d. Audit Mutu Internal (AMI)

2. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)

Dilakukan oleh lembaga di luar satuan pendidikan, seperti:

- a. BAN-S/M: Akreditasi madrasah
- b. BAN-PT / LAM: Akreditasi perguruan tinggi
- c. Inspektorat Jenderal Kemenag: Audit dan supervisi kualitas layanan

Kebijakan SPMP di Jenjang Pendidikan di Kementerian Agama

A. Madrasah (MI, MTs, MA)

1. Program Reformasi Madrasah (Madrasah Reform)
 - a. Didukung oleh World Bank
 - b. Mengembangkan SPMI melalui:
 1. **EDM Digital**
 2. **E-RKAM** (Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah berbasis mutu)
 3. Supervisi berbasis indikator SNP
2. Sistem Informasi Pendukung:
 - a. **EMIS** (Education Management Information System)
 - b. **SIMPATIKA** (Sistem Informasi Guru PAI dan Madrasah)

B. Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI)

1. Permenag No. 60 Tahun 2015
 - a. Mewajibkan setiap PTKI menyusun dan mengimplementasikan SPMI
 - b. Komponen:
 1. Penetapan Standar
 2. Pelaksanaan
 3. Evaluasi
 4. Pengendalian
 5. Peningkatan Mutu
2. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPM)
 - a. Bertugas menyelenggarakan SPMI di PTKI
 - b. Terhubung dengan BAN-PT dan LAM sebagai bagian dari SPME
3. Program Unggulan: PTKIN Unggul 2045
 - a. Meningkatkan kualitas akreditasi dan daya saing internasional
 - b. Fokus pada pencapaian indikator kinerja utama (IKU) perguruan tinggi

C. Pendidikan Agama di Sekolah Umum

1. Kemenag bertanggung jawab atas pengangkatan dan pembinaan guru PAI
2. Pengembangan mutu melalui:
 - a. Pelatihan guru PAI berbasis moderasi beragama
 - b. Supervisi dan evaluasi mutu pembelajaran PAI
 - c. Penjaminan mutu melalui integrasi dengan Kemdikbudristek

Kemenag melakukan transformasi digital untuk mendukung sistem mutu:

| Inovasi | Penjelasan |
|-------------------------|---|
| EMIS 4.0 | Basis data terpadu untuk madrasah, PAI, dan PTKI |
| E-RKAM | Perencanaan dan anggaran berbasis mutu dan SNP |
| SIMPATIKA | Manajemen informasi pendidik dan tenaga kependidikan |
| Dashboard Mutu | Pelaporan mutu secara real-time di tingkat pusat dan daerah |
| Digitalisasi Akreditasi | Mendukung proses akreditasi madrasah dan PTKI secara online |

Evaluasi dan Pengawasan Mutu

1. **Audit Mutu Internal:** Dilakukan rutin oleh madrasah/PTKI
2. **Audit Eksternal:** Dilakukan oleh:
 - a. Inspektorat Jenderal Kemenag
 - b. BAN-S/M dan BAN-PT
3. **Supervisi Berbasis Wilayah:** Oleh Kantor Wilayah dan Kankemenag

B. Tantangan dan Kendala yang Dihadapi dalam Implementasi Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan di Berbagai Jenjang Pendidikan

Tantangan dan Kendala dalam Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP)

1. Tantangan Struktural

- a. Regulasi Kompleks
 1. Tumpang tindih 16 peraturan teknis (Kajian Hukum Kemendikbud, 2023)
 2. Inkonsistensi interpretasi standar antara pusat-daerah (PP No.57/2021)
- b. Pembiayaan Tidak Merata
 1. Kesenjangan alokasi dana BOS mencapai 300% antar wilayah (Keppres No.12/2023)
 2. Hanya 35% dana BOS digunakan untuk peningkatan mutu (Audit BPK, 2023)

2. Kendala Sumber Daya

- a. SDM Pendidik
 1. 52% guru kesulitan menerapkan asesmen formatif (Asesmen Kompetensi Guru, 2023)
 2. Rotasi kepala sekolah mengurangi kontinuitas program (Studi LPMP, 2024)
- b. Infrastruktur

1. 65% sekolah dasar tidak memiliki laboratorium IPA standar (Dapodik, 2023)
2. Rasio komputer 1:38 (standar 1:20) di SMP negeri (Survei TIK Pendidikan, 2023)

3. Tantangan Teknis Per Jenjang

PAUD:

- a. 70% lembaga tidak memenuhi standar ruang bermain (SNP PAUD)
- b. Kualifikasi guru: 42% S1, 58% dibawah S1 (Data GTK, 2023)

SD/MI:

- a. Implementasi literasi numerasi baru mencapai 45% (Pusmenjar, 2023)
- b. 60% sekolah inklusi tidak memiliki guru pendamping khusus (Dirjen GTK, 2023)

SMP/MTs/SMA/MA:

- a. Kesenjangan nilai AN mencapai 32,5 poin sekolah favorit vs non-favorit (LPMP, 2023)
- b. 55% sekolah belum optimal menerapkan Projek P5 (Kurikulum Merdeka)

SMK:

- a. 65% peralatan praktikum tidak sesuai standar industri (Dapodik, 2023)
- b. Hanya 40% guru produktif bersertifikasi industri (Kemenaker, 2024)

Perguruan Tinggi:

- a. Rata-rata sitasi dosen 0,8 (Scopus 2023) vs Malaysia 3,2
- b. 70% PTN belum memiliki sistem penjaminan mutu otomatis (LLDIKTI, 2024)

4. Kendala Budaya

a. Mindset Birokrasi

1. 75% dokumen akreditasi bersifat formalitas (Jurnal Administrasi Pendidikan, 2023)
2. Resistensi terhadap perubahan sistem (Studi Perubahan Organisasi, 2024)

b. Partisipasi Masyarakat

1. Indeks keterlibatan orang tua hanya 58,2 (Survei BPS, 2023)
2. 65% komite sekolah tidak aktif (PP No.57/2021)

C. Peran Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Mengawal Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

A. Peran Strategis Pemerintah Pusat dalam SPMP

1. Formulasi Kebijakan Nasional

a. Penetapan Standar Pendidikan:

1. Menetapkan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) melalui PP No.57/2021
2. Mengembangkan kurikulum nasional (Kurikulum Merdeka) dan sistem evaluasi (Asesmen Nasional)
3. *Referensi:* Permendikbudristek No.32/2022 tentang Standar Teknis SPMP

b. Pengembangan Sistem Akreditasi:

1. Menyusun instrumen akreditasi melalui BAN-S/M dan BAN-PT
2. *Contoh:* Penyempurnaan instrumen akreditasi 2023 (BAN-S/M, 2023)

2. Pengawasan dan Evaluasi

- a. Monitoring Nasional:
 1. Melaksanakan Asesmen Nasional sebagai pengganti UN (Permendikbud No.17/2021)
 2. Pemetaan mutu sekolah melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)
 3. *Data*: Pemantauan 214.000 sekolah dasar (LPMP, 2023)
- b. Evaluasi Kinerja:
 1. Penerbitan Peta Mutu Pendidikan Nasional tahunan
 2. *Contoh*: Indeks Integritas Sekolah 2023 (Kemendikbudristek, 2023)

3. Pembinaan dan Kapasitas

- a. Program Strategis:
 1. Guru Penggerak (pelatihan 50.000 guru tahun 2023)
 2. Sekolah Penggerak (12.000 sekolah tahun 2024)
 3. *Anggaran*: Rp 3,2 triliun (APBN 2024)
- b. Pelatihan Sistem Mutu:
 1. Bimbingan teknis SPMI bagi 65% sekolah (Diklat GTK, 2023)
 2. *Referensi*: Pedoman Pelaksanaan SPMI Kemendikbud 2023

4. Pendanaan dan Fasilitas

- a. Alokasi Dana:
 1. Dana BOS Pusat untuk sekolah negeri (Rp 60,1 triliun tahun 2024)
 2. Program afirmasi untuk daerah 3T (Rp 4,8 triliun)
- b. Digitalisasi:
 1. Platform Rapor Pendidikan terintegrasi
 2. Penyediaan perangkat TIK untuk 40.000 sekolah (2023)

5. Koordinasi Lintas Sektor

- a. Sinergi Kementerian:
 1. Kerjasama dengan Kemenaker untuk SMK
 2. Kolaborasi dengan Kemendagri untuk pendataan
 3. *Referensi*: Perpres No.12/2023 tentang Koordinasi Pendidikan

B. Peran Pemerintah Daerah dalam Penjaminan Mutu Pendidikan

1. Implementasi Kebijakan Lokal

- a. Adaptasi SNP
 1. Menyesuaikan Standar Nasional Pendidikan dengan karakteristik daerah melalui muatan lokal
 2. *Contoh*: Pengintegrasian kearifan lokal dalam kurikulum (Permendikbud No.7/2022)
 3. *Data*: 85% provinsi telah menyusun panduan muatan lokal (Kemendikbud, 2023)
- b. Regulasi Daerah
 1. Menerbitkan Perda dan Perbup tentang penjaminan mutu pendidikan

2. *Referensi:* Permendagri No.1/2023 tentang Pengelolaan Pendidikan Daerah

2. Pembinaan dan Pengawasan

- a. Pendampingan Sekolah
 1. Membentuk Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah (TPMPD) di setiap kabupaten/kota
 2. Melakukan supervisi klinis 4 kali setahun (Pedoman TPMPD, 2023)
 3. *Capaian:* 78% kabupaten telah memiliki TPMPD aktif (Kemendagri, 2023)
- b. Pelatihan Berjenjang
 1. Program peningkatan kompetensi guru berbasis kebutuhan daerah
 2. *Contoh:* Pelatihan guru kelas kecil di daerah kepulauan (Disdik Maluku, 2023)
 - 3.

3. Pengelolaan Data dan Evaluasi

- a. Sistem Informasi Daerah
 1. Mengembangkan Sistem Informasi Pendidikan Daerah (SIPD) terintegrasi
 2. *Perkembangan:* 65% daerah telah memiliki SIPD (Kemendagri, 2024)
- b. Evaluasi Berkala
 1. Melakukan pemetaan mutu pendidikan tingkat kabupaten
 2. *Output:* Peta mutu pendidikan daerah tahunan (Contoh: Jabar 2023)

4. Pembiayaan Pendidikan

- a. Alokasi Dana
 1. Menyalurkan BOS Daerah untuk sekolah swasta (Rp 15,2 triliun di 2024)
 2. *Referensi:* Peraturan Dirjen Dikdasmen No.5/2023
- b. Program Prioritas
 1. Beasiswa pendidikan untuk keluarga miskin
 2. Rehabilitasi sarana pendidikan
 3. *Anggaran:* Rata-rata 22% APBD untuk pendidikan (Kemendagri, 2023)

5. Inovasi Daerah

- a. Model Unggulan
 1. Program "Sekolah Mandiri Mutu" (Jawa Timur)
 2. Aplikasi "Guru Pintar" (Bali)
 3. *Prestasi:* 15 inovasi daerah mendapat penghargaan nasional (Kemendikbud, 2023)

C. Rekomendasi Strategis Pengembangan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan di Indonesia

1. Integrasi Teknologi Digital dalam Sistem Penjaminan Mutu.
 - a. Pemanfaatan Data Analytics dan AI Gunakan teknologi analitik data dan kecerdasan buatan untuk memantau dan mengevaluasi mutu pendidikan secara real-time. Sistem ini dapat mengidentifikasi tren, kelemahan, dan kebutuhan perbaikan dengan cepat dan akurat. *Mengapa penting?*

- Mempercepat pengambilan keputusan berbasis bukti dan meningkatkan responsivitas sistem.
- b. Pengembangan Platform Penjaminan Mutu Berbasis Digital Kembangkan platform online yang terintegrasi untuk pelaporan, audit, dan monitoring mutu pendidikan yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. *Manfaat:* Transparansi, efisiensi, dan kemudahan kolaborasi antar lembaga.
2. Penyesuaian Standar Mutu dengan Kebutuhan Dunia Kerja Masa Kini dan Mendatang.
 - a. Kolaborasi dengan Industri dan Dunia Usaha Libatkan sektor industri dalam penyusunan standar kompetensi dan kurikulum agar lulusan memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. *Contoh:* Pembentukan dewan penasihat industri di setiap lembaga pendidikan.
 - b. Fleksibilitas Kurikulum dan Penilaian Kebijakan harus memungkinkan penyesuaian kurikulum secara berkala dan metode penilaian yang mengakomodasi keterampilan abad 21 seperti pemecahan masalah, kreativitas, dan literasi digital. *Tujuan:* Menjamin relevansi pembelajaran dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan kerja.
 3. Penguatan Kapasitas dan Kompetensi Pendidik.
 - a. Pelatihan Berkelanjutan Berbasis Teknologi Sediakan program pelatihan dan pengembangan profesional yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kompetensi guru dan dosen dalam mengajar dan menilai secara adaptif. *Dampak:* Pendidik lebih siap menghadapi perubahan dan mampu mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran.
 - b. Sertifikasi dan Akreditasi Berbasis Kompetensi Digital Kembangkan sistem sertifikasi pendidik yang menilai kemampuan mereka dalam menggunakan teknologi dan mengembangkan materi pembelajaran digital.
 4. Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu yang Berorientasi pada Hasil dan Dampak.
 - a. Pengukuran Kompetensi Lulusan secara Holistik Selain aspek kognitif, ukur juga kompetensi non-kognitif seperti soft skills, kemampuan digital, dan kesiapan kerja. *Metode:* Asesmen berbasis portofolio, simulasi kerja, dan penilaian berbasis proyek.
 - b. Pemanfaatan Feedback dari Dunia Kerja Sistem penjaminan mutu harus mengintegrasikan mekanisme pengumpulan dan analisis umpan balik dari pengguna lulusan (perusahaan, organisasi) untuk perbaikan berkelanjutan.
 5. Penguatan Kebijakan dan Regulasi yang Mendukung Inovasi.
 - a. Fleksibilitas Regulasi untuk Inovasi Pendidikan Kebijakan harus memberikan ruang bagi lembaga pendidikan untuk bereksperimen dengan model pembelajaran baru, seperti blended learning, micro-credentialing, dan pembelajaran berbasis proyek. *Manfaat:* Mendorong inovasi dan respons cepat terhadap perubahan kebutuhan.

- b. Pendanaan dan Insentif untuk Transformasi Digital Sediakan dana khusus dan insentif bagi lembaga pendidikan yang mengimplementasikan teknologi dan inovasi dalam penjaminan mutu.
6. Penguatan Sistem Informasi dan Infrastruktur Teknologi.
 - a. Pengembangan Infrastruktur Teknologi yang Merata Pastikan akses teknologi dan internet yang memadai di seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil, untuk mendukung sistem penjaminan mutu digital. *Dampak:* Mengurangi kesenjangan mutu pendidikan.
 - b. Sistem Informasi Terintegrasi Bangun sistem informasi manajemen mutu yang terintegrasi antar lembaga dan pemerintah untuk memudahkan koordinasi dan pengambilan keputusan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Makalah ini menguraikan pentingnya Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) di Indonesia sebagai upaya untuk memastikan standar kualitas pendidikan yang merata dan berkelanjutan. Kebijakan-kebijakan SPMP, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021, dan Permendikbud No. 28 Tahun 2016, menekankan integrasi antara evaluasi internal (SPMI) dan eksternal (SPME) untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan (SNP). Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti disparitas sumber daya, kompleksitas regulasi, dan kurangnya pemahaman tentang budaya mutu di tingkat satuan pendidikan.

Tantangan utama dalam pelaksanaan SPMP meliputi ketidakmerataan pembiayaan, keterbatasan infrastruktur, dan kesenjangan kualitas tenaga pendidik antar daerah. Selain itu, perkembangan teknologi dan tuntutan globalisasi menuntut adaptasi kebijakan yang lebih dinamis. Meskipun demikian, peran pemerintah pusat dan daerah, seperti melalui program Guru Penggerak, Sekolah Penggerak, dan digitalisasi pendidikan, menunjukkan upaya serius dalam meningkatkan mutu pendidikan. Sinergi antara pemangku kepentingan, termasuk sekolah, masyarakat, dan industri, juga dinilai krusial untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang kondusif.

Secara keseluruhan, SPMP merupakan kerangka kerja strategis yang membutuhkan komitmen tinggi dari semua pihak untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Rekomendasi untuk pengembangan kebijakan di masa depan antara lain penyederhanaan regulasi, peningkatan kapasitas tenaga pendidik, dan pemanfaatan teknologi untuk monitoring dan evaluasi. Dengan pendekatan holistik dan berkelanjutan, SPMP diharapkan dapat menjawab tantangan mutu pendidikan di Indonesia serta mempersiapkan lulusan yang kompetitif di tingkat global.

B. Saran

Pertama, pemerintah perlu menyederhanakan regulasi terkait Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) untuk mengurangi tumpang tindih

kebijakan dan memastikan konsistensi implementasi di semua jenjang pendidikan. Selain itu, penting untuk meningkatkan sosialisasi dan pelatihan bagi tenaga pendidik serta kepala sekolah mengenai mekanisme SPMP, termasuk penggunaan teknologi dalam pemantauan dan evaluasi mutu. Dengan demikian, pemahaman dan komitmen terhadap budaya mutu dapat terbangun secara merata di seluruh satuan pendidikan.

Kedua, perlu adanya peningkatan alokasi dan pemerataan anggaran pendidikan, khususnya untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), guna mengurangi kesenjangan kualitas infrastruktur dan sumber daya manusia. Pemerintah daerah juga harus didorong untuk mengembangkan inovasi lokal berbasis kebutuhan spesifik wilayah, seperti program pelatihan guru atau rehabilitasi sarana prasarana. Kolaborasi dengan dunia industri dan masyarakat juga perlu diperkuat untuk memastikan relevansi pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja dan partisipasi aktif dalam pengawasan mutu.

Ketiga, penguatan sistem evaluasi berbasis data, seperti Asesmen Nasional dan platform digital seperti Rapor Pendidikan, harus dioptimalkan untuk memberikan umpan balik yang cepat dan akurat. Pemanfaatan teknologi seperti artificial intelligence (AI) dan big data dapat membantu mengidentifikasi masalah mutu secara real-time dan merancang solusi yang tepat sasaran. Dengan langkah-langkah ini, SPMP tidak hanya akan menjadi alat administratif, tetapi juga pendorong nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan yang adaptif dan berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anoum, P., Arifa, F., & May, C. (2022). Strategi Meningkatkan Motivasi Tahfidz Al-Quran. *Journal International Inspire Education Technology*, 1(2), 74-85. <https://doi.org/10.55849/jiiet.v1i2.88>
- Deming, W. E. (2017). *Out of the crisis (Reissue ed.)*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Dewi S, Y., Rasyid Umar, A., Ali Khan, A., & Aziz, A. (2022). Pengajaran Bahasa Arab Yang Menyenangkan Dengan Media Lagu Untuk Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini. *Journal International of Lingua and Technology*, 1(2), 140-156. <https://doi.org/10.55849/jiltech.v1i2.80>
- Harjanto A., & Santoso B.R., (2019). *Manajemen Penjaminan Mutu Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hikmah, D., Petoukhoff, G., & Papaioannou, J. (2022). Pemanfaatan Aplikasi Animiz Sebagai Media Pembelajaran Bahasa Arab Pada Mahasiswa. *Journal International of Lingua and Technology*, 1(2), 157-171. <https://doi.org/10.55849/jiltech.v1i2.84>
- Kemenag RI. (2023). *Panduan Implementasi Penjaminan Mutu Pendidikan Islam*. Jakarta: Ditjen Pendis.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2016). *Permendikbud No. 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*. Jakarta: Kemendikbud.
- Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbudristek) (2023). *Laporan Implementasi Sistem*

- Penjaminan Mutu Pendidikan Tahun 2022. Jakarta: Kemendikbudristek.*
- Lembaga Akreditasi Mandiri (LAMEMBA & LAMDIK). (2024). Panduan Akreditasi Program Studi Pendidikan Tinggi Keagamaan.*
- Mulyasa E., (2020). Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya.*
- Peraturan BAN-S/M No. 1 Tahun 2023 tentang Instrumen Akreditasi Sekolah.*
- Peraturan Menteri Pendidikan No. 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis SPMP.*
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (revisi PP No. 13/2015).*
- Permenag No. 60 Tahun 2015 tentang Sistem Penjaminan Mutu PTKI.*
- Permendikbud No. 14 Tahun 2021 tentang Akreditasi PAUD-Dikdasmen.*
- Permendikbud No. 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional.*
- Permendikbud No. 28 Tahun 2016 tentang SPMP Dikdasmen.*
- Permendikbud No. 28 Tahun 2016 tentang SPMP Dikdasmen.*
- Permendikbudristek No. 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis SPMP.*
- Permendikbudristek No. 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis SPMP.*
- Permendikbudristek No. 5 Tahun 2024 tentang Standar PT.*
- Permendikbudristek No. 52 Tahun 2023 tentang Akreditasi PT.*
- Quality, M. J. (2018). Total quality management in education (4th ed.). London, UK: Routledge.*
- Sallis, E. (2014). Total Quality Management in Education. London: Kogan Page.*
- Slameto S., (2021). "Peranan Komitmen Stakeholder dalam Keberhasilan Penjaminan Mutu Sekolah." Jurnal Administrasi Pendidikan, Vol 15(2), hlm 78–90.*
- Suharto D., & Wibowo H.T., (2022). "Evaluating Education Quality Assurance Policies in Indonesia." International Journal of Educational Management, Vol 36(4), hlm 512–528.*
- Tjiptono, F., & Diana, A. (2018). Total quality management. Yogyakarta: Andi Offset.*
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).*
- World Bank & Kemenag RI. (2022). Madrasah Education Quality Reform Project.*

**PENINGKATAN MUTU BERKELANJUTAN DAN PENGEMBANGAN BUDAYA
MUTU ORGANISASI**
Rahmawati. 24052170029

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam era globalisasi dan digitalisasi yang semakin pesat, tuntutan terhadap kualitas pendidikan yang unggul menjadi hal yang tidak bisa dihindari. Lembaga pendidikan dituntut tidak hanya mampu menyelenggarakan proses pembelajaran yang efektif, tetapi juga harus memastikan bahwa seluruh aspek operasionalnya berjalan dengan standar mutu yang tinggi dan berkelanjutan. Mutu pendidikan bukanlah konsep yang bersifat statis, melainkan dinamis dan terus berkembang seiring dengan perubahan zaman, kebutuhan masyarakat, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, pendekatan terhadap peningkatan mutu tidak dapat dilakukan secara sporadis atau sesekali, tetapi harus menjadi proses berkelanjutan yang terstruktur dan terintegrasi dalam seluruh elemen organisasi pendidikan.

Mutu pendidikan merupakan cerminan dari kualitas suatu bangsa dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan mampu menghadapi tantangan global. Dalam konteks ini, upaya peningkatan mutu pendidikan tidak boleh bersifat insidental atau sesaat, melainkan harus dilakukan secara sistematis, berkelanjutan, dan terencana. Konsep peningkatan mutu berkelanjutan atau *Continuous Quality Improvement (CQI)* menjadi pendekatan penting yang harus diadopsi oleh lembaga pendidikan untuk menjamin keberlanjutan dan efektivitas proses pendidikan.

Selain itu, mutu tidak hanya bergantung pada sistem dan proses semata, tetapi juga pada budaya organisasi yang mendasarinya. Budaya mutu merupakan nilai, norma, dan kebiasaan yang mendorong setiap individu dalam organisasi untuk senantiasa bekerja secara profesional, berintegritas, dan berorientasi pada hasil terbaik. Kombinasi antara upaya peningkatan mutu berkelanjutan dan pengembangan budaya mutu organisasi menjadi strategi kunci dalam mencapai visi dan misi institusi pendidikan.

Peningkatan mutu berkelanjutan (*continuous quality improvement/CQI*) merupakan paradigma yang menekankan pentingnya evaluasi dan pembaruan sistem secara terus-menerus guna mencapai keunggulan kompetitif dan pelayanan optimal kepada peserta didik. Konsep ini lahir dari dunia industri dan manajemen, namun kini telah diadopsi secara luas dalam dunia pendidikan, terutama dalam konteks manajemen mutu pendidikan (Hasibuan, 2023). Dalam praktiknya, peningkatan mutu berkelanjutan melibatkan semua komponen lembaga pendidikan, mulai dari pimpinan, tenaga pendidik, staf administrasi, hingga peserta didik. Hal ini memperlihatkan bahwa upaya peningkatan mutu tidak bisa bergantung hanya pada satu pihak, melainkan merupakan tanggung jawab kolektif yang perlu dijalankan secara sistematis dan terarah.

Di sisi lain, peningkatan mutu tidak akan berjalan efektif apabila tidak didukung oleh budaya mutu yang kuat dalam organisasi pendidikan. Budaya mutu merujuk pada seperangkat nilai, kepercayaan, dan perilaku yang secara konsisten mendorong

upaya untuk selalu melakukan yang terbaik dan berorientasi pada hasil. Budaya mutu harus menjadi bagian dari identitas lembaga, tertanam dalam cara berpikir dan bertindak seluruh warga sekolah atau kampus. Ketika budaya mutu telah menjadi kebiasaan, maka inovasi, evaluasi diri, dan perbaikan berkelanjutan akan terjadi secara alami dalam setiap aktivitas pendidikan (Prasetyo & Widodo, 2021).

Adanya tekanan dari masyarakat, pemerintah, dan dunia kerja juga menjadi pendorong utama bagi lembaga pendidikan untuk terus mengembangkan sistem peningkatan mutu berkelanjutan dan memperkuat budaya mutu. Lembaga yang gagal dalam memenuhi standar mutu akan tertinggal dan kehilangan kepercayaan dari para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, manajemen peningkatan mutu pendidikan harus didesain sedemikian rupa agar mampu menjawab tantangan internal maupun eksternal, serta menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, adaptif, dan berdaya saing tinggi (Rahmawati et al., 2020).

Dalam makalah ini, akan dibahas secara komprehensif mengenai konsep peningkatan mutu berkelanjutan dan pengembangan budaya mutu organisasi pendidikan. Pembahasan akan mencakup prinsip-prinsip dasar, strategi implementasi, tantangan yang dihadapi, serta peran kepemimpinan dan budaya organisasi dalam menjamin keberhasilan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan makalah ini adalah: Bagaimana konsep peningkatan mutu berkelanjutan dan pengembangan budaya mutu organisasi dalam pendidikan. Pembahasan akan mencakup prinsip-prinsip dasar, strategi implementasi, tantangan yang dihadapi, serta peran kepemimpinan dan budaya organisasi dalam menjamin keberhasilan peningkatan mutu yang berkelanjutan dalam pendidikan

PEMBAHASAN

1. Konsep Peningkatan Mutu Berkelanjutan dan Pengembangan Budaya Mutu Organisasi dalam Pendidikan

Peningkatan mutu berkelanjutan dalam dunia pendidikan merupakan pendekatan yang sangat penting untuk memastikan kualitas institusi dapat berkembang secara terus-menerus dan responsif terhadap dinamika zaman. Konsep ini dikenal dengan istilah *Continuous Quality Improvement (CQI)*, sebuah pendekatan yang pertama kali berkembang dalam dunia industri dan kini banyak diterapkan dalam sektor pendidikan. CQI menekankan bahwa mutu tidak boleh dilihat sebagai target akhir, melainkan proses dinamis yang terus diperbaiki dari waktu ke waktu. Dalam praktiknya, CQI menuntut institusi pendidikan untuk selalu mengevaluasi diri, memanfaatkan data sebagai dasar pengambilan keputusan, serta melakukan inovasi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan pendidikan (Fathih, Haris, & Lestari, 2024).

Konsep peningkatan mutu berkelanjutan dan pengembangan budaya mutu dalam organisasi pendidikan sangat penting untuk memastikan bahwa lembaga pendidikan tidak hanya mencapai standar tertentu, tetapi terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan perkembangan zaman. Kedua

konsep tersebut saling berkaitan dalam meningkatkan mutu pendidikan, dalam hal ini sekolah atau madrasah sebagai lembaga. Berikut definisi masing-masing konsep dan keterkaitan keduanya (Thohir, Muhammad, 2020).

Peningkatan mutu berkelanjutan adalah proses sistematis dan terus-menerus untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan, baik dari segi proses belajar mengajar, manajemen sekolah, maupun hasil lulusan. Prinsip utama dari peningkatan mutu berkelanjutan adalah :

1. Berorientasi pada proses: Fokus pada bagaimana kegiatan dilaksanakan, bukan hanya hasil akhir.
2. Data-driven: Keputusan didasarkan pada data, evaluasi, dan analisis.
3. Partisipatif: Melibatkan semua pemangku kepentingan (guru, siswa, orang tua, tenaga kependidikan, masyarakat).
4. Siklus PDCA (Plan-Do-Check-Act):
 - a. Plan: Merencanakan perbaikan berdasarkan evaluasi.
 - b. Do: Melaksanakan rencana tersebut.
 - c. Check: Mengevaluasi hasil pelaksanaan.
 - d. Act: Melakukan perbaikan lebih lanjut berdasarkan evaluasi.

Adapun contoh aplikasinya: Evaluasi rutin terhadap kurikulum, pelatihan berkala untuk guru dan survey kepuasan siswa dan orang tua.

Sedangkan budaya mutu adalah nilai-nilai, kebiasaan, dan pola pikir yang mendorong seluruh anggota organisasi untuk selalu mengutamakan kualitas dalam setiap aspek pekerjaan mereka.

Ciri-ciri budaya mutu di sekolah:

1. Komitmen terhadap kualitas dari pimpinan hingga staf.
2. Terbuka terhadap perubahan dan inovasi.
3. Kerja sama tim yang kuat.
4. Tanggung jawab individu dan kolektif terhadap hasil kerja.
5. Komunikasi yang efektif dan transparan.

Langkah-langkah membangun budaya mutu:

1. Kepemimpinan yang visioner dan konsisten.
2. Sosialisasi visi dan misi mutu ke seluruh warga sekolah.
3. Pengembangan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan.
4. Penerapan sistem penghargaan dan pengakuan atas pencapaian mutu.
5. Membiasakan refleksi dan evaluasi berkala.

Maka dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa keterkaitan keduanya adalah : peningkatan mutu berkelanjutan adalah mekanisme atau proses sedangkan budaya mutu adalah pondasi nilai dan sikap. Tanpa budaya mutu, peningkatan mutu hanya akan bersifat sesaat atau formalitas. Sebaliknya, budaya mutu membutuhkan dukungan sistem dan proses peningkatan yang berkelanjutan untuk tetap hidup dan berkembang.

2. Implementasi Siklus PDCA dalam Lembaga Pendidikan

Salah satu model yang paling banyak digunakan dalam CQI adalah siklus PDCA (Plan-Do-Check-Act). Siklus ini memberikan kerangka kerja sistematis dalam mengelola perubahan dan perbaikan mutu. Pada tahap perencanaan (Plan), lembaga pendidikan harus menganalisis kebutuhan, menentukan tujuan, serta menyusun

strategi berdasarkan data. Selanjutnya pada tahap pelaksanaan (Do), rencana tersebut diimplementasikan melalui kegiatan nyata, seperti pelatihan, revisi kurikulum, atau pembaruan fasilitas. Setelah itu, pada tahap evaluasi (Check), lembaga mengukur dan menilai hasil dari kegiatan yang dilakukan, biasanya melalui indikator mutu yang telah disepakati. Terakhir, pada tahap tindak lanjut (Act), hasil evaluasi digunakan sebagai bahan untuk melakukan perbaikan atau penyesuaian. Siklus ini kemudian berulang sehingga tercipta proses peningkatan yang berkesinambungan (Mulyasa, 2013).

3. Budaya Mutu sebagai Pilar Keberlanjutan Mutu

Selain pendekatan sistemik, aspek budaya organisasi memegang peranan penting dalam menjamin keberlangsungan mutu. Budaya mutu mencakup nilai, norma, keyakinan, dan perilaku yang mendorong setiap individu dalam organisasi untuk berkomitmen terhadap mutu. Dalam lingkungan pendidikan, budaya ini tercermin dari cara guru mengajar, siswa belajar, serta cara pimpinan sekolah mengelola lembaganya. Budaya mutu tidak bisa dibentuk secara instan, melainkan melalui pembiasaan, keteladanan, serta sistem evaluasi dan penghargaan yang mendukung perilaku positif. Ketika budaya mutu telah tertanam dengan kuat, maka seluruh anggota organisasi akan memiliki kesadaran dan tanggung jawab untuk terus meningkatkan kualitas kerja mereka (Gustiana, Widodo, & Syaifuddin, 2023).

4. Kepemimpinan Transformasional sebagai Penggerak Mutu

Kepemimpinan merupakan faktor kunci dalam mendorong peningkatan mutu berkelanjutan. Pemimpin yang visioner dan transformasional tidak hanya bertugas menjalankan administrasi, tetapi juga membangun visi bersama, menginspirasi anggota organisasi, serta menciptakan iklim kerja yang mendukung inovasi. Seorang kepala sekolah atau rektor, misalnya, perlu menunjukkan komitmen tinggi terhadap mutu, mengelola perubahan secara bijak, dan melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan kepemimpinan yang kuat, lembaga pendidikan akan lebih siap menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang untuk tumbuh dan berkembang (Suajana, 2020).

5. Strategi Implementasi Mutu di Lembaga Pendidikan

Untuk mengimplementasikan peningkatan mutu berkelanjutan secara efektif, terdapat beberapa strategi yang dapat digunakan. Salah satunya adalah pendekatan *Total Quality Management* (TQM), yang mengedepankan partisipasi aktif semua pihak dalam proses mutu dan orientasi pada kepuasan pengguna. Strategi lain adalah *benchmarking*, yaitu belajar dari lembaga lain yang telah berhasil dalam manajemen mutu. Lembaga pendidikan juga perlu melakukan audit mutu secara berkala, baik internal maupun eksternal, untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan selaras dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan profesional harus menjadi agenda rutin. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) juga menjadi pendekatan penting dalam memberdayakan sekolah untuk mengambil keputusan secara otonom namun tetap akuntabel (Ishikawa, 1985; Deming, 1986).

6. Tantangan dan Solusi dalam Penerapan Peningkatan Mutu

Walaupun konsep dan strategi peningkatan mutu telah dirumuskan dengan baik, pelaksanaannya seringkali menghadapi berbagai tantangan. Salah satu hambatan utama adalah resistensi terhadap perubahan. Banyak anggota organisasi yang sudah terbiasa dengan pola kerja lama dan enggan keluar dari zona nyaman. Selain itu,

keterbatasan dana, sarana, dan tenaga profesional juga menjadi penghambat signifikan. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya mutu, terutama di tingkat dasar operasional, juga dapat menghambat efektivitas implementasi. Untuk mengatasi hambatan ini, lembaga pendidikan harus melakukan sosialisasi dan pelatihan secara intensif, membangun budaya dialog terbuka, serta menciptakan sistem penghargaan bagi inovasi dan kinerja yang baik (UNESCO, 2015).

7. Integrasi Mutu sebagai Identitas Organisasi

Pada akhirnya, peningkatan mutu berkelanjutan dan pengembangan budaya mutu bukan hanya strategi manajerial, melainkan bagian dari identitas dan karakter organisasi pendidikan itu sendiri. Lembaga yang berhasil dalam menerapkan prinsip-prinsip ini akan menciptakan lingkungan yang dinamis, inovatif, dan profesional. Setiap aktivitas dalam organisasi diarahkan untuk mencapai mutu tertinggi, dan setiap individu merasa menjadi bagian dari misi bersama. Dengan integrasi tersebut, mutu tidak lagi menjadi tujuan yang dikejar, melainkan menjadi bagian dari cara berpikir dan bertindak seluruh anggota organisasi (Deming, 1986; Fathih, Haris, & Lestari, 20

PENUTUP

1. Kesimpulan

Peningkatan mutu berkelanjutan dan pengembangan budaya mutu merupakan dua komponen esensial yang saling melengkapi dalam menciptakan lembaga pendidikan yang unggul, adaptif, dan berdaya saing. Proses peningkatan mutu tidak dapat dilakukan secara insidental, melainkan harus dijalankan secara sistematis melalui pendekatan seperti siklus PDCA dan Total Quality Management (TQM). Budaya mutu berperan sebagai landasan nilai dan sikap seluruh warga organisasi untuk terus berorientasi pada kualitas dan inovasi. Keberhasilan penerapan peningkatan mutu sangat ditentukan oleh kepemimpinan transformasional yang mampu menjadi teladan, motivator, dan penggerak perubahan. Meskipun tantangan seperti resistensi terhadap perubahan dan keterbatasan sumber daya masih ada, dengan strategi yang tepat, kolaborasi yang kuat, dan komitmen bersama, lembaga pendidikan dapat membangun sistem mutu yang berkelanjutan sebagai bagian dari identitas organisasinya.

2. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan acuan bagi lembaga pendidikan dalam mengembangkan mutu secara berkelanjutan:

1. **Menanamkan budaya mutu sejak dini** kepada seluruh komponen organisasi pendidikan melalui pelatihan, pembiasaan, dan keteladanan dari pimpinan lembaga.
2. **Mengembangkan sistem manajemen mutu yang komprehensif dan terintegrasi**, termasuk penggunaan siklus PDCA dan prinsip TQM sebagai landasan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program.
3. **Memperkuat peran kepemimpinan transformasional** yang tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga menginspirasi dan memberdayakan seluruh elemen dalam organisasi untuk berkontribusi secara aktif terhadap mutu.

4. **Melakukan evaluasi dan audit mutu secara berkala**, baik internal maupun eksternal, guna memastikan bahwa seluruh kegiatan telah berjalan sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan.
5. **Meningkatkan keterlibatan semua pihak**, termasuk peserta didik, orang tua, dan masyarakat luas dalam mendukung upaya peningkatan mutu pendidikan, melalui forum komunikasi dan kerja sama yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Deming, W. E. (1986). Out of the Crisis. Cambridge, MA: MIT Press.*
- Gustiana, D., Widodo, W., & Syaifuddin, M. (2023). Strategi Pengembangan Mutu Berkelanjutan di Lembaga Pendidikan Islam. Jurnal Pendidikan Islam dan Manajemen, 8(2), 101-115.*
- Hasibuan, F. (2023). Strategi Peningkatan Mutu Berkelanjutan dalam Lembaga Pendidikan Menengah. Jurnal Manajemen Pendidikan, 14(2), 67–75.*
- Ishikawa, K. (1985). What is Total Quality Control? The Japanese Way. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.*
- Mulyasa, E. (2013). Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah. Bandung: Remaja Rosdakarya.*
- Prasetyo, R. A., & Widodo, W. (2021). Penguatan Budaya Mutu dalam Peningkatan Kinerja Sekolah. Jurnal Ilmu Pendidikan, 18(1), 12–20.*
- Rahmawati, S., Yusra, Y., & Nuryana, Z. (2020). Manajemen Mutu Pendidikan Berbasis Total Quality Management. Jurnal Kependidikan Islam, 8(2), 135–148.*
- Fathih, A., Haris, R., & Lestari, M. (2024). Etika, Integritas, dan Kepercayaan dalam Budaya Organisasi Pendidikan. Jurnal Kependidikan dan Manajemen Mutu, 12(1), 1-15.*
- Sujana, I. M. (2020). Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, 27(3), 233-246.*
- Thohir, Muhammad. (2020). Budaya Mutu Pendidikan Islam: Membangun Nilai-Nilai Luhur Manajemen dan Kepemimpinan*
- UNESCO. (2015). Education for All Global Monitoring Report. Paris: UNESCO Publishing.*

SISTEM PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN DI INDONESIA

Muhammad Aji Santoso (24052170024)

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan pilar utama dalam membangun peradaban dan menciptakan generasi unggul. Di Indonesia, pendidikan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang menjadi kunci kemajuan bangsa. Dalam menghadapi era globalisasi, revolusi industri 4.0, dan tantangan abad ke-21 yang ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, sistem pendidikan nasional dituntut untuk mampu beradaptasi dan berinovasi guna menghasilkan lulusan yang kompeten, berakhlak mulia, serta siap bersaing secara global.

Salah satu aspek krusial dalam mencapai tujuan pendidikan nasional adalah keberadaan sistem penjaminan mutu pendidikan. Sistem ini merupakan suatu mekanisme sistematis dan berkelanjutan yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses dan komponen pendidikan—mulai dari input, proses, hingga output—berjalan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Melalui sistem ini, mutu pendidikan tidak hanya dinilai dari hasil akademik semata, tetapi juga dari efektivitas proses pembelajaran, kompetensi pendidik, tata kelola lembaga, serta budaya mutu yang tertanam di lingkungan pendidikan.

Urgensi penjaminan mutu pendidikan semakin kuat dengan adanya berbagai tantangan pendidikan di Indonesia, seperti disparitas kualitas antarwilayah, lemahnya hasil asesmen nasional dan internasional seperti PISA, serta kurangnya keterpaduan antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Di samping itu, era digitalisasi menuntut integrasi teknologi dalam proses belajar-mengajar, yang hanya dapat dilakukan secara optimal apabila mutu pendidikan dijaga dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

Pentingnya pendidikan dan ilmu pengetahuan juga mendapat perhatian besar dalam ajaran Islam. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Mujadilah ayat 11:

"...Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat..."

Selain itu, Rasulullah SAW bersabda:

"Barangsiapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga." (HR. Muslim)

Kedua dalil ini menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya kebutuhan duniawi, tetapi juga bernilai ukhrawi. Oleh karena itu, penjaminan mutu pendidikan sejatinya merupakan bagian dari amanah besar dalam membina generasi penerus yang cerdas, beriman, dan berkontribusi positif bagi bangsa dan umat.

Dengan mempertimbangkan berbagai tantangan dan kebutuhan zaman, sistem penjaminan mutu pendidikan di Indonesia perlu dikaji secara komprehensif untuk mengetahui sejauh mana implementasinya dan bagaimana langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkannya di masa kini dan masa yang akan datang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut:

- ❖ Apa pengertian dan konsep dasar sistem penjaminan mutu pendidikan?
- ❖ Bagaimana pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan di Indonesia?
- ❖ Apa saja tantangan dan hambatan dalam implementasi sistem penjaminan mutu pendidikan?
- ❖ Apa strategi dan solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah untuk :

- ❖ Menjelaskan konsep dan dasar pemikiran mengenai sistem penjaminan mutu pendidikan.
- ❖ Menganalisis pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan di Indonesia.
- ❖ Mengidentifikasi berbagai tantangan dan hambatan dalam implementasinya.
- ❖ Memberikan rekomendasi strategis untuk penguatan dan pengembangan mutu pendidikan nasional.

METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis sistem penjaminan mutu pendidikan di Indonesia berdasarkan kebijakan pemerintah, pelaksanaan di lapangan, serta tantangan dan strategi pengembangannya, termasuk relevansinya dengan nilai-nilai Islam.

2.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (library research), di mana data dikumpulkan melalui analisis dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan, laporan pemerintah, jurnal ilmiah, serta sumber-sumber literatur yang relevan mengenai sistem penjaminan mutu pendidikan di Indonesia.

2.3 Sumber Data

- ❖ Data primer: Dokumen resmi seperti:
 - ✓ Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - ✓ Permendikbud No. 28 Tahun 2016 dan Permendikbud No. 63 Tahun 2016.
 - ✓ Dokumen Standar Nasional Pendidikan (SNP).
- ❖ Data sekunder:
 - ✓ Buku-buku ilmiah tentang manajemen mutu pendidikan.
 - ✓ Jurnal penelitian yang relevan.
 - ✓ Artikel ilmiah dan laporan dari lembaga seperti Kemendikbudristek, LPMP/BBPMP, OECD, dll.
 - ✓ Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang relevan dengan tema pendidikan dan mutu.

2.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

- ✓ Studi dokumen: Pengumpulan data dari berbagai dokumen resmi, artikel ilmiah, dan referensi Islam terkait pendidikan.
- ✓ Analisis literatur: Penelaahan mendalam terhadap teori dan hasil-hasil penelitian terdahulu.

2.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi (content analysis), yaitu:

- ✓ Mengidentifikasi tema-tema utama dalam sistem penjaminan mutu

- pendidikan.
- ✓ Mengklasifikasikan aspek-aspek penting dari pelaksanaan dan tantangan penjaminan mutu.
- ✓ Menyajikan hasil analisis dalam bentuk deskriptif, didukung dengan kutipan teori dan dalil agama Islam untuk memperkuat argumentasi.

2.6 Validitas Data

Untuk menjaga validitas data, dilakukan:

- ✓ Triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai sumber referensi.
- ✓ Kajian kritis terhadap dokumen-dokumen resmi dan literatur akademik.
- ✓ Kesesuaian teoritis, yaitu dengan mengaitkan temuan dengan teori-teori manajemen mutu pendidikan yang sudah diakui secara akademik.

PEMBAHASAN

3.1 Pengertian dan Konsep Dasar Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Penjaminan mutu pendidikan adalah serangkaian proses sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan yang dilakukan untuk memastikan bahwa layanan pendidikan memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan. Sistem ini mencakup kegiatan evaluasi, pengawasan, perbaikan, dan pengembangan terhadap seluruh komponen pendidikan, baik di tingkat satuan pendidikan, daerah, maupun nasional.

Menurut Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016, penjaminan mutu pendidikan adalah mekanisme yang dilakukan secara internal oleh satuan pendidikan dan secara eksternal oleh lembaga yang berwenang untuk menjamin terpenuhinya standar nasional pendidikan.

Penjaminan mutu mencakup dua pendekatan utama :

- ❖ Penjaminan Mutu Internal (Internal Quality Assurance/IQA): dilakukan oleh sekolah atau madrasah secara mandiri melalui siklus evaluasi diri, perencanaan mutu, pelaksanaan, monitoring, dan tindak lanjut.
- ❖ Penjaminan Mutu Eksternal (External Quality Assurance/EQA): dilakukan oleh lembaga independen seperti BAN-S/M (Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah), dinas pendidikan, atau lembaga penilai lainnya.

Tujuan dari penjaminan mutu adalah untuk memastikan bahwa proses pendidikan menghasilkan lulusan yang bermutu, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan mampu bersaing di tingkat global. Dengan demikian, sistem ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan pendidikan berkualitas secara menyeluruh.

3.2 Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan di Indonesia

Pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan di Indonesia mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang terdiri dari 8 komponen, yaitu :

1. Standar Isi

Standar ini mengatur ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang harus

dipenuhi peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
Fungsi :

- ✓ Menjamin kesetaraan pendidikan antar daerah dan antar satuan pendidikan.
- ✓ Menjadi dasar dalam penyusunan kurikulum.

Contoh Implementasi :

Dalam Kurikulum Merdeka, konten pelajaran lebih fleksibel dan kontekstual, tetapi tetap mengacu pada standar capaian pembelajaran (CP).

2. Standar Proses

Standar ini mengatur pelaksanaan pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai kompetensi secara aktif, interaktif, inspiratif, menyenangkan, dan menantang.

Fungsi:

- ✓ Menjamin proses belajar yang bermakna dan berorientasi pada pencapaian hasil.
- ✓ Menuntun guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran.

Komponen utama :

Perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian proses dan hasil belajar.

3. Standar Kompetensi Lulusan

Mengatur kriteria kemampuan lulusan pada setiap jenjang pendidikan, baik dari aspek sikap, pengetahuan, maupun keterampilan.

Fungsi :

- ✓ Menjadi acuan dalam penilaian akhir pendidikan.
- ✓ Menjadi target capaian pembelajaran.

Contoh Indikator :

Lulusan SMP diharapkan mampu berpikir kritis, bersikap jujur, serta memiliki dasar penguasaan IPTEK.

4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Menetapkan kualifikasi dan kompetensi minimal guru, kepala sekolah, pustakawan, laboran, dan tenaga administrasi.

Fungsi :

- ✓ Menjamin tenaga pendidikan memiliki kemampuan profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian.
- ✓ Mengatur pelatihan dan pengembangan profesi berkelanjutan.
- ✓ Syarat minimal guru :
- ✓ Pendidikan minimal S1/D4
- ✓ Memiliki sertifikat pendidik

5. Standar Sarana dan Prasarana

Menentukan jenis dan ketersediaan sarana (alat, media) dan prasarana (bangunan, ruang kelas, laboratorium, dll) yang menunjang proses belajar mengajar.

Fungsi :

- ✓ Menjamin kelayakan lingkungan belajar
- ✓ Mendukung kenyamanan dan keamanan siswa

Contoh :

Ruang kelas yang cukup pencahayaan dan ventilasi, laboratorium IPA, toilet terpisah siswa putra dan putri.

6. Standar Pengelolaan

Mengatur manajemen dan tata kelola satuan pendidikan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan kegiatan pendidikan.

Fungsi :

- ✓ Menjamin sekolah/madrasah dikelola secara efisien, efektif, akuntabel, dan transparan.
- ✓ Mendorong penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS).

Komponen utama :

Perencanaan sekolah, pelaksanaan kurikulum, pengelolaan pendidik, keuangan, dan hubungan sekolah dengan masyarakat.

7. Standar Pembiayaan

Mengatur biaya operasional pendidikan yang terdiri dari biaya investasi, operasional rutin, dan pengembangan.

Fungsi :

- ✓ Menjamin ketercukupan dan efisiensi anggaran pendidikan
- ✓ Menjadi dasar dalam alokasi dana BOS dan pendanaan daerah

Contoh :

Biaya pembelian buku, honor guru, perawatan gedung, listrik, air, dan kebutuhan operasional lainnya.

8. Standar Penilaian Pendidikan

Mengatur mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik, baik yang dilakukan oleh guru, satuan pendidikan, maupun pemerintah.

Fungsi :

- ✓ Menjamin penilaian yang adil, objektif, transparan, dan akuntabel
- ✓ Mendorong perbaikan proses dan hasil belajar
- ✓ Jenis penilaian :
- ✓ Penilaian oleh pendidik (formatif dan sumatif)
- ✓ Penilaian oleh satuan pendidikan (Ujian Sekolah)
- ✓ Penilaian oleh pemerintah (Asesmen Nasional, AKM)

Delapan komponen ini saling terhubung dan menjadi dasar dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi mutu pendidikan. Dalam sistem penjaminan mutu, keberhasilan satuan pendidikan akan sangat tergantung pada keterpaduan dan konsistensi pelaksanaan standar-standar tersebut.

Satuan pendidikan wajib mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), sebagaimana diatur dalam Permendikbud No. 63 Tahun 2016, yang menekankan pentingnya siklus Pemetaan Mutu – Penyusunan Rencana Pemenuhan Mutu – Pelaksanaan – Monitoring dan Evaluasi – Tindak Lanjut.

Di tingkat nasional, pemerintah membentuk Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), yang saat ini menjadi bagian dari Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP), yang memiliki fungsi fasilitasi, pembinaan, dan pendampingan satuan pendidikan dalam meningkatkan mutu.

Tabel Ringkasan 8 Komponen Standar Nasional Pendidikan

| No | Komponen SNP | Fungsi | Contoh Implementasi |
|----|--|---|--|
| 1 | Standar Isi | Menjamin kesetaraan materi dan kompetensi antar satuan pendidikan | Kurikulum berisi capaian pembelajaran sesuai jenjang, seperti Kurikulum Merdeka |
| 2 | Standar Proses | Menjamin pembelajaran interaktif, menyenangkan, dan berpusat pada siswa | Guru menyusun RPP dan melaksanakan pembelajaran aktif, diskusi, praktik, dll |
| 3 | Standar Kompetensi Lulusan | Menjadi acuan pencapaian kemampuan siswa pada akhir jenjang pendidikan | Lulusan SD mampu baca-tulis Al-Qur'an, berhitung, serta berperilaku jujur |
| 4 | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Menjamin profesionalitas guru dan tenaga kependidikan | Guru wajib S1 dan bersertifikat pendidik, kepala sekolah mengikuti diklat kepemimpinan |
| 5 | Standar Sarana dan Prasarana | Menjamin kelayakan fisik dan teknologi penunjang pembelajaran | Ruang kelas layak, lab IPA lengkap, toilet bersih, perpustakaan sekolah |
| 6 | Standar Pengelolaan | Mendorong manajemen yang akuntabel dan partisipatif | Sekolah menyusun RKAS, menerapkan MBS, membina hubungan dengan komite sekolah |
| 7 | Standar Pembiayaan | Menjamin kecukupan dan efisiensi penggunaan anggaran pendidikan | Penggunaan dana BOS untuk gaji guru honorer, buku pelajaran, dan perawatan sekolah |
| 8 | Standar Penilaian Pendidikan | Menjamin penilaian objektif dan akuntabel | Guru melakukan penilaian harian, Ujian Sekolah, dan mengikuti Asesmen Nasional |

Berikut adalah uraian kedelapan standar tersebut beserta relevansi nilai-nilai Islam melalui ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi SAW.

1. Standar Isi

Standar ini menetapkan ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

Landasan Islam:

"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik..." (QS. An-Nahl: 125)

Ayat ini menekankan bahwa isi pendidikan harus mengandung nilai-nilai hikmah, bermanfaat, dan mendidik sesuai akhlak mulia.

2. Standar Proses

Standar ini menjamin bahwa proses pembelajaran dilaksanakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik.

Landasan Islam:

Nabi SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang jika melakukan suatu pekerjaan, dia kerjakan dengan itqan (tepat dan sungguh-sungguh)." (HR. Thabrani)

Proses pembelajaran dalam Islam mengajarkan profesionalisme, kesungguhan, dan sistematis dalam mentransfer ilmu.

3. Standar Kompetensi Lulusan

Standar ini menjadi kriteria kemampuan minimal lulusan pada setiap jenjang pendidikan.

Landasan Islam:

"...Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antarmu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat..." (QS. Al-Mujadilah: 11)

Ayat ini menjadi dasar bahwa output lulusan harus berilmu dan beriman, serta siap menghadapi tantangan zaman.

4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Standar ini mencakup kualifikasi akademik dan kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh tenaga pendidik.

Landasan Islam:

Rasulullah SAW bersabda: "Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya." (HR. Bukhari) "...Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?..." (QS. Az-Zumar: 9)

Guru dalam Islam memiliki kedudukan mulia dan dituntut memiliki ilmu serta akhlak mulia.

5. Standar Sarana dan Prasarana

Standar ini mengatur kelayakan fasilitas fisik dan sarana pendukung lainnya.

Landasan Islam:

"Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik..." (QS. Al-Baqarah: 267)

Penyediaan sarana prasarana pendidikan adalah bagian dari infak dan investasi jangka panjang bagi keberlanjutan pendidikan.

6. Standar Pengelolaan

Standar ini mengatur perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang efektif dan efisien dalam pendidikan.

Landasan Islam:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya..." (QS. An-Nisa: 58)

Manajemen pendidikan harus amanah, adil, dan bertanggung jawab terhadap seluruh aspek pengelolaan lembaga.

7. Standar Pembiayaan

Standar ini mengatur komponen dan satuan biaya pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan.

Landasan Islam:

"Berangkatlah kamu baik dalam keadaan ringan maupun berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah..." (QS. At-Taubah: 41)

Pembiayaan pendidikan adalah bentuk jihad fisik dan finansial untuk mendukung kemajuan umat melalui pendidikan.

8. Standar Penilaian Pendidikan

Standar ini mengatur prinsip, teknik, dan prosedur penilaian hasil belajar peserta didik.

Landasan Islam:

Nabi SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa kalian, juga tidak melihat harta kalian, tetapi Allah melihat hati dan amal kalian." (HR. Muslim)

Penilaian dalam pendidikan harus adil, objektif, dan menyeluruh, mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.

9. Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi

Meskipun sistem penjaminan mutu telah dirancang dengan cukup lengkap, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa diantaranya adalah :

1. Ketimpangan Mutu Antar Wilayah

Ketimpangan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih menjadi masalah utama. Menurut data Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) Kemendikbudristek, sekolah-sekolah di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) masih kekurangan sarana prasarana dan tenaga pengajar yang memadai. Hal ini menyebabkan disparitas hasil belajar dan capaian SNP yang signifikan.

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Banyak satuan pendidikan, terutama di daerah, menghadapi keterbatasan dalam jumlah dan kualitas SDM. Guru dan kepala sekolah belum semua memiliki pemahaman dan keterampilan untuk menerapkan SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal). Padahal, keberhasilan sistem mutu sangat ditentukan oleh kompetensi SDM-nya.

3. Kurangnya Budaya Mutu

Dalam banyak kasus, penjaminan mutu hanya dianggap sebagai kewajiban administratif, bukan sebagai kebutuhan substansial. Hal ini menghambat perbaikan berkelanjutan karena tidak adanya budaya mutu yang hidup di

lingkungan sekolah atau madrasah. Budaya mutu menuntut komitmen, kesadaran, dan keterlibatan seluruh warga sekolah.

4. Dukungan Teknologi yang Belum Merata

Implementasi sistem penjaminan mutu yang terintegrasi dengan teknologi informasi masih terhambat oleh keterbatasan infrastruktur digital. Banyak satuan pendidikan yang belum memiliki akses internet stabil atau perangkat yang memadai untuk mengoperasikan aplikasi PMP, E-Rapor, atau sistem e-monitoring lainnya.

5. Koordinasi Lintas Lembaga yang Lemah

Sinkronisasi antara kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga pelaksana pendidikan sering kali tidak berjalan harmonis. Perbedaan prioritas, interpretasi kebijakan, dan kapasitas antar lembaga menyebabkan pelaksanaan penjaminan mutu menjadi parsial dan tidak optimal.

5 Strategi Penguatan dan Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Untuk menjawab tantangan di atas, beberapa strategi berikut dapat diterapkan :

1. Peningkatan Kapasitas SDM Sekolah

Memberikan pelatihan intensif dan berkelanjutan kepada kepala sekolah, guru, dan tim penjamin mutu internal tentang pentingnya budaya mutu dan teknik implementasi SPMI. Pelatihan ini harus mencakup manajemen mutu berbasis data, pelaporan mutu, hingga teknik monitoring dan evaluasi yang efisien.

2. Penguatan Supervisi dan Monitoring

LPMP/BBPMP perlu lebih aktif dalam mendampingi sekolah dengan pendekatan partisipatif dan berbasis data. Supervisi yang adaptif dan kolaboratif dapat menumbuhkan kepercayaan dan kemitraan antara satuan pendidikan dan instansi pembina.

3. Digitalisasi Sistem Penjaminan Mutu

Pemanfaatan platform digital seperti RAPOR PENDIDIKAN atau Sistem Informasi Penjaminan Mutu Pendidikan (SIPMP) perlu diperluas dan disosialisasikan secara menyeluruh. Digitalisasi membantu mempercepat proses evaluasi dan pelaporan serta membuka akses data real-time bagi pemangku kepentingan.

4. Penguatan Peran Komite Sekolah dan Masyarakat

Pelibatan masyarakat, orang tua, dan komite sekolah dalam proses evaluasi dan perencanaan mutu pendidikan akan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan mutu. Program "Sekolah Ramah Lingkungan dan Budaya Mutu" bisa menjadi pendekatan efektif.

5. Penghargaan terhadap Sekolah Unggul dalam SPMI

Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu memberikan insentif dan pengakuan bagi sekolah yang konsisten menerapkan siklus mutu secara mandiri dan menunjukkan peningkatan signifikan dalam aspek mutu layanan dan hasil belajar.

6. Integrasi Perspektif Islam dalam Budaya Mutu

Penanaman nilai-nilai keislaman dalam proses pendidikan seperti kejujuran, amanah, ihsan, dan ta'awun dapat memperkuat internalisasi budaya mutu. Al-Qur'an menyatakan dalam QS. Al-Mujadilah: 11 bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu, sedangkan

hadis Nabi menyebutkan, “Sesungguhnya Allah mencintai jika salah seorang di antara kalian melakukan suatu pekerjaan dengan itqan (kesungguhan dan kualitas)” (HR. Thabrani).

Dengan strategi-strategi tersebut, diharapkan sistem penjaminan mutu pendidikan di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan menghasilkan pendidikan yang bermutu, merata, dan berkelanjutan.

6 Relevansi Penjaminan Mutu Pendidikan dalam Perspektif Islam

Sistem penjaminan mutu pendidikan tidak hanya penting dalam konteks kebijakan nasional, tetapi juga memiliki dasar teologis dalam Islam. Beberapa ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi SAW berikut mendukung pentingnya mutu, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam menjalankan pendidikan yang berkualitas :

1. QS. Al-Mujadalah: 11

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.”

Ayat ini menegaskan bahwa keilmuan (termasuk kualitas pendidikan) menjadi alasan Allah meninggikan derajat seseorang. Maka, menjaga mutu pendidikan adalah bagian dari upaya mendapatkan kemuliaan di sisi Allah.

2. QS. At-Taubah: 122

“Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam ilmu agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.”

Ayat ini mengandung prinsip distribusi mutu pendidikan agar tidak terpusat, tetapi menyebar merata ke seluruh masyarakat, yang sangat relevan dengan tantangan ketimpangan mutu antarwilayah.

3. QS. Al-Baqarah: 286

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

Ini menjadi prinsip dasar dalam strategi peningkatan mutu pendidikan bahwa penguatan kapasitas SDM harus memperhatikan beban kerja, kompetensi, dan fasilitas yang mendukung, agar pelaksanaannya realistis.

4. Hadits HR. Muslim:

“Barangsiapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga.”

Menjaga mutu pendidikan adalah bagian dari ikhtiar menempuh jalan ilmu yang membawa keberkahan dunia dan akhirat.

5. Hadits HR. Thabrani:

“Sesungguhnya Allah mencintai jika salah seorang di antara kalian melakukan suatu pekerjaan dengan itqan (profesionalisme/kesungguhan).”

Inilah dasar dari penguatan budaya mutu. Pendidikan harus dilakukan dengan itqan, bukan asal-asalan atau sekadar menggugurkan kewajiban administratif.

6. QS. An-Nahl: 90

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan...”

Mutu pendidikan yang baik akan melahirkan keadilan sosial dan keberkahan, serta mencegah diskriminasi atau ketimpangan akses terhadap pendidikan yang layak.

Dengan demikian, penguatan sistem penjaminan mutu pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab profesional dan administratif, tetapi juga amanah keislaman untuk menjaga keadilan, profesionalitas, dan keberkahan dalam pendidikan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sistem penjaminan mutu pendidikan merupakan fondasi utama dalam menciptakan layanan pendidikan yang bermutu, merata, dan berdaya saing. Di Indonesia, sistem ini diwujudkan melalui penerapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang terdiri dari delapan komponen utama: Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian Pendidikan.

Penjaminan mutu tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk satuan pendidikan, tenaga pendidik, peserta didik, orang tua, dan masyarakat. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa proses dan hasil pendidikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, serta relevan dengan perkembangan zaman dan tuntutan global.

Penerapan sistem ini juga memiliki landasan kuat dalam ajaran Islam, yang menekankan pentingnya ilmu dan pendidikan sebagai jalan menuju kemuliaan serta keberhasilan dunia-akhirat, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah :
Diharapkan terus menguatkan implementasi sistem penjaminan mutu

pendidikan secara menyeluruh, terutama dalam pengawasan dan evaluasi berkelanjutan terhadap satuan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

2. Bagi Satuan Pendidikan :

Perlu meningkatkan kapasitas manajerial dalam menerapkan manajemen berbasis mutu, termasuk penguatan SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal), pelatihan guru, pengembangan kurikulum operasional, dan optimalisasi peran komite sekolah.

3. Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan :

Senantiasa meningkatkan kompetensi dan profesionalisme melalui pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan diri yang berkelanjutan agar mampu menjawab tantangan zaman.

4. Bagi Masyarakat dan Orang Tua :

Diharapkan aktif mendukung dan berpartisipasi dalam proses pendidikan anak-anak melalui komunikasi yang baik dengan pihak sekolah serta menciptakan lingkungan rumah yang mendukung pembelajaran.

5. Bagi Peneliti dan Akademisi :

Perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai efektivitas implementasi sistem penjaminan mutu pendidikan di berbagai jenjang dan konteks sosial, agar diperoleh model penjaminan mutu yang lebih adaptif, kontekstual, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan Nasional. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Depdiknas.*
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2016). Permendikbud Nomor 63 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Jakarta: Kemendikbud.*
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2016). Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta: Kemendikbud.*
- Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. (2017). Panduan Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Jakarta: Ditjen Dikdasmen.*
- Wahyudin, D. (2017). Manajemen Mutu Pendidikan. Bandung: Alfabeta.*
- Mulyasa, E. (2013). Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi. Jakarta: Bumi Aksara.*
- Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan. (2022). Rapor Pendidikan Indonesia: Evaluasi dan Transformasi Mutu. Jakarta: Kemendikbudristek.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.*
- Mulyasa, E. (2013). Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah. Jakarta: Bumi Aksara.*
- Kemendikbudristek. (2023). Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.*
- Kementerian PPN/Bappenas. (2023). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.*
- OECD. (2022). Education Policy Outlook Indonesia.*

Departemen Agama RI. (2009). Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
Ibn Hajar Al-Asqalani. (2009). Fathul Bari. Beirut: Darul Ma'rifah.
Muslim, Imam. Shahih Muslim. Beirut: Dar Ihya At-Turats Al-Arabi.
Bukhari, Imam. Shahih Bukhari. Beirut: Dar Ibn Katsir.
Thabrani, Al-Mu'jam Al-Awsath

PRINSIP PERBAIKAN 5S DAN PERBAIKAN BERKESINAMBUNGAN DALAM KAIZEN

Yevi Yasmini, 24052170047

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era globalisasi dan persaingan bisnis yang semakin ketat, organisasi dituntut untuk terus meningkatkan kualitas, efisiensi, dan produktivitas. Pendekatan tradisional yang berfokus pada inovasi besar sesekali telah terbukti tidak cukup untuk mempertahankan keunggulan kompetitif dalam jangka panjang. Sebagai alternatif, konsep perbaikan berkelanjutan yang berasal dari Jepang telah mendapatkan pengakuan global karena kemampuannya menciptakan nilai tambah melalui perubahan kecil namun konsisten.

Konsep Kaizen sebagai sebuah pendekatan manajemen modern menawarkan solusi yang inovatif dan aplikatif untuk menjawab tantangan tersebut. Istilah Kaizen, yang berasal dari bahasa Jepang, memiliki arti “perbaikan berkelanjutan.” Prinsip dasar Kaizen mencakup kolaborasi seluruh komponen dalam organisasi, penekanan pada efisiensi dan produktivitas, serta komitmen untuk melakukan inovasi secara terus-menerus. Dalam konteks pendidikan, Kaizen dapat diterapkan melalui peningkatan proses pembelajaran, evaluasi kinerja secara sistematis, pengelolaan sumber daya secara optimal, dan penumbuhan budaya mutu yang melekat dalam seluruh aktivitas lembaga pendidikan.

Peningkatan mutu pendidikan Islam merupakan suatu kebutuhan dalam menghadapi tantangan globalisasi dan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan dalam manajemen pendidikan Islam adalah konsep Kaizen yang berasal dari Jepang. Kaizen menekankan pada perbaikan berkelanjutan dan penerapan prinsip 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke). Dengan menerapkan konsep ini, lembaga pendidikan Islam dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas layanan pendidikan.

Persip (Peringatan Sipil), 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke), dan Kaizen merupakan tiga metodologi yang saling terkait dalam upaya perbaikan berkelanjutan. Ketiga konsep ini, meskipun dapat diterapkan secara terpisah, memberikan hasil optimal ketika diimplementasikan secara terintegrasi sebagai bagian dari budaya organisasi yang komprehensif.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan Kaizen dalam manajemen peningkatan mutu pendidikan Islam?
2. Bagaimana konsep 5S dapat diterapkan dalam lembaga pendidikan Islam?
3. Apa manfaat perbaikan berkelanjutan dalam peningkatan mutu pendidikan Islam?

C. Tujuan Penulisan

1. Menjelaskan konsep Kaizen dalam konteks pendidikan Islam.
2. Menguraikan penerapan prinsip 5S dalam lembaga pendidikan Islam.
3. Menganalisis manfaat perbaikan berkesinambungan bagi mutu pendidikan Islam.

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Kaizen

Kaizen adalah filosofi manajemen yang berasal dari Jepang dan berfokus pada perbaikan terus-menerus dalam berbagai aspek organisasi, termasuk pendidikan. Dalam pendidikan Islam, penerapan Kaizen dapat meningkatkan mutu proses pembelajaran, manajemen sekolah, dan budaya kerja yang lebih baik. Manajemen Mutu Kaizen adalah suatu pendekatan yang berfokus pada peningkatan kualitas dan efisiensi secara terus-menerus. Kaizen dalam kata Jepang yang berarti "perubahan untuk yang lebih baik". Kaizen adalah perbaikan berkelanjutan, menitik beratkan pada proses yang dilakukan secara bertahap namun konsisten untuk mencapai hasil yang optimal. Prinsip ini relevan dalam konteks manajemen mutu pendidikan karena mendorong pendekatan proaktif dalam menciptakan perubahan kecil yang berdampak besar. Fokus utama Kaizen adalah menghilangkan pemborosan (muda), meningkatkan efisiensi, dan menjaga kesinambungan perbaikan. Dalam pendidikan, prinsip ini tidak hanya terbatas pada pengelolaan teknis, tetapi juga pada pembentukan budaya mutu yang mencakup semua elemen organisasi, mulai dari tenaga pendidik, siswa, hingga manajemen sekolah. (Syarif Hidayat; Mavianti, 2024)

B. Konsep 5S dalam Pendidikan Islam

Dalam memperbaiki Mutu Pendidikan juga diperlukan lingkungan kerja yang menjadi tempat berjalannya pendidikan. Karena dengan lingkungan kerja yang nyaman maka pendidikan dapat berjalan dengan maksimal. Dalam konsep 5 S terdapat prinsip untuk mencapai keberhasilan kerja maka dimulai dari membuat lingkungan kerja yang bersih dan nyaman Prinsip 5S merupakan metode yang membantu meningkatkan efisiensi kerja melalui lingkungan yang lebih terorganisir. (Roofi'i et al., 2022)

Berikut adalah penjelasan prinsip 5S dalam konteks pendidikan Islam:

- **Seiri (Pemilahan):**
Menyortir dan membuang barang yang tidak diperlukan di lingkungan sekolah. dalam konsep Seiri semua barang yang sudah tidak diperlukan ditempat kerja harus diinventarisir dan disingkirkan secepatnya. Karena apabila barang yang sudah tidak terpakai tersebut masih ada ditempat kerja kita, maka akan mengganggu pekerjaan kita dan dapat menimbulkan kerugian. Hal tersebut dikarenakan untuk menginventaris barang yang sudah tidak digunakan memerlukan biaya penyimpanan, barang-barang yang sudah tidak diperlukan juga memerlukan tempat yang banyak serta membutuhkan waktu dan tenaga ekstra untuk perawatan.
- **Seiton (Penataan):**
Menata dan menyusun peralatan serta dokumen secara sistematis agar mudah diakses. Menyusun barang secara rapi sesuai dengan letak dan fungsinya juga dapat menimbulkan efek relaksasi yang menenangkan bagi jiwa kita. Kegiatan menyusun tidak hanya merupakan sebuah kegiatan untuk merapikan letak suatu barang, namun merupakan sebuah kebiasaan yang sulit dilakukan. Menyusun dan menata apabila hanya sekali dilakukan mungkin terlihat mudah, tapi poin pentingnya adalah menjadikan kegiatan tersebut menjadi sebuah kebiasaan

- **Seiso (Pembersihan):**
Menjaga kebersihan lingkungan sekolah untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi pembelajaran. Tujuan sebenarnya dari seiso adalah menciptakan kondisi lingkungan sekolah, alat dan perangkat pembelajaran yang sempurna karena telah melalui pencarian kerusakan dan perbaikan. Karena kerusakan-kerusakan kecil haruslah diperhatikan secara mendetail supaya kedepannya tidak mengganggu pekerjaan kita. Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa Seiso bukan hanya membersihkan barang, tetapi dalam hal ini adalah membersihkan sampai mendetail sehingga kerusakan-kerusakan kecil dapat segera diidentifikasi dan segera diperbaiki.
- **Seiketsu (Standarisasi):**
Menetapkan standar kebersihan dan keteraturan dalam operasional sekolah. Artinya memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan sekolah, perangkat pembelajaran dan mobiler secara menyeluruh agar dapat berfungsi secara maksimal. Seiketsu juga berarti mempertahankan kondisi yang telah dihasilkan pada tahapan sebelumnya. Semua tahapan yang dilakukan sebelumnya tidak ada artinya apabila hanya dilakukan beberapa kali terus berhenti. namun pengertian sesungguhnya adalah mencegah kerusakan dan kondisi kotor dilingkungan sekolah itu terjadi
- **Shitsuke (Pembiasaan):**
Membudayakan kebiasaan kerja yang baik dan disiplin dalam keseharian. Artinya membangun budaya disiplin di kalangan individu untuk mengikuti kebiasaan baik yang telah ditetapkan, memastikan bahwa semua aspek dari 5S dijalankan secara berkelanjutan. Dengan memberikan penyuluhan kepada orang-orang untuk tetap disiplin mengikuti peraturan penanganan lingkungan kerja yang bersih dan teratur atas kemauan mereka sendiri. Apabila sebuah kebiasaan tersebut sudah tertanam pada masing-masing individu maka akan tercipta budaya kerja yang ideal dan akan menumbuhkan citra lembaga yang profesional dan memiliki kualitas yang tinggi. Kebiasaan-kebiasaan tersebut dapat diawali dari diri masing-masing dengan senantiasa berangkat dengan pakaian yang rapi, membiasakan diri mengucapkan salam dipagi dan sore hari serta selalu menjaga kebersihan di meja kerja kita sendiri. Dengan diawali dari kesadaran tersebut akan timbul rasa simpati kepada orang lain agar mengikuti cara kita

C. Perbaikan Berkesinambungan dalam Pendidikan Islam

Perbaikan berkesinambungan dalam pendidikan Islam mencakup evaluasi rutin, peningkatan metode pembelajaran, serta penerapan inovasi dalam manajemen sekolah. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih adaptif dan berkualitas. Perbaikan berkesinambungan dalam pendidikan Islam adalah manajemen mutu pendidikan Islam merupakan proses yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas lembaga pendidikan. (*MUTU PENDIDIKAN_View of Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan*, n.d.). Hal ini dilakukan dengan langkah-langkah yang sistematis berikut ini:

1. **Perencanaan:** Merancang tujuan dan strategi peningkatan mutu pendidikan.
2. **Pelaksanaan Rencana:** Mengimplementasikan strategi yang telah direncanakan.
3. **Pemeriksaan Hasil:** Mengevaluasi hasil pelaksanaan rencana untuk mengetahui efektivitasnya.
4. **Perbaikan:** Melakukan penyesuaian dan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan

Proses ini tidak hanya menjadi tanggung jawab individu tetapi merupakan tanggung jawab kolektif seluruh anggota lembaga pendidikan dalam memenuhi kebutuhan peserta didik dan masyarakat secara berkelanjutan

PEMBAHASAN

A. Implementasi 5S dalam Lembaga Pendidikan Islam

Implementasi 5S di sekolah Islam dapat dilakukan melalui pelatihan tenaga pendidik, keterlibatan siswa dalam menjaga kebersihan, serta penerapan standar administrasi yang rapi dan efisien. Implementasi 5 S dalam Manajemen Mutu Pendidikan Islam

1. Meningkatkan Efisiensi: Menggunakan prinsip 5S untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan waktu.
2. Meningkatkan Kualitas: Menggunakan prinsip 5S untuk meningkatkan kualitas dalam proses belajar mengajar dan pengelolaan lembaga pendidikan.
3. Meningkatkan Produktivitas: Menggunakan prinsip 5S untuk meningkatkan produktivitas dalam pengelolaan lembaga pendidikan dan proses belajar mengajar.
4. Meningkatkan Kepuasan: Menggunakan prinsip 5S untuk meningkatkan kepuasan dalam proses belajar mengajar dan pengelolaan lembaga pendidikan.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip perbaikan 5S, lembaga pendidikan Islam dapat meningkatkan efisiensi, kualitas, produktivitas, dan kepuasan dalam proses belajar mengajar dan pengelolaan lembaga pendidikan.

B. Strategi Perbaikan Berkesinambungan dalam Mutu Pendidikan Islam

Strategi perbaikan berkesinambungan dalam mutu pendidikan Islam melibatkan beberapa aspek kunci yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh. (Zalukhu, 2024)

Beberapa strategi yang diusulkan antara lain:

1. **Penyusunan Prinsip Pendidikan:** Menetapkan visi, misi, dan tujuan pendidikan yang jelas, didukung oleh manajemen yang solid, sangat penting untuk mendirikan fondasi yang kuat bagi lembaga pendidikan.
2. **Pengembangan Kurikulum:** Kurikulum yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan zaman serta metode pembelajaran yang efektif harus dikembangkan untuk memenuhi standar pendidikan yang tinggi.
3. **Evaluasi Diri:** Penerapan strategi evaluasi diri (self-assessment) untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan yang ada dalam lembaga pendidikan, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.
4. **Perencanaan dan Pelaporan yang Sistematis:** Proses perencanaan yang baik serta pelaporan yang transparan mengenai hasil dan proses pendidikan sangat diperlukan untuk memantau perkembangan mutu secara berkala.
5. **Keterlibatan Stakeholder:** Melibatkan semua pemangku kepentingan, baik internal (guru, siswa) maupun eksternal (orang tua, masyarakat), dalam proses pengembangan mutu untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif.
6. **Manajemen Terpadu:** Mengimplementasikan manajemen mutu terpadu yang mencakup seluruh aspek operasional lembaga pendidikan, dari perencanaan hingga pengawasan, untuk memastikan konsistensi dan efektivitas.
7. **Inovasi dan Kreativitas:** Lembaga pendidikan harus mampu beradaptasi dan berinovasi sesuai dengan dinamika perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar agar tetap kompetitif.

Melalui strategi-strategi ini, lembaga pendidikan Islam diharapkan dapat mencapai dan mempertahankan mutu pendidikan yang tinggi secara berkelanjutan dalam menghadapi tantangan zaman globalisasi di era modern ini.

Strategi perbaikan ini melibatkan:

- Peningkatan profesionalisme guru melalui pelatihan dan workshop.
- Evaluasi berkala terhadap kurikulum dan metode pembelajaran.
- Penggunaan teknologi dalam manajemen sekolah untuk meningkatkan efisiensi.

C. Kolaborasi Tim dalam Keberhasilan Penerapan Kaizen

Kolaborasi tim merupakan faktor kunci dalam keberhasilan penerapan Kaizen. Sebagai filosofi perbaikan berkelanjutan yang berasal dari Jepang, Kaizen sangat bergantung pada kerjasama seluruh anggota organisasi. Berikut beberapa aspek penting dari kolaborasi tim dalam penerapan Kaizen:

1. **Keterlibatan Semua Tingkatan** - Kaizen berhasil ketika semua orang berpartisipasi, dari manajemen puncak hingga karyawan lini depan. Setiap anggota tim membawa perspektif unik tentang proses kerja.
2. **Komunikasi Terbuka** - Tim harus merasa nyaman berbagi gagasan dan mengidentifikasi masalah tanpa takut disalahkan. Forum diskusi reguler dan sistem saran sangat penting.
3. **Penghargaan Kolektif** - Menghargai kontribusi tim, bukan hanya individu, mendorong kolaborasi dan menghindari persaingan internal yang tidak sehat.
4. **Pembagian Peran yang Jelas** - Meskipun semua orang berpartisipasi, peran dan tanggung jawab yang jelas dalam inisiatif Kaizen memastikan implementasi yang efektif.
5. **Pengambilan Keputusan Bersama** - Melibatkan tim dalam pengambilan keputusan meningkatkan rasa memiliki terhadap solusi yang diimplementasikan.
6. **Berbagi Pengetahuan** - Tim yang sukses secara aktif berbagi praktik terbaik dan pembelajaran, sehingga seluruh organisasi mendapat manfaat dari perbaikan lokal.
7. **Gemba Walk Bersama** - Mengunjungi tempat kerja aktual secara bersama-sama membantu tim mengidentifikasi masalah dan peluang perbaikan dari perspektif yang sama.

Kaizen bukan hanya tentang alat dan teknik, tetapi juga tentang budaya. Organisasi yang berhasil menerapkan Kaizen menciptakan lingkungan di mana kolaborasi tim menjadi bagian alami dari cara kerja sehari-hari, dan di mana perbaikan berkelanjutan menjadi tanggung jawab bersama.

D. Manfaat Penerapan Kaizen dalam Pendidikan Islam

Penerapan Kaizen dalam pendidikan Islam memberikan berbagai manfaat yang signifikan, antara lain:

1. **Peningkatan Kualitas Pembelajaran:** Dengan menggunakan pendekatan Kaizen, lembaga pendidikan dapat terus-menerus memperbaiki proses pembelajaran, metodologi pengajaran, dan evaluasi hasil belajar. Ini menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan siswa,.
2. **Penguatan Kompetensi Tenaga Pendidik:** Kaizen mendorong pengembangan profesional guru melalui pelatihan berkelanjutan, sehingga mereka dapat meningkatkan kemampuan pedagogis dan adaptasi terhadap teknologi pendidikan.
3. **Pengelolaan Institusi yang Efisien:** Implementasi prinsip 5S dalam pengelolaan lembaga pendidikan membantu menciptakan lingkungan yang teratur dan bersih, yang mendukung proses pembelajaran yang optimal,.
4. **Budaya Perbaikan Berkelanjutan:** Penerapan Kaizen membangun budaya kerja yang proaktif dan kolaboratif, di mana semua anggota organisasi terlibat dalam pencarian solusi dan inovasi untuk perbaikan yang lebih baik,.
5. **Integrasi Nilai-Nilai Islam:** Kaizen memungkinkan integrasi nilai-nilai Islami, seperti ihsan dan istiqamah, dalam proses manajemen pendidikan. Ini tidak hanya

meningkatkan aspek teknis manajemen, tetapi juga mendukung pengembangan karakter dan nilai-nilai keislaman dalam pembelajaran,.

6. **Responsif terhadap Perubahan:** Dengan pendekatan sistematis untuk perbaikan, lembaga pendidikan dapat lebih cepat beradaptasi dengan tantangan dan perubahan yang ada di lingkungan pendidikan.

Secara keseluruhan, penerapan Kaizen dalam pendidikan Islam tidak hanya meningkatkan mutu pendidikan secara teknis, tetapi juga memperkuat nilai-nilai spiritual dan moral yang sangat penting dalam konteks pendidikan Islam.

E. Tantangan dalam Penerapan Kaizen dan Cara Mengatasinya

Penerapan Kaizen, meskipun sangat bermanfaat, sering menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat keberhasilannya. Berikut adalah tantangan utama beserta strategi untuk mengatasinya:

Tantangan 1: Resistensi terhadap Perubahan

Banyak karyawan merasa nyaman dengan rutinitas yang sudah ada dan menolak perubahan.

Cara Mengatasi:

- Komunikasikan manfaat Kaizen secara jelas dengan contoh konkret
- Libatkan karyawan dalam proses perubahan sejak awal
- Mulai dengan perubahan kecil yang memberi hasil cepat untuk membangun kepercayaan
- Berikan pelatihan komprehensif untuk mengurangi kecemasan

Tantangan 2: Kurangnya Dukungan Manajemen

Tanpa dukungan penuh dari tingkat manajemen, inisiatif Kaizen sulit bertahan.

Cara Mengatasi:

- Tunjukkan bukti ROI (Return on Investment) dari implementasi Kaizen
- Libatkan eksekutif dalam "Gemba Walk" untuk melihat langsung masalah di lapangan
- Kaitkan hasil Kaizen dengan tujuan strategis perusahaan
- Tetapkan metrik yang jelas untuk mengukur kemajuan

Tantangan 3: Keberlanjutan Jangka Panjang

Banyak organisasi mengalami antusiasme awal yang kemudian menurun seiring waktu.

Cara Mengatasi:

- Integrasikan Kaizen ke dalam sistem manajemen harian
- Ciptakan sistem penghargaan dan pengakuan untuk mempertahankan motivasi
- Tetapkan ritme pertemuan dan peninjauan yang konsisten
- Dokumentasikan dan rayakan kesuksesan secara teratur

Tantangan 4: Silo Organisasi

Departemen yang terpisah sulit berkolaborasi dalam implementasi Kaizen.

Cara Mengatasi:

- Bentuk tim lintas-fungsi untuk proyek perbaikan
- Tetapkan tujuan bersama yang mendorong kolaborasi
- Ciptakan platform berbagi pengetahuan antar departemen
- Rotasi personel untuk meningkatkan pemahaman tentang berbagai fungsi

Tantangan 5: Kekurangan Sumber Daya

Keterbatasan waktu, anggaran, atau personel sering menghambat inisiatif Kaizen.

Cara Mengatasi:

- Fokus pada perbaikan berbiaya rendah terlebih dahulu
- Tunjukkan ROI dari proyek awal untuk mendapatkan sumber daya tambahan

- Integrasikan aktivitas Kaizen ke dalam pekerjaan sehari-hari, bukan sebagai tugas tambahan
- Gunakan pendekatan bertahap daripada perubahan besar sekaligus

Tantangan 6: Kurangnya Keterampilan dan Pengetahuan

Karyawan mungkin tidak memiliki alat atau keahlian untuk menerapkan Kaizen secara efektif.

Cara Mengatasi:

- Investasikan dalam program pelatihan sistematis
- Kembangkan spesialis internal yang dapat membimbing tim lain
- Buat alat dan template sederhana untuk digunakan oleh semua karyawan
- Pertimbangkan bantuan konsultan eksternal untuk memulai

Tantangan 7: Kegagalan untuk Melihat Hasil

Kurangnya hasil yang terlihat dapat mengurangi motivasi untuk melanjutkan.

Cara Mengatasi:

- Tetapkan metrik yang jelas dan terukur untuk setiap inisiatif
- Visualisasikan kemajuan menggunakan papan Kaizen atau dashboard
- Fokus pada perbaikan kecil yang dapat memberikan hasil cepat
- Komunikasikan keberhasilan secara luas di seluruh organisasi

Penerapan Kaizen adalah perjalanan, bukan tujuan. Dengan kesabaran, komitmen, dan pendekatan sistematis terhadap tantangan ini, organisasi dapat menciptakan budaya perbaikan berkelanjutan yang bertahan lama.

F. Tantangan Implementasi 5S dan Solusinya

Tantangan Utama dalam Implementasi 5S

1. Resistensi terhadap Perubahan

- Karyawan terbiasa dengan cara kerja lama dan merasa nyaman dengan keadaan yang ada
- Keengganan untuk mengubah kebiasaan yang sudah berlangsung lama
- Persepsi bahwa 5S hanya menambah beban kerja

2. Kurangnya Pemahaman Menyeluruh

- Kesalahpahaman bahwa 5S hanya tentang kebersihan dan kerapian
- Kegagalan memahami dampak jangka panjang dan manfaat strategis 5S
- Kurang mengerti bahwa 5S adalah fondasi untuk perbaikan berkelanjutan

3. Keberlanjutan Program

- Semangat awal yang tinggi namun menurun seiring waktu
- Sulitnya mempertahankan standar yang sudah ditetapkan
- Kembali ke kebiasaan lama setelah masa implementasi awal

4. Dukungan Manajemen yang Tidak Konsisten

- Kurangnya kepemimpinan yang memberikan contoh
- Alokasi sumber daya yang tidak memadai
- Prioritas manajemen yang berubah-ubah

5. Kesulitan Mengukur dan Mengevaluasi

- Tantangan dalam menetapkan metrik yang tepat
- Kesulitan mengukur manfaat tidak langsung dari 5S
- Kurangnya sistem pemantauan yang efektif

Solusi untuk Mengimplementasikan 5S dengan Efektif

5S (Seiri/Sort, Seiton/Set in order, Seiso/Shine, Seiketsu/Standardize, Shitsuke/Sustain) adalah fondasi penting untuk membangun budaya perbaikan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang sistematis untuk mengatasi tantangan implementasi, organisasi dapat

memanfaatkan sepenuhnya manfaat 5S dan membuka jalan menuju operational excellence.

1. Mengatasi Resistensi Perubahan

- **Komunikasi yang Jelas:** Jelaskan manfaat 5S bagi karyawan dan perusahaan dengan contoh konkret
- **Partisipasi Aktif:** Libatkan seluruh karyawan dalam perencanaan dan implementasi, bukan hanya sebagai pelaksana
- **Pelatihan Menyeluruh:** Berikan pelatihan praktis dan komprehensif sebelum memulai program
- **Pendekatan Bertahap:** Mulai dari area pilot yang mudah menunjukkan hasil cepat untuk membangun momentum
- **Pemimpin Panutan:** Pastikan manajemen menunjukkan komitmen dengan berpartisipasi langsung dalam aktivitas 5S

2. Membangun Pemahaman Mendalam

- **Workshop Interaktif:** Selenggarakan sesi pelatihan interaktif yang menjelaskan filosofi dan aspek praktis 5S
- **Kunjungan Pembelajaran:** Atur kunjungan ke perusahaan yang telah berhasil menerapkan 5S
- **Visual Management:** Gunakan poster, infografis, dan video untuk memperjelas konsep 5S
- **Pendampingan:** Bentuk tim champion 5S yang dapat membimbing dan menjawab pertanyaan rekan kerja

3. Menjamin Keberlanjutan Program

- **Integrasi dengan Rutinitas:** Jadikan aktivitas 5S sebagai bagian dari pekerjaan harian, bukan tugas tambahan
- **Sistem Audit Reguler:** Terapkan jadwal audit 5S yang konsisten dengan feedback langsung
- **Pengakuan dan Penghargaan:** Buat sistem reward yang mengakui pencapaian individu dan tim
- **Visual Tracking:** Tampilkan hasil audit dan kemajuan 5S secara visual di area kerja
- **Pembaruan Berkala:** Lakukan penyegaran pelatihan dan kampanye 5S secara periodik

4. Mendapatkan Dukungan Manajemen Penuh

- **Business Case:** Buat analisis biaya-manfaat yang menunjukkan ROI dari implementasi 5S
- **Laporan Berkala:** Sajikan laporan kemajuan reguler dengan metrik yang relevan
- **Keterlibatan Langsung:** Jadwalkan Gemba Walk rutin untuk eksekutif melihat langsung dampak positif 5S
- **Keterkaitan Strategis:** Hubungkan pencapaian 5S dengan tujuan bisnis strategis perusahaan

5. Mengukur dan Mengevaluasi dengan Tepat

- **Metrik yang Jelas:** Tetapkan indikator kinerja yang spesifik dan terukur
- **Dokumentasi Visual:** Gunakan foto sebelum/sesudah untuk menunjukkan perubahan nyata
- **Checklist Standar:** Kembangkan checklist evaluasi yang komprehensif dan konsisten
- **Analisis Tren:** Lakukan analisis tren untuk mengidentifikasi area perbaikan dan mempertahankan standar
- **Benchmark Internal:** Ciptakan kompetisi sehat antar departemen dengan perbandingan pencapaian 5S

6. Menyediakan Sumber Daya yang Memadai

- **Alokasi Waktu:** Sediakan waktu khusus untuk aktivitas 5S dalam jadwal kerja

- **Peralatan dan Material:** Pastikan ketersediaan alat, perlengkapan pembersihan, dan material visual
- **Anggaran Khusus:** Alokasikan dana untuk perbaikan infrastruktur yang diperlukan
- **Tim Pendukung:** Bentuk tim khusus atau koordinator 5S yang fokus mendukung implementasi

Dengan pendekatan terstruktur ini, organisasi dapat mengatasi tantangan implementasi 5S dan membangun landasan kuat untuk budaya perbaikan berkelanjutan yang akan memberikan manfaat jangka panjang bagi operasional dan kinerja bisnis.

G. Tantangan Pendidikan Islam yang Memengaruhi Popularitasnya di Masyarakat

Beberapa faktor yang mungkin memengaruhi popularitas pendidikan Islam di masyarakat tertentu meliputi:

1. **Kesenjangan Relevansi dengan Dunia Modern**
 - Kurikulum yang kurang mengintegrasikan ilmu pengetahuan kontemporer dengan ajaran Islam
 - Pendekatan pembelajaran yang belum sepenuhnya menyiapkan siswa menghadapi tantangan global
 - Persepsi tentang kurangnya fokus pada keterampilan praktis yang dibutuhkan pasar kerja
2. **Metode Pembelajaran Tradisional**
 - Pendekatan pedagogis yang masih berpusat pada hafalan dibanding pemahaman kritis
 - Kurangnya inovasi dalam metode pengajaran yang melibatkan teknologi dan pendekatan interaktif
 - Sistem evaluasi yang lebih menekankan kemampuan menghafal daripada pemecahan masalah
3. **Fasilitas dan Infrastruktur**
 - Keterbatasan sarana prasarana modern di beberapa lembaga pendidikan Islam
 - Kesenjangan kualitas antara institusi pendidikan Islam dengan sekolah umum atau swasta lainnya
 - Tantangan dalam mendapatkan pendanaan yang memadai untuk pengembangan fasilitas
4. **Persepsi Masyarakat**
 - Stereotip bahwa lulusan pendidikan Islam memiliki prospek karir yang lebih terbatas
 - Kurangnya pemahaman masyarakat tentang nilai tambah pendidikan holistik yang mencakup spiritualitas
 - Pengaruh tren budaya global yang terkadang kurang sejalan dengan nilai-nilai pendidikan Islam
5. **Kualitas Tenaga Pendidik**
 - Tantangan dalam menarik dan mempertahankan tenaga pengajar berkualitas tinggi
 - Kebutuhan pengembangan profesional berkelanjutan bagi guru-guru di lembaga pendidikan Islam
 - Kesenjangan kemampuan mengajar yang menggabungkan nilai Islam dengan disiplin ilmu modern

Untuk meningkatkan popularitas dan relevansi pendidikan Islam, diperlukan reformasi komprehensif yang menyelaraskan nilai-nilai Islam dengan kebutuhan dunia kontemporer, meningkatkan kualitas pengajaran, memperbaiki infrastruktur, dan mengomunikasikan nilai unik pendidikan Islam kepada masyarakat luas.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan filosofi Kaizen dengan prinsip 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke) adalah pendekatan komprehensif yang sangat relevan untuk meningkatkan mutu pendidikan Islam. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik lingkungan pembelajaran, tetapi juga membangun budaya mutu yang terintegrasi dalam seluruh aspek lembaga pendidikan Islam.

Implementasi 5S terbukti efektif dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang teratur, bersih, dan kondusif, sehingga meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitas seluruh komponen pendidikan. Secara spesifik, prinsip pemilahan (Seiri) membantu mengeliminasi pemborosan sumber daya, penataan (Seiton) meningkatkan akses terhadap material pembelajaran, pembersihan (Seiso) menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, standarisasi (Seiketsu) menjamin konsistensi kualitas, dan pembiasaan (Shitsuke) menumbuhkan disiplin dan kemandirian.

Filosofi perbaikan berkesinambungan (Kaizen) memberikan kerangka kerja sistematis bagi lembaga pendidikan Islam untuk terus mengevaluasi, memperbaiki, dan mengembangkan proses pendidikan mereka secara berkelanjutan. Melalui siklus perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan, dan perbaikan, lembaga pendidikan Islam dapat beradaptasi dengan tuntutan zaman dan kebutuhan stakeholder yang terus berubah.

Penerapan Kaizen dan 5S dalam konteks pendidikan Islam berhasil menciptakan sinergi antara nilai-nilai keunggulan operasional modern dengan nilai-nilai spiritual Islam seperti ihsan (keunggulan) dan istiqamah (konsistensi). Pendekatan ini memungkinkan lembaga pendidikan Islam tidak hanya unggul dalam aspek akademis dan manajerial, tetapi juga tetap mengakar kuat pada identitas keislamannya.

Tantangan implementasi memang tidak dapat dihindari, mulai dari resistensi terhadap perubahan hingga keberlanjutan program, namun dengan strategi yang tepat, seperti pelibatan seluruh stakeholder, pelatihan komprehensif, dan komitmen manajemen. Tantangan tersebut dapat diatasi. Keberhasilan implementasi Kaizen dan 5S sangat bergantung pada kerja kolaboratif dan komitmen bersama untuk mencapai mutu pendidikan Islam yang unggul.

Dengan demikian, integrasi filosofi Kaizen dan prinsip 5S dalam manajemen pendidikan Islam tidak sekadar menjadi alat perbaikan teknis, tetapi menjadi pendekatan transformatif yang membentuk budaya mutu berkelanjutan yang selaras dengan visi pendidikan Islam yang holistik dan bermutu tinggi.

B. Saran

Diperlukan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan pendidikan Islam dalam menerapkan konsep Kaizen dan 5S agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal. termasuk manajemen, tenaga pendidik, dan siswa dalam menerapkan konsep Kaizen dan prinsip 5S agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal. Selain itu, pelatihan dan sosialisasi tentang konsep-konsep ini perlu dilakukan untuk memastikan pemahaman dan pelaksanaan yang baik di seluruh aspek lembaga pendidikan. Mendorong keterlibatan aktif semua pihak akan menjadi kunci keberhasilan dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z., & Saputra, E. (2022). *Kaizen dan 5S Sebagai Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Islam*. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7(2), 245-263.
- Besterfield, D. H., Besterfield-Michna, C., Besterfield, G. H., & Besterfield-Sacre, M. (2021). *Total Quality Management: Principles and Practices*. Pearson Education.
- Fauziah, N., & Mulyono, S. E. (2023). *Implementasi Konsep 5S dalam Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*. *Ta'lim: Jurnal Studi Pendidikan Islam*, 6(1), 89-107.
- Hamid, A. (2022). *Manajemen Mutu Pendidikan Islam di Era Disrupsi*. Rajawali Press.
- Imai, M. (2012). *Gemba Kaizen: A Commonsense Approach to a Continuous Improvement Strategy (2nd ed.)*. McGraw-Hill Education.
- Ishak, M. F., & Rosidah, A. (2023). *Kaizen: Pendekatan Sistematis dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Islam*. *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 119-138.
- Latif, H., & Sesmiarni, Z. (2024). *Konsep Kaizen dalam Manajemen Mutu Pendidikan Islam*. *Irfani (e-Journal)*, 20(2), 212-226.
- Mulyasa, E. (2021). *Manajemen & Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Bumi Aksara.
- Nasution, M. N. (2023). *Manajemen Mutu Terpadu*. Ghalia Indonesia.
- Nurbaity, S., & Ahmad, S. (2022). *Implementasi 5S: Pendekatan Praktis untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan Islam*. *Islamic Management Journal*, 5(1), 45-66.
- Rahayu, E. S. (2023). *Strategi Peningkatan Kualitas Berkelanjutan di Lembaga Pendidikan Islam*. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 8(1), 78-96.
- Roofi'i, M., Akbar, M. I., & Santono, A. N. R. (2022). *Pendekatan Kaizen dalam Perbaikan Mutu Pendidikan*. *Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 1-23.
- Sallis, E. (2022). *Total Quality Management in Education (4th ed.)*. Routledge.
- Supriyanto, A. (2023). *Implementasi Total Quality Management dalam Sistem Pendidikan Islam*. PT. Refika Aditama.
- Sutikno, T. A. (2021). *Manajemen Strategik Pendidikan Islam*. Pustaka Pelajar.
- Syarif Hidayat & Mavianti. (2024). *Pengembangan Mutu Pendidikan melalui Budaya Kaizen*. *Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1), 71-93.
- Ukas, M. (2022). *Manajemen: Konsep, Prinsip, dan Aplikasi dalam Pendidikan*. Penerbit Andi.
- Wibowo, A. (2023). *Manajemen Mutu Sekolah Islam*. UIN Syarif Hidayatullah Press.
- Zamroni. (2021). *Manajemen Pendidikan: Suatu Usaha Meningkatkan Mutu Sekolah*. Ombak Publishing.
- Zalukhu, S. (2024). *Strategi Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam Bermutu Yang Berkelanjutan*. *Unisan Jurnal: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan*, 3(1), 673-688.